



R P J M D

KABUPATEN KOTABARU

TAHUN 2021 - 2026

“ Terwujudnya Masyarakat Kotabaru
yang Semakin Mandiri dan Sejahtera melalui Peningkatan
di Bidang Agrobisnis dan Kepariwisataaan ”



RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2021 - 2026



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2021



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54958);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6634);
29. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
30. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Selatan 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kotabaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 Nomor 05);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 3 Tahun 2019 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU
Dan
BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
2021 - 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
14. Arah kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPJMD Tahun 2021 - 2026.
- (2) RPJMD RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Visi, Misi dan prioritas pembangunan Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) RPJMD RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Rincian Visi, Misi dan Program Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJMD Tahun 2021 - 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

Bab I	: Pendahuluan.
Bab II	: Gambaran Umum Kondisi Daerah.
Bab III	: Gambaran Keuangan Daerah.
Bab IV	: Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah.
Bab V	: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.
Bab VI	: Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.
Bab VII	: Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah.
Bab VIII	: Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Bab IX	: Penutup.

Pasal 4

- (1) RPJMD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun:
 - a. Renstra Perangkat Daerah dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2021-2026; dan
 - b. RKPD.
- (2) RPJMD menjadi pedoman bagi desa dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (3) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan RPJMD Tahun 2021-2022.
- (4) Pembinaan dan pelaksanaan pengawasan RPJMD Tahun 2021-2022 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melibatkan Perangkat Daerah teknis.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 8

- (1) Pendanaan pelaksanaan RPJMD yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Dalam hal pelaksanaan RPJMD Tahun 2021 – 2026 terdapat kebijakan Pemerintah Pusat, kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi atau kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten yang berimplikasi terhadap dokumen RPJMD yang telah ditetapkan ini, maka akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian pada Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Kebijakan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkenaan pengaturan dan implementasi penyelenggaraan kewenangan/urusan Pemerintahan Daerah dan kebijakan dibidang keuangan terkait alokasi dana transfer ke Daerah.
- (3) Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi atau kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkenaan pengaturan dan implementasi yang terkait susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Daerah lainnya yang berimplikasi terhadap dokumen RPJMD ini.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kebijakan Daerah yang telah ditetapkan sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotabaru tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 21 Oktober 2021


BUPATI KOTABARU,
SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 21 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,



SAID AKHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2021 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (12-110/2021)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas ridho-Nya, sehingga penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 - 2026 merupakan penyempurnaan Rancangan Akhir setelah mendapatkan masukan dari proses Musrenbang, pembahasan bersama DPRD Kabupaten Kotabaru, serta masukan berdasarkan hasil konsultasi dengan Gubernur Kalimantan Selatan melalui Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan RPJMD ini. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dalam mewujudkan Kotabaru Maju, Adil dan Sejahtera sebagaimana visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kotabaru Tahun 2005-2025.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Kotabaru, Oktober 2021

Bupati Kotabaru

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-11
1.4. Maksud dan Tujuan	I-16
1.5. Sistematika Penulisan	I-16
 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	 II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-28
2.3. Aspek Pelayanan Umum	II-53
2.4. Aspek Daya Saing Daerah	II-124
2.5. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	 II-129
 BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	 III-1
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-1
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-11
3.3. Kerangka Pendanaan	III-14
 BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	 IV-1
4.1. Permasalahan Pembangunan	IV-1
4.2. Isu Strategis	IV-17

BAB V	VISI DAN MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V-1
	5.1. Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 - 2026	V-2
	5.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 - 2026	V-9
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI-1
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-1
	7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan	VII-1
	7.2. Program Perangkat Daerah	VII-3
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VIII-1
BAB IX	PENUTUP	IX-1
	9.1. Pedoman Transisi	IX-1
	9.2. Kaidah Pelaksanaan	IX-2
	9.3. Perubahan RPJMD	IX-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Kotabaru 2020	II-2
Tabel 2.2.	Penggunaan Lahan secara Umum di Kotabaru Menurut Ketinggian Permukaan Tanah Tahun 2019	II-3
Tabel 2.3.	Suhu Udara Menurut Bulan di Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 - 2020	II-7
Tabel 2.4.	Kelembaban Udara Menurut Bulan di Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 - 2020	II-9
Tabel 2.5.	Tekanan Udara Menurut Bulan di Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 - 2020	II-10
Tabel 2.6.	Kecepatan Angin Menurut Bulan di Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 - 2020	II-10
Tabel 2.7.	Jumlah Curah Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 - 2020	II-11
Tabel 2.8.	Jumlah Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 - 2020	II-12
Tabel 2.9.	Penggunaan Lahan Kabupaten Kotabaru	II-13
Tabel 2.10.	Potensi Bencana Alam di Kabupaten Kotabaru	II-17
Tabel 2.11.	Potensi Bahaya di Kabupaten Kotabaru	II-17
Tabel 2.12.	Potensi Bahaya Bencana Per Kecamatan di Kabupaten Kotabaru	II-18
Tabel 2.13.	Lanjutan Potensi Bahaya Bencana Per Kecamatan di Kabupaten Kotabaru	II-19
Tabel 2.14.	Jumlah Penduduk Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 - 2020	II-20
Tabel 2.15.	Kepadatan Penduduk Kabupaten Kotabaru Tahun 2020	II-21
Tabel 2.16.	Perkembangan Pertumbuhan Penduduk Kotabaru Tahun 2016 - 2020	II-22
Tabel 2.17.	Struktur Penduduk Menurut Umur Selama Periode Tahun 2016 - 2020	II-23
Tabel 2.18.	Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin	II-24
Tabel 2.19.	Kelompok Umur Penduduk Kabupaten Kotabaru Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020	II-25
Tabel 2.20.	Jumlah Usia Produktif dan Non Produktif Tahun 2020	II-26

Tabel 2.21.	Penduduk Menurut Pendidikan Tahun 2020	II-27
Tabel 2.22.	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016 s.d 2020 atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Kotabaru	II-29
Tabel 2.23.	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016 s.d 2020 atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kotabaru	II-30
Tabel 2.24.	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016 sampai 2020 Kabupaten Kotabaru	II-31
Tabel 2.25.	Kontribusi Menurut Lapangan Usaha PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016 sampai 2020 Kabupaten Kotabaru	II-33
Tabel 2.26.	PDRB Kabupaten Kotabaru Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2016 sampai 2020 (Juta Rp)	II-35
Tabel 2.27.	Distribusi PDRB Kabupaten Kotabaru Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2016 sampai 2020 (%)	II-36
Tabel 2.28.	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kotabaru Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Tahun 2016 sampai 2020 (%)	II-37
Tabel 2.29.	PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 - 2020 (Juta Rupiah)	II-38
Tabel 2.30.	Perkembangan Inflasi Tahunan Kabupaten Kotabaru dan rata- rata Inflasi Kalimantan Selatan Tahun 2016 - 2020 (Persen)	II-39
Tabel 2.31.	Indeks Gini Kabupaten Kotabaru	II-41
Tabel 2.32.	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Serta Garis Kemiskinan di Kabupaten Kotabaru	II-42
Tabel 2.33.	Angka Kriminalitas Kabupaten Kotabaru	II-44
Tabel 2.34.	Indeks Pembangunan Manusia (Metode Baru) dan Indikatornya Kabupaten Kotabaru	II-45
Tabel 2.35.	Rata-rata Lama Sekolah dan Rata-rata Harapan Lama Sekolah Di Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 - 2020	II-48
Tabel 2.36.	Perkembangan Angka Harapan Hidup Sejak Lahir Di Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 - 2020	II-49
Tabel 2.37.	Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Masyarakat Kotabaru Tahun 2016 - 2020	II-50
Tabel 2.38.	Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 s.d. 2020	II-51
Tabel 2.39.	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kotabaru, Provinsi	

	Kalimantan Selatan, dan Indonesia, 2016 - 2020 (%)	II-52
Tabel 2.40.	Perkembangan Kebudayaan Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 s.d 2020	II-52
Tabel 2.41.	Perkembangan pembangunan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 s.d 2020	II-53
Tabel 2.42.	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 - 2020	II-54
Tabel 2.43.	Perkembangan APK Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 - 2020 ...	II-55
Tabel 2.44.	Perkembangan Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 - 2020	II-55
Tabel 2.45.	Jumlah Murid Menurut Jenjang dan Jenis Pendidikan Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 - 2020	II-56
Tabel 2.46.	Perkembangan APS Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 - 2020 ...	II-56
Tabel 2.47.	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Kotabaru	II-57
Tabel 2.48.	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Kotabaru	II-57
Tabel 2.49.	Perkembangan Sekolah Dasar Menurut Kecamatan Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 - 2020	II-58
Tabel 2.50.	Perkembangan MI Menurut Kecamatan Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 - 2020	II-58
Tabel 2.51.	Perkembangan SMP Menurut Kecamatan Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 - 2020	II-59
Tabel 2.52.	Perkembangan Sekolah MTs Menurut Kecamatan Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 - 2020	II-60
Tabel 2.53.	Perkembangan SMA Menurut Kecamatan Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 - 2020	II-60
Tabel 2.54.	Perkembangan SMK Menurut Kecamatan Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 - 2020	II-61
Tabel 2.55.	Perkembangan MA Menurut Kecamatan Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 - 2020	II-62
Tabel 2.56.	Jumlah Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kotabaru, 2019/2020	II-63
Tabel 2.57.	Perkembangan Angka Putus Sekolah SD/MI Menurut Kecamatan	

	Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 - 2020	II-64
Tabel 2.58.	Perkembangan Angka Putus Sekolah SMP Sederajat Menurut Kecamatan Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 - 2020	II-64
Tabel 2.59.	Perkembangan Angka Putus Sekolah SMA Sederajat Menurut Kecamatan Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 - 2020	II-65
Tabel 2.60.	Perkembangan Angka Kelulusan SD sederajat Menurut Kecamatan Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 - 2020	II-66
Tabel 2.61.	Perkembangan Angka Kelulusan SMP Sederajat Menurut Kecamatan Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 - 2020	II-67
Tabel 2.62.	Perkembangan Angka Kelulusan SMA Sederajat Menurut Kecamatan Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 - 2020	II-67
Tabel 2.63.	Perkembangan Angka Melanjutkan SD Sederajat ke SMP Sederajat Menurut Kecamatan Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 - 2020	II-68
Tabel 2.64.	Perkembangan Angka Melanjutkan SMP Sederajat ke SMA Sederajat Menurut Kecamatan Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 - 2020	II-69
Tabel 2.65.	Perkembangan Jumlah Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2020	II-70
Tabel 2.66.	Usia Harapan Hidup Kabupaten Kotabaru	II-70
Tabel 2.67.	Angka Kematian Ibu di Kabupaten Kotabaru	II-71
Tabel 2.68.	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kabupaten Kotabaru ..	II-71
Tabel 2.69.	Perkembangan Penyakit Teratas di Puskesmas dan Rumah Sakit Di Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 - 2020	II-72
Tabel 2.70.	Perkembangan Kejadian Penyakit Teregerter Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 - 2020	II-72
Tabel 2.71.	Jumlah Balita dan Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Kotabaru	II-73
Tabel 2.72.	Jumlah dan Rasio Rumah Sakit, Puskesmas, poliklinik, dan Pustu	II-73
Tabel 2.73.	Jumlah dan Rasio Dokter serta Tenaga Medis	II-74
Tabel 2.74.	Perkembangan Rasio Balita dengan Posyandu Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 - 2020	II-75
Tabel 2.75.	Perkembangan Kasus Komplikasi yang Ditangani Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 - 2020	II-75

Tabel 2.76.	Perkembangan Persalinan di Tolong Nakes Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 - 2020	II-75
Tabel 2.77.	Perkembangan Cakupan UCI Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 - 2020	II-76
Tabel 2.78.	Perkembangan Cakupan Penemuan dan Penanganan TB Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 - 2020	II-76
Tabel 2.79.	Perkembangan Cakupan Rujukan Kesehatan Penduduk Miskin Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 - 2020	II-76
Tabel 2.80.	Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi di Kabupaten Kotabaru	II-77
Tabel 2.81.	Persentase kondisi Jalan di Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 - 2020	II-78
Tabel 2.82.	Rekapitulasi Tipe Permukaan Jalan Kabupaten Kotabaru	II-78
Tabel 2.83.	Jenis Bangunan Jaringan Irigasi dan Bangunan Air	II-79
Tabel 2.84.	Proporsi Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum dari PDAM Kabupaten Kotabaru	II-79
Tabel 2.85.	Rumah Tangga ber Sanitasi Tahun 2016 - 2020 Kabupaten Kotabaru	II-80
Tabel 2.86.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	II-80
Tabel 2.87.	Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Kabupaten Kotabaru	II-81
Tabel 2.88.	Ketaatan terhadap RTRW	II-81
Tabel 2.89.	Aspek Pelayanan Umum dalam Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II-82
Tabel 2.90.	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	II-83
Tabel 2.91.	Perkembangan PMKS (PPKS) di Kab. Kotabaru Tahun 2016-2019	II-83
Tabel 2.92.	Aspek Pelayanan Umum Urusan Sosial	II-85
Tabel 2.93.	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kotabaru 2020	II-86
Tabel 2.94..	Aspek Pelayanan Umum Urusan Tenaga Kerja	II-86
Tabel 2.95.	Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemberdayaan Perempuan dan	

Perlindungan Anak	II-86
Tabel 2.96. Aspek Pelayanan Umum Urusan Pangan	II-87
Tabel 2.97. Aspek Pelayanan Umum Urusan Pertanahan	II-87
Tabel 2.98. Aspek Pelayanan Umum Urusan Lingkungan Hidup	II-89
Tabel 2.99. Target dan Realisasi Capaian IKLH Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 s.d 2020	II-90
Tabel 2.100. Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-91
Tabel 2.101. Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-92
Tabel 2.102. Kemajuan dan Perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2020 dan Tahun 2021	II-92
Tabel 2.103. Rata - rata Jumlah Anak Per Keluarga Kabupaten Kotabaru	II-93
Tabel 2.104. Rasio Akseptor KB Kabupaten Kotabaru	II-93
Tabel 2.105. Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	II-93
Tabel 2.106. Aspek Pelayanan Umum dalam Urusan Perhubungan	II-94
Tabel 2.107. Aspek Pelayanan Umum Urusan Komunikasi dan Informatika	II-95
Tabel 2.108. Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	II-96
Tabel 2.109. Jumlah UKM non BPR/LKM Kabupaten Kotabaru	II-96
Tabel 2.110. Jumlah Investor PMDN/PMA dan Nilai Investasi Kabupaten Kotabaru	II-97
Tabel 2.111. Aspek Pelayanan Umum Urusan Kepemudaan dan Olahraga	II-99
Tabel 2.112. Aspek Pelayanan Umum Urusan Statistik	II-101
Tabel 2.113. Aspek Pelayanan Umum Urusan Persandian	II-101
Tabel 2.114. Aspek Pelayanan Umum Urusan Kebudayaan	II-103
Tabel 2.115. Aspek Pelayanan Umum Urusan Perpustakaan	II-103
Tabel 2.116. Aspek Pelayanan Umum Urusan Kearsipan	II-104
Tabel 2.117. Tabel jadwal waktu yang harus dipenuhi dalam penyusunan perencanaan	II-105
Tabel 2.118. Aspek Pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan	II-105
Tabel 2.119. Aspek Layanan Penunjang Urusan Keuangan	II-106

Tabel 2.120. Aspek Layanan Penunjang Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	II-106
Tabel 2.121. Aspek Layanan Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan	II-107
Tabel 2.122. Aspek Layanan Penunjang Urusan Pengawasan	II-108
Tabel 2.123. Banyaknya Surat Keputusan Dan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 - 2020	II-108
Tabel 2.124. Objek-objek Wisata yang ada di Kabupaten Kotabaru	II-109
Tabel 2.125. Aspek Pelayanan Umum Urusan Pariwisata	II-110
Tabel 2.126. Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanian	II-111
Tabel 2.127. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lainnya	II-112
Tabel 2.128. Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kab. Kotabaru	II-113
Tabel 2.129. Kontribusi Sektor Pertanian (palawija) terhadap PDRB Kab. Kotabaru	II-114
Tabel 2.130. Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB Kabupaten Kotabaru	II-115
Tabel 2.131. Cakupan Bina Kelompok Petani Kabupaten Kotabaru	II-116
Tabel 2.132. Produksi Padi atau Bahan Pangan Utama Lainnya Kabupaten Kotabaru	II-117
Tabel 2.133. Produksi Hasil Peternakan (Sapi) Kabupaten Kotabaru	II-118
Tabel 2.134. Produksi Hasil Perkebunan Kabupaten Kotabaru	II-119
Tabel 2.135. Aspek Pelayanan Umum Urusan Perdagangan	II-121
Tabel 2.136. Perkembangan Ekspor Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 - 2020	II-121
Tabel 2.137. Aspek Pelayanan Umum dalam Urusan Perindustrian	II-122
Tabel 2.138. Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotabaru	II-123
Tabel 2.139. Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan (Rupiah) Kabupaten Kotabaru	II-124
Tabel 2.140. Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDRB Kabupaten Kotabaru ...	II-125
Tabel 2.141. Penggunaan Telepon Rumah dan Seluler Kabupaten Kotabaru ..	II-125
Tabel 2.142. Ketersediaan dan Penggunaan Listrik Kabupaten Kotabaru	II-126
Tabel 2.143. Fasilitas Perdagangan dan Jasa Kabupaten Kotabaru	II-126
Tabel 2.144. Angka Kriminalitas Kabupaten Kotabaru	II-126

Tabel 2.145. Lama Proses Perijinan Kabupaten Kotabaru	II-127
Tabel 2.146. Rasio Penduduk Menurut Pendidikan yang Ditamatkan	II-128
Tabel 2.147. Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio).....	II-128
Tabel 2.148. Realisasi Sasaran Capaian Kinerja Sasaran RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 - 2021	II-130
Tabel 2.149. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Program Pembangunan Kabupaten Kotabaru	II-138
Tabel 2.150. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kotabaru	II-198
Tabel 3.1. Realisasi Pendapatan Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 s.d Tahun 2020	III-3
Tabel 3.2. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 s.d Tahun 2020	III-7
Tabel 3.3. Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 s.d Tahun 2020	III-8
Tabel 3.4. Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 - 2020	III-9
Tabel 3.5. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Kotabaru	III-12
Tabel 3.6. Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kotabaru	III-13
Tabel 3.7. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kotabaru ...	III-13
Tabel 3.8. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Kotabaru	III-13
Tabel 3.9. Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026	III-16
Tabel 3.10. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru	III-18
Tabel 3.11. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kotabaru	III-19
Tabel 4.1 Capaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Kotabaru	IV-31
Tabel 5.1. Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 - 2026	V-3
Tabel 5.2. Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah	V-5
Tabel 5.3 Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Kotabaru 2021 - 2026	

	dengan Misi RPJPD Kabupaten Kotabaru 2005 - 2025	V-8
Tabel 5.4	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 - 2026	V-11
Tabel 6.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 - 2026	VI-2
Tabel 6.2	Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Kotabaru	VI-13
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 - 2026 Kabupaten Kotabaru	VII-2
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Kotabaru	VII-4
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kotabaru	VIII-2
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kotabaru	VIII-4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Dokumen RPJMD Terhadap Penyusunan Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota	I-14
Gambar 1.2	Hubungan Dokumen RPJMD Dengan Dokumen Penganggaran Kabupaten/Kota	I-15
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Kotabaru	II-1
Gambar 2.2	Suhu Udara Rata-rata Tahun 2016 - 2020 Kabupaten Kotabaru	II-8
Gambar 2.3	Kelembapan Udara Rata-rata tahun 2016 - 2020 Kabupaten Kotabaru	II-9
Gambar 2.4	Kecepatan Angin Rata-rata tahun 2016 - 2020 Kabupaten Kotabaru	II-11
Gambar 2.5	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 - 2020	II-22
Gambar 2.6	Piramida Penduduk Kabupaten Kotabaru Tahun 2020	II-26
Gambar 2.7	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2016 - 2020 (%)	II-33
Gambar 2.8	Perkembangan Inflasi Desember 2020 Kabupaten Kotabaru	II-40
Gambar 2.9	Perbandingan Indeks Gini Kotabaru dengan Kalimantan Selatan dan Indonesia 2016 - 2020	II-41
Gambar 2.10	Tingkat Kemiskinan Kotabaru dengan Kalimantan Selatan dan Indonesia 2016 - 2020 (%)	II-42
Gambar 2.11	Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 - 2020	II-43
Gambar 2.12	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 - 2020	II-46
Gambar 2.13	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 - 2020	II-46
Gambar 2.14	Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kotabaru tahun 2016 - 2020	II-48
Gambar 2.15	Usia Harapan Hidup Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 - 2020 ...	II-49
Gambar 2.16	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu/Rupiah/Orang/ Tahun) di Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 - 2020	II - 50
Gambar 2.17	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu	

	Rupiah/Orang/Tahun) Kotabaru, Kalimantan Selatan dan Indonesia, 2016 - 2020	II-51
Gambar 2.18	Laju Perkembangan Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lainnya Tahun 2016 - 2020	II-113
Gambar 2.19	Laju Perkembangan Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Tahun 2016 - 2020	II-114
Gambar 2.20	Laju Perkembangan Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB Tahun 2016 - 2020	II-115
Gambar 2.21	Laju Perkembangan Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB Tahun 2016 - 2020	II-116
Gambar 2.22	Perkembangan Cakupan Bina Kelompok Petani Tahun 2016 - 2020	II-116
Gambar 2.23	Laju Perkembangan Produksi Padi atau Bahan Pangan Utama Lainnya Tahun 2016 - 2020	II-118
Gambar 2.24	Laju Perkembangan Produksi Hasil Perternakan (Sapi) Tahun 2016 - 2020.	II-119
Gambar 2.25	Laju Perkembangan Produksi Hasil Perkebunan (Kelapa Sawit dan Karet Tahun 2016 - 2020.	II-120
Gambar 3.1	Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 - 2020	III-4
Gambar 3.2	Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 - 2020	III-5
Gambar 3.3	Perkembangan Realisasi Dana Perimbangan Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 - 2020	III-6
Gambar 3.4	Perkembangan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 - 2020	III-6
Gambar 4.1	SDGs Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	IV-18
Gambar 4.2	Tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2005 - 2025	IV-30

BAB 1

PENDAHULUAN



*Transportasi Laut
Antar Kecamatan*



*Siring Laut
Kotabaru*



LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2021 – 2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan arah kebijakan daerah di masa mendatang, melalui rangkaian pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh daerah pada jangka waktu tertentu.

Sebagai upaya menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, terukur, efektif, efisien, dan akuntabel, proses perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, politis, partisipatif, *Bottom Up* dan *Top Down*. Selain itu, secara substantif, perencanaan pembangunan daerah juga harus menggunakan pendekatan yang tematik, holistik, integratif, dan spasial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, dijelaskan bahwa sebagai persiapan penyusunan RPJMD yang akan memuat visi dan misi kepala daerah terpilih, terlebih dahulu disusun dengan rancangan teknokratik RPJMD yang merupakan rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Rancangan Teknokratik RPJMD tersebut disusun dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Setelah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan maka Pemerintah Daerah menyusun dokumen RPJMD dengan memperhatikan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang dimulai dengan Rancangan Awal yang disempurnakan menjadi Rancangan Akhir yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026 ini merupakan tahapan keempat rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kotabaru yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kotabaru Tahun 2005-2025, yang ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera di segenap wilayah melalui pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang meliputi meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemantapan struktur ekonomi dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat, peningkatan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif dan penegakan hukum. Penyelenggaraan pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang berbasis ekonomi dan ekologi. Selain itu, RPJMD ini juga memperhatikan hasil dan masukan dari para pemangku kepentingan termasuk dari akademisi dan masyarakat, serta mempertimbangkan dinamika geostrategis dan analisis atas berbagai tantangan utama dalam pembangunan daerah yang akan dihadapi Kabupaten Kotabaru.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026 ini berdasarkan peraturan perundang– undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54958);
12. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik I – 5 Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178);
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
30. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
31. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
32. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
33. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131);

34. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
35. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
36. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
37. Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
38. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Makassar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 183);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
49. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
50. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17)
51. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2013-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 71);
52. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 09 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9);
53. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 113);
54. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 03);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata

Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2005 Nomor 14);

56. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 Nomor 05);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 11);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 6);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 3 Tahun 2019 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 3);
61. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 640/16/SJ tentang Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dan perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJM Nasional Tahun 2020-2024, RPJM Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026, RPJP Kabupaten Kotabaru Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Kotabaru Tahun 2012-2032, untuk selaras dan sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi perlu telaah keterkaitan hubungan antar dokumen.

Hubungan antar dokumen perencanaan daerah Kabupaten Kotabaru dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Hubungan dengan perencanaan lainnya.

a. RPJMD dengan RPJMN

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kotabaru memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dan RPJMN sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Memperhatikan RPJMN 2020-2024 dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah.

b. RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Kotabaru

Untuk mengetahui hubungan dan keterkaitan misi antara RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026 dan RPJPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

MISI RPJMD 2021-2026		MISI RPJPD 2005-2025	
1	Mewujudkan ekonomi masyarakat yang berdaya saing dengan	2	Mengembangkan ekonomi kearah industri dan perdagangan yang

MISI RPJMD 2021-2026		MISI RPJPD 2005-2025	
	pemenuhan layanan infrastruktur yang berkelanjutan		berbasis pada potensi agraris dan maritim dengan dukungan transportasi yang baik.
		3	Mengembangkan prasarana dan sarana pembangunan yang dapat mendukung pengembangan ekonomi kabupaten
		4	Mendorong pengelolaan SDA secara efisien untuk menjamin kelanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan.
2	Meningkatkan kualitas masyarakat yang religius, lebih sehat, cerdas dan kreatif serta terampil	1	Meningkatkan mutu SDM pada berbagai lapisan masyarakat dan wilayah serta pada berbagai aspek pembangunan dengan fokus pada kesehatan, pendidikan dan sosial budaya agama secara keseluruhan dengan berlandaskan pada IPTEK dan IMTAQ
3	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang melayani, akuntabel dan transparan	5	Menciptakan pemerintahan daerah, kehidupan berpolitik, sosial, budaya dan agama yang tertib hukum sehingga dapat memperluas kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan menikmati hasil hasilnya

- c. RPJMD dengan RTRW Kabupaten Kotabaru;
- d. RPJMD dengan SPM yang menjadi kewenangan Kabupaten Kotabaru;
- e. RPJMD dengan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Kabupaten Kotabaru;

f. RPJMD dengan Matrik SDGs yang sudah disusun di Kabupaten Kotabaru;

g. RPJMD dengan Visi dan Misi KDH;

h. RPJMD dengan Renstra SKPD;

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah (PD) dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

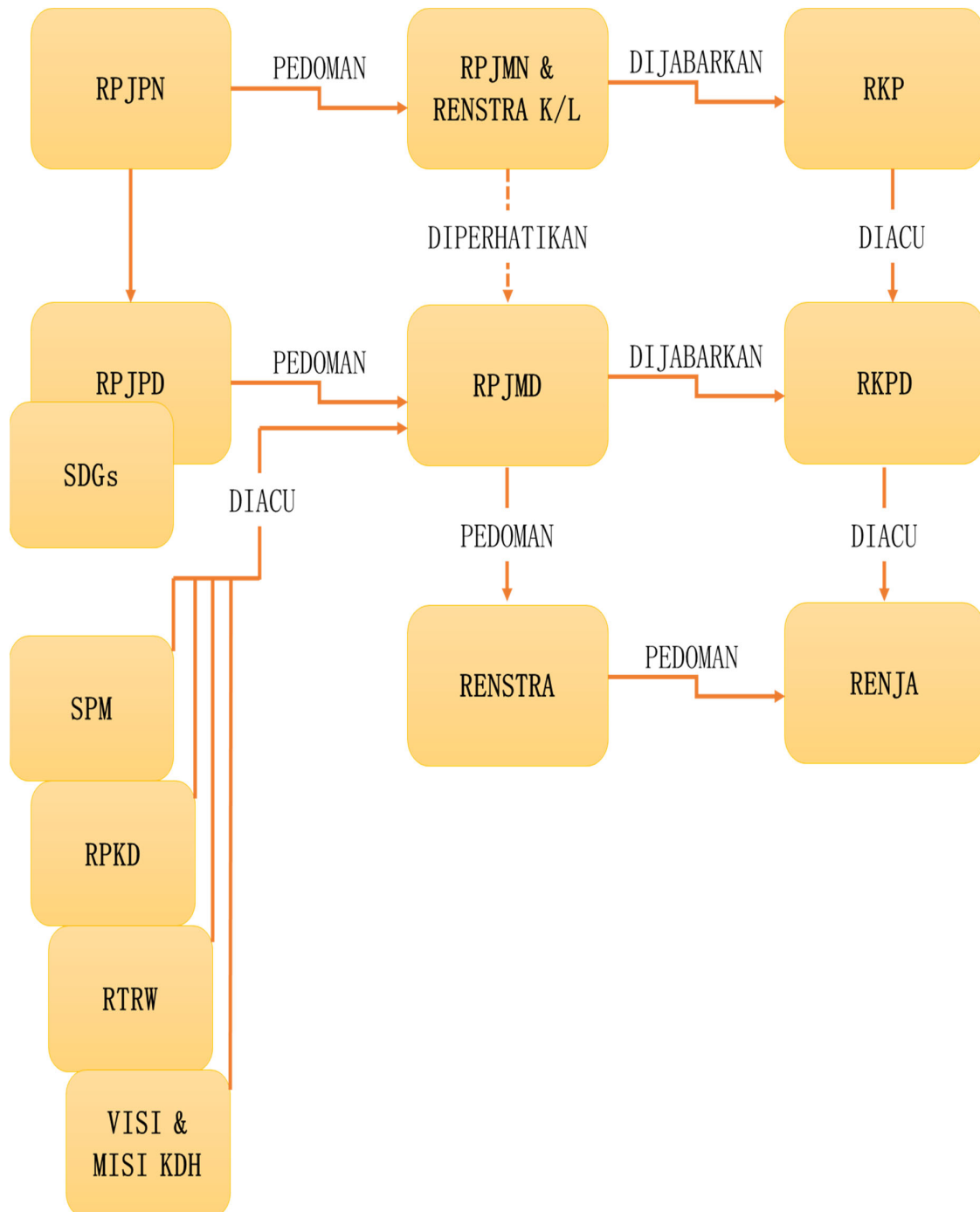
i. RPJMD dengan RKPD;

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026 dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan daerah.

j. RPJMD dengan Renja PD.

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026 dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja PD. RKPD menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten. Selanjutnya PD dengan berpedoman pada Renstra PD dan RKPD menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

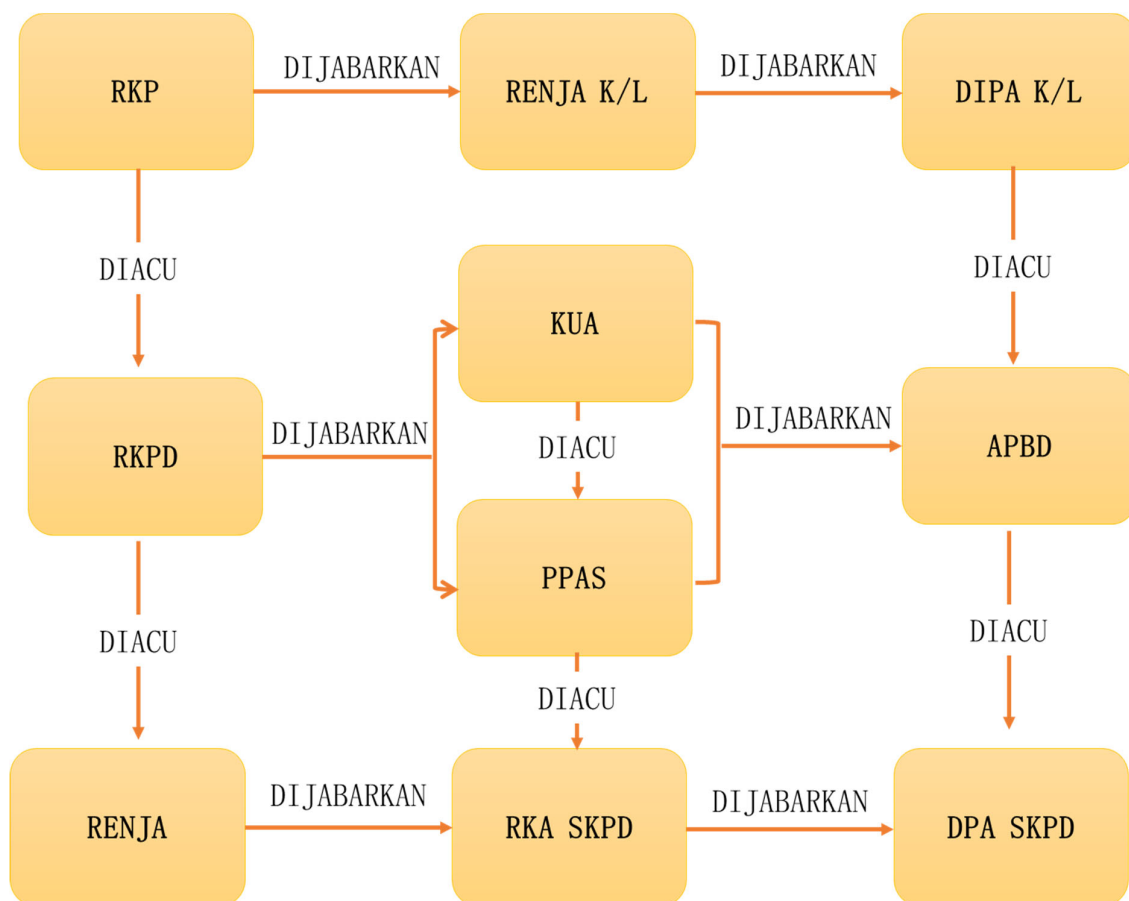
Gambar 1.1
Hubungan Dokumen RPJMD terhadap Penyusunan Dokumen Perencanaan
Kabupaten/Kota



2. Dengan dokumen penganggaran

RPJMD menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra-PD merupakan rencana kerja lima tahunan yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja tahunan Perangkat Daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan jangka menengah. Selanjutnya, RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan Pemerintah Daerah. RPJMD dan RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat Daerah dalam menyusun rancangan APBD setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

Gambar 1.2
Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen
Penganggaran Kabupaten/Kota



1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1. Maksud

RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud sebagai pedoman pembangunan Kabupaten Kotabaru kedepan melalui menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Dengan demikian RPJMD Tahun 2021-2026 ini akan menjadi acuan pelaksanaan pembangunan tahunan dalam periode Tahun 2021-2026.

1.4.2. Tujuan

Tujuan RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026 adalah :

1. Terpenuhinya aspirasi masyarakat sesuai visi dan misi Kepala Daerah Terpilih.
2. Tersedianya acuan bagi pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam berpartisipasi dalam pembangunan.
3. Mendorong terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi menuju pola pembangunan yang Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS).
4. Tersedianya ukuran keberhasilan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kotabaru.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian dokumen RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026 terdiri dari 9 (sembilan) bab dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Aspek Geografis dan Demografis
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah
- 2.5. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
- 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
- 3.3. Kerangka Pendanaan

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

- 4.1. Permasalahan Pembangunan
- 4.2. Isu Strategis

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

- 5.1. Visi dan Misi
- 5.2. Tujuan dan Sasaran

**BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH**

**BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH**

- 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan
- 7.2. Program Perangkat Daerah

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB IX PENUTUP

- 9.1. Pedoman Transisi
- 9.2. Kaidah Pelaksanaan
- 9.3. Perubahan RPJMD

BAB 2

GAMBARAN UMUM

KONDISI DAERAH



Pulau Manti



*Event Tahunan
Wisata Laut*



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

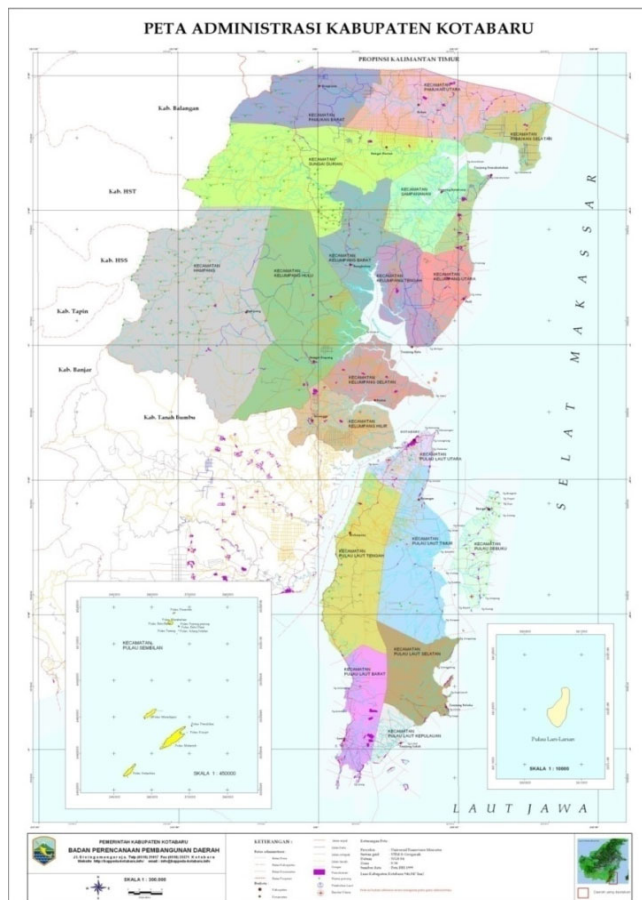
2.1.1 Aspek Geografi

2.1.1.1 Karakteristik dan Lokasi Wilayah

2.1.1.1.1 Luas dan Batas Administrasi

Kabupaten Kotabaru berada pada bagian timur Kalimantan Selatan yang memiliki keanekaragaman sumberdaya alam dan sebagai kekayaan alam Kalimantan Selatan. Kabupaten Kotabaru terletak antara 02°20' - 04°21' Lintang Selatan dan 115°15' - 116°30' Bujur Timur.

Kabupaten Kotabaru memiliki wilayah seluas 9.422,46 km² atau 942.246 Ha



merupakan kabupaten terluas di Provinsi Kalimantan Selatan, dengan luas lebih dari seperempat (25,11%) dari wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten ini terbagi menjadi 22 kecamatan dengan 198 desa dan 4 kelurahan. Kecamatan Hampang merupakan kecamatan yang terluas, dengan luas wilayah 17,88 persen dari luas Kabupaten Kotabaru. Sedangkan kecamatan yang memiliki luas terkecil adalah Kecamatan Pulau Sembilan yang luasnya hanya 0,05 persen dari luas wilayah Kabupaten Kotabaru.

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Kotabaru

Wilayah Kabupaten Kotabaru sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa dan Kabupaten Tanah Bumbu, sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makasar dan Provinsi Sulawesi Barat, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Balangan Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Bumbu.

Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Kotabaru terdiri dari 22 kecamatan dan 198 desa dan 4 kelurahan sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Kotabaru Tahun 2020

No.	Kecamatan	Ibukota	Luas (km ²)	(%)	Desa/Kel
1.	P. Sembilan	Marabatuan	4,76	0,05	5
2.	P. Laut Barat	Lontar	297,81	3,16	11
3.	P. Laut Tanjung Selayar	Tanjung Pelayar	101,01	1,07	10
4.	P. Laut Selatan	Tanjung seloka	378,07	4,01	8
5.	P. Laut Kepulauan	Tanjung Lalak Selatan	107,12	1,14	9
6.	P. Laut Timur	Berangas	642,81	6,82	14
7.	P. Sebuku	Sungai Bali	225,50	2,39	8
8.	P. Laut Utara	Kotabaru	96,88	1,03	10 / 1 Kel
9.	P. Laut Sigam	Sigam	36,87	0,39	11 / 3 Kel
10.	P. Laut Tengah	Salino	337,64	3,58	7
11.	Kelumpang Selatan	Pantai	279,66	2,97	9
12.	Kelumpang Hilir	Serongga	281,20	2,98	9
13.	Kelumpang Hulu	Sungai Kupang	553,44	5,87	10
14.	Kelumpang Barat	Bungkuan	589,15	6,25	6
15.	Hampang	Hampang	1.684,64	17,88	9
16.	Sungai Durian	Sungai Durian	1.042,38	11,06	7
17.	Kelumpang Tengah	Tanjung Batu	349,29	3,71	13
18.	Kelumpang Utara	Pudi	279,45	2,97	7
19.	Pamukan Selatan	Tanjung Samalantakan	391,87	4,16	11
20.	Sampanahan	Gunung Batu Besar	488,89	5,19	10
21.	Pamukan Utara	Bakau	638,63	6,78	13
22.	Pamukan Barat	Sengayam	589,84	6,26	5
JUMLAH			9.422,46	100,00	202

Sumber : BPS Kabupaten Kotabaru Tahun 2021

2.1.1.1.1.2 Posisi Geostrategis

Kabupaten Kotabaru dengan Ibukota Kotabaru terletak di pertengahan nusantara yakni jalur pelayanan nusantara dari barat ke timur dan dari utara ke selatan melalui Laut Jawa dan Laut Sulawesi melalui Selat Makassar. Kota Kotabaru sebagai ibukota Kabupaten Kotabaru terletak di Kecamatan Pulau Laut Utara yang berposisi di Pulau Laut memiliki kedalaman laut yang cukup mampu untuk sandar kapal dengan bobot 20.000 DWT, kemudian di bagian selatan Pulau Laut terdapat kedalaman laut dengan kemampuan sandar kapal dengan bobot mati 40.000 DWT. Di samping pelabuhan Kabupaten Kotabaru juga memiliki Bandara Gt. Syamsir Alam di Desa Stagen yang merupakan bagian dari sistem transportasi, dengan demikian moda angkutan yang diselenggarakan oleh Kabupaten Kotabaru terdiri dari moda darat, laut dan udara sebagai akses dari dan ke kotabaru.

2.1.1.1.1.3 Topografi

Kondisi topografi cukup beragam, dari pantai di timur yang merupakan daerah cukup datar sampai ke arah barat wilayahnya semakin bergelombang sampai dengan berbukit. Wilayah bagian barat dari selatan ke utara pegunungan Meratus memanjang sampai ke wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Keadaan wilayah yang medannya bergelombang ringan sampai terjal terdapat di Pulau Laut bagian tengah. Secara umum, konfigurasi medan wilayah Kabupaten Kotabaru miring arah ke timur.

Berdasarkan letak ketinggiannya dari permukaan laut 46% Kabupaten Kotabaru terletak pada ketinggian antara 25–100 m. Letak ketinggian ini secara umum menentukan pola pengelolaan dan pemanfaatannya, yaitu:

Tabel 2.2.
Penggunaan Lahan secara Umum di Kotabaru menurut Ketinggian Permukaan Tanah Tahun 2019

No	Kelas Ketinggian	Luas (Ha)	%	Penggunaan
1.	0–7 m	86.618	5,98	usaha tambak ikan
2.	7–10 m	43.743	3,01	sawah dengan satu kali tanam

No	Kelas Ketinggian	Luas (Ha)	%	Penggunaan
3.	10–25 m	256.792	17,73	sawah dua kali tanam;
4.	25–125 m	667.932	46,10	Kebun Campuran
5.	125–500 m	320.388	22,1	pertanian lahan kering dan perkebunan
6.	500–1000 m	67.064	4,63	sulit untuk diolah sebagai lahan pertanian;
7.	> 1000 m	6.433	0,44	kawasan lindung.

Sumber : RTRW Kab. Kotabaru

Selain ketinggian, faktor kelerengan juga menentukan pola pengusahaan lahan. Secara umum, berdasarkan kelerengan wilayah Kabupaten Kotabaru dapat dibedakan menjadi empat kelompok, yaitu:

- 0 – 2 % : 154.211 ha (10,64 %)
- 2 – 15 % : 877.315 ha (60,55 %)
- 15 – 40 % : 331.297 ha (22,85 %)
- > 40 % : 86.146 ha (05,96 %)

Kelerengan digunakan sebagai batas pengusahaan lahan-lahan dengan kelerengan lebih dari 40% tidak diusahakan secara produktif, tetapi dijadikan sebagai kawasan lindung. Wilayah dengan kelerengan yang lebih besar dari 40% terletak di Pegunungan Meratus dan Pegunungan Sebatung.

Wilayah 2–15% dan 1–40% kebanyakan terdapat di kaki Pegunungan Meratus, sedangkan yang termasuk dataran 0–2% menyebar luas pada hampir semua wilayah di Kabupaten Kotabaru.

2.1.1.1.1.4 Geologi

Geologi Kabupaten Kotabaru didominasi oleh formasi tanjung dan jenis batuan lainnya yang terdiri dari jenis batuan endapan permukaan, formasidahor, warukin, paau berai, pitap, haruyan ultramatik dan malihan. Struktur geologi yang berkembang di Kabupaten Kotabaru antara lain adalah lipatan dan sesar. Struktur lipatan membentuk sinklin dan antiklin dengan jurut mengarah ke timur dan bawah laut di utara dan tengah wilayah kabupaten dengan kemiringan yang landai dan sungkup serta vertikal.

Dari sudut pandang geologi, maka Kabupaten Kotabaru memiliki potensi cecakan bahan mineral yang beranekaragam dengan posisi berlapis jenisnya dengan kuantitas dan kualitas yang baik. Hal ini terlihat dari sebaran batuan tersier yang memberikan tempat kedudukan endapan yang batu bara yang diikuti dengan biji besi, pasir kwarsa dan lain sebagainya.

a. Morfologi

Morfologi yang berkembang di daerah Kotabaru dapat dibagi menjadi 2 satuan, yaitu morfologi pedataran, dan satuan morfologi perbukitan.

Satuan morfologi pedataran tersebar hampir di seluruh daerah Kotabaru penyebarannya terdapat di sepanjang pantai dengan ketinggian antara 0 hingga 50 mdpl, dengan titik terendah 0 mdpl merupakan garis pantai. Kemiringan medan pada satuan morfologi pedataran maksimum 11% dan sudut kelereng tidak lebih dari 7°.

Satuan morfologi perbukitan dengan arah sebaran relatif utara - selatan terdapat dibagian selatan daerah Kotabaru. Secara umum satuan perbukitan menepati ketinggian antara 50 mdpl hingga 150 mdpl dengan kemiringan lereng lebih dari 11%.

b. Stratigrafi

Secara geologi regional, Kabupaten Kotabaru termasuk kedalam cekungan pasir. Proses terbentuk awalnya diduga berlangsung pada Jaman Jura yang mengakibatkan bercampurnya batuan pratersier seperti ultramafik, batuan bancuh, sekis, garnet, amfibol dan batu pasir terkarsikan. Genangan laut dan kegiatan gunung api terjadi pada Zaman Kapur Akhir bagian bawah yang menghasilkan Formasi Pitap, Formasi Manunggul, Formasi Haruyan dan Formasi Paau. Pada Zaman Kapur Akhir bagian atas terjadi kegiatan magma yang menghasilkan terobosan diorite. Diorit ini menerobos batuan alas Formasi Pitap dan batuan-batuan yang lebih tua.

Pengangkatan dan pendataran terjadi pada Awal Paleosen-Eosen yang diikuti pengendapan Formasi Tanjung bagian bawah, sedangkan bagian atas

formasi ini terbentung genang laut. Paparan karbonat Formasi Berai terbentuk dalam kondisi genang laut Oligosen. Pada Misoen Tengah terjadi susut laut dan bersamaan dengan pengendapan Formasi Warukin dalam suasana darat.

Kegiatan tektonik terjadi lagi pada jaman Mesoen Akhir yang mengakibatkan hampir seluruh batuan mesozoikum membentuk tinggian Meratus yang memisahkan Cekungan Bariro dan Cekungan Pasir. Pada akhir Zaman Misoen Akhir batuan-batuan pratersier dan tersier terlipat kuat dan tersesarkan. Pada pilo-plistosen berlangsung lagi pendataran dan pengendapan Formasi Dahor pada pliosen dan kemudian diikuti pengendapan Aluvium. Susunan batuan secara regional dapat dijelaskan dari formasi batuan yang termuda sampai yang tertua adalah sebagai berikut (sumber : Geologi regional daerah Kotabaru berdasarkan Geologi Lembar Kotabaru, Skala 1:250.000) :

1. Endapan Alluvium, endapan alluvium merupakan satuan batuan yang paling muda yang di jumpai di daerah Kotabaru., satuan batuan ini erumur kuartar, menempati daerah pantai dan pinggiran sungai-sungai besar, satuan ini tersusun oleh litologi lempung, lanau, pasir dan kerikil, dimana sifat batuan pada alluvium ini belum kompak dan masih terurai (*unconsolidated*), dan diendapkan secara tidak selaras terhadap batuan sekitarnya.
2. Formasi Dahor, tersusun oleh batu pasir kuarsa, mudah hancur, setempat bersisipan lempung, ligit, limonit, kerakal kuarsa asap dan basal. Terendapkan di lingkungan paralis, tebal formasi ini diperkirakan sekitar 750 meter.
3. Formasi Warukin, tersusun oleh batu pasir kuarsa, berbutir sedang-kasar, kurang padat, setempat konglomeratan, mengandung sisipan batu lempung, batu lanau dan batu bara.
4. Formasi Berai, berupa batu gamping berwarna kuning sampai kecoklatan, umumnya berlapis serta padat dan keras. Formasi ini diendapkan silang jemari dengan formasi atas dan bawahnya.
5. Formasi Tanjung, berupa perselingan batu pasir, batu lempung, batu lanau, konglomerat dan batu bara.
6. Batuan Pratersier, adalah satuan batuan tertua yang mengisi Cekungan Pasir, terdiri atas batuan ultramafik, serpentinit, batuan bancuh, sekis garnet amfibol,

batu pasir terkersikkan. Formasi ini diendapkan secara tidak selaras terhadap seluruh formasi yang ada. Dari kesemua formasi yang telah disebutkan di atas, Formasi Warukin dan Tanjung merupakan formasi pembawa batu bara.

c. Struktur Geologi

Secara umum struktur geologi yang terdapat di daerah Kotabaru adalah sesar dan perlipatan. Sumbu lipatan umumnya berarah Barat Daya-Timur Laut dan Utara-Selatan, dan sejajar dengan arah sesar normal, sedangkan sesar mendatar umumnya daerah Barat Laut-Tenggara dan Barat Daya-Timur Laut.

Struktur lipatan berada pada formasi Tanjung dan sesar minor berada pada Formasi Tanjung dan Batuan Pra Tersier di bagian Utara daerah Kotabaru. Secara umum kemiringan lapisan batuan di wilayah Kotabaru relatif datar sekitar 10-20°.

2.1.1.1.5 Klimatologi

Aspek klimatologi diharapkan dapat membantu memberi gambaran umum mengenai kondisi daerah Kabupaten Kotabaru ditinjau dari kondisi Suhu Udara, Kelembapan Udara, Tekanan Udara, Kecepatan Angin, Curah Hujan dan Hari Hujan. Aspek klimatologi dalam gambaran umum diharapkan juga dapat membantu dalam proses pengambil kebijakan pembangunan daerah. Kondisi iklim Kabupaten Kotabaru layaknya kondisi umum daerah-daerah lainnya di Indonesia, yaitu memiliki musim tropis basah, berikut merupakan data klimatologi Kabupaten Kotabaru periode 5 tahun terakhir :

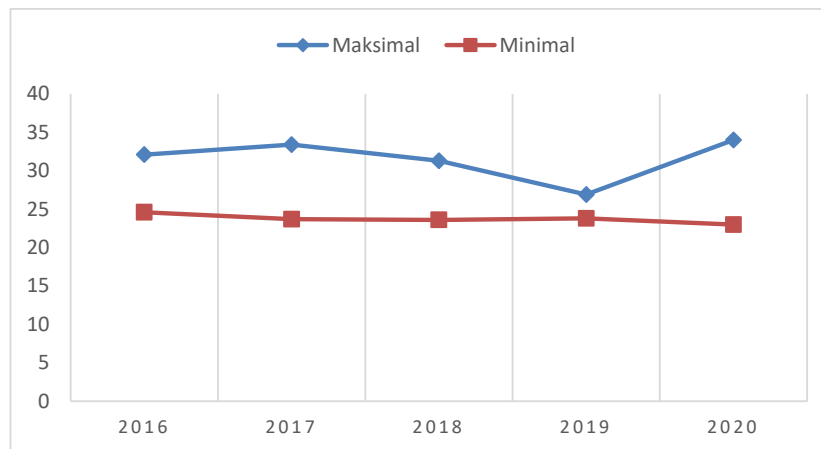
Tabel 2.3.
Suhu Udara Menurut Bulan di Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2020

Bulan	Suhu Udara Temperatur °C									
	2016		2017		2018		2019		2020	
	Maks	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks	Min
Januari	32,5	25,1	33,7	24,1	31,8	23,7	26,7	24,0	34,4	23,3
Februari	31,8	24,7	34,1	23,8	31,6	23,4	27,1	24,3	33,6	20,8
Maret	32,5	24,9	33,3	24,1	31,7	23,6	26,8	24,2	34,4	23,6
April	32,3	25,1	33,3	23,2	31,4	24,2	26,8	24,3	33,7	23,7
Mei	32,5	25,2	33,1	24,7	30,8	24,2	27,4	24,5	34,1	24,2
Juni	31,4	24,5	33,0	23,6	30,2	23,4	26,3	23,9	32,8	23,2
Juli	32,0	24,0	32,2	23,5	30,2	23,1	26,0	22,9	32,2	22,5
Agustus	32,4	23,8	31,8	23,5	31,2	22,6	26,4	22,6	35,8	22,4

Bulan	Suhu Udara Temperatur °C									
	2016		2017		2018		2019		2020	
	Maks	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks	Min
September	32,0	24,2	33,5	23,4	31,8	22,8	26,9	22,7	32,9	23,2
Oktober	31,4	24,6	34,3	23,3	31,5	23,6	27,5	24,0	34,8	23,0
November	32,1	24,6	33,9	23,7	31,6	24,0	27,0	24,1	34,3	23,0
Desember	32,1	24,5	34,6	23,7	31,5	24,3	27,6	24,5	35,5	23,0
Rata-Rata per Tahun	32,1	24,6	33,4	23,7	31,3	23,6	26,9	23,8	34,0	23,0

Sumber : Kotabaru Dalam Angka Tahun 2017-2021 (diolah)

Secara umum, suhu udara di Kabupaten Kotabaru cenderung stabil tidak mengalami kenaikan maupun penurunan secara signifikan. Suhu udara maksimal dan minimal rata-rata sepanjang tahun 2016 s.d 2020 digambarkan dalam diagram berikut :



Gambar 2.2 Suhu Udara Rata-rata Tahun 2016-2020 Kabupaten Kotabaru

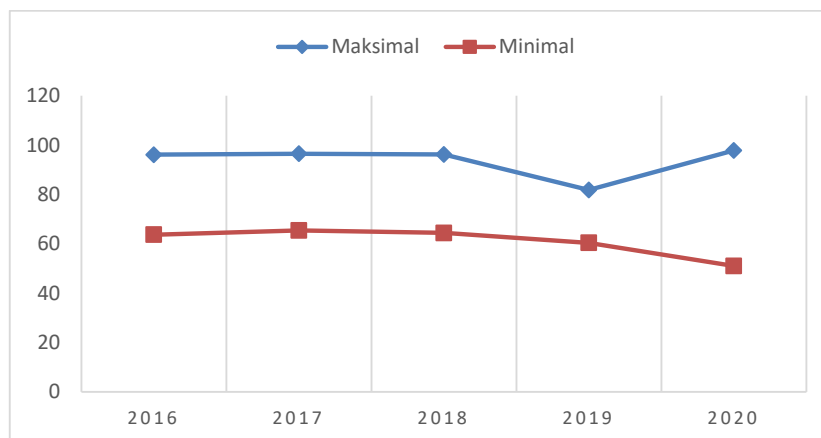
Berdasarkan grafik tersebut di atas, dapat diketahui rata-rata suhu udara di Kabupaten Kotabaru selama 5 tahun terakhir, suhu udara tertinggi terjadi di tahun 2020 yaitu mencapai 34 °C dan suhu udara terendah tidak mengalami perubahan secara signifikan selama 2016-2020, yang terendah terjadi di tahun 2020 yaitu mencapai 23 °C.

Tabel 2.4.
Kelembapan Udara Menurut Bulan di Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2020

Bulan	Kelembapan Udara (%)									
	2016		2017		2018		2019		2020	
	Maks	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks	Min
Januari	94	61	97	65	96	60	85	66	96	55
Februari	96	64	96	64	97	64	84	63	97	55
Maret	97	67	97	64	97	64	84	62	96	50
April	97	66	97	64	95	65	86	67	97	51
Mei	97	66	97	68	98	69	83	62	98	55
Juni	97	60	97	71	98	70	86	71	99	51
Juli	96	63	97	69	97	68	81	61	98	56
Agustus	96	60	96	67	97	62	77	55	98	45
September	96	63	96	63	96	65	75	49	98	50
Oktober	96	68	97	64	95	59	78	54	98	45
November	96	64	96	62	95	64	80	56	99	50
Desember	95	62	95	64	93	63	82	59	99	49
Rata-Rata per Tahun	96,1	63,7	96,5	65,4	96,2	64,4	81,8	60,4	97,8	51,0

Sumber : Kotabaru Dalam Angka Tahun 2017-2021 (diolah)

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa sepanjang tahun 2016-2020 kelembapan udara tertinggi rata-rata terjadi di sekitar bulan Maret hingga Juni mencapai 86-99 % dan kelembapan udara terendah terjadi di sekitar bulan Agustus hingga November mencapai 45-60%. Berikut merupakan grafik kelembapan udara di kabupaten kotabaru rata-rata sepanjang tahun dari tahun 2016 – 2020 :



Gambar 2.3 Kelembapan Udara Rata-Rata Tahun 2016-2020 Kabupaten Kotabaru

Tabel 2.5.
Tekanan Udara Menurut Bulan di Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2020

Bulan	Tekanan Udara (mb)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Januari	1.010,8	1.008,9	1.007,3	1.014,6	1.013,8
Februari	1.010,6	1.009,5	1.009,3	1.015,0	1.013,9
Maret	1.010,8	1.009,4	1.008,6	1.015,1	1.013,8
April	1.009,8	1.009,6	1.008,7	1.013,4	1.013,2
Mei	1.009,1	1.010,1	1.008,6	1.014,0	1.013,3
Juni	1.010,2	1.010,4	1.009,7	1.013,4	1.012,5
Juli	1.009,6	1.010,0	1.009,3	1.014,6	1.012,1
Agustus	1.009,5	1.009,9	1.009,9	1.014,3	1.013,7
September	1.009,5	1.008,7	1.010,1	1.015,4	1.012,8
Oktober	1.009,1	1.008,1	1.010,2	1.013,7	1.012,6
November	1.008,7	1.007,1	1.009,5	1.013,4	1.014,1
Desember	1.008,2	1.008,2	1.009,0	1.012,7	1.010,9
Rata-Rata per Tahun	1.009,7	1.009,2	1.009,2	1.014,1	1.013,1

Sumber : Kotabaru Dalam Angka Tahun 2017-2021 (diolah)

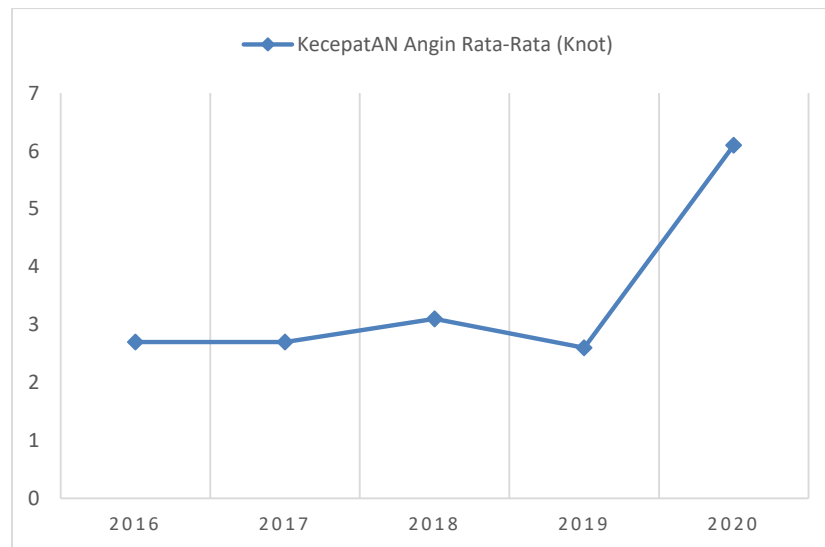
Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan Tekanan Udara rata-rata sepanjang tahun di Kabupaten Kotabaru selama tahun 2016-2020 mengalami kenaikan pada tahun 2019-2020 terakhir.

Tabel 2.6.
Kecepatan Angin Menurut Bulan di Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2020

Bulan	Kecepatan Angin (Knot)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Januari	3,5	2,6	2,8	3,3	6,1
Februari	2,7	2,9	3,0	2,3	7,2
Maret	2,2	2,7	2,7	2,9	7,2
April	2,6	2,3	2,5	2,5	6,1
Mei	2,2	2,2	2,4	2,7	5,1
Juni	2,1	2,2	2,7	1,9	5,6
Juli	2,5	2,7	3,2	2,3	5,1
Agustus	3,1	3,2	3,5	2,9	5,1
September	2,7	3,2	4,0	3,2	5,6
Oktober	2,4	3,0	3,6	2,3	5,6
November	2,6	2,6	2,9	2,9	7,7
Desember	3,6	3,2	3,4	2,3	6,6
Rata-Rata per Tahun	2,7	2,7	3,1	2,6	6,1

Sumber : Kotabaru Dalam Angka Tahun 2017-2021 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, tren kecepatan angin yang terjadi selama tahun 2016 hingga 2020, tertinggi terjadi rata-rata di awal tahun antara bulan Januari – Maret dan terjadi kembali pertengahan hingga akhir tahun antara bulan September – Desember. Sedangkan kecepatan angin terendah rata-rata terjadi di sekitar bulan Mei – Juni.



Gambar 2.4 Kecepatan Angin Rata-rata tahun 2016-2020 Kabupaten Kotabaru

Sedangkan berdasarkan grafik di atas, rata-rata kecepatan angin yang terjadi sepanjang tahun di tahun 2016-2020 terjadi lonjakan kecepatan angin secara signifikan pada tahun 2020 yaitu rata-rata sepanjang tahun sebesar 6,1 knot.

**Tabel 2.7.
Jumlah Curah Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2020**

Bulan	Curah Hujan (mm)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Januari	102,6	412,1	184,2	239,6	330,7
Februari	174,2	277,7	311,5	230,2	334,6
Maret	350,1	157,6	456,7	224,6	301,2
April	179,7	131,5	147,9	252,6	181,0
Mei	134,8	379,2	183,4	118,6	215,8
Juni	151,6	378,2	399,0	479,2	450,4
Juli	73,6	303,8	235,7	46,3	566,8
Agustus	102,1	124,3	98,2	13,5	252,0
September	182,0	163,5	48,7	9,2	334,5

Bulan	Curah Hujan (mm)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Oktober	237,3	201,1	72,9	96,5	215,6
November	186,6	167,0	219,5	162,5	101,0
Desember	210,1	125,8	226,4	223,7	221,4
Rata-Rata per Tahun	173,7	235,2	215,3	169,7	292,1

Sumber : Kotabaru Dalam Angka Tahun 2017-2021 (diolah)

Berdasarkan tabel tersebut, curah hujan di Kabupaten Kotabaru rentang tahun 2016-2020 umumnya terjadi paling tinggi di awal tahun antara Januari hingga Maret, namun pada tahun 2019-2020 puncak curah hujan bergeser hingga pertengahan tahun antara bulan Juni-Juli. Curah hujan terendah terjadi mulai pertengahan antara bulan Juli hingga bulan Oktober. Rata-rata curah hujan sepanjang tahun paling tinggi terjadi di tahun 2020 yaitu mencapai 292,1 mm/tahun.

Tabel 2.8.
Jumlah Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Kotabaru
Tahun 2016-2020

Bulan	Hari Hujan (Hari)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Januari	14	26	22	21	20
Februari	22	20	21	18	18
Maret	26	22	25	20	19
April	26	19	19	26	23
Mei	22	24	24	16	26
Juni	23	22	21	22	23
Juli	18	21	17	8	26
Agustus	15	20	13	6	14
September	21	18	6	5	20
Oktober	24	20	17	14	19
November	19	24	21	15	18
Desember	23	27	25	22	26
Rata-Rata per Tahun	21,1	21,9	19,3	16,1	21,0

Sumber : Kotabaru Dalam Angka Tahun 2017-2021 (diolah)

Sejalan dengan curah hujan, jumlah hari hujan rentang tahun 2016-2020 terjadi paling tinggi di awal tahun antara bulan Januari – Juni kemudian rata-rata

mengalami peningkatan kembali di akhir tahun pada bulan Desember. Sedangkan intensitas hari hujan terendah terjadi di bulan Agustus - September.

2.1.1.1.1.6 Penggunaan Lahan.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya. Rencana kawasan lindung meliputi semua upaya perlindungan, konservasi, dan pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungannya guna mendukung kehidupan secara serasi yang berkelanjutan dan tidak dapat dialihfungsikan menjadi kawasan budidaya. Kawasan peruntukan budidaya meliputi : Kawasan hutan produksi, Kawasan pertanian, Kawasan perikanan, Kawasan pertambangan dan energi, Kawasan peruntukan industri, Kawasan pariwisata, Kawasan permukiman dan Kawasan pertahanan dan keamanan.

Tabel 2.9.
Penggunaan Lahan Kabupaten Kotabaru

No	Landuse	Luas (Ha)	%
1	Bandara	156,96	0,02
2	Danau Bekas Tambang	630,54	0,07
3	Empang	112,55	0,01
4	Hutan	336.159,04	35,49
5	Kolam	245,98	0,03
6	Lahan Terbuka	1.962,12	0,21
7	Mangrove	69.427,14	7,33
8	Perkebunan Campuran	44.888,02	4,74
9	Perkebunan Sawit	226.976,74	23,97
10	Perkebunan/Kebun	10.718,24	1,13
11	Permukiman dan Tempat Kegiatan	6.395,94	0,68
12	Pertambangan	4.803,02	0,51
13	Pertanian Lahan Kering	6,856,32	0,72
14	Rawa	167,34	0,02
15	Sawah	13.427,78	1,42
16	Semak Belukar	141.147, 09	14,90
17	Semak Belukar Rawa	2.593,32	0,27
18	Sungai	8.987,28	0,95
19	Tambak	14.174,90	1,50
20	Tanah Kosong/Gundul	7.748,60	0,82

No	Landuse	Luas (Ha)	%
21	Tegalan/Ladang	49.488,89	5,23
	Total	947.883,69	100

Sumber : KLHS Revisi RTRW Kabupaten Kotabaru, 2021

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menghapuskan kawasan strategis provinsi dan kabupaten dalam muatan RTRW provinsi dan kabupaten, maka kawasan strategis provinsi yang berada di wilayah Kabupaten Kotabaru dan kawasan strategis Kabupaten Kotabaru untuk kepentingan pengembangan wilayah, kawasan yang dahulunya ditetapkan sebagai kawasan strategis daerah masih akan menjadi kawasan yang diprioritaskan dalam Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru. Seiring dengan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kotabaru yang saat ini masih dalam proses maka kawasan strategis Kabupaten Kotabaru yang saat ini menjadi Kawasan prioritas terdiri atas:

Kawasan Strategis Nasional yang ada di Kabupaten yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi :

- a) Pengembangan Dermaga Sebuku
- b) Pembangunan Jalan Tol Batulicin – Kotabaru – IKN
- c) Pembangunan Jembatan Pulau Laut – Pulau Kalimantan

Kawasan yang diprioritaskan dalam pembangunan daerah Kabupaten Kotabaru :

1. Kawasan yang diprioritaskan karena memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi, terdiri atas :
 - a. Kawasan Pusat Bisnis Kota Kotabaru di Kecamatan Pulau Laut Utara
 - b. Pengembangan S2TS (Stagen, Sebelimbingan, Tarjun dan Serongga), meliputi Kecamatan Pulau Laut Utara dan Kelumpang Hilir.
 - c. Kawasan Agro Industri Pertanian Bungkukan, meliputi Kecamatan Pamukan Barat, Pamukan Utara, Sungai Durian, Kelumpang Barat, Kelumpang Tengah dan Kelumpang Hulu.

- d. Kawasan Agro Industri Pertanian Berangas, berada di Kecamatan Pulau Laut Timur
 - e. Kawasan Industri Sebuk yang berada di Kecamatan Pulau Sebuk;
2. Kawasan yang diprioritaskan karena memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, terdiri :
- a. Kawasan Cagar Budaya Makam Raja-raja Sigam.
 - b. Kawasan Pelestarian dan Pengembangan Adat Dayak berada di sepanjang Pegunungan Meratus, dan kawasan pelestarian dan pengembangan adat-adat lainnya dalam wilayah kabupaten.
 - c. Kawasan Cagar Budaya Ratu Intan di Kecamatan Pamukan Utara.
 - d. Kawasan Cagar Budaya Makam Raja Cantung di Banua Lawas
3. Kawasan yang diprioritaskan karena memiliki nilai strategis menurut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, terdiri atas :
- a. Kawasan Geopark Pegunungan Meratus, meliputi Kecamatan Hampang, Kecamatan Sungai Durian dan Kecamatan Pamukan Barat.
 - b. Kawasan Taman Hutan Raya Sebatung, meliputi Kecamatan Pulau Laut Utara, Kecamatan Pulau Laut Tengah dan Kecamatan Pulau Laut Timur.
 - c. Kawasan Pengembangan Pesisir, meliputi Kecamatan Pamukan Selatan dan Kecamatan Kelumpang Utara.
 - d. Kawasan Pulau-pulau Kecil, berada di Kecamatan Pulau Sembilan
4. Kawasan yang diprioritaskan karena memiliki nilai strategis berdasarkan daya tarik destinasi pariwisata, terdiri atas kawasan strategis pariwisata :
- a. KSPK Pantai Gedambaan dan KSPK Pantai siring laut Kecamatan Pulau Laut Utara,
 - b. KSPK Hutan Meranti Kecamatan Pulau Laut Utara,
 - c. KSPK Teluk Tamiang dan KSPK tanjung Kunyit Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar,
 - d. KSPK Samber Gelap Kecamatan Pulau Sebuk.

Sedangkan kawasan yang diprioritaskan oleh provinsi yang berlokasi di Kabupaten Kotabaru, berupa :

- a. Kawasan Pendukung sekitar IKN (Ibu Kota Negara) di kawasan Cantung – Sengayam yang merupakan kawasan strategis pendukung wilayah pemerintahan pusat.
- b. KSP Pegunungan Meratus (Geopark Nasional Pegunungan Meratus) yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- c. Kawasan Ekonomi Khusus Mekarputih di Kecamatan Pulau Laut Barat yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi.
- d. Rencana Sentral Kelautan dan Perikanan Terpadu di Kawasan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (Perda Prov. Kalsel No.13 tahun 2018 tentang RZWP3K).

Rencana pengembangan infrastruktur Provinsi Kalimantan Selatan yang berlokasi di Kotabaru diantaranya KEK Mekarputih, Pelabuhan Internasional Mekarputih, Sentral Kelautan Perikanan Terpadu dan *Marine Industry*, Jembatan Penghubung Pulau Laut dan Pulau Kalimantan, Tol Batulicin-Kotabaru-IKN, Pengembangan Geopark Pegunungan Meratus, SPAM Regional Tanah Bumbu - Kotabaru.

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Bencana merupakan suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan non alam. Kejadian bencana berpotensi terjadi disebabkan oleh beberapa faktor dimana salah satunya adalah kondisi daerah. Gambaran wilayah berupa keadaan geografis, topografi, demografi yang berbeda beda di setiap daerah memicu potensi suatu jenis bencana.

Berdasarkan catatan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) terhitung mulai tahun 2004 sd 2016 sejarah kebencanaan di Kabupaten Kotabaru berjumlah 4 jenis bencana yaitu cuaca ekstrem, banjir, banjir bandang, dan gelombang ekstrem dan abrasi.

Tabel 2.10.
Potensi Bencana Alam di Kabupaten Kotabaru

No	Potensi Bencana	Lokasi	Ket
1	Tanah Longsor	Kecamatan Pulau Sembilan	
2	Banjir Bandang	Kecamatan Hampang, Kelumpang Hulu, Kelumpang Barat, Sampanahan, dan Sungai Durian	
3	Banjir	Kecamatan Pulau Sembilan	
4.	Kebakaran Hutan dan Lahan	Kecamatan Kelumpang Barat, Kelumpang Hulu, Kelumpang Utara, Pulau Laut Barat, Pulau Laut Kepulauan, Pulau Laut Selatan, Pulaut Laut Tanjung Selayar, Pulau Sembilan dan Sungai Durian	
5	Kekeringan	Kecamatan Pamukan Barat	
6	Cuaca ekstrim	Kecamatan Kelumpang Utara, Pulau Sembilan dan Sampanahan	
7.	Gelombang ekstrim dan Abrasi	Kecamatan Kelumpang Utara, Pamukan Selatan, Pulau laut Barat Pulau Laut Kepulauan, Pulau Laut Tanjung Selayar dan Pulau Sembilan	

Sumber :Kajian Resiko Bencana Kab Kotabaru 2017 - 2021

Dalam penilaian komponen bahaya Kabupaten Kotabaru diperoleh dari hasil pengkajian bahaya rendah, sedang atau tinggi yang memiliki persentase luas bahaya yang paling besar. Hasil kelas bahaya dan persentase luas bahaya didapatkan dari pengkajian bahaya yang berpotensi di Kabupaten Kotabaru. Skala kelas bahaya dibagi kedalam 3 (tiga) kategori yaitu rendah, sedang dan tinggi.

Tabel 2.11.
Potensi Bahaya di Kabupaten Kotabaru

NO	JENIS BENCANA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1.	GEMPA BUMI	961.888	RENDAH
2.	TANAH LONGSOR	194.523	SEDANG
3.	BANJIR	518.153	TINGGI
4.	BANJIR BANDANG	10.7 13	TINGGI
5.	TSUNAMI	7.483	RENDAH
6.	KEKERINGAN	961.888	TINGGI
7.	CUACA EKSTRIM	452.791	TINGGI
8.	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	28.868	TINGGI

NO	JENIS BENCANA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
9.	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	696.816	TINGGI

Sumber : Review Kajian Resiko Bencana Kab Kotabaru 2017-2021

Hasil rekapitulasi kelas bahaya di atas menunjukkan dominan bencana di Kabupaten Kotabaru berada pada kelas tinggi. Kelas bahaya diketahui dengan melihat nilai kelas bahaya maksimum di masing-masing bencana. Bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, kekeringan, gelombang ekstrim dan abrasi, serta kebakaran hutan dan lahan dikatakan memiliki kelas bahaya tinggi sedangkan bencana tanah longsor memiliki kelas bahaya sedang dan bencana gempa bumi serta tsunami dikatakan memiliki kelas bahaya rendah.

Dalam dokumen KRB Kabupaten Kotabaru ini dijabarkan hasil kajian bahaya tingkat kecamatan. Adapun hasil kajian bahaya tersebut dipaparkan untuk seluruh potensi bahaya sebagai berikut.

Tabel 2.12.
Potensi Bahaya Bencana Per Kecamatan di Kabupaten Kotabaru

No	Kecamatan	Bahaya Gempa Bumi		Bahaya Tanah Longsor		Bahaya Banjir		Bahaya Banjir Bandang		Bahaya Tsunami	
		Luas (Ha)	Kelas	Luas (Ha)	Kelas	Luas (Ha)	Kelas	Luas (Ha)	Kelas	Luas (Ha)	Kelas
1	Hampang	55.068	Rendah	90.618	Sedang	49.385	Rendah	5.769	Tinggi	-	-
2	Kelumpang Barat	27.960	Rendah	5.975	Sedang	34.265	Rendah	657	Tinggi	389	Rendah
3	Kelumpang Hilir	34.739	Rendah	1.645	Rendah	18.535	Rendah	-	-	427	Rendah
4	Kelumpang Hulu	37.500	Rendah	24.449	Sedang	45.039	Rendah	3.484	Tinggi	408	Rendah
5	Kelumpang Selatan	58.619	Rendah	26	Rendah	19.807	Rendah	-	-	818	Rendah
6	Kelumpang Tengah	39.041	Rendah	3.867	Sedang	20.541	Rendah	-	-	496	Rendah
7	Kelumpang Utara	63.709	Rendah	1.950	Sedang	17.348	Rendah	-	-	162	Rendah
8	Pamukan Barat	25.633	Rendah	15.372	Sedang	20.002	Rendah	-	-	-	-
9	Pamukan Selatan	11.999	Rendah	710	Sedang	31.009	Rendah	-	-	597	Rendah
10	Pamukan Utara	37.776	Rendah	181	Rendah	49.659	Rendah	-	-	193	Rendah
11	Pulau Laut Barat	7.454	Rendah	312	Sedang	17.635	Rendah	-	-	148	Rendah
12	Pulau Laut Kepulauan	33.592	Rendah	891	Sedang	7.355	Rendah	-	-	355	Rendah
13	Pulau Laut Selatan	57.450	Rendah	488	Rendah	29.840	Rendah	-	-	419	Rendah

No	Kecamatan	Bahaya Gempa Bumi		Bahaya Tanah Longsor		Bahaya Banjir		Bahaya Banjir Bandang		Bahaya Tsunami	
		Luas (Ha)	Kelas	Luas (Ha)	Kelas	Luas (Ha)	Kelas	Luas (Ha)	Kelas	Luas (Ha)	Kelas
14	Pulau Laut Tanjung Selayar	15.844	Rendah	195	Sedang	3.730	Rendah	-	-	267	Rendah
15	Pulau Laut Tengah	24.343	Rendah	5.636	Sedang	30.691	Rendah	-	-	286	Rendah
16	Pulau Laut Timur	476	Rendah	7.258	Sedang	36.940	Rendah	-	-	396	Rendah
17	Pulau Laut Utara	48.421	Rendah	5.650	Sedang	5.584	Rendah	-	-	81	Rendah
18	Pulau Sebuku	103.913	Rendah	1.407	Sedang	15.858	Rendah	-	-	399	Rendah
19	Pulau Sembilan	55.068	Rendah	51	Sedang	476	Tinggi	-	-	466	Rendah
20	Sampanahan	27.960	Rendah	4.839	Sedang	21.995	Rendah	30	Tinggi	963	Rendah
21	Sungai Durian	34.739	Rendah	23.003	Sedang	42.459	Rendah	773	Tinggi	213	Rendah
Kabupaten Kotabaru		961.888	Rendah	194.523	Sedang	518.153	Tinggi	10.713	Tinggi	7.483	Rendah

Sumber : Review Kajian Resiko Bencana Kab Kotabaru 2017-2021

Tabel 2.13.
Lanjutan Potensi Bahaya Bencana Per Kecamatan di Kabupaten Kotabaru

No	Kecamatan	Bahaya Kekeringan		Bahaya Cuaca Ekstrem		Bahaya Gelombang Ekstrem dan Abrasi		Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan	
		Luas (Ha)	Kelas	Luas (Ha)	Kelas	Luas (Ha)	Kelas	Luas (Ha)	Kelas
1	Hampang	189.298	Sedang	62.109	Sedang	-	-	134.936	Sedang
2	Kelumpang Barat	54.222	Sedang	36.450	Sedang	1.512	Sedang	42.386	Tinggi
3	Kelumpang Hilir	34.831	Sedang	18.578	Sedang	1.937	Sedang	20.185	Sedang
4	Kelumpang Hulu	55.068	Sedang	51.929	Sedang	1.727	Sedang	54.470	Tinggi
5	Kelumpang Selatan	27.960	Rendah	13.632	Sedang	3.647	Sedang	19.786	Sedang
6	Kelumpang Tengah	34.739	Sedang	15.797	Sedang	2.304	Sedang	25.954	Sedang
7	Kelumpang Utara	37.500	Sedang	12.491	Tinggi	526	Tinggi	18.804	Tinggi
8	Pamukan Barat	58.619	Tinggi	13.728	Sedang	-	-	36.198	Sedang
9	Pamukan Selatan	39.041	Sedang	27.038	Sedang	1.750	Tinggi	31.941	Sedang
10	Pamukan Utara	63.709	Sedang	37.478	Sedang	832	Sedang	49.536	Sedang
11	Pulau Laut Barat	25.633	Sedang	15.703	Sedang	792	Tinggi	17.790	Tinggi
12	Pulau Laut Kepulauan	11.999	Sedang	7.893	Sedang	720	Tinggi	8.277	Tinggi
13	Pulau Laut Selatan	37.776	Sedang	26.263	Sedang	1.209	Sedang	30.908	Tinggi
14	Pulau Laut Tanjung Selayar	7.454	Sedang	3.820	Sedang	716	Tinggi	3.876	Tinggi
15	Pulau Laut Tengah	33.592	Sedang	9.644	Sedang	1.558	Sedang	33.762	Sedang
16	Pulau Laut Timur	57.450	Sedang	28.522	Sedang	1.440	Sedang	39.553	Sedang

No	Kecamatan	Bahaya Kekeringan		Bahaya Cuaca Ekstrem		Bahaya Gelombang Ekstrem dan Abrasi		Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan	
		Luas (Ha)	Kelas	Luas (Ha)	Kelas	Luas (Ha)	Kelas	Luas (Ha)	Kelas
17	Pulau Laut Utara	15.844	Sedang	3.737	Sedang	754	Sedang	11.652	Sedang
18	Pulau Sebuku	24.343	Sedang	4.300	Sedang	1.637	Sedang	17.826	Sedang
19	Pulau Sembilan	476	Sedang	476	Tinggi	476	Tinggi	476	Tinggi
20	Sampanahan	48.421	Sedang	17.595	Tinggi	4.418	Sedang	26.718	Sedang
21	Sungai Durian	103.913	Sedang	45.608	Sedang	913	Sedang	71.782	Tinggi
Kabupaten Kotabaru		961.888	Tinggi	452.791	Tinggi	28.868	Tinggi	696.816	Tinggi

Sumber : Review Kajian Resiko Bencana Kab Kotabaru 2017-2021

2.1.2 Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 adalah 324.965 jiwa yang tersebar di 198 desa dan 4 kelurahan. Jumlah penduduk terbesar masih berada di Kecamatan Pulau Laut Utara dengan 53.781 jiwa. Jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Kelumpang Utara sebesar 5.995 jiwa.

Tabel 2.14.
Jumlah Penduduk Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 -2020

NO	KECAMATAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	P. Sembilan	5.572	5.783	6.282	6.344	6.363
2	P. Laut Barat	9.594	9.717	10.191	10.304	10.358
3	P. Laut Tanjung Selayar	10.250	10.386	10.818	10.917	11.095
4	P. Laut Selatan	9.690	9.826	10.307	10.364	10.464
5	P. Laut Kepulauan	13.014	13.157	13.504	13.664	13.890
6	P. Laut Timur	13.732	13.918	14.163	14.162	14.196
7	P. Sebuku	7.269	7.357	7.622	7.503	7.549
8	P. Laut Utara	86.647	89.157	91.329	53.430	53.781
9	P. Laut Sigam	0	0	0	37.456	37.667
10	P. Laut Tengah	11.175	11.091	11.407	11.400	11.559
11	Kelumpang Selatan	10.303	10.284	10.424	10.387	10.476
12	Kelumpang Hilir	23.253	23.409	22.950	23.094	23.116
13	Kelumpang Hulu	15.455	15.539	15.742	16.046	16.166
14	H a m p a n g	12.622	12.765	11.931	12.765	11.500
15	Sungai Durian	11.427	11.532	11.432	11.535	11.657
16	Kelumpang Tengah	13.655	13.517	13.238	13.266	13.321
17	Kelumpang Barat	6.993	7.178	6.990	7.110	6.981
18	Kelumpang Utara	5.984	5.947	5.965	5.968	5.995

NO	KECAMATAN	2016	2017	2018	2019	2020
19	Pamukan Selatan	13.545	13.178	12.855	12.752	12.919
20	Sampanahan	11.207	11.116	10.878	10.869	10.974
21	Pamukan Utara	15.953	15.542	15.033	14.851	14.996
22	Pamukan Barat	10.559	10.288	9.597	9.821	9.942
Jumlah		317.899	320.683	322.658	323.999	324.965

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

2.1.2.1 Kepadatan dan Laju Pertumbuhan Penduduk

A. Penduduk Menurut Kepadatan

Tabel 2.15.
Kepadatan Penduduk Kabupaten Kotabaru Tahun 2020

Kecamatan	Penduduk	Luas Wilayah (km2)	Kepadatan
P. Sembilan	6.363	4,76	1.337
P. Laut Barat	10.358	297,81	35
P. Laut Tanjung Selayar	11.095	101,01	110
P. Laut Selatan	10.464	378,07	28
P. Laut Kepulauan	13.890	107,12	130
P. Laut Timur	14.196	642,81	22
P. Sebuku	7.549	225,50	33
P. Laut Utara	53.781	96,88	555
P. Laut Sigam	37.667	36,87	1.022
P. Laut Tengah	11.559	337,64	34
Kelumpang Selatan	10.476	279,66	37
Kelumpang Hilir	23.116	281,2	82
Kelumpang Hulu	16.166	553,44	29
H a m p a n g	11.500	1.684,64	7
Sungai Durian	11.657	1.042,38	11
Kelumpang Tengah	13.321	349,29	38
Kelumpang Barat	6.981	589,15	12
Kelumpang Utara	5.995	279,45	21
Pamukan Selatan	12.919	391,87	33
Sampanahan	10.974	488,89	22
Pamukan Utara	14.996	638,63	23
Pamukan Barat	9.942	589,84	17
Kabupaten Kotabaru	324.965	9.422,46	34

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotabaru

B. Laju Pertumbuhan Penduduk

Kabupaten Kotabaru merupakan Kabupaten dengan pertumbuhan penduduk yang relatif stabil dengan intensitas sedang di banding kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan. Rata-rata pertumbuhan selama kurun waktu tahun 2016-2020 rata-rata sebesar 0,53 persen pertahunnya, namun jika dilihat perkembangan pertumbuhan penduduk Kabupaten Kotabaru sebagaimana tabel berikut ini :

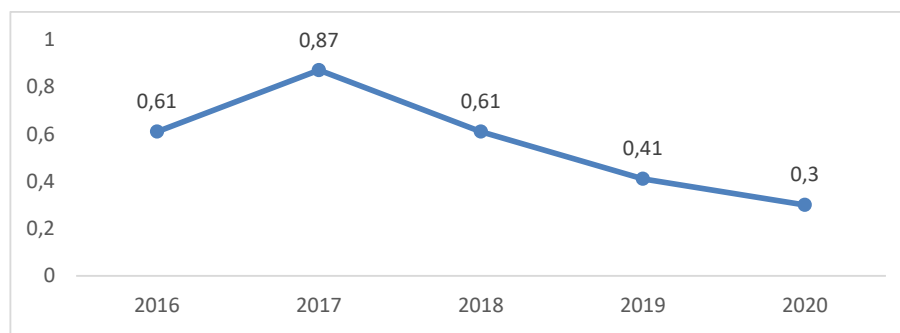
Tabel 2.16.
Perkembangan Pertumbuhan Penduduk Kotabaru Tahun 2016-2020

Tahun	Penduduk	Pertumbuhan
2016	317.899	0,61
2017	320.683	0,87
2018	322.658	0,61
2019	323.999	0,41
2020	324.965	0,30

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotabaru

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Kotabaru selama periode tahun 2016-2020 mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2016-2017 pertumbuhan penduduk meningkat, sedangkan pada tahun 2017-2020 pertumbuhan penduduk menurun. Tahun 2016 pertumbuhan penduduk yang terjadi 0,61 persen menjadi 0,30 persen pada tahun 2020. Angka ini mengalami penurunan 0,31 poin selama 5 tahun atau rata-rata lebih dari 0,062 poin per tahunnya. Grafik berikut ini menggambarkan kondisi kecenderungan peningkatan dan penurunan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kotabaru selama tahun 2016-2020.

Gambar 2.5
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2020



2.1.2.2 Piramida Penduduk

A. Struktur Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Struktur penduduk menurut umur di Kabupaten Kotabaru selama kurun waktu 2016-2020 secara umum tidak terjadi perubahan struktur penduduk menurut umur yakni didominasi pada usia 5-19 tahun. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.17.
Struktur Penduduk Menurut Umur selama periode tahun 2016-2020

Klpk Umur	2016		2017		2018		2019		2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
0-4	22.081	6,95	19.537	6,09	20.499	6,35	16.047	4,96	15.382	4,74
5-9	31.065	9,77	24.155	7,53	30.087	9,32	29.425	9,08	29.118	8,97
10-14	33.922	10,67	32.774	10,22	33.236	10,32	38.605	11,92	31.439	9,68
15-19	29.357	9,23	32.312	10,08	32.905	10,20	33.629	10,38	33.595	10,35
20-24	27.089	8,52	26.801	8,36	26.940	8,35	27.580	8,51	29.098	8,96
25-29	27.721	8,72	27.213	8,49	26.283	8,15	25.598	7,90	25.680	7,91
30-34	29.822	9,38	28.075	8,75	26.620	8,25	25.628	7,91	25.300	7,79
35-39	28.267	8,89	29.668	9,25	28.499	8,83	27.600	8,52	27.335	8,42
40-44	25.023	7,87	25.884	8,07	25.325	7,85	25.755	7,95	26.289	8,10
45-49	20.715	6,52	22.918	7,15	22.655	7,02	22.557	6,96	23.634	7,28
50-54	14.853	4,67	16.926	5,28	16.616	5,15	17.749	5,48	19.416	5,98
55-59	10.731	3,38	12.474	3,89	12.166	3,77	12.551	3,87	13.678	4,21
60-64	6.866	2,16	8.395	2,62	8.150	2,53	8.581	2,65	9.828	3,03
65-69	4.877	1,53	5.647	1,76	5.357	1,66	5.537	1,71	6.048	1,86
70-74	2.972	0,93	3.817	1,19	3.594	1,11	3.702	1,14	4.314	1,33
75+	2.538	0,80	4.087	1,27	3.726	1,15	3.428	1,06	4.811	1,48
Jumlah	317.899	100	320.683	100	322.658	100	323.999	100	324.695	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotabaru

Struktur penduduk dari sisi jenis kelamin menggambarkan adanya perubahan proporsi penduduk laki-laki dan perempuan, selama kurun waktu tahun 2016-2020 tidak terjadi perubahan struktur penduduk menurut jenis kelamin atau dengan kata lain bahwa sex ratio pada setiap kabupaten tidak mengalami perubahan berarti, lebih lanjut gambaran struktur penduduk menurut jenis kelamin digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.18.
Struktur Penduduk menurut Jenis Kelamin

Kecamatan	Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pulau Sembilan	5.572	5.783	6.282	6.344	6.363
L	2.846	2.945	3.211	3.223	3.228
P	2.726	2.838	3.071	3.121	3.135
Pulau Laut Barat	9.594	9.717	10.191	10.304	10.358
L	4.947	4.989	5.264	5.308	5.331
P	4.647	4.728	4.927	4.996	5.027
Pulau Laut Tanjung Selayar	10.250	10.386	10.818	10.917	11.095
L	5.249	5.324	5.571	5.611	5.696
P	5.001	5.062	5.247	5.306	5.399
Pulau Laut Selatan	9.690	9.826	10.307	10.364	10.464
L	5.014	5.081	5.303	5.315	5.356
P	4.676	4.745	5.004	5.046	5.108
Pulau Laut Kepulauan	13.014	13.157	13.504	13.664	13.890
L	6.648	6.721	6.899	6.965	7.086
P	6.366	6.436	6.605	6.699	6.804
Pulau Laut Timur	13.732	13.918	14.163	14.162	14.196
L	7.256	7.337	7.462	7.441	7.446
P	6.476	6.581	6.701	6.721	6.750
Pulau Sebuku	7.269	7.357	7.622	7.503	7.549
L	3.740	3.803	3.938	3.870	3.883
P	3.529	3.554	3.684	3.663	3.666
Pulau Laut Utara	86.647	89.157	91.329	90.886	53.781
L	44.432	45.604	46.664	46.226	27.472
P	42.215	43.553	44.665	44.660	26.309
Pulau Laut Sigam	0	0	0	37.456	37.667
	0	0	0	18.939	19.077
	0	0	0	18.517	18.590
Pulau Laut Tengah	11.175	11.091	11.407	11.400	11.559
L	5.821	5.765	5.950	5.926	6.004
P	5.354	5.326	5.457	5.474	5.555
Kelumpang Selatan	10.303	10.284	10.424	10.387	10.476
L	5.381	5.362	5.446	5.388	5.423
P	4.922	4.922	4.978	4.999	5.053
Kelumpang Hilir	23.253	23.409	22.950	23.094	23.116
L	12.197	12.210	11.947	11.968	11.975
P	11.056	11.199	11.003	11.126	11.141
Kelumpang Hulu	15.455	15.539	15.742	16.046	16.166
L	8.083	8.100	8.231	8.375	8.431
P	7.372	7.439	7.511	7.671	7.735
Hampang	12.622	12.765	11.931	12.756	11.500
L	6.736	6.793	6.396	6.788	6.067
P	5.886	5.972	5.535	5.968	5.433
Sungai Durian	11.427	11.532	11.432	11.535	11.657
L	6.043	6.793	6.021	6.788	6.145

Kecamatan	Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)				
	2016	2017	2018	2019	2020
P	5.384	5.972	5.411	5.968	5.512
Kelumpang Tengah	13.655	13.513	13.238	13.266	13.321
L	7.115	7.041	6.897	6.887	6.900
P	6.540	6.472	6.341	6.379	6.421
Kelumpang Barat	6.993	7.178	6.990	7.110	6.981
L	3.656	3.754	3.651	3.709	3.631
P	3.337	3.424	3.339	3.401	3.350
Kelumpang Utara	5.984	5.947	5.965	5.968	5.995
L	3.089	3.071	3.108	3.113	3.129
P	2.895	2.876	2.857	2.855	2.866
Pamukan Selatan	13.545	13.176	12.855	12.752	12.919
L	7.138	6.913	6.778	6.687	6.769
P	6.407	6.256	6.077	6.065	6.150
Sampanahan	11.207	11.116	10.787	10.869	10.974
L	5.976	6.913	5.784	5.746	5.791
P	5.231	6.265	5.094	5.123	5.183
Pamukan Utara	15.953	15.542	15.033	14.851	14.996
L	8.442	8.197	7.904	7.780	7.840
P	7.511	7.354	7.129	7.081	7.156
Pamukan Barat	10.559	10.288	9.597	9.821	9.942
L	5.679	5.508	5.106	5.176	5.227
P	4.880	4.780	4.491	4.645	4.715
Kabupaten Kotabaru	317.899	320.683	322.658	323.999	324.965
L	165.488	166.520	167.531	167.563	167.907
P	152.411	154.163	155.992	156.436	157.058

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotabaru

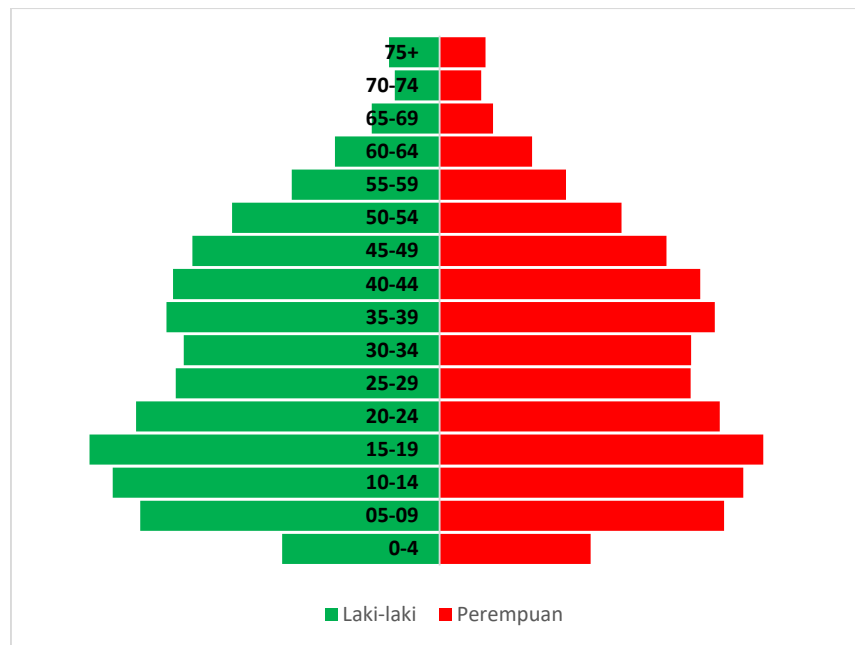
Tabel 2.19.
Kelompok Umur Penduduk Kabupaten Kotabaru berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020

Umur	Laki-laki	Perempuan
0-4	7.852	7.530
5-9	14.933	14.185
10-14	16.296	15.143
15-19	17.461	16.134
20-24	15.132	13.966
25-29	13.162	12.518
30-34	12.755	12.545
35-39	13.613	13.722
40-44	13.291	12.998
45-49	12.325	11.309
50-54	10.344	9.072
55-59	7.373	6.305
60-64	5.218	4.610
65-69	3.387	2.661

Umur	Laki-laki	Perempuan
70-74	2.239	2.075
75+	2.526	2.285
Jumlah	167.907	157.058

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotabaru

Gambar 2.6
Piramida Penduduk Kabupaten Kotabaru Tahun 2020



B. Penduduk Usia Produktif

Posisi penduduk produktif di Kabupaten Kotabaru mencapai 71,96 persen pada tahun 2020. Sementara penduduk usia non produktif mencapai 28,04 persen yang terdiri dari 23,37 persen usia anak-anak dan 4,67 persen usia lebih dari 65 tahun ke atas. Artinya saat ini Kabupaten Kotabaru sedang berada pada bonus demografi, tentu hal ini masih belum dimanfaatkan dengan maksimal. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.20.
Jumlah Usia Produktif dan Non Produktif Tahun 2020

No	Usia Produktif dan Non Produktif	Jenis Kelamin		Jumlah	%
		Laki-laki	Perempuan		
1	< 14 Tahun (Non Produktif)	39.081	36.858	75.939	23,37
2	15-65 Tahun (Usia Produktif)	120.674	113.179	233.853	71,96

No	Usia Produktif dan Non Produktif	Jenis Kelamin		Jumlah	%
		Laki-laki	Perempuan		
3	> 65 Tahun (Non Produktif)	8.152	7.021	15.173	4,67
Jumlah		167.907	157.058	324.965	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotabaru

2.1.2.3 Penduduk Menurut Pendidikan

Tabel 2.21.
Penduduk menurut Pendidikan Tahun 2020

No.	Kecamatan	Tidak/ Belum Se kolah	Belum Tamat SD/ sede raja	Tamat SD/ sede raja	SLTP/ sede raja	SLTA/ Sede raja	Diplo ma I/ II	Aka demi/ Diplo ma III/ Sarja na Muda	Diplo ma IV/ strata I	Strata II	Strata III	Grand Total
1	Pulau Sembilan	2.112	1.520	1.813	473	324	28	12	79	1	1	6.363
2	Pulau Laut Barat	3.107	2.137	2.848	968	1.077	35	35	149	2	-	10.358
3	Pulau Laut Selatan	3.527	2.192	2.687	965	806	85	54	146	2	-	10.464
4	Pulau Laut Timur	3.629	2.695	4.543	1.661	1.410	68	49	138	3	-	14.196
5	Pulau Sebuku	2.050	1.377	2.311	899	748	41	30	93	-	-	7.549
6	Pulau Laut Utara	13.123	8.302	10.166	6.637	11.155	439	861	2.878	214	6	53.781
7	Kelumpang Selatan	2.978	1.684	3.068	1.340	1.134	60	44	164	3	1	10.476
8	Kelumpang Hulu	4.482	3.021	4.742	1.829	1.714	85	59	229	5	-	16.166
9	Kelumpang Tengah	3.588	2.452	4.264	1.503	1.300	40	40	131	2	1	13.321
10	Kelumpang Utara	1.638	1.567	1.745	505	427	24	10	78	1	-	5.995
11	Pamukan Selatan	4.121	2.389	4.075	1.177	961	55	43	94	3	1	12.919
12	Sampanahan	2.912	2.380	3.338	1.088	1.033	60	38	123	2	-	10.974
13	Pamukan Utara	3.781	2.711	5.140	1.611	1.427	108	56	158	4	-	14.996
14	Hampang	4.221	2.748	2.850	924	597	49	28	80	3	-	11.500
15	Sungai Durian	3.314	2.453	3.114	1.393	1.196	37	43	102	3	2	11.657
16	Pulau Laut Tengah	3.174	2.467	3.534	1.150	1.021	45	39	122	7	-	11.559
17	Kelumpang Hilir	5.745	3.334	5.566	3.384	4.221	130	187	536	12	1	23.116
18	Kelumpang Barat	2.059	1.361	2.023	753	659	27	29	69	1	-	6.981
19	Pamukan Barat	3.001	1.752	2.818	1.203	998	53	22	93	2	-	9.942
20	Pulau Laut Kepulauan	4.912	2.714	4.193	964	813	79	53	158	1	3	13.890

No.	Kecamatan	Tidak/ Belum Se kolah	Belum Tamat SD/ sede raja	Tamat SD/ sede raja	SLTP/ sede raja	SLTA/ Sede raja	Diplo ma I/ II	Aka demi/ Diplo ma III/ Sarja na Muda	Diplo ma IV/ strata I	Stra ta II	Stra ta III	Grand Total
21	Pulau Laut Tanjung Selayar	3.654	2.346	3.045	879	930	55	33	152	1	-	11.097
22	Pulau Laut Sigam	8.735	5.342	7.701	5.143	8.261	245	481	1.658	94	7	37.667
Grand Total		89.863	58.944	85.584	36.449	42.212	1.848	2.246	7.430	366	23	324.965

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotabaru

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan secara umum tidak dapat hanya diukur dari persoalan ekonomi namun pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator dari dampak kebijakan pembangunan secara keseluruhan.

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan kontribusi dari pertumbuhan berbagai macam sektor ekonomi, yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi. Bagi daerah, indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arah pembangunan dimasa yang akan datang.

2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, meratakan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi antar daerah, serta mengusahakan terjadinya pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder atau tersier.

Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi tersebut mutlak diperlukan perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang tepat, agar pembangunan yang dilaksanakan bisa tepat waktu dan tepat sasaran. Dalam pada itu data statistik mempunyai peran yang sangat penting dalam setiap tahap pelaksanaan

pembangunan. Salah satu data statistik yang banyak digunakan untuk keperluan tersebut adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Secara umum, aktivitas perekonomian di Kabupaten Kotabaru dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 mencapai 4,89 persen dan di tahun 2019 sedikit menurun menjadi sebesar 4,17 persen. Hal ini seiring dengan merosotnya harga batubara yang berakibat pada penurunan produksi batubara selanjutnya diikuti penurunan produksi industri pengolahan, pertanian, kehutanan dan perikanan.

Adapun PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Kotabaru tahun 2019 mencapai 24.123.120,00 juta rupiah dan di tahun 2020 menurun 23.969.660,00 juta rupiah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2019 mencapai 17.643.610,00 juta rupiah sedang tahun 2020 menjadi sebesar 17.313.030,00 juta rupiah. Angka PDRB tersebut, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini mengimplikasikan terjadinya penurunan aktivitas ekonomi pada tahun 2020 baik dari sisi nominal maupun sisi produksi.

Tabel 2.22.
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016 s.d 2020
atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Kotabaru

PDRB Lap Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)									
	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.899.105,84	18,85	3.033.644,46	18,79	3.153.118,73	18,62	3.270.878,49	18,54	3.291.666,48	19,01
Pertambangan dan Penggalian	3.736.010,40	24,30	3.853.933,70	23,87	4.009.636,49	23,67	4.135.522,48	23,44	4.024.010,08	23,24
Industri Pengolahan	4.953.793,31	32,22	5.235.493,43	32,42	5.477.349,58	32,34	5.658.169,18	32,07	5.430.700,18	31,37
Pengadaan Listrik dan Gas	5.152,19	0,03	5.305,54	0,03	5.705,64	0,03	6.012,08	0,03	6.256,70	0,04
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	12.342,57	0,08	12.725,03	0,08	13.243,53	0,08	13.387,33	0,08	14.317,37	0,08
Konstruksi	756.150,68	4,92	800.889,80	4,96	853.606,46	5,04	914.649,24	5,18	908.114,39	5,25

PDRB Lap Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)									
	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	652.486,60	4,24	703.209,15	4,35	755.607,97	4,46	812.244,54	4,60	797.802,64	4,61
Transportasi dan Pergudangan	820.857,45	5,34	880.507,78	5,45	949.516,89	5,61	1.007.176,27	5,71	974.938,42	5,63
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	89.410,69	0,58	97.700,01	0,61	106.846,83	0,63	117.024,45	0,66	115.771,31	0,67
Informasi dan Komunikasi	70.061,96	0,46	75.845,25	0,47	81.740,46	0,48	88.415,59	0,50	96.113,63	0,56
Jasa Keuangan dan Asurans	157.255,27	1,02	167.296,62	1,04	179.083,04	1,06	189.014,12	1,07	194.532,19	1,12
Real Estate	147.151,11	0,96	154.950,12	0,96	163.425,89	0,96	170.169,56	0,96	175.028,64	1,01
Jasa Perusahaan	20.283,68	0,13	21.547,86	0,13	22.580,62	0,13	23.681,89	0,13	23.435,88	0,14
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	556.805,34	3,62	568.204,36	3,52	589.566,58	3,48	618.223,35	3,50	629.284,48	3,63
Jasa Pendidikan	275.500,38	1,79	298.059,26	1,85	322.743,61	1,91	349.363,56	1,98	354.180,85	2,05
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	136.323,00	0,89	144.775,02	0,90	153.861,29	0,91	161.753,00	0,92	172.123,59	0,99
Jasa Lainnya	88.238,56	0,57	94.053,48	0,58	100.466,35	0,59	107.927,49	0,61	104.753,37	0,61
Produk Domestik Regional Bruto	15.376.929,03	100,00	16.148.140,88	100,00	16.938.099,94	100,00	17.643.612,64	100,00	17.313.030,20	100,00

Sumber : BPS Kotabaru

Tabel 2.23.

**Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016 s.d 2020
atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kotabaru**

PDRB Lap Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)									
	2016		2017		2018		2019		2020	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.700.945,31	18,99	4.015.979,61	18,82	4.278.306,30	18,71	4.510.904,22	18,70	4.571.197,54	19,07
Pertambangan dan	3.803.436,29	19,52	4.134.586,47	19,38	4.349.975,10	19,03	4.470.676,05	18,53	4.356.743,57	18,18

PDRB Lap Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)									
	2016		2017		2018		2019		2020	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Penggalian										
Industri Pengolahan	6.781.921,83	34,80	7.488.121,94	35,10	7.971.370,44	34,87	8.289.746,18	34,36	8.100.829,55	33,80
Pengadaan Listrik dan Gas	6.887,93	0,04	7.909,98	0,04	9.023,52	0,04	9.763,61	0,04	10.430,77	0,04
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	16.002,16	0,08	16.809,88	0,08	17.924,79	0,08	18.591,09	0,08	20.043,40	0,08
Konstruksi	1.025.232,58	5,26	1.109.925,24	5,20	1.210.886,59	5,30	1.332.529,40	5,52	1.330.893,07	5,55
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	906.648,67	4,65	1.032.204,20	4,84	1.143.633,08	5,00	1.266.389,69	5,25	1.270.486,50	5,30
Transportasi dan Pergudangan	1.121.516,72	5,75	1.234.868,56	5,79	1.370.953,35	6,00	1.491.639,76	6,18	1.466.220,42	6,12
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	117.117,65	0,60	131.021,31	0,61	145.860,82	0,64	162.819,69	0,67	164.961,24	0,69
Informasi dan Komunikasi	84.030,67	0,43	94.420,39	0,44	104.959,69	0,46	116.844,06	0,48	126.593,91	0,53
Jasa Keuangan dan Asuransi	214.824,14	1,10	236.180,51	1,11	262.609,91	1,15	285.827,12	1,18	295.453,07	1,23
Real Estate	188.219,58	0,97	200.453,85	0,94	214.605,89	0,94	233.700,19	0,97	242.455,27	1,01
Jasa Perusahaan	28.854,27	0,15	31.910,29	0,15	34.553,10	0,15	37.367,56	0,15	37.811,18	0,16
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	815.586,15	4,18	853.473,68	4,00	919.913,58	4,02	980.330,33	4,06	1.019.729,25	4,25
Jasa Pendidikan	367.027,82	1,88	408.814,11	1,92	455.435,50	1,99	510.533,38	2,12	531.175,57	2,22
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	188.280,46	0,97	204.284,30	0,96	223.556,72	0,98	239.513,03	0,99	259.430,53	1,08
Jasa Lainnya	122.830,48	0,63	135.604,85	0,64	149.450,11	0,65	165.948,27	0,69	165.202,21	0,69
Produk Domestik Regional Bruto	19.489.362,72	100,00	21.336.569,18	100,00	22.863.018,51	100,00	24.123.123,65	100,00	23.969.657,05	100,00

Sumber : BPS Kotabaru

Tabel 2.24.
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016 sampai 2020
Kabupaten Kotabaru

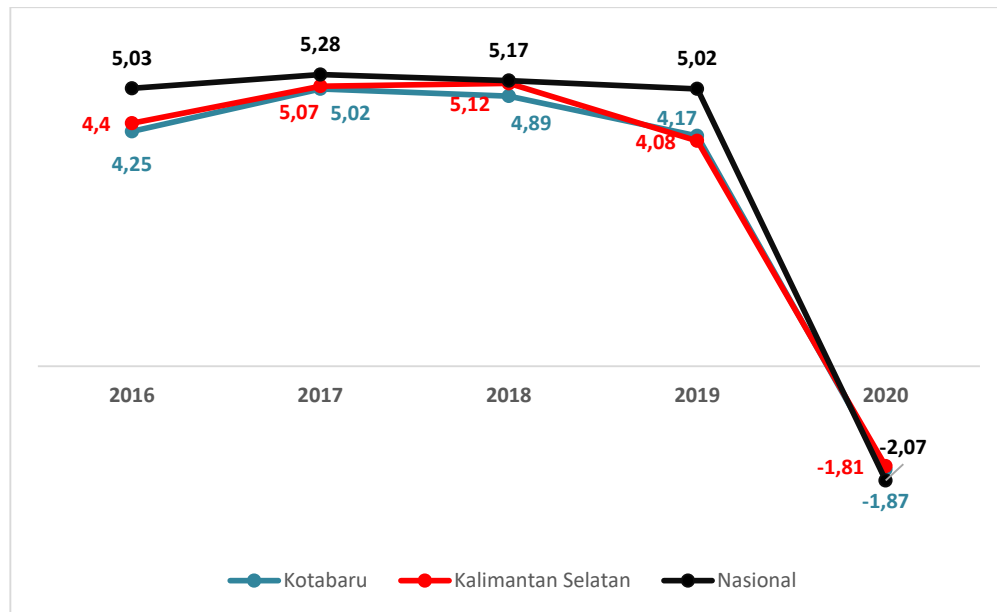
PDRB Lap Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (%)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,57	4,64	3,94	3,73	0,64
Pertambangan dan Penggalian	2,79	3,16	4,03	3,14	-2,70
Industri Pengolahan	4,86	5,69	4,62	3,30	-4,02
Pengadaan Listrik dan Gas	7,29	2,98	7,54	5,37	4,07
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4,75	3,10	4,07	1,09	6,95

PDRB Lap Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (%)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Konstruksi	4.92	5.92	6.58	7.15	-0.71
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.34	7.77	7.45	7.50	-1.78
Transportasi dan Pergudangan	7.75	7.27	7.84	6.07	-3.20
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.59	9.27	9.36	9.53	-1.07
Informasi dan Komunikasi	8.10	8.25	7.77	8.17	8.71
Jasa Keuangan dan Asuransi	6.58	6.39	7.05	5.55	2.92
Real Estate	5.90	5.30	5.47	4.13	2.86
Jasa Perusahaan	7.78	6.23	4.79	4.88	-1.04
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2.07	2.05	3.84	4.86	1.79
Jasa Pendidikan	8.11	8.19	8.28	8.25	1.38
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.71	6.20	6.28	5.13	6.41
Jasa Lainnya	8.25	6.59	6.82	7.43	-2.94
Produk Domestik Regional Bruto	4.25	5.02	4.89	4.17	-1.87

Sumber : BPS Kotabaru

Kabupaten Kotabaru pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif sebesar -1,87 persen mengalami kontraksi jika dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 4,17 persen. Hal ini disebabkan adanya pertumbuhan negatif pada beberapa kategori dominan, yaitu industri pengolahan; dan pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kontraksi ini akibat tekanan pandemi covid-19 yang berpengaruh secara global dan nasional. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotabaru tahun 2016-2020 masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. Namun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotabaru masih diatas Nasional dan sedikit dibawah Provinsi Kalimantan Selatan walaupun tertekan oleh pengaruh pandemi covid-19.

Gambar 2.7
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2016-2020 (%)



Sumber : BPS (diolah)

Tabel 2.25.
Kontribusi Menurut Lapangan Usaha PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016 sampai 2020 Kabupaten Kotabaru

Sektor/Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (%)					
	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata
SEKTOR PRIMER						42,47
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	18,85	18,79	18,62	18,54	19,01	18,76
Pertambangan dan Penggalian	24,3	23,87	23,67	23,45	23,24	23,71
SEKTOR SEKUNDER						37,19
Industri Pengolahan	32,22	32,42	32,34	32,07	31,37	32,08
Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,03
Konstruksi	4,92	4,96	5,04	5,18	5,25	5,07
SEKTOR TERSIER						20,35
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,24	4,35	4,46	4,6	4,61	4,45
Transportasi dan Pergudangan	5,34	5,45	5,61	5,71	5,63	5,55

Sektor/Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (%)					
	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,58	0,61	0,63	0,66	0,67	0,63
Informasi dan Komunikasi	0,46	0,47	0,48	0,5	0,56	0,49
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,02	1,04	1,06	1,07	1,12	1,06
Real Estate	0,96	0,96	0,96	0,96	1,01	0,97
Jasa Perusahaan	0,13	0,13	0,13	0,13	0,14	0,13
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,62	3,52	3,48	3,5	3,63	3,55
Jasa Pendidikan	1,79	1,85	1,91	1,98	2,05	1,92
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,89	0,9	0,91	0,93	0,99	0,92
Jasa Lainnya	0,57	0,58	0,59	0,61	0,61	0,59
PDRB	100	100	100	100	100	100

Sumber : BPS, diolah

Berdasarkan kontribusi lapangan usaha PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Kotabaru tahun 2016-2020 masih didominasi oleh sektor primer (lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, dan lapangan usaha pertambangan dan penggalan) dan sektor sekunder (lapangan usaha industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, dan konstruksi), dimana rata-rata kontribusi sektor primer selama tahun 2016-2020 adalah sebesar 42,47 persen dan rata-rata kontribusi sektor sekunder sebesar 37,19 persen.

Pergeseran struktur ekonomi ini merupakan fenomena yang menarik untuk dicermati. Peran sektor primer dan sekunder sebaiknya lebih dikendalikan karena masih bergantung pada sumber daya alam dan lebih banyak berdampak kepada degradasi lingkungan. Kedepannya diharapkan sektor tersier akan semakin berkembang serta terjalin simbiosis mutualisme (saling menguntungkan) antara satu sektor dengan sektor lain, yang artinya masing-masing sektor tidak berdiri sendiri. Dengan begitu bukan tidak mungkin akan tercipta suatu sistem perekonomian yang berbasis kuat dan lebih stabil, serta lebih memperhatikan keberlangsungan alam dan lingkungan.

Untuk mengetahui bagaimana peran konsumsi, investasi dan ekspor terhadap perkembangan PDRB, dapat dilihat pada PDRB dari sisi pendekatan

pengeluaran. PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga; (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga; (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah; (4) pembentukan modal tetap bruto; (5) perubahan inventori; dan (6) net ekspor (ekspor dikurangi impor).

Tabel 2.26.
PDRB Kabupaten Kotabaru Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Tahun 2016 sampai 2020 (Juta Rp)

PDRB Menurut Jenis Pengeluaran	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kotabaru Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran (Juta Rupiah)				
	2016	2017	2018	2019*	2020**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5.390.266,20	5.828.419,27	6.246.024,61	6.792.703,83	6.880.398,86
Pengeluaran Konsumsi LNPR	118.077,99	129.702,61	142.204,70	156.869,68	155.133,96
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.773.561,36	1.818.333,85	1.961.210,75	2.031.468,16	1.998.307,28
Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.583.735,40	3.832.813,00	4.141.294,52	4.584.643,78	4.610.557,59
Perubahan Inventori	- 54.315,51	5.885,67	88.150,67	37.135,20	5.115,65
Net Ekspor Barang dan Jasa	8.678.037,27	9.721.414,78	10.284.133,26	10.520.303,00	10.320.143,72
- <i>Ekspor</i>	15.156.770,00	17.711.070,00	21.296.790,00	20.085.280,00	16.977.430,00
- <i>Impor</i>	6.478.730,00	7.989.650,00	11.012.660,00	9.564.970,00	6.657.290,00
Produk Domestik Regional Bruto	19.489.362,72	21.336.569,18	22.863.018,51	24.123.123,65	23.969.657,05

Sumber : BPS Kotabaru, BPS Kalsel

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Kondisi perekonomian Kabupaten Kotabaru menunjukkan tanda semakin membaik, terlihat dari PDRB yang cenderung meningkat pada tahun 2019 dan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan arah positif. Nilai PDRB selama periode 2016-2020 menunjukkan perkembangan fluktuatif. Peningkatan dan penurunan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume. Pada tahun 2016, PDRB Kabupaten Kotabaru ADHB sebesar 19.489.362,72 juta rupiah dan mencapai 24.123.123,65 juta rupiah pada tahun 2019. Namun mengalami kontraksi pada tahun 2020 akibat tekanan pandemi covid-19 menjadi 23.969.657,05 juta rupiah.

Tabel 2.27.
Distribusi PDRB Kabupaten Kotabaru Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Pengeluaran Tahun 2016 sampai 2020 (%)

PDRB Menurut Jenis Pengeluaran	Distribusi PDRB Kabupaten Kotabaru Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen)				
	2016	2017	2018	2019*	2020**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	27,66	27,32	27,32	28,16	28,70
Pengeluaran Konsumsi LNPR	0,61	0,61	0,62	0,65	0,65
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	9,10	8,52	8,58	8,42	8,34
Pembentukan Modal Tetap Bruto	18,39	17,96	18,11	19,01	19,23
Perubahan Inventori	-0,28	0,03	0,39	0,15	0,02
Net Ekspor Barang dan Jasa	44,53	45,56	44,98	43,61	43,06
- Ekspor	77,77	83,01	93,15	83,26	70,83
- Impor	33,24	37,45	48,17	39,65	27,77
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kotabaru, BPS Kalsel

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Selama periode 2016-2020, komponen terbesar adalah Net Ekspor (di atas 43 persen). Proporsi konsumsi rumah tangga juga mempunyai peran relatif besar dengan kontribusi sekitar 27-28 persen. Di sisi lain, pengeluaran untuk modal (PMTB) berada pada rentang 18-19 persen. Konsumsi pemerintah berada pada 8-9 persen. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi pemerintah kurang dari konsumsi rumah tangga dalam penggunaan produk domestik.

Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga cenderung meningkat, pada tahun 2016 mencapai 27,66 persen dan sempat menurun menjadi 27,32 persen di tahun 2017. Namun kembali meningkat di tahun 2019 dengan kontribusi 28,16 persen. Peningkatan konsumsi rumah tangga ini sebagai akibat dari peningkatan pendapatan yang berimplikasi pada meningkatnya daya beli. Dan pada tahun 2020 masih menunjukkan kenaikan pada angka 28,70 persen.

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) adalah bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). PMTB menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil yang dapat dilihat dari

tren pertumbuhan komponen PMTB dari tahun 2016-2020 yang terus mengalami peningkatan.

Tabel 2.28.
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kotabaru Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Tahun 2016 sampai 2020 (%)

PDRB Menurut Jenis Pengeluaran	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kotabaru Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen)				
	2016	2017	2018	2019*	2020**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,81	4,85	5,02	4,31	-0,16
Pengeluaran Konsumsi LNPR	5,67	6,25	7,21	6,09	-2,30
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,46	0,77	1,77	2,64	-3,88
Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,36	4,85	5,17	6,07	-0,85
Net Ekspor Barang dan Jasa	5,25	5,13	4,36	4,12	-2,64
- <i>Ekspor</i>	0,13	8,44	6,47	1,70	-9,70
- <i>Impor</i>	-5,65	12,60	8,94	-1,02	-18,04
Produk Domestik Regional Bruto	4,25	5,02	4,89	4,17	-1,87

Sumber : BPS Kotabaru

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotabaru mengalami perlambatan selama dua tahun berturut-turut, yakni tahun 2018 dan 2019 hingga 2020. Pada tahun tersebut, pertumbuhan PDRB Kabupaten Kotabaru ADHK menurut pengeluaran mengalami perlambatan pertumbuhan dari angka 4,89 persen tahun 2018 menjadi 4,17 persen di tahun 2019 dan terus berlanjut menjadi -1,87 persen di tahun 2020.

PDRB perkapita adalah rata-rata nilai tambah perkapita yang mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Angka PDRB perkapita diperoleh dengan membagi PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB perkapita adalah rata-rata nilai tambah perkapita yang mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Namun karena dalam nilai PDRB masih terdapat komponen-komponen yang tidak dapat dinikmati oleh masyarakat secara langsung seperti penyusutan, pajak tak langsung neto, dan faktor pendapatan neto, maka penggunaan PDRB perkapita sebagai indikator untuk

mengukur tingkat kesejahteraan perlu dibandingkan lagi dengan indikator lain seperti konsumsi masyarakat perkapita atau indikator lain yang relevan.

Tabel 2.29.
PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Kabupaten Kotabaru
Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
1	PDRB Perkapita ADHB (juta rupiah)	59,81	64,39	67,89	70,49	68,99
2	PDRB Perkapita ADHK (juta rupiah)	47,19	48,73	50,30	51,55	49,83
3	PDRB Per Kapita Provinsi Kalimantan Selatan (ADHB)	36,02	38,62	41,04	42,54	41,62
4	PDRB Per Kapita Nasional (ADHB)	47,93	51,89	55,99	59,06	56,94
5	PDRB Per Kapita Provinsi Kalimantan Selatan (ADHK)	28,54	29,58	30,61	31,40	30,40
6	PDRB Per Kapita Nasional (ADHK)	36,47	37,85	39,34	40,84	39,55

Sumber: Badan Pusat Statistik

*) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara

PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan pendapatan per satu orang penduduk yang memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun karena dalam nilai PDRB masih terdapat komponen-komponen yang tidak dapat dinikmati oleh masyarakat secara langsung seperti penyusutan, pajak tak langsung neto, dan faktor pendapatan neto (*net factor income*), maka penggunaan PDRB perkapita sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan perlu dibandingkan lagi dengan indikator lain seperti konsumsi masyarakat perkapita atau indikator lain yang relevan.

Sementara itu PDRB perkapita atas dasar harga konstan memiliki fungsi yang berbeda yaitu untuk menggambarkan pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara. Dari gambar dapat dilihat bahwa PDRB perkapita atas dasar harga berlaku tahun 2020 adalah sebesar 68,99 juta rupiah, menurun 3,34 persen dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 70,49 juta rupiah. Sedangkan PDRB perkapita atas dasar harga konstan tahun 2020 adalah sebesar 49,83 juta rupiah, menurun dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 51,55 juta rupiah. Besaran nilai PDRB Per Kapita Kotabaru baik atas dasar harga

konstan maupun atas dasar harga konstan berada di atas besaran nilai PDRB Per Kapita Kalimantan Selatan dan Nasional.

2.2.1.2 Laju Inflasi

Inflasi merupakan persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Sepanjang tahun 2020, inflasi Kabupaten Kotabaru tercatat berada pada level 1,44 persen (*year-on-year*). Hal ini berarti bahwa secara rata-rata terjadi kenaikan harga berbagai komoditas pada periode tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan inflasi rata-rata di Kalimantan Selatan, tingkat inflasi di Kotabaru lebih tinggi dari pada rata-rata Kalimantan Selatan, dimana pada tahun 2016 inflasi Rata-rata Kalimantan Selatan adalah sebesar 3,57 persen sedangkan inflasi Kotabaru sebesar 3,80 persen begitu juga pada tahun 2020 triwulan kedua inflasi di Kalimantan Selatan adalah 3,50 persen sedangkan Kotabaru sebesar 1,44 persen. Hal ini menandakan bahwa harga komoditi kemungkinan lebih rendah di Kotabaru, harga komoditi yang lebih tinggi dapat disebabkan karena faktor distribusi dan faktor *supply* dan *demand*.

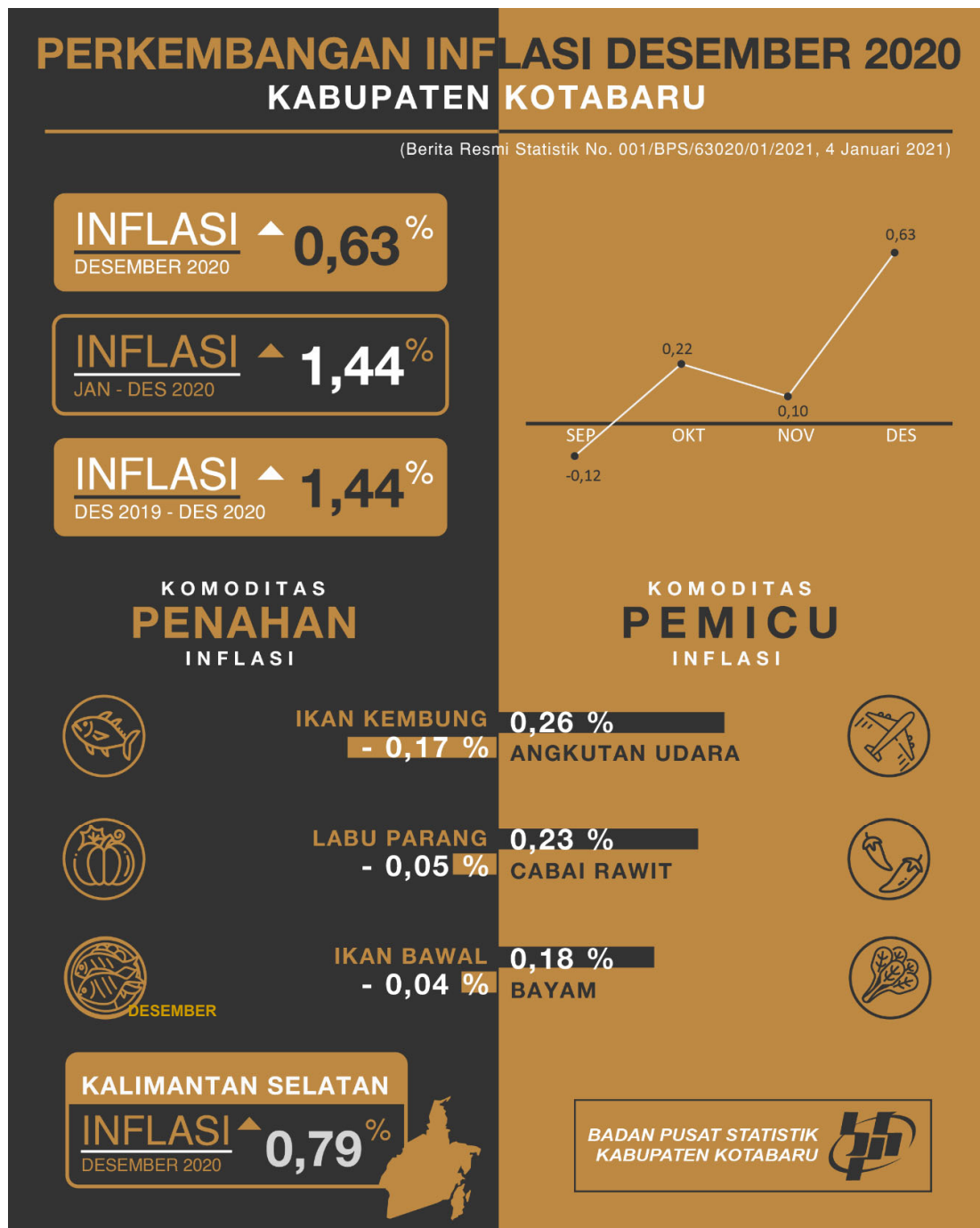
Tabel 2.30.
Perkembangan Inflasi Tahunan Kabupaten Kotabaru dan rata-rata Inflasi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020 (Persen)

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020*
Kotabaru	3,80	3,03	-	5,46	1,44
Kalimantan Selatan	3,57	3,82	2,63	4,01	3,50

* Data sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 2.8
Perkembangan Inflasi Desember 2020 Kabupaten Kotabaru



Sumber : Gambar milik kotabarukab.bps.go.id

2.2.1.3 Indeks Gini

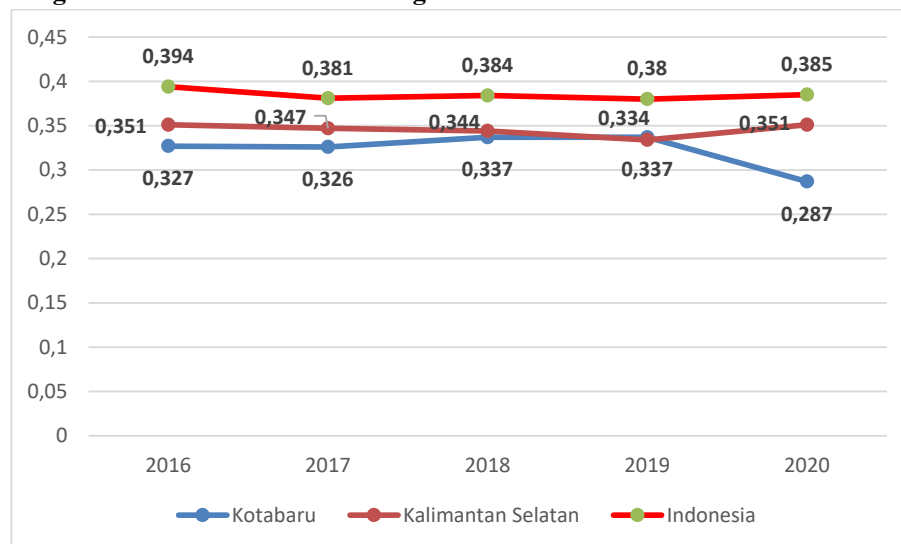
Ratio Gini atau Indeks Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa.

Tabel 2.31.
Indeks Gini Kabupaten Kotabaru

No	Tahun	Indeks Gini
1	2014	0,347
2	2015	0,349
3	2016	0,327
4	2017	0,326
5	2018	0,337
6	2019	0,337
7	2020	0,287

Sumber : BPS Kalimantan Selatan

Gambar 2.9
Perbandingan Indeks Gini Kotabaru dengan Kalimantan Selatan dan Indonesia 2016-2020



Indeks Gini Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 sebanyak 0,287 artinya Kabupaten Kotabaru menurun sebanyak 0,05 poin dibanding Tahun 2019 yang sebesar 0,337. Indeks Gini Kotabaru rata-rata lebih rendah dari indeks Gini Kalimantan Selatan dan Nasional, pada tahun 2019 Indeks Gini Kotabaru lebih tinggi dari Indeks Gini Kalimantan Selatan. Dan pada tahun 2020 kembali lebih rendah dari Kalimantan Selatan.

2.2.1.4 Kemiskinan

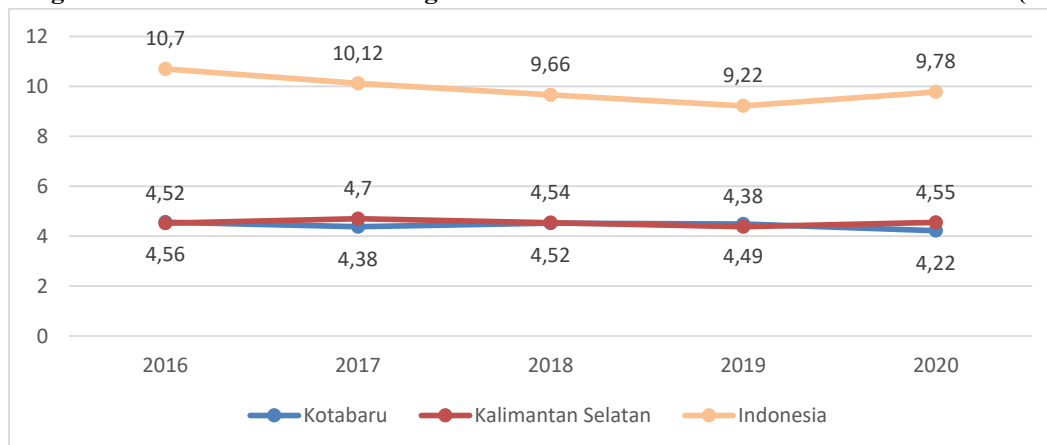
Salah satu indikator sosial ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk adalah perkembangan penduduk miskin. Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di daerah tergantung dua faktor. Pertama, tingkat pendapatan daerah rata-rata. Kedua, lebar sempitnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan yang diperoleh dari perbandingan angka persentase penduduk dan pendapatan riil tahunan.

Tabel 2.32.
Kemiskinan di Kabupaten Kotabaru

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Garis Kemiskinan (rupiah)	369.147	384.977	401.300	416.388	466.121
2	Jumlah Penduduk Miskin (orang)	14.780	14.440	15.167	15.287	14.597
3	% Penduduk Miskin (P0)	4,56	4,38	4,52	4,49	4,22
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,62	0,76	0,51	0,72	0,60
5	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,11	0,23	0,14	0,15	0,12

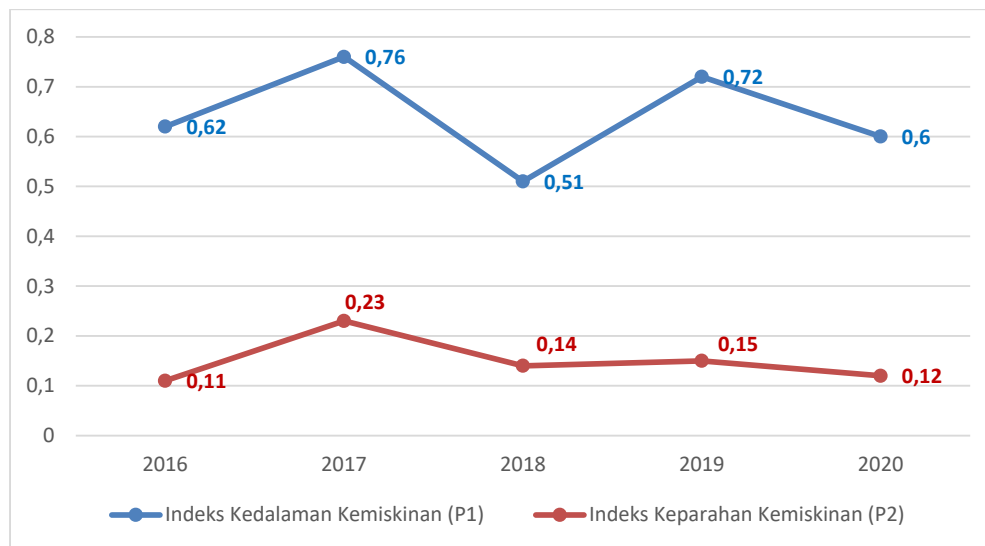
Sumber: BPS Kotabaru Tahun 2020

Gambar 2.10
Tingkat Kemiskinan Kotabaru dengan Kalimantan Selatan dan Indonesia 2016-2020 (%)



Secara umum pada periode 2016-2020 tingkat kemiskinan di Kabupaten Kotabaru sedikit lebih rendah dibandingkan Kalimantan Selatan dan masih dibawah Nasional. Sedangkan untuk kedalaman dan keparahan kemiskinan sebagai berikut:

Gambar 2.11
Kedalaman dan Keparahannya Kemiskinan Kabupaten Kotabaru 2016-2020



Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Jika dilihat dari Gambar 2.11 maka kedalaman kemiskinan Kabupaten Kotabaru masih cukup tinggi.

Indeks Keparahannya Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Dari data yang disajikan pada Gambar 2.11 maka keparahan kemiskinan yaitu ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin Kabupaten Kotabaru termasuk rendah.

2.2.1.5 Angka Kriminalitas yang ditangani

Tabel 2.33.

Angka Kriminalitas Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 s/d 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	514	641	451	433	438
2	Jumlah Penduduk*	325,827	331.326	336.719	342.217	324.965**
3	Persentase Angka Kriminalitas	0,16 %	0,19 %	0,13 %	0,13 %	0,13 %

Sumber: Polres Kotabaru, 2021, *Proyeksi Tahun berjalan, ** sensus 2020

Dengan pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Kotabaru yang meningkat dari tahun ke tahun, jumlah tindak kriminalitas dari tahun ke tahun semakin menurun. Hal ini merupakan kondisi yang baik bagi iklim investasi di Kabupaten Kotabaru.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus kesejahteraan sosial di indikasikan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perubahan paradigma pembangunan pada pembangunan SDM terus dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, hal itu dapat dilihat dari komitmen Pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk menaikkan anggaran pendidikan sehingga dapat mencapai 20 persen dari total anggaran (APBD) setiap tahunnya.

Indikator yang mewakili bidang pendidikan untuk menggambarkan IPM adalah angka melek huruf penduduk dewasa serta rata-rata lama sekolah. Faktor-faktor lainnya yang berpengaruh terhadap kualitas pendidikan adalah belum idealnya rasio siswa terhadap guru, rasio siswa terhadap daya tampung sekolah dan rasio guru terhadap sekolah. Pencermatan atas data sebaran rata-rata lamanya sekolah dan angka melek huruf menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana, aksesibilitas serta kondisi sosial ekonomi, berpengaruh pada peningkatan kualitas sumber daya manusia

Salah satu alat ukur yang dianggap dapat merefleksikan status pembangunan manusia adalah *Human Development Indeks* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup 3 (tiga) bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yaitu :

1. Umur Panjang dan Hidup Sehat,
2. Pengetahuan dan
3. Standar Hidup Layak.

Tingkatan status pembangunan manusia suatu wilayah dibagi ke dalam empat kelompok kelas yaitu: rendah (<60), sedang (60- <70), tinggi (antara 70 - < 80) dan sangat tinggi (≥80) (BPS, 2015).

Dengan metode baru, IPM Kabupaten Kotabaru tahun 2020 tercatat sebesar 68,86. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,09 dibandingkan IPM pada tahun 2019 yang sebesar 68,95. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan signifikan pada komponen Pengeluaran per kapita disesuaikan.

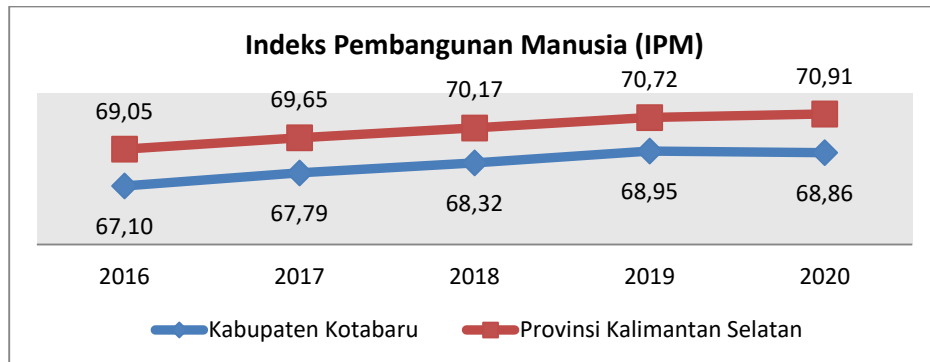
Tabel 2.34.
Indeks Pembangunan Manusia (Metode Baru) dan Indikatornya
Kabupaten Kotabaru

	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Pembangunan Manusia	67,10	67,79	68,32	68,95	68,86
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,02	7,18	7,19	7,42	7,43
Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	11,66	11,82	11,83	11,92	11,93
Angka Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun)	68,61	68,72	68,89	69,10	69,21
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)	11.065	10.777	11.065	11.731	11.530

Sumber : BPS 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat sejauh mana posisi pencapaian pembangunan manusia di wilayah Kabupaten Kotabaru. Berdasarkan kriteria tersebut maka secara umum dapat diperoleh suatu gambaran bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Kotabaru tahun 2020 dengan nilai 68,86 termasuk dalam kelas sedang, dengan rentang nilai $60 \leq \text{IPM} \leq 70$.

Gambar 2.12
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2020

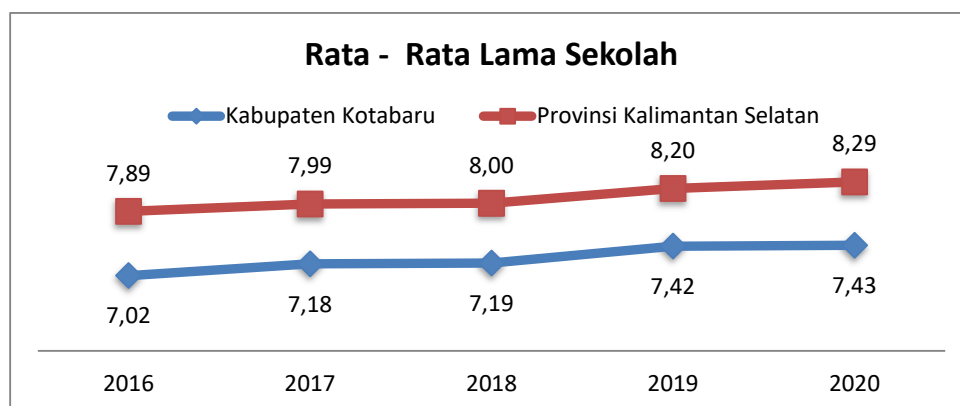


A. Pendidikan

1. Rata – Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu komponen penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada dimensi pendidikan. Rata-rata lama sekolah ini berguna untuk menunjukkan kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah di suatu wilayah menunjukkan semakin lama atau semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk suatu wilayah. Pada tahun 2020 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kotabaru 7,43 dan Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Selatan 8,29.

Gambar 2.13
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2020



Berdasarkan Gambar 2.13 terlihat bahwa dari tahun 2016 hingga tahun 2020 rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun keatas di Kabupaten Kotabaru senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 rata-rata lama sekolah mencapai 7,02 tahun. Sementara itu, pada tahun 2020 rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Kotabaru sudah mencapai 7,43 tahun.

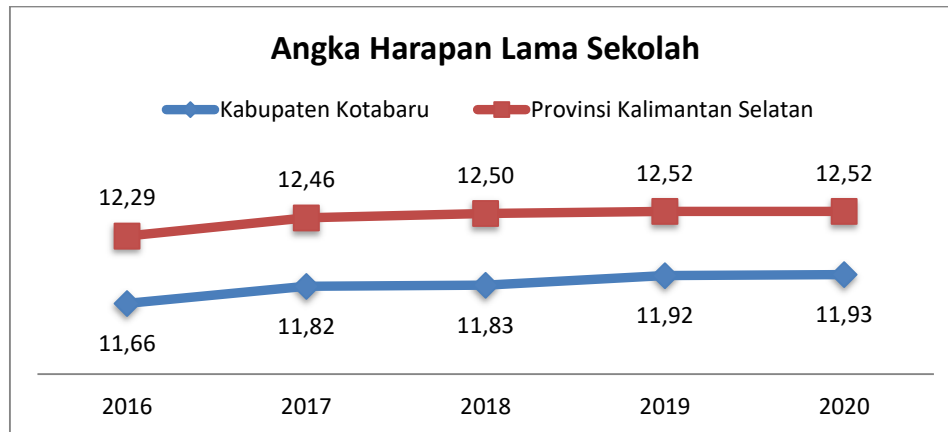
Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kotabaru ini masih lebih rendah jika dibandingkan angka rata-rata lama sekolah Provinsi Kalimantan Selatan yang sejak 2016 hingga 2020. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah Kabupaten Kotabaru selaku penanggung jawab penyelenggaraan Pendidikan dasar di daerah beserta seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat bisa lebih mendukung dan memanfaatkan program-program yang dicanangkan pemerintah dibidang Pendidikan sehingga setiap penduduk di Kabupaten Kotabaru bisa mendapatkan Pendidikan dasar atau yang lebih dikenal dengan wajib belajar 9 tahun akan terwujud dalam beberapa tahun kedepan.

2. Angka Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) yaitu lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun keatas.

Angka Harapan lama sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Gambar 2.14
Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2020



Berdasarkan Gambar 2.14 terlihat bahwa dari tahun 2016 hingga tahun 2020 angka harapan lama sekolah di Kabupaten Kotabaru senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 angka harapan lama sekolah mencapai 11,66 tahun. Sementara itu, pada tahun 2020 angka harapan lama sekolah penduduk di Kabupaten Kotabaru sudah mencapai 11,93 tahun.

Angka harapan lama sekolah di Kabupaten Kotabaru ini masih lebih rendah jika dibandingkan angka harapan lama sekolah Provinsi Kalimantan Selatan yang sejak 2016 hingga 2020 sudah lebih dari 12 tahun. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah Kabupaten Kotabaru.

Tabel 2.35.
Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah
Di Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2020.

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,18	7,19	7,19	7,42	7,43
Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	11,82	11,83	11,83	11,92	11,93

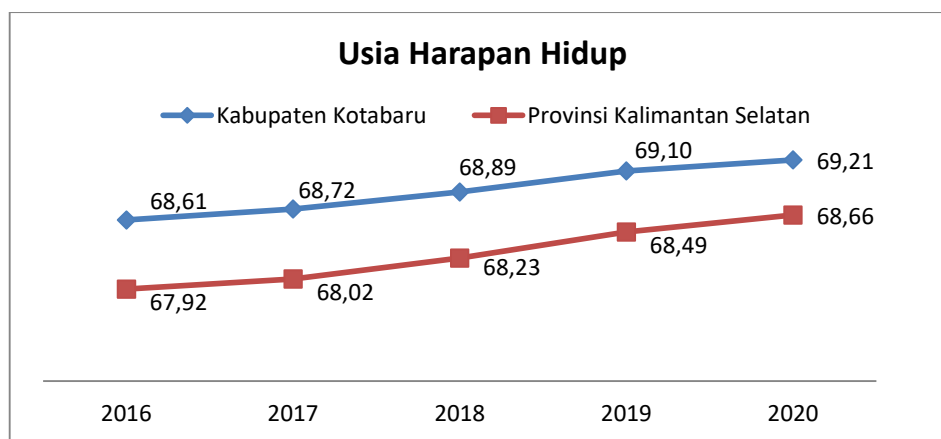
Sumber : BPS Kotabaru

B. Kesehatan

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator yang digunakan untuk mencerminkan status kesehatan dalam pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Secara keseluruhan UHH Kabupaten Kotabaru lebih baik dibandingkan dengan UHH Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2020, UHH

Kabupaten Kotabaru sebesar 69,21 tahun, artinya setiap bayi yang akan lahir di Kabupaten Kotabaru pada tahun 2020 secara rata-rata akan mempunyai harapan untuk dapat hidup selama 69,21 tahun. Sedangkan UHH Provinsi Kalimantan Selatan hanya 68,66 tahun.

Gambar 2.15
Usia Harapan Hidup Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2020



Gambaran UHH Kabupaten Kotabaru selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Meningkatnya usia harapan hidup ini antara lain terkait dengan meningkatnya status sosial ekonomi masyarakat, disamping kesadaran masyarakat tentang pola kebiasaan hidup sehat. Dan sudah pasti andil dari semakin gencarnya peningkatan fasilitas kesehatan oleh pemerintah.

Tabel 2.36.
Perkembangan Angka Harapan Hidup Sejak Lahir
Di Kabupaten Kotabaru Tahun 2015-2020.

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun)	68.72	68.89	68.89	69.10	69.21

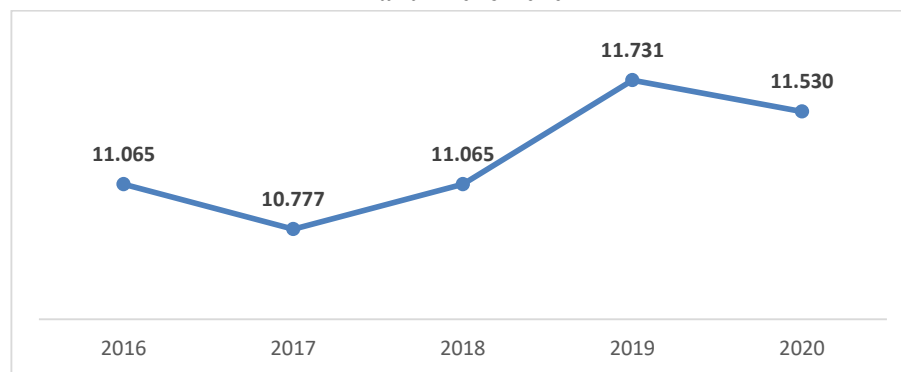
Sumber : BPS Kotabaru

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan pencapaian UHH tahun 2016-2020 mengalami peningkatan secara konsisten dengan angka relatif kecil yakni sebesar 0,49 tahun. Hal ini berarti selama 5 tahun hanya mengalami peningkatan kurang lebih 6 bulan atau rata-rata sekitar 1 bulan per tahunnya.

C. Ekonomi

Salah satu komponen perhitungan IPM dari aspek ekonomi adalah pengeluaran per kapita. Pada tahun 2016 pengeluaran per kapita per tahun masyarakat Kotabaru sebesar Rp. 11.065,000 menjadi Rp. 11.731.000 pada tahun 2019, namun menurun pada tahun 2020 menjadi Rp. 11.530.000. Selanjutnya perkembangan selama tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Gambar 2.16
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) Di Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2020



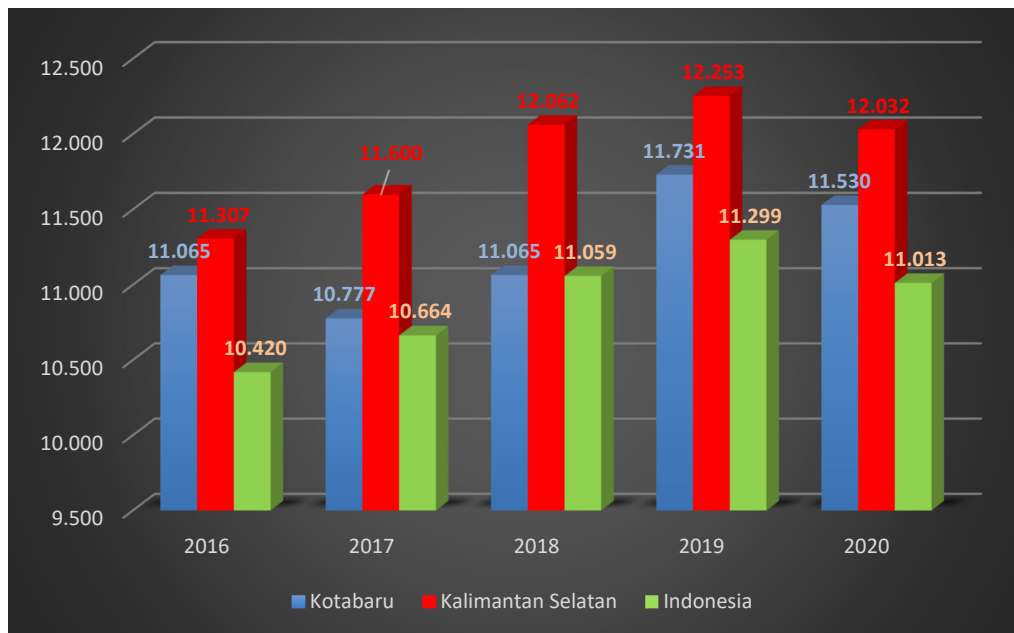
Tabel 2.37.
Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Masyarakat Kotabaru Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)	11.065	10.777	11.065	11.731	11.530

Sumber : BPS Kotabaru

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan terjadi kecenderungan peningkatan setiap tahunnya, dimana selama tahun 2016-2020 terjadi peningkatan sebesar Rp. 465.000,- atau rata-rata Rp. 38.750,- per kapita per tahunnya. Angka ini termasuk peningkatan yang sangat kecil per tahunnya, angka ini menunjukkan bahwa peningkatan terbesarnya ada pada masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. Dan pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar Rp. 201.000 menjadi Rp, 11.530.000 dibandingkan tahun 2019.

Gambar 2.17
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) Kotabaru, Kalimantan Selatan dan Indonesia, 2016-2020



D. Ketenagakerjaan

Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang terserap pada lapangan kerja. Tingginya angkatan kerja disuatu daerah secara langsung dapat menggerakkan perekonomian di suatu daerah.

Tabel 2.38.
Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Kotabaru
Tahun 2016 s.d. 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk yang bekerja	141.568	142.731	150.600	153.439	149.553
2	Jumlah Angkatan Kerja	146.690	148.678	157.340	161.409	157.363
3	Rasio Penduduk yang bekerja	0,97	0,96	0,96	0,95	0,95

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Kotabaru Tahun 2020

Peningkatan angka pengangguran merupakan salah satu indikasi bahwa kegiatan perekonomian yang melambat akibat pengaruh pelambatan ekonomi nasional dan global terkait dengan penurunan sektor pertambangan. Tingkat

pengangguran terbuka Kabupaten Kotabaru dari tahun 2016 sampai 2017 mengalami penurunan yaitu dari 3,94 pada tahun 2016 menjadi 4,28 pada tahun 2017, dan tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 4,71 dan tahun 2019 meningkat menjadi 5,02. Pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka Kotabaru meningkat menjadi 4,96 dimana lebih rendah dari Indonesia namun masih di atas tingkat pengangguran Kalimantan Selatan.

Tabel 2.39.
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dan
Indonesia, 2016-2020 (%)

Uraian	Tahun (%)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	65,79	68,90	69,97	67,49	64,68
Tingkat Pengangguran Terbuka	3,94	4,28	4,71	5,02	4,96
Tingkat Pengangguran Terbuka Kalimantan Selatan	5,45	4,77	4,35	4,18	4,74
Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia	5,61	5,50	5,34	5,28	7,07

Sumber : BPS Tahun 2020

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

2.2.3.1 Kebudayaan

Kebudayaan pada hakekatnya adalah bentuk dari suatu tradisi yang dilaksanakan secara terus menerus dan memberikan nilai sosial yang mendasar bagi tatanan kehidupan masyarakat dalam lingkungan tertentu. Dengan demikian salah satu unsur kebudayaan adalah kesenian. Kesenian memiliki nilai yang berakar dimasyarakat sebagai bentuk aktualisasi budaya yang berkembang di masyarakat. Tabel berikut ini menjelaskan bahwa kesenian akan sangat berhubungan dengan kebersamaan yang disebut grup kesenian.

Tabel 2.40.
Perkembangan Kebudayaan Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 s.d 2020

No	Capaian Pembangunan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.	25	25	25	30	30
2	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.	5	5	5	5	5

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Kotabaru Tahun 2021

2.2.3.2 Pemuda dan Olah Raga

Pembangunan kepemudaan sangat sulit dipisahkan dengan keolahragaan. Keolahragaan yang berkembang meliputi 3 jenis yaitu prestasi, kreatif dan pemasalan. Olah raga juga memiliki nilai yang berakar dimasyarakat sebagai bentuk aktualisasi peran pemuda yang berkembang di masyarakat. Tabel berikut ini menjelaskan bahwa pembangunan kepemudaan sangat berhubungan dengan kebersamaan yang disebut grup dalam olah raga.

Tabel 2.41.
Perkembangan pembangunan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 s.d 2020

No	Capaian Pembangunan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk.	-	303	303	303	303
2	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk.	34	34	34	34	34

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Kotabaru Tahun 2021

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib

2.3.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan.

Pembangunan urusan pendidikan merupakan salah satu urusan wajib penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai konteks undang-undang otonomi daerah untuk mengoptimalkan tujuan pelayanan pendidikan, maka urusan pendidikan dipertajam lagi dengan urusan wajib pelayanan dasar. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan pendidikan akan menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya saing menuju masyarakat yang sejahtera melalui jenis, jalur dan jenjang pendidikan.

a. Angka Partisipasi Murni (APM)

Keberhasilan pembangunan pendidikan di Kabupaten Kotabaru dapat dilihat dari Angka Partisipasi Murni (APM). Indikator ini menunjukkan persentase

jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan.

Tabel 2.42.
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2020

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	35.211	34.892	35.016	36.694	37.058
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	37.697	37.697	40.498	40.498	40.498
1.3.	APM SD/MI	93,41	92,56	86,46	89,13	91,51
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	11.477	12.554	12.937	14.408	14.531
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	16.114	16.114	16.778	16.778	16.778
2.3.	APM SMP/MTs	71,22	77,91	77,11	85,87	86,61
3	SMA/MA/SMK					
3.1.	Jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	8.325	8.475	8.423	8.422	10.313
3.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	13.310	13.310	15.326	15.326	15.328
3.3.	APM SMA/MA/SMK	62,55	63,67	54,95	54,94	67,28

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan APM semakin menurun. Hal ini Nampak jelas pada tahun 2020 APM SD sederajat sudah mencapai 91,51 persen, sementara pada jenjang SLTP sederajat APM tersisa sebesar 86,61 persen dan pada tingkat SLTA sederajat 67,28 Persen. Namun jika dilihat setiap tahunnya selama periode tahun 2016-2020 menunjukkan fluktuasi. Pada tingkat SD sederajat justru mengalami kecenderungan penurunan dari 95,14 persen tahun 2015 menjadi 91,51 persen pada tahun 2020, terjadi penurunan 3,63 persen dan kondisi yang terparah adalah pada tahun 2018 yang hanya 86,46 persen angka ini paling rendah dalam periode waktu 2016-2020.

Pada jenjang SLTP sederajat menunjukkan angka yang relatif stabil selama periode tahun 2016-2020 dengan capaian 71,22 persen tahun 2016 menjadi 86,61 persen tahun 2020. Angka ini meningkat sangat baik mencapai 15,39 persen atau meningkat rata 3,078 persen per tahunnya. Demikian dengan APM SLTA sederajat dengan angka 62,55 persen tahun 2016 menjadi 67,28 persen pada tahun 2020, terjadi peningkatan sebesar 4,73 persen selama periode tahun 2016-2020.

b. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar menunjukkan (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang menempuh pendidikan sesuai jenjang pendidikan dengan memperhitungkan persentase jumlah penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap penduduk usia sekolah, capaian APK Kabupaten Kotabaru tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.43.
Perkembangan APK Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2020

Jenjang APK	2016	2017	2018	2019	2020
APK SD sederajat	106,88	105,13	105	96,89	95,48
APK SLTP Sederajat	94,32	97,18	85,83	93,27	91,48
APK SLTA Sederajat	77,04	77,03	72,26	72,77	78,11

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

c. Pendidikan yang Ditamatkan

Tabel 2.44.
Perkembangan Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)
Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2020

No.	APT	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tamat SD	6.278	6.129	5.833	6.367	5.980
2	Tamat SLTP sederajat	4.613	4.489	4.947	5.110	4.965
3	Tamat SLTA sederajat	2.743	2.801	2.856	3.329	3.378
4.	PT	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

d. Capaian Pelaksanaan Pendidikan Dasar

1) Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Tabel 2.45.
Jumlah Murid menurut Jenjang dan Jenis Pendidikan
Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2020

Jenjang Pendidikan	Jumlah Murid				
	2016	2017	2018	2019	2020
TK/PAUD	9.754	9.542	9.676	9.565	10.107
SD Sederajat	40.289	39.551	39.239	38.253	38.668
SLTP Sederajat	15.198	15.660	15.649	15.237	15.348
Jumlah	153.031	64.753	64.564	63.055	64.123

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Tabel 2.46.
Perkembangan APS Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2020

Jenjang Pendidikan	Perkembangan APS				
	2016	2017	2018	2019	2020
SD Sederajat					
Jumlah Murid Usia 7-12 tahun	35.211	34.892	35.016	36.094	37.058
Jumlah Murid SLTP dibawah 13 Tahun					441
Jumlah Penduduk 7-12 Tahun	37.697	37.697	40.498	40.498	40.498
APS usia 7-12 tahun	93,41	92,56	86,46	88,13	92,59
SLTP Sederajat					
Jumlah Murid SD diatas 12 tahun					352
Jumlah Murid usia 13-15 tahun	11.477	12.554	12.937	14.408	14.531
Jumlah murid SMA sederajat dibawah 16 tahun					257
Jumlah penduduk 12-15 tahun	16.114	16.114	16.778	16.778	16.778
APS 13-15 tahun	71,22	77,91	77,11	85,87	90,24

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kotabaru, 2021

2) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah akan menggambarkan rasio sekolah dengan peserta didik atau murid, atau dengan kata lain bahwa sekolah disediakan dalam rangka menampung proses belajar mengajar anak usia

sekolah. Berdasarkan data tahun 2016-2020 rasio gedung sekolah dengan jumlah anak usia sekolah sebagai mana tabel berikut ini :

Tabel 2.47.
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2016 s.d 2020
Kabupaten Kotabaru

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah gedung sekolah	1.843	1.862	1.838	1.849	1.957
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	37.697	37.697	40.498	40.498	40.498
1.3.	Rasio	1 : 20	1 : 20	1 : 22	1 :22	1:21
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah gedung sekolah	466	479	478	495	565
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	16.114	16.114	16.778	16.778	16.778
2.3.	Rasio	1 : 35	1 : 34	1 : 35	1 :34	1:30

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kotabaru, 2021

3) Rasio Guru/Murid

Rasio ini memperlihatkan jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Tabel berikut ini memperlihatkan data ketersediaan guru/murid di Kabupaten Kotabaru per jenjang pendidikan tahun 2020.

Tabel 2.48.
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Kotabaru

No	JENJANG PENDIDIKAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru	2.940	2.494	2.812	2.790	2.916
1.2.	Jumlah Murid	40.289	39.551	39.239	38.253	38.668
1.3.	Rasio	1:14	1:16	1:14	1:14	1:13
2.	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Guru	1.161	992	1.129	1.181	1.149
2.2.	Jumlah Murid	15.198	15.660	15.649	15.237	15.348
2.3.	Rasio (2.3./2.2.)	1:13	1:16	1:14	1:13	1:13

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotabaru Tahun 2021

4) Ketersediaan Fasilitas Pendidikan Dasar dan Menengah

Berikut perkembangan jumlah sekolah berdasarkan jenjang Pendidikan di Kabupaten Kotabaru berdasarkan kecamatan:

Tabel 2.49.
Perkembangan Sekolah Dasar menurut Kecamatan
Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2020

No.	Kecamatan	Fasilitas Pendidikan				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kec. Hampang	40	13	13	13	13
2	Kec. Kelumpang Barat	7	7	7	7	7
3	Kec. Kelumpang Hilir	9	16	16	16	16
4	Kec. Kelumpang Hulu	17	16	16	16	16
5	Kec. Kelumpang Selatan	11	10	10	10	10
6	Kec. Kelumpang Tengah	7	11	11	12	11
7	Kec. Kelumpang Utara	5	7	7	7	7
8	Kec. Pamukan Barat	10	5	5	5	5
9	Kec. Pamukan Selatan	16	15	15	15	15
10	Kec. Pamukan Utara	11	18	18	18	18
11	Kec. Pulau Laut Barat	16	7	7	7	7
12	Kec. Pulau Laut Kepulauan	7	9	9	9	9
13	Kec. Pulau Laut Selatan	7	9	9	9	9
14	Kec. Pulau Laut Tanjung Selayar	13	10	10	11	11
15	Kec. Pulau Laut Tengah	10	11	11	11	11
16	Kec. Pulau Laut Timur	10	17	17	17	17
17	Kec. Pulau Laut Utara	15	41	41	41	41
18	Kec. Pulau Sebuku	18	7	7	7	7
19	Kec. Pulau Sembilan	5	5	5	5	5
20	Kec. Sampanahan	9	10	10	10	10
21	Kec. Sungai Durian	11	11	11	11	11
TOTAL		254	255	255	257	256

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotabaru Tahun 2021

Tabel 2.50.
Perkembangan MI menurut Kecamatan Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2020

No.	Kecamatan	Fasilitas Pendidikan				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kec. Hampang	0	0	0	0	0
2	Kec. Kelumpang Barat	0	0	0	0	0
3	Kec. Kelumpang Hilir	0	0	0	0	0
4	Kec. Kelumpang Hulu	0	0	0	0	0
5	Kec. Kelumpang Selatan	0	0	0	0	0
6	Kec. Kelumpang Tengah	0	0	0	0	0
7	Kec. Kelumpang Utara	0	0	0	0	0

No.	Kecamatan	Fasilitas Pendidikan				
		2016	2017	2018	2019	2020
8	Kec. Pamukan Barat	0	0	0	0	0
9	Kec. Pamukan Selatan	0	0	0	0	0
10	Kec. Pamukan Utara	0	0	0	0	0
11	Kec. Pulau Laut Barat	0	0	0	0	0
12	Kec. Pulau Laut Kepulauan	0	0	0	0	0
13	Kec. Pulau Laut Selatan	1	1	1	1	1
14	Kec. Pulau Laut Tanjung Selayar	0	0	0	0	0
15	Kec. Pulau Laut Tengah	0	0	0	0	0
16	Kec. Pulau Laut Timur	0	0	0	0	0
17	Kec. Pulau Laut Utara	7	7	7	7	7
18	Kec. Pulau Sebuku	1	1	1	1	1
19	Kec. Pulau Sembilan	1	1	1	1	1
20	Kec. Sampanahan	0	0	0	0	0
21	Kec. Sungai Durian	0	0	0	0	0
TOTAL		10	10	10	10	10

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotabaru Tahun 2021

Tabel 2.51.
Perkembangan SMP menurut Kecamatan Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2020

No.	Kecamatan	Fasilitas Pendidikan				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kec. Hampang	2	2	2	2	2
2	Kec. Kelumpang Barat	1	1	1	1	1
3	Kec. Kelumpang Hilir	3	3	3	3	3
4	Kec. Kelumpang Hulu	2	2	2	2	2
5	Kec. Kelumpang Selatan	3	3	3	3	3
6	Kec. Kelumpang Tengah	3	3	3	3	3
7	Kec. Kelumpang Utara	2	2	2	2	2
8	Kec. Pamukan Barat	1	1	1	1	1
9	Kec. Pamukan Selatan	4	4	4	4	4
10	Kec. Pamukan Utara	4	4	5	5	5
11	Kec. Pulau Laut Barat	2	2	2	2	2
12	Kec. Pulau Laut Kepulauan	2	2	2	2	2
13	Kec. Pulau Laut Selatan	3	3	3	3	3
14	Kec. Pulau Laut Tanjung Selayar	2	2	2	2	2
15	Kec. Pulau Laut Tengah	4	4	4	4	4
16	Kec. Pulau Laut Timur	3	3	3	3	3
17	Kec. Pulau Laut Utara	9	9	11	11	11
18	Kec. Pulau Sebuku	2	2	2	2	2
19	Kec. Pulau Sembilan	2	2	2	2	2

No.	Kecamatan	Fasilitas Pendidikan				
		2016	2017	2018	2019	2020
20	Kec. Sampanahan	2	2	2	2	2
21	Kec. Sungai Durian	3	3	3	3	3
	TOTAL	59	59	62	62	62

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotabaru Tahun 2021

Tabel 2.52.

Perkembangan Sekolah MTs menurut Kecamatan Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2020

No.	Kecamatan	Fasilitas Pendidikan				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kec. Hampang	0	0	0	0	0
2	Kec. Kelumpang Barat	0	0	0	0	0
3	Kec. Kelumpang Hilir	1	1	1	1	1
4	Kec. Kelumpang Hulu	1	1	1	1	1
5	Kec. Kelumpang Selatan	0	0	0	0	0
6	Kec. Kelumpang Tengah	0	0	0	0	0
7	Kec. Kelumpang Utara	0	0	0	0	0
8	Kec. Pamukan Barat	0	0	0	0	0
9	Kec. Pamukan Selatan	0	0	0	0	0
10	Kec. Pamukan Utara	0	0	0	0	0
11	Kec. Pulau Laut Barat	2	2	2	2	2
12	Kec. Pulau Laut Kepulauan	2	2	2	2	2
13	Kec. Pulau Laut Selatan	1	1	1	1	1
14	Kec. Pulau Laut Tanjung Selayar	1	1	1	1	1
15	Kec. Pulau Laut Tengah	0	0	0	0	0
16	Kec. Pulau Laut Timur	0	0	0	0	0
17	Kec. Pulau Laut Utara	4	4	4	4	4
18	Kec. Pulau Sebak	1	1	1	1	1
19	Kec. Pulau Sembilan	0	0	0	0	0
20	Kec. Sampanahan	2	2	2	2	2
21	Kec. Sungai Durian	0	0	0	0	0
	TOTAL	15	15	15	15	15

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotabaru Tahun 2021

Tabel 2.53.

Perkembangan SMA menurut Kecamatan Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2020

No.	Kecamatan	Fasilitas Pendidikan				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kec. Hampang	1	1	1	1	1
2	Kec. Kelumpang Barat	1	1	1	1	1
3	Kec. Kelumpang Hilir	2	2	2	2	2

No.	Kecamatan	Fasilitas Pendidikan				
		2016	2017	2018	2019	2020
4	Kec. Kelumpang Hulu	2	2	2	2	2
5	Kec. Kelumpang Selatan	1	1	1	1	1
6	Kec. Kelumpang Tengah	1	1	1	1	1
7	Kec. Kelumpang Utara	1	1	1	1	1
8	Kec. Pamukan Barat	1	1	1	1	1
9	Kec. Pamukan Selatan	1	1	1	1	2
10	Kec. Pamukan Utara	2	1	1	1	1
11	Kec. Pulau Laut Barat	1	1	1	2	2
12	Kec. Pulau Laut Kepulauan	2	2	2	2	3
13	Kec. Pulau Laut Selatan	1	1	1	1	1
14	Kec. Pulau Laut Tanjung Selayar	0	0	0	0	0
15	Kec. Pulau Laut Tengah	1	1	1	1	1
16	Kec. Pulau Laut Timur	1	1	1	1	1
17	Kec. Pulau Laut Utara	4	4	4	4	4
18	Kec. Pulau Sebuku	2	2	2	2	2
19	Kec. Pulau Sembilan	1	1	1	1	1
20	Kec. Sampanahan	1	1	1	1	1
21	Kec. Sungai Durian	0	0	0	0	0
TOTAL		27	26	26	27	29

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotabaru Tahun 2021

Tabel 2.54.
Perkembangan SMK menurut Kecamatan Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2020

No.	Kecamatan	Fasilitas Pendidikan				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pulau Laut Utara	3	3	3	3	3
2	Pulau Laut Barat	0	0	0	0	0
3	Pulau Laut Selatan	0	0	0	0	0
4	Pulau Laut Timur	0	0	0	0	0
5	Pulau Laut Tengah	0	0	0	0	0
6	Pulau Sebuku	0	0	0	0	0
7	Pulau Sembilan	0	0	0	0	0
8	Kelumpang Selatan	0	0	0	0	0
9	Kelumpang Hulu	0	0	0	0	0
10	Kelumpang Tengah	0	0	0	0	0
11	Kelumpang Hilir	1	1	1	1	1
12	Kelumpang Utara	0	0	0	0	0
13	Kelumpang Barat	0	0	0	0	0
14	Hampang	0	0	0	0	0
15	Sungai Durian	1	1	1	1	1
16	Sampanahan	0	0	0	0	0

No.	Kecamatan	Fasilitas Pendidikan				
		2016	2017	2018	2019	2020
17	Pamukan Selatan	0	0	0	0	0
18	Pamukan Utara	1	1	1	1	1
19	Pamukan Barat	0	0	0	0	0
20	Pulau Laut Kepulauan	0	0	0	0	0
21	Pulau Laut Tj Selayar	1	1	1	1	1
	TOTAL	7	7	7	7	7

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotabaru Tahun 2021

Tabel 2.55.
Perkembangan MA menurut Kecamatan Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2020

No.	Kecamatan	Fasilitas Pendidikan				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kec. Hampang	0	0	0	0	0
2	Kec. Kelumpang Barat	0	0	0	0	0
3	Kec. Kelumpang Hilir	0	0	0	0	0
4	Kec. Kelumpang Hulu	0	0	0	0	0
5	Kec. Kelumpang Selatan	0	0	0	0	0
6	Kec. Kelumpang Tengah	0	0	0	0	1
7	Kec. Kelumpang Utara	0	0	0	0	0
8	Kec. Pamukan Barat	0	0	0	0	0
9	Kec. Pamukan Selatan	0	0	0	0	0
10	Kec. Pamukan Utara	0	0	0	0	0
11	Kec. Pulau Laut Barat	0	1	1	1	1
12	Kec. Pulau Laut Kepulauan	0	1	1	1	1
13	Kec. Pulau Laut Selatan	0	0	0	0	1
14	Kec. Pulau Laut Tanjung Selayar	0	0	0	0	0
15	Kec. Pulau Laut Tengah	0	0	0	0	0
16	Kec. Pulau Laut Timur	0	0	0	0	0
17	Kec. Pulau Laut Utara	2	2	2	2	2
18	Kec. Pulau Sebuk	0	0	0	0	1
19	Kec. Pulau Sembilan	0	0	0	0	0
20	Kec. Sampanahan	0	0	0	0	0
21	Kec. Sungai Durian	0	0	0	0	0
	TOTAL	2	4	4	4	7

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotabaru Tahun 2021

5) Pendidikan Usia Dini

Berikut perkembangan jumlah tempat Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kotabaru berdasarkan kecamatan:

Tabel 2.56.
Jumlah Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kotabaru, 2019/2020

Kecamatan	Taman Kanak-kanak (TK)		
	Negeri	Swasta	Jumlah
	2019/2020	2019/2020	2019/2020
Pulau Sembilan	1	7	8
Pulau Laut Barat	1	22	23
Pulau Laut Tanjung Selayar	1	2	3
Pulau Laut Selatan	1	11	12
Pulau Laut Kepulauan	1	11	12
Pulau Laut Timur	1	11	12
Pulau Sebuku	1	7	8
Pulau Laut Utara	1	57	58
Pulau Laut Tengah	1	8	9
Pulau Laut Sigam			
Kelumpang Selatan	1	9	10
Kelumpang Hilir	1	12	13
Kelumpang Hulu	1	8	9
Hampang	1	7	8
Sungai Durian	1	8	9
Kelumpang Tengah	1	9	10
Kelumpang Barat	1	5	6
Kelumpang Utara	1	3	4
Pamukan Selatan	1	7	8
Sampanahan	1	4	5
Pamukan Utara	1	6	7
Pamukan Barat	1	2	3
Kabupaten Kotabaru	21	216	237

Sumber : BPS Kotabaru

6) Angka Putus Sekolah Dasar dan Menengah

Berikut perkembangan angka putus sekolah berdasarkan jenjang pendidikan di Kabupaten Kotabaru berdasarkan Kecamatan:

Tabel 2.57.
Perkembangan Angka Putus Sekolah SD/MI menurut Kecamatan
Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2020

No.	Kecamatan	Jumlah Putus Sekolah				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kec. Hampang	9	1	2	0	0
2	Kec. Kelumpang Barat	0	0	1	0	1
3	Kec. Kelumpang Hilir	0	0	0	0	0
4	Kec. Kelumpang Hulu	5	1	1	1	0
5	Kec. Kelumpang Selatan	0	0	0	0	0
6	Kec. Kelumpang Tengah	0	0	0	0	0
7	Kec. Kelumpang Utara	0	0	0	0	0
8	Kec. Pamukan Barat	0	0	0	0	0
9	Kec. Pamukan Selatan	0	0	1	0	1
10	Kec. Pamukan Utara	0	0	2	0	0
11	Kec. Pulau Laut Barat	1	0	1	0	1
12	Kec. Pulau Laut Kepulauan	2	2	3	7	1
13	Kec. Pulau Laut Selatan	1	0	0	3	8
14	Kec. Pulau Laut Tanjung Selayar	0	4	0	2	1
15	Kec. Pulau Laut Tengah	0	0	1	0	0
16	Kec. Pulau Laut Timur	0	1	0	1	0
17	Kec. Pulau Laut Utara	1	0	0	1	5
18	Kec. Pulau Sebuku	1	0	0	0	0
19	Kec. Pulau Sembilan	1	0	0	0	2
20	Kec. Sampanahan	0	1	0	3	0
21	Kec. Sungai Durian	1	0	1	0	0
	TOTAL	22	10	13	18	20

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotabaru Tahun 2021

Tabel 2.58.
Perkembangan Angka Putus Sekolah SMP Sederajat menurut Kecamatan Kabupaten
Kotabaru Tahun 2016-2020

No.	Kecamatan	Jumlah Putus Sekolah				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kec. Hampang	0	0	0	1	2
2	Kec. Kelumpang Barat	0	0	0	0	0
3	Kec. Kelumpang Hilir	0	2	0	0	0
4	Kec. Kelumpang Hulu	0	0	0	1	0
5	Kec. Kelumpang Selatan	0	0	1	0	0
6	Kec. Kelumpang Tengah	0	0	1	0	1
7	Kec. Kelumpang Utara	0	0	1	1	0
8	Kec. Pamukan Barat	1	1	0	0	0
9	Kec. Pamukan Selatan	0	0	2	0	0

No.	Kecamatan	Jumlah Putus Sekolah				
		2016	2017	2018	2019	2020
10	Kec. Pamukan Utara	0	0	0	0	0
11	Kec. Pulau Laut Barat	0	0	0	1	1
12	Kec. Pulau Laut Kepulauan	2	0	0	0	0
13	Kec. Pulau Laut Selatan	0	0	0	0	1
14	Kec. Pulau Laut Tanjung Selayar	3	0	0	0	6
15	Kec. Pulau Laut Tengah	0	0	0	0	0
16	Kec. Pulau Laut Timur	0	0	0	0	0
17	Kec. Pulau Laut Utara	0	0	0	0	0
18	Kec. Pulau Sebuku	0	0	0	1	0
19	Kec. Pulau Sembilan	0	0	0	1	2
20	Kec. Sampanahan	0	0	0	0	0
21	Kec. Sungai Durian	0	0	1	0	0
	TOTAL	6	3	6	6	13

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotabaru Tahun 2021

Tabel 2.59.
Perkembangan Angka Putus Sekolah SMA Sederajat menurut Kecamatan Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2020

No.	Kecamatan	Jumlah Putus Sekolah				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kec. Hampang	0	0	0	0	0
2	Kec. Kelumpang Barat	0	0	0	0	0
3	Kec. Kelumpang Hilir	0	0	0	0	0
4	Kec. Kelumpang Hulu	0	0	0	0	0
5	Kec. Kelumpang Selatan	0	0	0	0	0
6	Kec. Kelumpang Tengah	0	0	0	0	0
7	Kec. Kelumpang Utara	0	0	0	0	0
8	Kec. Pamukan Barat	0	0	1	0	0
9	Kec. Pamukan Selatan	0	0	0	0	0
10	Kec. Pamukan Utara	0	0	0	0	0
11	Kec. Pulau Laut Barat	0	0	1	0	1
12	Kec. Pulau Laut Kepulauan	0	0	2	0	0
13	Kec. Pulau Laut Selatan	0	0	0	0	0
14	Kec. Pulau Laut Tanjung Selayar	0	0	0	0	0
15	Kec. Pulau Laut Tengah	3	0	0	0	0
16	Kec. Pulau Laut Timur	0	1	0	0	0
17	Kec. Pulau Laut Utara	0	0	1	0	0
18	Kec. Pulau Sebuku	0	0	0	0	0

No.	Kecamatan	Jumlah Putus Sekolah				
		2016	2017	2018	2019	2020
19	Kec. Pulau Sembilan	0	0	0	0	0
20	Kec. Sampanahan	0	0	0	0	0
21	Kec. Sungai Durian	0	0	0	0	0
	TOTAL	3	1	5	0	1

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotabaru Tahun 2021

7) Angka Kelulusan Sekolah Dasar dan Menengah

Berikut perkembangan angka kelulusan berdasarkan jenjang pendidikan di Kabupaten Kotabaru berdasarkan kecamatan:

Tabel 2.60.
Perkembangan Angka Kelulusan SD sederajat menurut Kecamatan
Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2020

No.	Kecamatan	Jumlah Kelulusan				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kec. Hampang	186	186	214	247	247
2	Kec. Kelumpang Barat	142	122	124	168	122
3	Kec. Kelumpang Hilir	452	476	473	640	462
4	Kec. Kelumpang Hulu	298	298	273	264	264
5	Kec. Kelumpang Selatan	169	177	175	166	166
6	Kec. Kelumpang Tengah	248	248	239	240	240
7	Kec. Kelumpang Utara	144	104	116	105	105
8	Kec. Pamukan Barat	170	197	170	181	181
9	Kec. Pamukan Selatan	299	249	267	262	262
10	Kec. Pamukan Utara	286	286	289	255	255
11	Kec. Pulau Laut Barat	265	275	186	169	169
12	Kec. Pulau Laut Kepulauan	325	370	339	373	313
13	Kec. Pulau Laut Selatan	234	214	196	165	195
14	Kec. Pulau Laut Tanjung Selayar	259	259	252	246	246
15	Kec. Pulau Laut Tengah	215	215	166	266	216
16	Kec. Pulau Laut Timur	278	258	250	227	227
17	Kec. Pulau Laut Utara	1464	1359	1391	1554	1591
18	Kec. Pulau Sebuk	160	151	118	171	121
19	Kec. Pulau Sembilan	159	159	134	161	141
20	Kec. Sampanahan	254	254	212	257	207
21	Kec. Sungai Durian	271	272	249	250	250
	TOTAL	6.278	6.129	5.833	6.367	5.980

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotabaru Tahun 2021

Tabel 2.61.
Perkembangan Angka Kelulusan SMP Sederajat menurut Kecamatan Kabupaten
Kotabaru Tahun 2016-2020

No.	Kecamatan	Jumlah Kelulusan				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kec. Hampang	44	84	121	195	92
2	Kec. Kelumpang Barat	49	49	173	177	87
3	Kec. Kelumpang Hilir	520	320	418	324	388
4	Kec. Kelumpang Hulu	171	171	190	166	213
5	Kec. Kelumpang Selatan	152	152	154	161	161
6	Kec. Kelumpang Tengah	153	153	156	181	153
7	Kec. Kelumpang Utara	209	189	178	174	89
8	Kec. Pamukan Barat	112	112	194	187	155
9	Kec. Pamukan Selatan	155	155	194	252	210
10	Kec. Pamukan Utara	226	226	253	236	248
11	Kec. Pulau Laut Barat	193	193	198	193	183
12	Kec. Pulau Laut Kepulauan	164	115	127	174	258
13	Kec. Pulau Laut Selatan	124	124	173	183	212
14	Kec. Pulau Laut Tanjung Selayar	163	113	129	184	160
15	Kec. Pulau Laut Tengah	179	168	170	194	178
16	Kec. Pulau Laut Timur	295	205	187	190	169
17	Kec. Pulau Laut Utara	1246	1532	1089	1290	1490
18	Kec. Pulau Sebuku	108	108	207	197	111
19	Kec. Pulau Sembilan	98	68	206	112	114
20	Kec. Sampanahan	112	112	198	147	185
21	Kec. Sungai Durian	140	140	232	193	109
TOTAL		4.613	4.489	4.947	5.110	4.965

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotabaru Tahun 2021

Tabel 2.62.
Perkembangan Angka Kelulusan SMA Sederajat menurut Kecamatan Kabupaten
Kotabaru Tahun 2016-2020

No.	Kecamatan	Jumlah Kelulusan				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kec. Hampang	20	30	-	-	28
2	Kec. Kelumpang Barat	33	53	-	-	56
3	Kec. Kelumpang Hilir	240	314	-	-	260
4	Kec. Kelumpang Hulu	87	87	-	-	116
5	Kec. Kelumpang Selatan	94	54	-	-	72
6	Kec. Kelumpang Tengah	51	51	-	-	55
7	Kec. Kelumpang Utara	44	44	-	-	71
8	Kec. Pamukan Barat	82	82	-	-	103
9	Kec. Pamukan Selatan	70	81	-	-	57
10	Kec. Pamukan Utara	127	120	-	-	151

No.	Kecamatan	Jumlah Kelulusan				
		2016	2017	2018	2019	2020
11	Kec. Pulau Laut Barat	134	134	-	-	180
12	Kec. Pulau Laut Kepulauan	90	90	-	-	135
13	Kec. Pulau Laut Selatan	122	122	-	-	117
14	Kec. Pulau Laut Tanjung Selayar	61	61	-	-	62
15	Kec. Pulau Laut Tengah	83	63	-	-	72
16	Kec. Pulau Laut Timur	92	72	-	-	114
17	Kec. Pulau Laut Utara	1.056	1.056	-	-	1.416
18	Kec. Pulau Sebuku	64	64	-	-	66
19	Kec. Pulau Sembilan	46	76	-	-	41
20	Kec. Sampanahan	81	81	-	-	114
21	Kec. Sungai Durian	66	66	-	-	92
	TOTAL	2.743	2.801	-	-	3.378

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotabaru Tahun 2021

8) Angka Melanjutkan

Berikut perkembangan angka melanjutkan berdasarkan jenjang pendidikan di Kabupaten Kotabaru berdasarkan Kecamatan:

Tabel 2.63.
Perkembangan Angka Melanjutkan SD Sederajat ke SMP Sederajat menurut Kecamatan Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2020

No.	Kecamatan	Jumlah Siswa Melanjutkan				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kec. Hampang	116	110	135	159	155
2	Kec. Kelumpang Barat	82	89	82	78	77
3	Kec. Kelumpang Hilir	433	406	372	359	353
4	Kec. Kelumpang Hulu	225	237	219	214	215
5	Kec. Kelumpang Selatan	173	163	172	147	147
6	Kec. Kelumpang Tengah	120	143	152	172	173
7	Kec. Kelumpang Utara	76	75	97	82	81
8	Kec. Pamukan Barat	151	147	152	145	162
9	Kec. Pamukan Selatan	233	229	190	198	196
10	Kec. Pamukan Utara	256	253	251	219	217
11	Kec. Pulau Laut Barat	201	194	207	200	224
12	Kec. Pulau Laut Kepulauan	305	302	289	270	274
13	Kec. Pulau Laut Selatan	239	218	238	204	185
14	Kec. Pulau Laut Tanjung Selayar	217	193	209	180	166
15	Kec. Pulau Laut Tengah	201	189	199	168	188

No.	Kecamatan	Jumlah Siswa Melanjutkan				
		2016	2017	2018	2019	2020
16	Kec. Pulau Laut Timur	223	196	196	185	184
17	Kec. Pulau Laut Utara	1.491	1.527	1.480	1.477	1.482
18	Kec. Pulau Sebuku	117	112	94	87	90
19	Kec. Pulau Sembilan	105	120	144	84	91
20	Kec. Sampanahan	219	216	219	195	216
21	Kec. Sungai Durian	180	130	158	139	139
	TOTAL	5.363	5.249	5.255	4.962	5.015

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotabaru Tahun 2021

Tabel 2.64.
Perkembangan Angka Melanjutkan SMP Sederajat ke SMA Sederajat menurut Kecamatan
Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2020

No.	Kecamatan	Jumlah Siswa Melanjutkan				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kec. Hampang	40	42	50	50	25
2	Kec. Kelumpang Barat	67	84	79	82	85
3	Kec. Kelumpang Hilir	295	303	301	301	354
4	Kec. Kelumpang Hulu	123	111	135	135	131
5	Kec. Kelumpang Selatan	72	67	76	76	90
6	Kec. Kelumpang Tengah	38	25	67	68	61
7	Kec. Kelumpang Utara	78	63	60	60	60
8	Kec. Pamukan Barat	113	137	147	149	166
9	Kec. Pamukan Selatan	69	78	96	97	88
10	Kec. Pamukan Utara	200	154	156	157	192
11	Kec. Pulau Laut Barat	205	172	281	281	197
12	Kec. Pulau Laut Kepulauan	151	154	186	186	158
13	Kec. Pulau Laut Selatan	140	128	160	158	164
14	Kec. Pulau Laut Tanjung Selayar	76	93	60	60	86
15	Kec. Pulau Laut Tengah	76	80	90	87	79
16	Kec. Pulau Laut Timur	115	86	100	99	114
17	Kec. Pulau Laut Utara	1667	1640	1742	1728	1663
18	Kec. Pulau Sebuku	77	58	69	69	91
19	Kec. Pulau Sembilan	53	46	71	71	70
20	Kec. Sampanahan	126	129	144	144	140
21	Kec. Sungai Durian	122	101	100	100	82
	TOTAL	3.903	3.751	4.170	4.158	4.096

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotabaru Tahun 2021

9) Kualifikasi Guru

Berikut perkembangan jumlah guru dengan kualifikasi S1/D-IV sederajat di Kabupaten Kotabaru.

Tabel 2.65.
Perkembangan Jumlah Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2020

No.	Kualifikasi	Jumlah Guru				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Guru Kualifikasi S1/D-IV	3.932	3.695	4.030	4.116	4.331
2	Jumlah Seluruh Guru SD/ sederajat, SMP Sederajat dan SMA Sederajat	4.908	4.256	4.720	4.750	4.893
	Persentase	80,11	86,82	85,38	86,65	88,51

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotabaru Tahun 2021

2. Kesehatan

Beberapa indikator untuk menggambarkan kinerja pembangunan bidang kesehatan pada umumnya meliputi 5 (lima) kelompok indikator besar sebagai berikut :

a. Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Usia harapan hidup pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Usia harapan hidup saat lahir adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.

Tabel 2.66.
Usia Harapan Hidup Kabupaten Kotabaru

Usia Harapan Hidup	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Kotabaru	68,61	68,72	68,89	69,10	69,21

Sumber : BPS Kalimantan Selatan

Tabel di atas menunjukkan perkembangan Usia Harapan Hidup masyarakat Kabupaten Kotabaru. Berdasarkan angka-angka tersebut terjadi peningkatan yang relatif lambat yakni 68,61 tahun pada tahun 2016 menjadi 69,21 tahun pada tahun 2020. Peningkatan selama 5 tahun hanya sebesar 0,6 tahun atau sekitar 7 bulan dan sekitar 44 hari setiap tahunnya.

b. Angka Kematian Ibu (AKI)

Perkembangan Kematian Ibu di Kabupaten Kotabaru cenderung fluktuatif, dengan gambaran di beberapa Kecamatan tingkat kategori keterjadian yang terbesar dan Kecamatan dengan kategori tidak pernah ada kejadian. Perkembangan Angka Kematian Ibu selama periode tahun 2016-2020 mengalami kecenderungan menurun dimana pada tahun 2015 adalah 246,73 per 100.000 menjadi 141,21 per 100.000. Lebih lanjut perkembangan AKI di Kabupaten Kotabaru selama kurun waktu tahun 2016-2020 sebagai mana tabel berikut ini :

Tabel 2.67.
Angka Kematian Ibu di Kabupaten Kotabaru

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Kematian Ibu	246,73	331,64	139,25	149,37	141,21

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru Tahun 2021

c. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Faktor yang mendukung angka kelangsungan hidup bayi adalah umur ibu yang tidak boleh muda untuk melahirkan, jarak kelahiran tidak boleh terlalu dekat, kurang bumil KEK (kurang energi kronis) baik ibu maupun bayinya ada terdeteksi penyakit yang tidak diketahui.

Tabel 2.68.
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kabupaten Kotabaru

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun	32	45	73	13	36
2	Jumlah Kelahiran Hidup	5.222	5.269	5.126	5.027	4957
3	Angka Kematian Bayi	13,85	15,41	11,74	12,2	7.26

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru Tahun 2021

d. Angka Kesakitan

Definisi angka kesakitan menurut BPS adalah Angka Kesakitan/ Morbiditas/Persentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan. Berikut perkembangan angka kesakitan di Kabupaten Kotabaru.

Tabel 2.69.
Perkembangan Penyakit Teratas di Puskesmas dan Rumah Sakit
Di Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Kode/ Jenis Penyakit Teratas				
1	2016	1. ISPA ytt	2. Hipertensi Primer	3. Gastritis & Duodenitis	4. Nasapharangitis Acuta	5. Alergi
2	2017	1. ISPA ytt	2. Penyakit Lainnya	3. Hipertensi Primer	4. Alergi	5. Influenza
3	2018	1. ISPA ytt	2. Hipertensi Primer	3. Nasapharangitis Acuta	4. Artritis Lainnya	5. Gastritis & Duodenitis
4	2019	1. Penyakit Lainnya	2. Artritis Lainnya	3. Alergi	4. Pharangistis	5. Diare & GE
5	2020	1. ISPA ytt	2. Hipertensi Primer	3. Gastritis & Duodenitis	4. Alergi	5. Artritis Lainnya

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru Tahun 2021

Tabel 2.70.
Perkembangan Kejadian Penyakit Teregerter
Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2020

No.	Jenis Penyakit	2016	2017	2018	2019	2020
PTM						
1.	Hipertensi	10.508	10.910	19.300	17.540	4.558
2.	Jantung Cor	34	79	165	235	55
3.	Stroke	249	149	161	265	73
4.	Asma	497	1109	1397	1787	514
5.	DM	2463	2653	5765	5433	1649
6.	Exident	290	364	475	451	154
PML						
7.	HIV	3	9	2	48	15
8.	AIDS	1	4	2	48	15
9.	Kusta	13	12	17	9	4
10.	Diare	7.062	6.061	5.249	6.173	2.424
11.	ISPA	22.273	2.778	17.093	11.640	39
PM Karena Binatang						
12.	DBD	270	44	126	204	99
13.	Malaria	174	135	65	158	46
14.	Vilaria	0	0	0	0	0
15.	Rabies	12	77	40	38	31

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru Tahun 2021

e. Status Gizi Masyarakat

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar WHO. WHO mengelompokkan wilayah yaitu Kecamatan untuk Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota untuk Provinsi berdasarkan prevalensi gizi kurang ke dalam 4 kelompok dari seluruh jumlah balita, yaitu :

- a. rendah = di bawah 10 %
- b. sedang = 10-19 %
- c. tinggi = 20-29 %
- d. sangat tinggi = 30 %

Tabel 2.71.
Jumlah Balita dan Persentase Balita Gizi Buruk
Kabupaten Kotabaru

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Balita (Jiwa)	29.922	36.706	36.472	28.110	27.984
2	Jumlah Balita Gizi Buruk	14	31	26	22	16
3	Persentase BGB (%)	0,05	0,003	0,07	0,08	0,06

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru Tahun 2021

Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Desa dan Puskesmas Keliling merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan.

f. Upaya Pembangunan Pelayanan Bidang Kesehatan

- 1) Rasio Sarana Kesehatan dengan Satuan Penduduk

Tabel 2.72.
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit, Puskesmas, poliklinik, dan Pustu

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Rumah Sakit	1	1	1	1	1
2	Jumlah Puskesmas	28	28	28	28	28
3	Jumlah Poliklinik	17	18	19	19	19
4	Jumlah Puskesmas Pembantu	41	41	41	41	41

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
5	Jumlah Penduduk (Proyeksi BPS)	325.827	331.326	336.719	342.217	347.399
6	Rasio Rumah Sakit persatuan penduduk	0,307	0,302	0,297	0,292	0,288
7	Rasio Puskesmas persatuan penduduk	8,59	8,45	8,32	8,18	8,06
8	Rasio Poliklinik persatuan penduduk	5,22	5,43	5,64	5,55	5,47
9	Rasio Pustu persatuan penduduk	12,58	12,37	12,18	11,98	11,80

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru Tahun 2021

Indikator rasio dokter perjumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Jumlah dokter dan dokter spesialis di Indonesia belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk Indonesia. Selain itu distribusi dokter dan dokter spesialis tidak merata serta kualitasnya masih perlu ditingkatkan.

2) Rasio Tenaga Kesehatan dengan Penduduk

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, rasio tenaga kesehatan juga meningkat. Rasio tenaga kesehatan menunjukkan tingkat ketersediaan tenaga kesehatan (dokter, bidan, dan perawat) yang melayani kelompok masyarakat. Berikut perkembangan jumlah dan rasio dokter dan tenaga medis di Kabupaten Kotabaru.

Tabel 2.73.
Jumlah dan Rasio Dokter serta Tenaga Medis

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Dokter	43	41	41	47	48
2	Jumlah Penduduk	325.827	331.326	336.719	342.217	347.399
3	Rasio Dokter per satuan penduduk	13,20	12,37	12,18	13,73	13,82
4	Jumlah Tenaga Medis	68	70	68	73	79
5	Jumlah Penduduk	325.827	331.326	336.719	342.217	347.399
6	Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	20,87	21,13	20,19	21,33	22,74

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru Tahun 2021

3) Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Berikut perkembangan rasio balita dengan posyandu di Kabupaten Kotabaru.

Tabel 2.74.
Perkembangan Rasio Balita dengan Posyandu
Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Jumlah				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Balita	29.922	36.706	36.472	28.110	27.984
2	Jumlah Posyandu	276	276	276	276	294
	Rasio	9,22	7,52	7,57	9,82	10,51

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru Tahun 2021

4) Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Berikut perkembangan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaten Kotabaru.

Tabel 2.75.
Perkembangan Kasus Komplikasi yang Ditangani
Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Jumlah				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kasus Komplikasi di Tangani	741	671	886	795	615
2	Jumlah Kasus Komplikasi	1.659	1.645	1.630	1.618	615
	Rasio	44,67	40,78	54,36	49,13	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru Tahun 2021

5) Cakupan Persalinan Ditolong Nakes

Berikut perkembangan cakupan persalinan ditolong nakes di Kabupaten Kotabaru.

Tabel 2.76.
Perkembangan Persalinan di Tolong Nakes
Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Jumlah				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Ibu Bersalin yang di Tolong Nakes	4.659	5.044	4.952	4.874	4.830
2	Jumlah Jumlah Ibu Bersalin	7.916	5.285	5.138	5.062	5.008
	Cakupan Pertolongan	58,86	95,44	96,38	96,29	96,4

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru Tahun 2021

6) Cakupan Desa/Kelurahan UCI

Berikut perkembangan cakupan Desa/Kelurahan UCI di Kabupaten Kotabaru.

Tabel 2.77.
Perkembangan Cakupan UCI
Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Jumlah				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Desa/Kelurahan UCI	174	175	180	192	176
2	Jumlah Desa/Kelurahan	202	202	202	202	202
	Cakupan Desa/Kelurahan UCI	86.14	86.63	89.11	95.05	87.13

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru Tahun 2021

7) Cakupan Penemuan TB

Berikut perkembangan cakupan Penemuan TB di Kabupaten Kotabaru.

Tabel 2.78.
Perkembangan Cakupan Penemuan dan Penanganan TB
Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Jumlah				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kasus TB baru ditemukan	370	232	237	238	338
2	Jumlah perkitaan TB	386	252	254	318	348
	Cakupan Penemuan TB	95,85	92,06	93,31	74,84	97,12

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru Tahun 2021

8) Cakupan Pelayanan Rujukan Penduduk Miskin

Berikut perkembangan cakupan pelayanan rujukan penduduk miskin di Kabupaten Kotabaru.

Tabel 2.79.
Perkembangan Cakupan Rujukan Kesehatan Penduduk Miskin
Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Jumlah				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pasien Penduduk Miskin dirujuk di Sarkes Strata I	3.999	4.879	1.103	1.020	1.036
2	Jumlah Seluruh Penduduk Miskin	14.780	14.440	15.164	15.287	14.600

No.	Uraian	Jumlah				
		2016	2017	2018	2019	2020
3	Cakupan Pelayanan Rujukan	27,06	33,79	7,27	6,67	7,10

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru Tahun 2021

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Jalan

Jalan merupakan salah satu infrastruktur yang mendasar dalam segala aktivitas pemenuhan kebutuhan manusia. Pemerintah Kabupaten Kotabaru berupaya penuh dalam pelaksanaan pengembangan jaringan jalan sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat segera terlaksana. Total Panjang Jalan Kabupaten di Kabupaten Kotabaru 1.205,116 km pada tahun 2018, jumlah ini menurun dari tahun 2016 yang sepanjang 1.372,595 km, hal ini terjadi karena adanya perubahan status jalan, kondisi jalan di Kabupaten Kotabaru tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.80.
Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Kabupaten Kotabaru

No	Kondisi Jalan (km)	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jalan Baik	186,511	297,273	232,922	194,785	236,408
2	Jalan Sedang	253,037	190,903	54,415	85,566	161,229
3	Jalan Rusak Sedang	295,773	323,045	318,207	284,106	327,887
4	Jalan Rusak Berat	637,274	561,374	600,029	641,116	480,049
	Jumlah	1.372,595	1.372,595	1.205,573	1.205,573	1.205,573

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021

Kinerja pengelenggaraan jalan di Kabupaten Kotabaru sudah cukup baik dengan kondisi jalan dengan rusak berat yang mencapai 39,86 persen pada tahun 2020, angka ini sudah membaik dari tahun 2019 sebesar 53,18 persen. Sementara jalan dengan kondisi baik sebesar 19,61 persen pada tahun 2020, angka ini meningkat dari tahun 2016 yang hanya 13,59 persen, namun jika dilihat dari tahun ke tahun kondisi ini mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2017 kondisi jalan dengan kondisi baik mencapai 21,66 persen. Tabel berikut ini

menjelaskan perkembangan kinerja pengelolaan jalan di Kabupaten Kotabaru tahun 2016-2020 :

Tabel 2.81.
Persentase kondisi Jalan di Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2020

No	Kondisi Jalan (km)	Persentase Kondisi Jalan (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jalan Baik	13,59	21,66	19,32	16,16	19,61
2	Jalan Sedang	18,43	13,91	4,51	7,10	13,37
3	Jalan Rusak Sedang	21,55	23,54	26,39	23,57	27,19
4	Jalan Rusak Berat	46,43	40,90	49,77	53,18	39,86
	Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021

Berdasarkan tipe permukaan jalan di Kabupaten Kotabaru masih didominasi dengan permukaan LPB, pada tahun 2020 jalan dengan permukaan LPB mencapai 62,66 persen, kemudian permukaan Aspal 28,39 persen. Perkembangan permukaan selama kurun waktu tahun 2016-2020 menunjukkan peningkatan permukaan jalan dari tanah menjadi LPB ataupun Aspal. Lebih lanjut perkembangan permukaan jalan di Kabupaten Kotabaru dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.82.
Rekapitulasi Tipe Permukaan Jalan Kabupaten Kotabaru

Tipe Permukaan	Tahun									
	2016		2017		2018		2019		2020	
	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%
Aspal	439,548	32,02	597,280	43,51	376,333	31,22	361,811	30,01	342,261	32,15
Beton (Rigid)	295,773	21,55	23,430	1,71	37,713	3,13	37,738	3,13	56,012	4,25
LPB (Kerikil)	548,81	39,98	746,805	54,41	358,484	29,74	364,598	30,24	755,469	37,30
Tanah	88,459	6,44	5,075	0,37	433,043	35,92	441,426	36,62	51,831	26,30
Jumlah	1372,590	100	1372,590	100	1205,573	100	1205,573	100	1205,573	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021

b. Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi yang langsung berfungsi

sebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuartier dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuartier serta bangunan pelengkap.

Pola P3A dalam melaksanakan peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan pada 39 Daerah Pengairan (DP), dan 39 DP melaksanakan semua kegiatan tersebut. Pekerjaan yang dilakukan untuk pembersihan saluran air irigasi.

Tabel 2.83.
Jenis Bangunan Jaringan Irigasi dan Bangunan Air

No	Jenis Bangunan Pengairan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Saluran Pembawa Primer (m)	142.920	142.920	142.920	142.920	142.920
2	Saluran Pembawa Sekunder (m)	212.945	212.945	212.945	212.945	212.945
3	Bendung (unit)	14	18	18	21	22
4	Pintu Air (unit)	241	245	245	252	264
5	Jembatan Penyeberangan (unit)	161	161	161	161	161
6	Tanggul (m)	26.225	26.225	26.225	26.225	26.225

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021

c. Penduduk Berakses Air Minum Layak

Air minum adalah salah satu kebutuhan vital bagi masyarakat. Proporsi jumlah rumah tangga yang memperoleh akses air minum dari PDAM Kabupaten Kotabaru disajikan pada tabel.

Tabel 2.84.
Proporsi Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum dari PDAM Kabupaten Kotabaru

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pelanggan yang mendapatkan akses air PDAM	9.625	12.930	15.936	18.065	18.590
2	Non PDAM/sumber lainnya	-	-	-	33.943	38.727
3	Jumlah Rumah Tangga	83.160	84.955	86.750	87.278	95.890
4	Persentase Rumah Tangga berakses air bersih	11,14	14,93	18,36	59,59	59,77

Sumber : Dinas PUPR, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rumah tangga yang akses terhadap air minum layak di Kabupaten kotabaru baru mencapai 59,77 persen. Air minum layak ini bersumber dari PDAM dan non PDAM seperti sumber lainnya seperti air terlindungan, sumber mata air, penampungan air hujan dan kemasn. Hal ini menunjukkan bahwa layanan ini baru didominasi oleh wilayah perkotaan, sementara wilayah perdesaan masih memerlukan perhatian untuk penyediaannya.

d. Rumah Tangga Bersanitasi Layak

Rumah tangga yang bersanitasi layak di Kabupaten Kotabaru sudah mencapai 73,73 persen. Angka ini meningkat dari tahun 2016 yang hanya 63,42 persen. Cakupan rumah tangga akses sanitasi ini sejalan dengan perkembangan rumah tangga yang semakin sadar akan pentingnya sanitasi dalam penyediaan perumahan dan permukiman yang layak. Kondisi rumah tangga akses sanitasi layak di Kabupaten Kotabaru dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.85.
Rumah Tangga ber Sanitasi Tahun 2016-2020 Kabupaten Kotabaru

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah RT Bersanitasi	51.360	53.876	56.392	58.908	63.782
2	Jumlah Seluruh RT	83.160	84.955	86.750	87.278	95.890
3	Rumah tangga bersanitasi (%)	61,76	63,42	65.01	64,49	66,52

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021

e. Penataan Ruang

Dari aspek penataan ruang telah terbangun ruang terbuka hijau yang didominasi oleh ruang terbuka hijau publik. Luasan ruang terbuka hijau di Kabupaten Kotabaru tetap selama periode tahun 2016 - 2020 sebesar 309,52 Ha.

Tabel 2.86.
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas RTH	309,52	309,52	309,52	309,52	309,52
2	Luas Wilayah Ber HPL/HGB	622,72	622,72	622,72	622,72	622,72

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Rasio RTH	49,70	49,70	49,70	49,70	49,70

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021

Pada sisi lain luas bangunan ber IMB masih sudah mencapai 100 persen, pada tahun 2020. Sesuai dengan UU Cipta Kerja, IMB berubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.87.
Rasio Bangunan ber-IMB (PBG) per Satuan Bangunan Kabupaten Kotabaru

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020*
1.	Jumlah Bangunan ber-IMB	229	341	348	264	207
2.	Jumlah Bangunan	391	410	400	300	207
3.	Rasio bangunan ber-IMB (1:2)	0,58	0,83	0,87	0,88	1,00

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru Tahun 2019, * Dinas PUPR, 2021

Sementara dari sisi ketaatan terhadap RTRW, hingga saat ini masih dalam koridor kebijakan yang ditetapkan semula pada saat RTRW ditetapkan. Jikapun terjadi ketidaktaatan hanya terjadi pada pola dan struktur ruang yang sama, yang hanya memerlukan beberapa penyesuaian dalam implementasi di lapangannya, kondisi ini dapat dilihat pada matrik berikut :

Tabel 2.88.
Ketaatan terhadap RTRW

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi RTRW	921.324,95 Ha	921.324,95 Ha	921.324,95 Ha	921.324,95 Ha	921.324,95 Ha
2	Rencana Peruntukan	947.883,69 Ha	947.883,69 Ha	947.883,69 Ha	947.883,69 Ha	947.883,69 Ha
3	Ketaatan terhadap RTRW (%)	97,20 %	97,20 %	97,20 %	97,20 %	97,20 %

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Capaian pembangunan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Kotabaru menunjukkan perkembangan yang membaik seiring dengan perkembangan pembangunan perumahan dan permukiman. Rumah tidak layak

huni di kabupaten Kotabaru pada tahun 2020 sebesar 5,21 persen, angka ini lebih baik dari posisi tahun 2016 yang sebesar 12,42 persen. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.89.
Aspek Pelayanan Umum dalam Urusan Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Rumah di Kotabaru	59.246	60.036	60.421	60.839	61.447
2	Total Jumlah rumah layak huni (n)	51.886	55.818	56.621	57.222	58.243
3	Jumlah Rumah Layak Huni (n-1)	50.688	55.028	55.818	56.621	57.222
4	Total Jumlah Pembangunan Rumah (n)	1198	790	803	601	773
5	Rehab (Pembangunan dari Pemerintah)	400	329	315	273	213
6	Pembangunan (Dari Pengembang Perumahan MBR) (unit)	119	64	70	50	60
7	Pengadaan lainnya	679	397	418	278	500
8	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)	87,58	92,97	93,71	94,05	94,79
9	Rumah Tidak Layak Huni (%)	12,42	7,03	6,29	5,95	5,21

Sumber : Dinas Perkim Kotabaru, 2021

Dari tabel diatas tergambar bahwa kondisi rumah layak huni cenderung meningkat selama periode tahun 2016-2020 yakni 58.243 unit (94,79 persen) merupakan rumah layak huni dari 61.447 rumah di Kabupaten Kotabaru, jumlah ini meningkat daripada tahun 2019 yaitu 57.222 unit (94,05 persen) dari 60.839 rumah di Kabupaten Kotabaru, jika dilihat dari tahun ke tahun memang selalu terjadi peningkatan rumah layak huni di Kabupaten Kotabaru.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah akan ditangani oleh Satpol PP dan Linmas. Jumlah Satpol PP di Kabupaten Kotabaru pada tahun 2020 hanya sebanyak 102 personil, jumlah ini dua kali lipat dari tahun 2016 yang sebanyak 51 personil. Demikian juga untuk tenaga Linmas tidak mengalami perubahan selama tahun 2016-2020 yakni sebanyak 1.220 personil. Lebih lanjut perkembangan personil Satpol PP dan Linmas di Kabupaten Kotabaru sebagai mana tabel berikut ini :

Tabel 2.90.
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Polisi Pamong Praja	51	86	102	102	102
2.	Jumlah Linmas	1220	1220	1220	1220	1220
3.	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	202	202	205	205	205
4.	Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.	Cakupan patroli petugas Satpol PP	7	7	7	7	
6.	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kotabaru	-	-	-	-	7
7.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kotabaru	8	11	5	5	6
8.	Tingkat waktu tanggap Jumlah ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran	9	8	5	5	8

Sumber : Satpol PP dan Damkar, 2021

6. Sosial

PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Istilah PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah pengganti istilah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). Berikut perkembangan PPKS di Kabupaten Kotabaru.

Tabel 2.91.
Perkembangan PMKS (PPKS) di Kab Kotabaru Tahun 2016-2020

No	Uraian PMKS (PPKS)	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Balita Terlantar	6	6	4	5	-
2	Anak Terlantar	62	15	15	17	217
3	Anak Jalanan	-	-	-	-	-
4	Anak Berhadapan dgn hukum	9	-	2	12	15

No	Uraian PMKS (PPKS)	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
5	Anak dengan kedisabilitasaan (ADK)	170	-	-	-	-
6	Anak Korban Kekerasan atau diperlakukan salah	4	4	4	1	4
7	Anak memerlukan perlindungan khusus	6	6	6	3	3
8	Lanjut Usia Terlantar	2981	3341	4507	1353	2939
9	Penyandang Disabilitas	180	208	356	268	528
10	Tuna Susila	-	70	88	14	1
11	Gelandangan	-	7	-	-	-
12	Pengemis	-	24	24	-	8
13	Pemulung	1	29	33	3	3
14	Kelompok Minoritas	10	43	59	-	2
15	Eks Napi	46	65	103	107	33
16	Orang dengan HIV/AIDS	-	1	17	18	17
17	Korban Nafza	8	1	59	51	4
18	Korban Trefiking	-	1	1	0	3
19	Korban Tindak Kekerasan	4	4	6	0	0
20	Pekerja Migran bermasalah sosial	-	-	-	-	-
21	Korban Bencana Alam	6	12	973	747	1204
22	Korban Bencana Sosial	8	56	142	577	498
23	Perempuan Rawan Sosek	1209	1014	1477	1175	535
24	Fakir Miskin	5611	7422	22.827	23.050	22.865
25	Keluarga Bermasalah Psikologis	8	12	24	13	5
26	KAT	501	488	488	488	493
	Jumlah PMKS (PPKS)	10.830	12.829	31.215	27.902	29.377

Sumber : Dinas Sosial, 2021

Jumlah PMKS (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial pada tahun 2017 mencapai 56,86 persen namun menurun pada tahun 2018 yaitu 36,34 persen, pada tahun 2019 mencapai 35,77 persen, angka ini meningkat dari tahun 2016 yang hanya sebesar 7,36 persen, namun meningkat pada tahun 2020 sebesar 77,65 persen. Data fluktuatif ini disebabkan masih adanya data PMKS yang perlu diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dan adanya data baru PMKS (PPKS) yang baru masuk dan tingkat ekonomi masyarakat yang semakin menurun sehingga terjadi penurunan persentasi dari

jumlah PMKS (PPKS) yang semakin meningkat. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.92.
Aspek Pelayanan Umum Urusan Sosial

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase PMKS (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial	7,36	56,86	36,34	35,78	77,65
2	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	-	-	-	-	-
3	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial, 2021

Dilihat dari tabel 2.92 Aspek Pelayanan Umum Urusan Sosial Poin 2 persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial persentasenya nihil disebabkan bukan kewenangan Kabupaten/kota melainkan kewenangan Provinsi di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Aspek Pelayanan Umum Urusan Sosial. Ada pun istilah PMKS telah diganti dengan istilah PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial).

2.3.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedang penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Berikut perkembangan jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan selama seminggu yang lalu berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Kotabaru.

Tabel 2.93.
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kotabaru, 2020

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Angkatan Kerja	105.177	52.186	157.363
<i>Bekerja</i>	<i>99.258</i>	<i>50.295</i>	<i>149.553</i>
<i>Pengangguran Terbuka</i>	<i>5.919</i>	<i>1.891</i>	<i>7.810</i>
Bukan Angkatan Kerja	22.210	63.705	85.915
<i>Sekolah</i>	<i>8.043</i>	<i>8.476</i>	<i>16.519</i>
<i>Mengurus Rumah Tangga</i>	<i>10.508</i>	<i>51.162</i>	<i>61.670</i>
<i>Lainnya/Others</i>	<i>3.659</i>	<i>4.067</i>	<i>7.726</i>
Jumlah/Total	127.387	115.891	243.278

Sumber : BPS Kotabaru

Berikut perkembangan sengketa industrial dan jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi di Kabupaten Kotabaru.

Tabel 2.94.
Aspek Pelayanan Umum Urusan Tenaga Kerja

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	6	7	4	12	5
2	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	131	Menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi			
3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	256	416	496	608	192

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, 2021

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berikut perkembangan partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Kabupaten Kotabaru dari tahun 2016 - 2020.

Tabel 2.95.
Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	2306	2062	1997	2077	2035
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	8	8	8	8	8
3	Rasio KDRT	7	12	8	5	3

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
4	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	-	-	-	2,03	2,03
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	-	50,41	52,96	47,84	47,84

Sumber : Dinas P3AP2KB, 2021

3. Urusan Pangan

Berikut perkembangan urusan pangan di Kabupaten Kotabaru tahun 2016-2021.

Tabel 2.96.
Aspek Pelayanan Umum Urusan Pangan

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan pangan utama (ton/tahun)	135,09	182,06	256,29	118,30	124,84
2	Ketersediaan energi perkapita (kal/kap/hr)	1513,5	1514	1413,3	1437,5	3254
3	Ketersediaan protein perkapita (gram/kap/hr)	52,5	46,9	45,5	49,9	77,95
4	Pengawasan dan pembinaan Keamanan Pangan (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2021

4. Urusan Pertanahan

Dari tabel berikut tergambar bahwa persentase luas lahan aset Pemda Kotabaru yang bersertifikat selama periode tahun 2016-2020 masih sangat rendah, adapun kendala yang dihadapi yaitu dalam pembuatan sertifikat memerlukan waktu yang panjang dengan harus turun kelapangan dengan lokasi tidak satu tempat dan masih banyaknya permasalahan - permasalahan yang dihadapi dari sekitar aset sampai ke ranah hukum (pengadilan).

Tabel 2.97.
Aspek Pelayanan Umum Urusan Pertanahan

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase luas lahan Aset Pemda yang bersertifikat*	0	0,41%	0,05%	0,51%	0,67%
2	Penyelesaian kasus tanah Negara*	9	6	12	12	12
3	Penyelesaian izin lokasi**	0	10	6	3	0
4.	Pencadangan tanah untuk pembangunan*	3.102 m ²	27.521 m ²	14.828 m ²	69.980 m ²	20.573 m ²

*sumber Dinas Perkim, 2021, **sumber Dinas PM PTSP

Adapun dalam penyelesaian kasus tanah negara yang bersengketa yang dapat terukur sehubungan dengan barunya terbentuk Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2017 maka yang terealisasi penyelesaian sengketa tanah rata-rata pertanahan diselesaikan 12 kasus tanah yang tertangani walaupun masih banyak terkendala dengan waktu dan mediasi.

Adapun penyelesaian izin lokasi yang didapat data dari tahun 2016 sampai tahun 2019 dari target 20 izin lokasi baru terealisasi sebanyak 19 izin lokasi atau 95 persen yang diperoleh (*Data surat No.900/841/DPMPTSP/2020, Tanggal 08 Oktober 2020*).

Dalam pencadangan tanah untuk penunjang pembangunan semenjak di dirikannya Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2017 melakukan pengadaan tanah dari 2017 s/d 2020, yaitu ;

1. Tanah untuk jalan jembatan Pulau Laut – Pulau Kalimantan (Kec.Pulau Laut Tengah)
2. Tanah untuk pembangunan tempa sampah (Desa Batuah)
3. Tanah untuk balai sidang/ pertemuan (Ds. Teluk tamiang)
4. Tanah untuk pembangunan dermaga penyeberangan pulau sebuksu
5. Tanah untuk embung gunung tirawan
6. Tanah untuk lapangan sepak bola (Ds. Tanjuk lalak)
7. Tanah untuk kuburan umum/makam umum
8. Tanah untuk jalan menuju embung gunung perak
9. Tanah untuk penampungan air (Ds. Tirawan)

5. Urusan Lingkungan Hidup

Pelayanan pada aspek Lingkungan Hidup berprinsip pada eko-efisiensi menjadi bagian penting dalam proses penyusunan arah kebijakan dan sasaran pokok daerah Kabupaten Kotabaru terutama dalam upaya mensinergikan dan mengintegrasikan dengan pemanfaatan sumberdaya alam terhadap ekosistem lingkungan dengan luas cakupan kerja sebesar 57,75 persen dari total luas wilayah Kabupaten Kotabaru sebesar 950.982 hektar.

Tabel 2.98.
Aspek Pelayanan Umum Urusan Lingkungan Hidup

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020*
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0
2	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	68,23	67,14	70,00	70,00	67,5
3	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	98,34	98,34	83,92	95,07	86,16
4	Tutupan Lahan	71,07	71,07	71,07	58,26	62,62
5	Timbunan sampah yang ditangani	0	16,68	16,68	18,54	34,13
6	Persentase cakupan area pelayanan	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021, * Metode Baru

Kinerja pelayanan umum pembangunan urusan Lingkungan Hidup selama periode tahun 2016 sd tahun 2020 dapat ditunjukkan dengan formulasi Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Secara umum Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) menggambarkan kondisi lingkungan Kabupaten Kotabaru yang masih memiliki kemampuan memulihkan secara alamiah (*self-purification*). Sedangkan untuk Indeks Kualitas Tutupan Lahan mengalami kecenderungan menurun, terutama akibat penggunaan lahan oleh pihak pemilik usaha/industri maupun kegiatan masyarakat.

Kualitas air berfluktuatif dalam kriteria CUKUP dalam makna kualitas air dalam kategori memerlukan upaya pengelolaan yang terakselerasi. Akibat mendapat tekanan yang menjadikan sungai sebagai badan penerima air limbah usaha/kegiatan.

Kualitas udara rata-rata menunjukkan kondisi menurun dengan kriteria BAIK yang berarti kualitas udara dalam kategori pemeliharaan. Tekanan sumber pencemar udara kegiatan emisi sumber tidak bergerak (industri) dan emisi sumber bergerak (kendaraan bermotor) cukup berkontribusi berdampak terhadap lingkungan. Selain itu pengaruh perubahan iklim global, berkurangnya vegetasi

peneduh dan peningkatan kegiatan kepadatan transportasi berbahan bakar fosil memberikan dampak emisi pencemaran udara.

Penyelamatan dan pemeliharaan kawasan hutan dan kawasan non hutan khususnya wilayah hutan spesifik seperti hutan dataran tinggi dan hutan pesisir pantai (mangrove) merupakan upaya memperbaiki penurunan kualitas tutupan lahan yang pada tahun 2019 dalam kriteria WASPADA yang dimaknai bahwa kualitas tutupan lahan sangat memerlukan tindakan pemulihan yang memadai.

Secara umum Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru setiap tahunnya (tahun 2016 s/d 2020) mengalami peningkatan menuju kondisi membaik dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Konsepsi, perhitungan indeks termasuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) memiliki sifat komparatif yang berarti nilai satu komponen lingkungan relatif terhadap komponen lingkungan lainnya, sehingga antara kualitas air, kualitas udara dan tutupan lahan merupakan kesatuan siklus lingkungan hidup. Data tahun 2016 sd 2020 diatas, menunjukkan dengan semakin luasnya tutupan lahan seperti kawasan hutan dapat meningkatkan kualitas air dan kualitas udara karena keanekaragaman hayati pepohonan dan tanaman berfungsi sebagai penyaring alami air permukaan dan penghasil pengayaan oksigen dalam udara.

Untuk pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup digunakan metode baru untuk perhitungannya. Sehingga ada penyesuaian nilai indeks sebagai berikut:

Tabel 2.99.
Target dan Realisasi Capaian IKLH Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 sd 2020

Kualitas Lingkungan Hidup	Tahun			
	2019		2020	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Indeks Kualitas Air (IKA)	60,50	46,67	60,60	67,50
Indeks Kualitas Udara (IKU)	85,20	85,24	85,34	86,16
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	58,10	58,26	59,58	62,62
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,10	62,88	68,30	73,99

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup

Data pada tabel 2.99 berbeda dengan data pada tabel 2.98 dikarenakan adanya perbedaan metode pengukuran yang disepakati pada urusan lingkungan hidup. Capaian pada tahun 2020 (tabel 2.99) dijadikan acuan dalam menentukan

target kinerja pada periode mendatang sesuai dengan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 tanggal 4 April 2021 tentang Penetapan RPJMD berwawasan Lingkungan.

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Kinerja pembangunan pada pelayanan kependudukan dan catatan sipil adalah peningkatan kinerja kependudukan dan catatan sipil lebih dipengaruhi oleh kesadaran penduduk yang disebabkan makin mudahnya pelayanan administrasi kependudukan. Kegiatan kependudukan diarahkan pada upaya penataan data kependudukan; penyediaan sistem informasi kependudukan; peningkatan pelayanan kegiatan kependudukan dan catatan sipil, dan penyiapan data kependudukan untuk menunjang administrasi kependudukan dan terlaksananya kebijakan kependudukan yang serasi antara kebijakan kependudukan nasional dengan kebijakan kependudukan Kabupaten Kotabaru.

Tabel 2.100.
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Akte nikah yang diterbitkan	29.778	31.917	36.614	55.986	63.072
2	Akte kelahiran yang diterbitkan	170.698	185.692	195.494	146.206	149.885
3	Kepemilikan KTP	149.291	149.895	193.383	203.928	205.690
4	Cakupan Kepemilikan KK	83,38	81,73	82,95	70,36	64,91
5	Cakupan Kepemilikan KTP	64,86	62,60	86,03	87,52	90,15
6	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	53,69	57,91	60,59	45,13	46,12
7	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	100	100	100	100	100
8	Kepemilikan KIA	-	-	-	-	4,51

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru Tahun 2021

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berikut perkembangan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Kotabaru tahun 2021-2026.

Tabel 2.101.
Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah LSM aktif	14	16	18	21	23
2	Persentase LPM Berprestasi	10,60%	10,60%	10,60%	11,11%	100%
3	Persentase PKK aktif	9,77%	9,77%	9,77%	10,22%	100%
4	Persentase Posyandu aktif	7,02%	7,02%	7,02%	7,36 %	100%
5	Jumlah BUMDes	25	71	96	152	159

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021

Tabel 2.102.
Kemajuan dan Perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM)
Tahun 2020 dan Tahun 2021

No.	Status Desa IDM	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Keterangan
1	Sangat Tertinggal	2	2	1	Desa Sangat Tertinggal Berubah Status 1 Desa, dan Tersisa 1 Desa 1. Desa Hulu Sampanahan Kec. Hampang
2	Tertinggal	55	28	16	Desa Tertinggal Berkurang Dari 28 Desa, dan Tersisa 16 Desa
3	Berkembang	123	138	142	Desa Berkembang Ada Kenaikan 4 Desa, menjadi 142 Desa
4	Maju	15	27	36	Desa Maju Ada Kenaikan 9 Desa, menjadi 36 Desa
5	Mandiri	3	3	3	Desa Mandiri Tetap 3 Desa 1. Desa Stagen Kec. PL. Utara 2. Desa Semayap Kec. PL. Utara 3. Desa Tegalrejo Kec. Kelumpang Hilir
	Jumlah Desa	198	198	198	

Sumber : Bidang Sosbudpem Bappeda, 2021

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Salah satu indikator keberhasilan keluarga berencana adalah penurunan rata-rata jumlah anak per keluarga. Rata-rata jumlah anak per keluarga adalah jumlah anak dibagi dengan jumlah keluarga.

Tabel 2.103.
Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Kabupaten Kotabaru

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anak	101.739	102.823	103.771	131.545	123.390
2	Jumlah keluarga	94.671	96.138	23.312	66.603	68.341
3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	2	4	2	1,8

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotabaru Tahun, 2021

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (*akseptor*) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk.

Tabel 2.104.
Rasio Akseptor KB Kabupaten Kotabaru

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah akseptor KB	35.496	37.834	36.609	51.520	48.346
2	Jumlah pasangan usia subur	58.921	55.745	53.965	66.603	59.416
3	Rasio akseptor KB	60,24	67,87	67,84	77,35	81,4

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotabaru Tahun 2021

Tabel 2.105.
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	2	4	2	1,8
2.	Cakupan peserta KB aktif	35.496	37.834	36.609	51.520	48.346
3.	Keluarga Pra Sejahtera	10.006	10.421	1.877	9.199	1.148
4.	Keluarga Sejahtera I	23.217	22.987	21.435	19.264	15.628
5.	Total Fertility Rate (TFR)	-	-	-	2,5	2,75
6.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	96,7	83,77	80,63	77,3	81,37
7.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmeet need)	21,79	9,9	12,7	10,87	10,35
8.	Jumlah Kampung KB	1	21	12	21	42

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotabaru Tahun 2021

9. Urusan Perhubungan

Pelayanan umum yang berkaitan dengan bidang perhubungan adalah pelayanan angkutan. Seluruh angkutan umum yang ada di Kabupaten Kotabaru terdiri dari dari perhubungan darat, laut, dan udara. Hal ini dikarenakan kondisi geografis Kabupaten Kotabaru yang sangat kompleks. Aspek pelayanan umum dalam bidang perhubungan di Kabupaten Kotabaru disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.106.
Aspek Pelayanan Umum dalam Urusan Perhubungan

No	Nama	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	259.024	261.692	264.387	267.111	240.399
2	Rasio ijin trayek	Unit	276	276	276	276	276
3	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	2861	3866	1445	1140	1.152
4	Jumlah Terminal Klas A	Unit	-	-	-	-	-
5	Jumlah Terminal Klas B	Unit	1	1	1	1	1
6	Jumlah Terminal Klas C	Unit	12	12	12	12	12
7	Jumlah Pelabuhan Laut	Lokasi	-	6	-	-	-
8	Jumlah Bandar Udara	Lokasi	1	1	1	1	1
9	Persentase layanan angkutan darat	%	67	71	76	86	90
10	Kepemilikan KIR angkutan umum	Unit	1.226	1.362	1.462	1.124	2.304
11	Pemasangan Rambu-rambu	Unit	65	58	95	96	0
12	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	-	0.000201	0.000201	0.000229	0.000229	0.000229
13	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	Orang	259.024	261.692	264.387	267.111	261.768
14	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	Kg	5.595.212	5.651.729	5.708.818	5.765.906	5.717.517
15	Jumlah orang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	Orang	584.192	590.136	596.127	602.168	596.158
16	Jumlah barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	Kg	5.595.212	5.651.729	5.708.818	5.765.906	5.717.517
17	Jumlah Dermaga Penyeberangan	Lokasi	4	6	8	8	8

Sumber : Dinas Perhubungan, 2021

10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Berikut perkembangan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika Kabupaten Kotabaru tahun 2021-2026.

Tabel 2.107.
Aspek Pelayanan Umum Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	-	14,29	14,29	14,29	14,29
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	27	25	25	25	25
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	63,1	63,07	63,02	62,99	62,99
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	95,4 : 4,6	95,6 : 4,4	95,5 : 4,5	95,5 : 4,5	95,80 : 4,2
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	95,4 : 4,6	95,6 : 4,4	95,5 : 4,5	95,5 : 4,5	95,80 : 4,2

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021

Penjelasan :

1. Berdasarkan jumlah desa di Kabupaten Kotabaru yang terdapat area *blankspot*.
2. Dengan asumsi bahwa penduduk pada kelompok umur 10 – 59 tahun telah menggunakan HP secara aktif (Sumber data : *kotabarukab.go.id*).
3. Dengan asumsi bahwa penduduk yang tidak termasuk kategori penduduk miskin telah memiliki akses internet (Sumber data : *kotabarukab.go.id*).
4. Dengan asumsi bahwa penduduk yang tidak termasuk kategori penduduk miskin telah memiliki komputer pribadi (Sumber data : *kotabarukab.go.id*).

11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha.

Tabel 2.108.
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah koperasi aktif	146	149	153	100	103
2	Jumlah koperasi	228	233	237	193	194
3	Persentase koperasi aktif	64,04	63,95	64,56	51,81	53,09
4	Usaha Mikro dan Kecil	8.031	8.158	8.426	8.515	8.227

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Kotabaru Tahun 2021

Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Semakin banyak jumlah UKM non BPR/LKM akan menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah melalui UKM. BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan, kredit, pembayaran sebagai transaksi jasa serta *money transfer* yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. LKM memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil.

Tabel 2.109.
Jumlah UKM non BPR/LKM Kabupaten Kotabaru

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah seluruh UKM	8.031	8.581	8.426	8.515	8.515
2	Jumlah BPR/LKM	2	2	2	2	-
3	Jumlah Unit Usaha dalam industri RT	289	294	375	59	8

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Kotabaru Tahun 2021

12. Urusan Penanaman Modal

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.

Jumlah nilai investasi investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan jumlah realisasi nilai proyek investasi berupa PMDN dan nilai proyek investasi PMA yang telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Banyaknya investasi PMDN berskala nasional dengan banyaknya investasi PMA berskala nasional dihitung dari total nilai proyek yang telah terealisasi pada suatu periode tahun pengamatan.

Tabel 2.110.
Jumlah Investor PMDN/PMA dan Nilai Investasi Kabupaten Kotabaru

Tahun	PMDN		PMA		Total	
	Jumlah Investor	Nilai Investasi (Rp.Juta)	Jumlah Investor	Nilai Investasi (Rp.Juta)	Jumlah Investor	Nilai Investasi (Rp.Juta)
2010	22	9.301.500	15	11.229.090	37	20.530.590
2011	22	9.301.500	16	12.332.068	38	21.633.568
2012	22	9.850.179	18	12.447.290	40	22.297.469
2013	22	9.850.179	19	12.447.290	41	22.297.469
2014	23	13.243.346	19	16.825.840	42	30.069.186
2015	23	13.243.346	20	16.953.109	43	30.196.455
2016	23	13.243.346	20	16.953.109	43	30.196.822
2017	25	50.602.822	22	60.215.114	47	110.817.936
2018	65	21.244.962	22	89.572.974	87	110.817.936
2019	71	22.328.933	18	89.416.342	99	111.745.276
2020	71	22.328.933	18	89.416.342	99	111.745.276

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru Tahun 2021

13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Perkembangan pembangunan bidang pemuda dirasakan belum memadai sehingga kontribusi pemuda dalam pembangunan pun belum optimal. Kegiatan-kegiatan kepemudaan termasuk pelajar generasi muda, karang taruna,

kepramukaan dan kewirausahaan. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan antara lain menyebutkan bahwa sasaran pembangunan kepemudaan adalah usia 16 s/d 30 tahun. Dengan demikian upaya penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi dan kreatifitas diarahkan untuk meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan.

Pembinaan terhadap generasi muda meliputi dua pola yaitu di sekolah dan di luar sekolah. Berbagai kegiatan yang masih terkait dengan pembinaan di sekolah adalah seperti pelatihan dasar kepramukaan, pelatihan tingkat mahir dan lanjutan dimaksudkan untuk keberlangsungan pendidikan mental dan spritual termasuk pula pembinaan tentang bela negara. Sedangkan pembinaan di luar sekolah adalah pembinaan kewirausahaan guna mengurangi pengangguran. Selain itu juga dikembangkan pertukaran pelajar dan pertukaran pemuda baik antar negara maupun antar daerah. Pembinaan kepada organisasi permanen adalah karang taruna sebagai wadah pemuda-pemudi untuk mengembangkan diri berperan dalam masyarakat sekitarnya. Peran karang taruna ini mencoba menyeimbangkan terhadap peran pemuda yang tergabung dalam organisasi yang memiliki jangkauan luas baik berorientasi politik, sosial maupun keagamaan. Langkah strategis Pemerintah melalui dinas sosial adalah memberikan peluang bagi karang taruna dalam beberapa program pemerintah sebagai bentuk perhatian pemerintah dibidang kepemudaan.

Pemerintah Kabupaten Kotabaru telah mengembangkan pembinaan dan mengorganisir aktivitas dan peran kelembagaan pemuda dalam memfungsikan dan mengoptimalkan minat dan bakat pemuda melalui berbagai kegiatan seperti karang taruna, organisasi olahraga, seni, kepramukaan, organisasi keagamaan, remaja masjid. Setidaknya pendekatan demikian merupakan media menyatukan pikiran, gagasan dan inovasi pemuda dalam konteks keterlibatannya untuk pembangunan Kabupaten Kotabaru ke depan. Integrasi elemen pemuda tidak sekedar dalam wadah KNPI saja, tetapi juga dalam wadah-wadah formal dan non formal sebagai sarana menggerakkan kreatifitas, minat dan bakat baik ranah pendidikan, olahraga, keterampilan, pencinta alam, keagamaan, sosial maupun kepariwisataan.

Pembangunan dibidang olah raga di Kabupaten Kotabaru melalui 3 (tiga) kegiatan pokok yaitu Pengembangan olah raga masyarakat, pembibitan olah raga dan pemasaran olah raga. Salah satu bentuk pembinaan nyata bagi dikembangkannya olah raga kesehatan, olah raga rekreasi dan olah raga prestasi. Terhadap olah raga kesehatan pemerintah Kabupaten menyiapkan tempat-tempat umum yang dilengkapi dengan sarana olah raga, demikian juga untuk olah raga rekreasi telah pula dikembangkan sarana olah raga dalam bentuk outbond. dan untuk olah raga prestasi telah dikembangkan program pemusatan latihan, disamping membangun kemitraan dengan pihak perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kabupaten Kotabaru.

Langkah - langkah strategi yang diambil pemerintah dari pemetaan masalah soal kepemudaan setidaknya melepaskan dan menghindarkan dari bahaya pengguna narkoba yang berakibat pada tindakan patologi sosial yang merusak masa depan pemuda itu sendiri, daerah, bangsa dan negara. Tantangan yang dihadapi di bidang pemuda dan olah raga adalah : mengoptimalkan peran serta pemuda dalam berbagai bidang pembangunan, meningkatkan sosialisasi dan kampanye bahaya narkoba bagi generasi muda dan mengupayakan pembangunan fasilitas kepemudaan dan wadah olahraga yang representatif dan pelibatan kepemudaan lewat wadah karang taruna dengan dinas - dinas terkait. Setidaknya pembinaan pemuda yang dimaksud setidaknya ada dua tujuan yakni pertama mendorong kearah prestasi dan kedua menangkal kearah penyimpangan perilaku sosial/patalogi sosial. Ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Tabel 2.111.
Aspek Pelayanan Umum Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	28	28	29	30	80,76
2	Persentase wirausaha muda	0,021	0,025	0,032	0,035	0,04
3	Cakupan pembinaan olahraga	100	100	100	100	100
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	30,88	35,29	39,71	39,71	39,71
5	Cakupan pembinaan atlet muda	46,33	57,92	81,08	81,08	42,08

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
6	Jumlah atlet berprestasi	-	270	127	178	36
7	Jumlah prestasi olahraga	-	311	156	190	48

Sumber : Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga, 2021

14. Urusan Statistik

Undang-Undang No 16 Tahun 1997 tentang statistik, peran statistik sangat penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan aspek kehidupan masyarakat dalam pembangunan nasional. Dalam pemanfaatan statistik untuk pembangunan, data akurat, valid, lengkap dan informatif sangat dibutuhkan. Peran data dan informasi di Kabupaten Kotabaru saat ini masih mengalami beberapa kendala dalam pembangunannya, terutama untuk menggambarkan hasil-hasil pembangunan. Sementara peran data ini akan memberikan gambaran tentang pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan dari tahun ke tahun. Berkaitan dengan statistik ini adalah bagaimana setiap aktivitas yang dilakukan memiliki rekam jejak, sehingga dapat diketahui oleh orang lain maupun penerus pelaksana kegiatan yang bersangkutan.

Salah satu manfaat data dan informasi adalah untuk perencanaan pembangunan daerah dapat dibedakan menjadi berbagai jenis berdasarkan tujuan yang diinginkan. Hal itu disebabkan tujuan dari perencanaan itu sendiri juga beragam. Inti dari perencanaan adalah bagaimana mengantisipasi masa depan berdasarkan tujuan yang ditetapkan dengan melakukan persiapan yang didasarkan data dan informasi yang tersedia saat ini. Jadi, aspek yang terkandung dalam perencanaan adalah perumusan tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Akan tetapi, dalam kenyataannya sering kali tidak mudah menentukan alat atau cara mencapai tujuan tersebut. Hal itu dikarenakan perumusan tujuan pembangunan sering kali abstrak dan sangat ideal, padahal jika melihat sumber daya yang ada, keadaan yang dihadapi saat ini masih jauh dari yang diinginkan. Menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, data adalah keterangan objektif tentang suatu fakta baik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif, maupun gambar visual (images) yang diperoleh baik melalui observasi langsung

maupun dari yang sudah terkumpul dalam bentuk cetakan atau perangkat penyimpan lainnya. Sedangkan, Informasi adalah data yang sudah terolah yang digunakan untuk mendapatkan interpretasi tentang suatu fakta, data dan informasi yang dihimpun berhubungan dengan potensi dan kondisi daerah dan merupakan bahagian penting demi hasil perencanaan yang baik dan komprehensif. Data dan informasi yang berkualitas harus dijadikan rujukan bagi penentuan kebijakan dan program sasaran yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dengan ini, hasil akhir pembangunan berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat/rakyat akan tercapai dengan efektif dan efisien.

Tabel 2.112.
Aspek Pelayanan Umum Urusan Statistik

No	Uraian	Keterangan
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada
2	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada
3	Buku "PDRB"	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021

15. Urusan Persandian

Persandian sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah merupakan hal yang amat penting dalam era serba teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran (*e-office*), perencanaan (*e-planning*), keuangan (*e-budgetting*) dan fungsi pemerintahan lainnya. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa resiko seperti penyadapan, *hacking* dan berbagai ancaman lainnya. Adanya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (*e-government*) tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah menjadi terasa lebih penting.

Tabel 2.113.
Aspek Pelayanan Umum Urusan Persandian

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi	8	8	8	25	25

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	dalam komunikasi Perangkat Daerah (%)					

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021

16. Urusan Kebudayaan

Keberhasilan pembangunan daerah tidak semata-mata karena tingginya pendapatan/kesejahteraan, lamanya usia sekolah dan angka harapan hidup, tetapi juga dari sisi kehidupan berkesenian dan berkebudayaan. Integratif kebudayaan dan seni dalam kehidupan masyarakat akan mengantarkan pada kehidupan yang beradab, termasuk saling mengisi dan menghargai kesenian dan kebudayaan yang berbeda antar suku bangsa dalam suatu wilayah.

Kabupaten Kotabaru sebagai kawasan yang mengidentifikasikan kawasan *bicultural* yakni Kebudayaan Banjar dan Kebudayaan Bugis bagi masyarakat pesisir memberikan nuansa yang lain dalam menunjang pembangunan Kotabaru. disamping kebudayaan dari etnis pendatang lainnya seperti Jawa, Bali dan Lombok. Ragam kebudayaan yang dikomunikasikan oleh kehadiran etnis harus menjadi kekuatan perekat antar suku dalam NKRI, bukan sebagai potensi konflik. Prioritas program seni budaya lebih mengetengahkan kesempatan dan keadilan dalam memberikan pengayaan bidang seni dan budaya di Kabupaten Kotabaru.

Sebagaimana diungkapkan para ahli bahwa kesenian adalah produk budaya masyarakat pada suatu teritori kedua, dimana pemetaan terhadap persoalan seni dan budaya di daerah memiliki karakteristik tersendiri dalam perkembangannya, demikian pula di Kabupaten Kotabaru yang dihuni oleh berbagai etnis, suku dan bangsa. Seni dan budaya di Kotabaru sebagaimana di daerah lain mengalami perkembangan pasang surut. Arbain (2010) mengidentifikasi perkembangan seni budaya selama ini hanya dikonstruksi oleh tiga pilar yakni, (1) Pilar nilai-nilai seni budaya yang berlaku di masyarakat (2) Pilar Kegiatan yang dilakukan dan kokohkan para pemangku seni budaya (adat) dan yang (3) Pilar Peran dan fasilitasi pemerintah daerah. Setidaknya pilar ketiga sering dijadikan sandaran bagi masyarakat seni dan budaya untuk melakukan kelestarian dan

keberlangsungan kegiatan berkesenian dan berkebudayaan. Berikut merupakan rincian event kesenian dan kebudayaan Kabupaten Kotabaru.

Tabel 2.114.
Aspek Pelayanan Umum Urusan Kebudayaan

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	7	8	21	19	6
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	-	-	10	8	-
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	5	5	5	5	-
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2021

17. Urusan Perpustakaan

Berikut perkembangan perpustakaan di Kabupaten Kotabaru tahun 2021 – 2026.

Tabel 2.115.
Aspek Pelayanan Umum Urusan Perpustakaan

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	58.471	43.983	20.667	19.854	6.481
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	-	-	-	-	77.932
3	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	-	-	-	-	-
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	4.872	3.665	1.722	1.654	540
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	62.234	65.006	63.165	74.520	40.246
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	75	75	13	13	15

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2021

18. Urusan Kearsipan

Capaian kinerja bidang urusan kearsipan, meliputi indikator kinerja Pengelolaan Arsip secara Baku, pengelola kearsipan dan pengelolaan yang rutin serta berkala yang akan dilakukan oleh penyelenggara kearsipan setiap tahunnya.

Tabel 2.116.
Aspek Pelayanan Umum Urusan Kearsipan

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	0	1,92	0	38,46	7,69
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

2.3.2 Urusan Pemerintahan Penunjang

1. Perencanaan Pembangunan

Pada sisi perencanaan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimana sesuai dengan jadwal penyusunan perencanaan secara bertahap dimulai dari musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa pada bulan Januari dan dilanjutkan rapat kerja pembangunan di tingkat kecamatan pada bulan Februari. Pada tahapan selanjutnya bulan Maret diselenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten.

Dalam lingkup perencanaan ini disamping penetapan RPJMD dan RKPD masing-masing Perangkat Daerah harus menyiapkan Renstra sebagai penjabaran dari RPJMD dan Renja Perangkat Daerah sebagai penjabaran RKPD. setelah disusun RKPD pada bulan Juni sampai dengan Juli Pemerintah Kabupaten menyusun dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS). Daftar beberapa dokumen menurut jadwal waktu yang harus dipenuhi dalam penyusunan perencanaan terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.117.
Tabel Jadwal Waktu yang Harus dipenuhi Dalam Penyusunan Perencanaan

No	Dokumen	Jadwal Waktu
1	RPJMD	6 Bulan Setelah Pelantikan Kepala Daerah
2	RENSTRA Perangkat Daerah	3 Bulan Setelah Pelantikan Kepala Perangkat Daerah
3	RKPD	April – Juni
4	KUA PPAS	Juli – Agustus

Sumber: Bappeda Kabupaten Kotabaru

Tabel 2.118.
Aspek Pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappeda Kabupaten Kotabaru

2. Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah diarahkan dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan dalam memenuhi tuntutan pembiayaan pembangunan. Tuntutan pembangunan secara undang-undang seperti pendidikan kesehatan dan lain sebagainya, disamping itu juga tuntutan kebutuhan peningkatan kesejahteraan pegawai dan operasional pemerintahan serta anggaran untuk pembangunan atau penyelenggaraan urusan.

Pengelolaan keuangan yang baik akan mendorong investasi pemerintah yang lebih baik pula melalui stimulus perekonomian yang diselenggarakan oleh OPD pelaksana program dan kegiatan. Konsekuensi dari upaya perbaikan pengelolaan digambarkan dengan hasil Pemeriksaan BPK dengan WTP,

perkembangan pengelolaan keuangan Kabupaten Kotabaru digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.119.
Aspek Layanan Penunjang Urusan Keuangan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA terhadap APBD (%)	0,25	15,68	1,44	0,65	1,7
3	Persentase belanja pendidikan (20%)	4,77	7,45	22,47	20,38	27,10
4	Persentase belanja kesehatan (10%)	4,65	6,93	14,59	12,21	18,09
5	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung (%)	115,58	110,58	105,99	106,48	63,94
6	Penetapan APBD (Tepat waktu/Tidak)	tepat waktu	tidak	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu

Sumber : BPKAD, 2021

3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan Pelatihan merupakan bagian dari upaya pembinaan kepegawaian dalam rangka meningkatkan kapasitas pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Pemerintah mempunyai kewajiban menyelenggarakan peningkatan kapasitas bagi pegawai setiap tahunnya minimal 28 JPL.

Peningkatan kapasitas juga memberikan kesempatan terjadinya promosi kepada setiap pegawai. Peningkatan kapasitas dibidang struktural menjadi bagian yang harus diselenggarakan dalam rangka memenuhi kapasitas kepemimpinan pegawai, perkembangan kepegawaian Kabupaten Kotabaru sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.120.
Aspek Layanan Penunjang Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	2,79%	1,12%	2,07%	3,03%	18,61%

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
2	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	97,14%	70,99%	61,67%	89,00%	89%
3	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	37	21	30	29	26
4	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	197	179	162	164	1903
5	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	3173	2732	2633	2495	2419

Sumber : BKPSDM, 2021

4. Penelitian dan Pengembangan

Konsep penelitian dan pengembangan di kabupaten/kota pada dasarnya masih merupakan pendekatan *learning by doing*, karena kabupaten/kota dihadapkan langsung pada persoalan-persoalan yang mendesak di masyarakat dan segera harus diselesaikan, maka pada hakekatnya penelitian lebih berorientasi pada upaya-upaya mengidentifikasi permasalahan sebagai informasi kebijakan yang akan dikembangkan dalam jangka pendek.

Tabel 2.121.
Aspek Layanan Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	4 kajian	5 kajian	2 kajian	1 Kajian	8 Kajian
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	75%	80%	100%	0 %	100%
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	-	-	-	-	-
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	3	3	5	3	-

Sumber: Bappeda Kabupaten Kotabaru

5. Pengawasan

Salah satu dari fungsi manajemen adalah pengawasan. Pengawasan dilakukan pemerintah daerah bertujuan untuk memberikan kepastian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang ditentukan semula. Pengawasan yang dilakukan oleh Kabupaten Kotabaru terdiri dari pengawasan

internal dan pengawasan eksternal, selanjutnya hasil pengawasan selama kurun waktu tahun 2016-2020 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.122.
Aspek Layanan Penunjang Urusan Pengawasan

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase tindak lanjut temuan pemeriksaan APIP	35,48%	69,23%	79,17%	38,10%	43,14%
2	Jumlah Hasil Pemeriksaan/ Audit Kepegawaian	0	2	1	2	0
3	Jumlah temuan BPK	16	13	27	15	24

Sumber : Inspektorat Kabupaten, 2021

6. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD sebagai lembaga fasilitasi yang melayani kegiatan DPRD mulai dari perencanaan hingga kunjungan kerja, reses dan paripurna. Sementara output yang dihasilkan oleh DPRD adalah Peraturan Daerah. Maka Sekretariat DPRD memiliki tanggung jawab atas terselenggaranya berbagai proses yang berujung pada terbitnya Peraturan Daerah. Perkembangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru yang berhasil terbit sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.123.
Banyaknya Surat Keputusan Dan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2020

Jenis Surat Keputusan	Banyaknya Surat Keputusan				
	2016	2017	2018	2019	2020
1. Peraturan Daerah	30	30	16	15	16
2. Surat Keputusan DPRD	26	20	29	39	35
3. Surat Keputusan Pimpinan DPRD	36	36	22	22	44

Sumber : DPRD Kabupaten Kotabaru Tahun 2021

2.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Pariwisata

Potensi pariwisata Kabupaten Kotabaru merupakan hal yang sangat menjanjikan, sehingga peran masyarakat dan pemerintah daerah dalam menggalakkan potensi tersebut sangat diperlukan. Upaya tersebut tercermin dari frekuensi kegiatan festival budaya. Aspek Pariwisata di Kabupaten Kotabaru merupakan aset utama yang harus tetap dijaga dan dilestarikan. Pariwisata

memerlukan infrastruktur yang memadai serta kelembagaan yang dapat berupa kelompok kerja lintas sektoral salah satunya adalah perangkat hukum (Peraturan) yang mengikat dan menjadi pedoman bagi segenap stakeholder untuk memprogram dan melaksanakan kegiatan secara tepat sasaran, terpadu, simultan dan berkelanjutan. Peran tersebut dapat diwujudkan melalui promosi budaya sebagai salah media memperkenalkan aset budaya pariwisata. Hal ini mengingat besarnya potensi pariwisata di Kabupaten Kotabaru. Objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Kotabaru disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.124.
Objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Kotabaru

No	Kawasan	Uraian	Lokasi
1	Wisata Alam	Air Terjun Tumpang Dua	Kecamatan Pulau Laut Utara
		Gua Temu Luang	Kecamatan Kelumpang Hulu
		Air Terjun Seratak	Kecamatan Pulau Laut Timur
		Gua Lowo	Desa Tegalrejo Kecamatan Kelumpang Hilir
2	Wisata Bahari Dan Wisata Pantai	Teluk Tamiang, Terumbu Karang	Kecamatan Pulau Laut Barat Dan Pulau Kunyit
		Pantai Gedambaan	Kecamatan Pulau Laut Utara
		Pulau Samber Gelap, Terumbu Karang, Penyu	Pulau Sebuku
		Pantai Tanjung Ketapang	Kecamatan Pulau Laut Utara
		Pantai Teluk Aru	Pulau Laut Kepulauan
		Pantai Sungai Bulan	Pulau Laut Selatan
		Pulau Manti	Pulau Sebuku
3	Wisata Buatan	Waduk Gunung Ulin, Bundaran Sebelimbingan, Taman Wisata Siring Laut Dan Hutan Meranti Putih	Kecamatan Pulau Laut Utara
4	Wisata Budaya	Budaya Maceretassi	Desa Gedambaan

Sumber : RTRW Kabupaten Kotabaru Tahun 2012-2032

Tabel 2.125.
Aspek Pelayanan Umum Urusan Pariwisata

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kunjungan wisatawan nusantara	37.374	193.694	541.367	684.441	479.100
2	Kunjungan wisatawan Asing	131	110	120	128	89
3	PAD sektor pariwisata	123.432.000	212.525.000	271.981.500	769.311.000	903.944.000
4	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Kalimantan Selatan	-	-	-	11.152.247	7.761.437
5	Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing ke Kalimantan Selatan	-	-	-	4.427	7.002

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2021

Jumlah wisatawan nusantara yang mengunjungi Kotabaru dari tahun 2016 sampai 2020 mengalami peningkatan sebesar 441.726 orang, dimana pada tahun 2016 jumlah wisatawan nusantara sebanyak 37.374 orang menjadi 479.100 orang pada tahun 2020 atau meningkat sebesar 1.181,90 persen dan walaupun pada tahun 2020 jumlah wisatawan nusantara menurun dari tahun 2019. Sementara jumlah kunjungan wisatawan asing tertinggi terjadi pada tahun 2016 dengan jumlah wisatawan sebanyak 131 orang sementara pada tahun 2019 sebanyak 128 orang dan tahun 2020 menurun menjadi 89 orang.

Jika dibandingkan jumlah wisatawan yang masuk ke Kotabaru dengan jumlah seluruh wisatawan yang masuk ke Kalimantan Selatan pada tahun 2020, maka yang masuk ke Kotabaru hanya sebesar 6,17 persen untuk wisatawan nusantara dan 1,27 persen untuk wisatawan asing.

2. Pertanian

Pembangunan Pertanian di Kotabaru dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kontribusi sektor pertanian mempunyai peran yang paling dominan, disisi tenaga kerja sektor ini juga paling dominan dalam penyerapan tenaga kerja, sedangkan dalam

mendukung pengentasan kemiskinan kebanyakan jumlah keluarga miskin bermukim di pedesaan dan bermata pencaharian sebagai petani. Pembangunan Pertanian di Kabupaten Kotabaru difokuskan pada tiga sub sektor yaitu Tanaman Pangan, Peternakan dan Perkebunan.

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pertanian adalah sebagai berikut :

Tabel 2.126.
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanian

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020*
1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya (ton/hektar)	4,02	3,99	3,80	4,68	4,36
	Padi	3,61	3,67	3,32	3,00	3,24
	Jagung	7,65	5,27	4,56	6,01	5,45
	Kedelai	1,61	1,50	1,36	1,34	1,60
2.	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	18,85%	18,79	18,62%	18,54%	19,01%
3.	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	1,57%	1,64%	1,59%	1,58%	1,62%
4.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	9,28%	9,14%	9,02%	9,92%	8,96%
5.	Nilai Tukar Petani**	97,84%	96,35%	95,43%	96,72%	105,37%
6.	Cakupan bina kelompok petani	800	925	975	1.075	1.342
7.	Produksi padi atau bahan pangan utama lainnya (ton)	149.023	172.135	186.484	233.451	93.157
	Padi	90.954	107.286	76.746	66.383	33.989
	Jagung	49.296	62.307	106.087	167.046	59.160
	Kedelai	8.773	3.542	3.651	21,4	8
8.	Produksi Hasil Peternakan (Sapi/Ekor)	10.598	11.179	11.967	12.707	13.196
9.	Produksi Hasil Perkebunan (Ton)	90.341	141.455	142.828	84.732	130.058
	Kelapa Sawit	3.236	5.023	5.092	5.377	8.348
	Karet	87.105	136.432	137.736	79.355	121.710

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Kotabaru Tahun 2021

*Angka Sementara, ** NTP Kalsel

a. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya (ton/hektar)

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pertanian adalah produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya sebagai hasil

tanaman pangan utama di Kabupaten Kotabaru.

Tabel 2.127.
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya (ton/hektar)	4,02	3,99	3,80	4,68	4,36
	Padi	3,61	3,67	3,32	3,00	3,24
	Jagung	7,65	5,27	4,56	6,01	5,45
	Kedelai	1,61	1,50	1,36	1,34	1,60

Sumber : Dinas Pertanian, 2021

Dilihat dari tabel diatas produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya dari awal RPJMD sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan.

Hal yang menyebabkan penurunan produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya dikarenakan adanya :

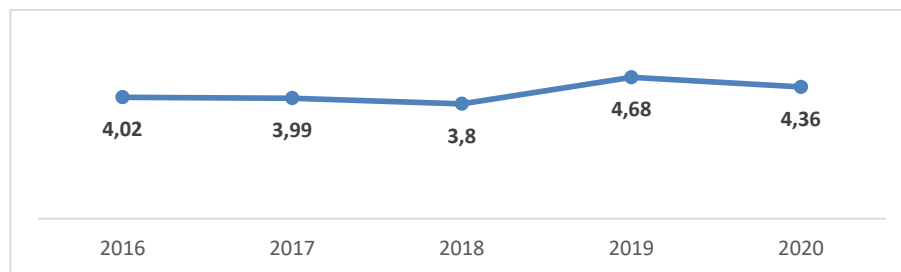
1. Tingginya alih fungsi lahan pertanian
2. Adanya aturan tidak boleh membakar lahan sehingga turunnya produksi padi gogo/padi lahan kering
3. Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air
4. Adanya pandemi covid 19 Tahun 2020 mengakibatkan pengurangan anggaran di bidang pertanian baik APBD maupun APBN
5. Beralihnya mata pencaharian petani ke perusahaan swasta (perkebunan sawit dll)
6. Sulitnya penanganan pasca panen dan pemasaran hasil untuk komoditas kedelai sehingga mengurangi minat petani untuk bertanam kedelai
7. Petani masih banyak yang belum menggunakan bibit unggul dan saprodi (pupuk dan pestisida)

Pada tahun 2019 produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya mengalami peningkatan dikarenakan adanya program pemerintah pusat untuk perluasan areal tanam komoditas jagung di Kabupaten

Kotabaru.

Laju Perkembangan Produktivitas Padi atau bahan Pangan Utama Lainnya Tahun 2016 – 2020.

Gambar 2.18
Laju Perkembangan Produktivitas Padi atau bahan Pangan Utama Lainnya
Tahun 2016 – 2020



Pada tahun 2020 produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya mengalami penurunan dikarenakan adanya tekanan kondisi secara umum di Kabupaten Kotabaru.

b. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pertanian adalah Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB. Sektor Pertanian masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Kotabaru.

Tabel 2.128.
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kab Kotabaru

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	18,85%	18,79	18,62%	18,54%	19,01%

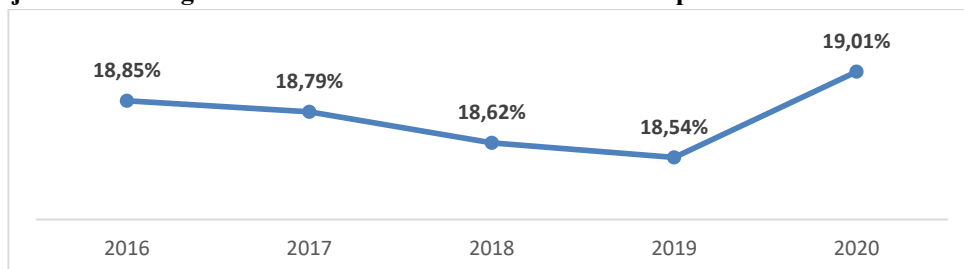
Sumber : Dinas Pertanian, 2021

Berdasarkan tabel diatas Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Kotabaru cenderung menurun, pada tahun 2016 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Kotabaru mencapai 18,85 persen dan melambat setiap tahunnya sampai dengan tahun 2019 dan meningkat tahun 2020 Salah satu penyebab menurunnya peranan pertanian adalah ketidakstabilan harga produk lapangan usaha tersebut.

Laju Perkembangan Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Tahun 2016 – 2020.

Gambar 2.19

Laju Perkembangan Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Tahun 2016 – 2020



c. Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pertanian adalah Kontribusi Sektor Pertanian (palawija) terhadap PDRB. Sektor Pertanian Khususnya Palawija (Bahan Makanan Pokok) masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Kotabaru.

Tabel 2.129.

Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB Kab Kotabaru

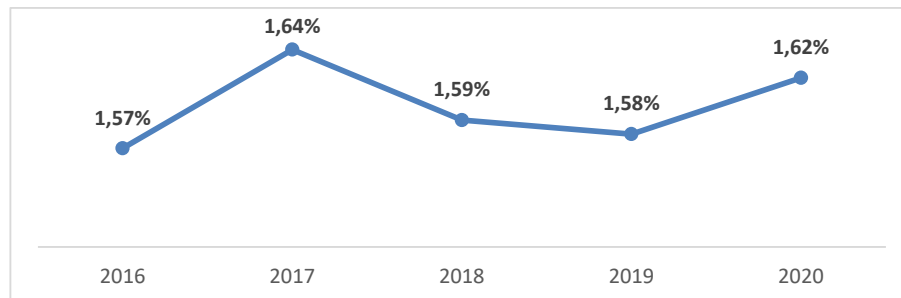
No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	1,57%	1,64%	1,59%	1,58%	1,62%

Sumber : Dinas Pertanian, 2021

Berdasarkan tabel diatas kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB cenderung mengalami fluktuasi, pada tahun 2016 kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB mencapai 1,57 persen meningkat di tahun 2016 dan 2017. Pada tahun 2018-2019 kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB menurun dari tahun 2016 dan 2017 dan meningkat lagi pada tahun 2020. Salah satu penyebab adalah ketidakstabilan harga produk bahan makanan pokok.

Laju Perkembangan Kontribusi Sektor Pertanian (Palwajia) Terhadap PDRB Tahun 2016 – 2020.

Gambar 2.20
Laju Perkembangan Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB
Tahun 2016 – 2020



d. Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pertanian adalah kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap pdrb. sektor perkebunan masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Kotabaru.

Tabel 2.130.
Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB Kab Kotabaru

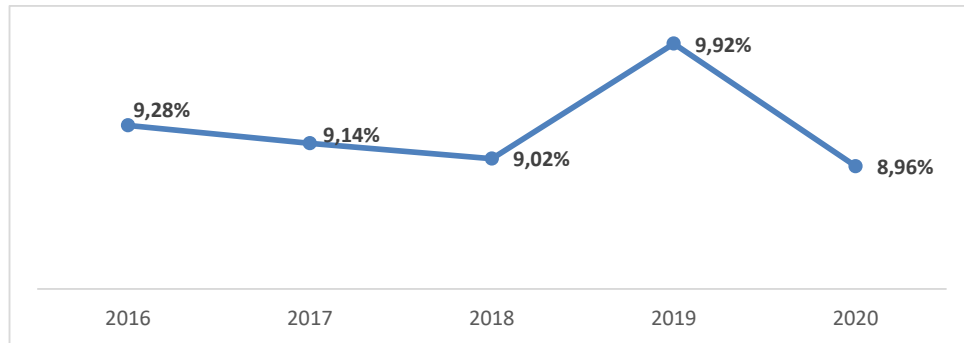
No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	9,28%	9,14%	9,02%	9,92%	8,96%

Sumber : Dinas Pertanian, 2021

Berdasarkan tabel diatas kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Kotabaru cenderung menurun, pada tahun 2016 kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Kotabaru mencapai 9,28 persen dan melambat setiap tahunnya sampai tahun 2018 dan meningkat pada tahun 2019 dan menurun tahun 2020. Salah satu penyebab menurunnya peranan perkebunan adalah ketidakstabilan harga produk lapangan usaha tersebut.

Laju perkembangan kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB Tahun 2016 – 2020.

Gambar 2.21
Laju Perkembangan Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB
Tahun 2016 – 2020



e. Cakupan Bina Kelompok Petani

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pertanian adalah Cakupan Bina Kelompok Petani.

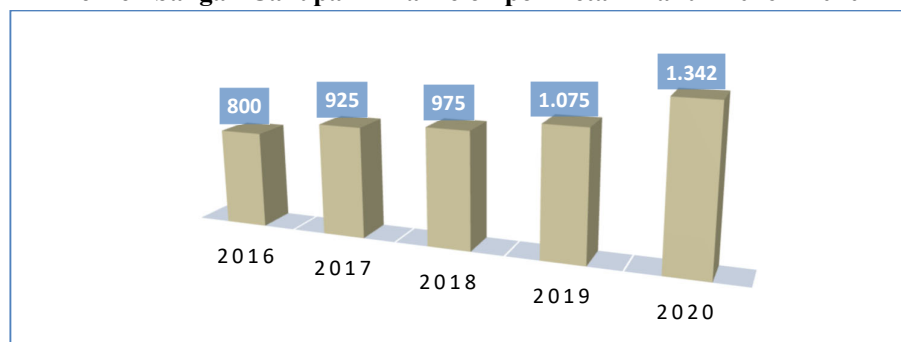
Tabel 2.131.
Cakupan bina kelompok petani Kab Kotabaru

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Cakupan bina kelompok petani	800	925	975	1.075	1.342

Sumber : Dinas Pertanian, 2021

Berdasarkan tabel diatas cakupan bina kelompok petani cenderung meningkat setiap tahunnya. Salah satu penyebabnya meningkatnya peranan kelompok tani di sektor pertanian.

Gambar 2.22
Perkembangan Cakupan Bina Kelompok Petani Tahun 2016 – 2020



f. Produksi Padi atau Bahan Pangan Utama Lainnya

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pertanian adalah produksi padi atau bahan pangan utama lainnya sebagai hasil tanaman pangan utama di Kabupaten Kotabaru

Tabel 2.132.
Produksi Padi atau Bahan Pangan Utama Lainnya Kab Kotabaru

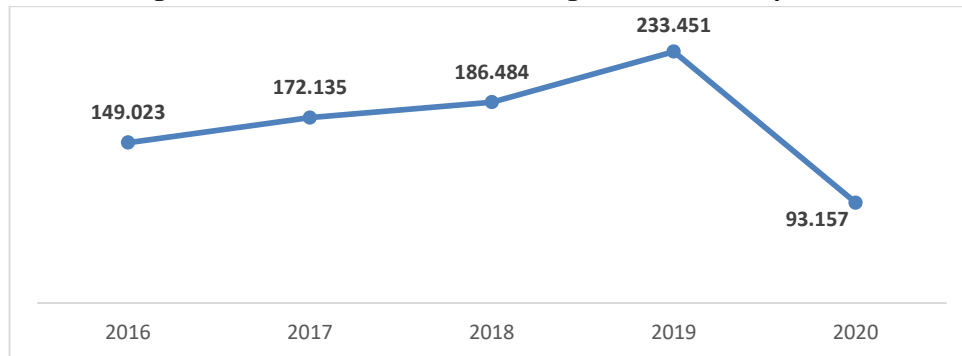
No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Produksi padi atau bahan pangan utama lainnya (ton)	149.023	172.135	186.484	233.451	93.157
	Padi	90.954	107.286	76.746	66.383	33.989
	Jagung	49.296	62.307	106.087	167.046	59.160
	Kedelai	8.773	3.542	3.651	21,4	8

Sumber : Dinas Pertanian, 2021

Berdasarkan tabel diatas produksi padi atau bahan pangan utama lainnya cenderung meningkat setiap tahunnya sampai tahun 2019. Salah satu penyebabnya adanya Program Pemerintah Pusat yaitu Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai (Upsus Pajale). Pada tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan antara lain :

1. Tingginya alih fungsi lahan pertanian
2. Adanya aturan tidak boleh membakar lahan sehingga turunnya produksi padi gogo/padi lahan kering
3. Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air
4. Adanya pandemi covid 19 Tahun 2020 mengakibatkan pengurangan anggaran di bidang pertanian baik APBD maupun APBN
5. Beralihnya mata pencaharian petani ke perusahaan swasta (perkebunan sawit dll)
6. Sulitnya penanganan pasca panen dan pemasaran hasil untuk komoditas kedelai sehingga mengurangi minat petani untuk bertanam kedelai
7. Petani masih banyak yang belum menggunakan bibit unggul dan saprodi (pupuk dan pestisida).

Gambar 2.23
Laju Perkembangan Produksi Padi atau Bahan Pangan Utama Lainnya Tahun 2016 – 2020



g. Produksi Hasil Peternakan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pertanian adalah produksi hasil peternakan (sapi) sebagai hasil peternakan utama di Kabupaten Kotabaru.

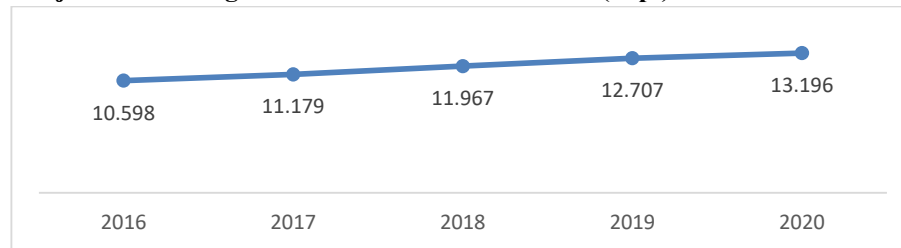
Tabel 2.133.
Produksi hasil peternakan (sapi) Kab Kotabaru

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi Hasil Peternakan (Sapi/Ekor)	10.598	11.179	11.967	12.707	13.196

Sumber : Dinas Pertanian, 2021

Berdasarkan tabel diatas produksi hasil peternakan (Sapi) cenderung meningkat setiap tahunnya. Salah satu penyebabnya peternak sudah menggunakan bibit unggul berkualitas dan telah menerapkan budidaya beternak dengan baik dengan menggunakan pola pemeliharaan ternak dari ekstensif menjadi intensif serta adanya program Pemerintah Pusat yaitu Upaya Khusus Peningkatan Produksi Sapi Wajib Bunting (Upsus SIWAB).

Gambar 2.24
Laju Perkembangan Produksi Hasil Peternakan (Sapi) Tahun 2016 – 2020



h. Produksi Hasil Perkebunan (Kelapa Sawit dan Karet)

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pertanian adalah produksi hasil perkebunan (kelapa sawit dan karet) sebagai hasil perkebunan utama di Kabupaten Kotabaru.

Tabel 2.134.
Produksi hasil perkebunan Kab Kotabaru

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Produksi Hasil Perkebunan (Ton)	90.341	141.455	142.828	84.732	130.058
	Kelapa Sawit	3.236	5.023	5.092	5.377	8.348
	Karet	87.105	136.432	137.736	79.355	121.710

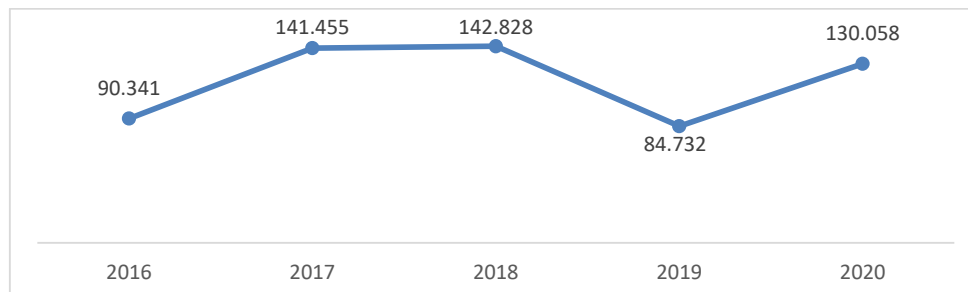
Sumber : Dinas Pertanian, 2021

Berdasarkan tabel diatas produksi perkebunan (Kelapa Sawit dan Karet) cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016 produksi perkebunan mencapai 90.341 Ton. Pada tahun 2017 meningkat hingga pada tahun 2019 menurun lagi dan meningkat kembali tahun 2020.

Hal yang menyebabkan penurunan produksi hasil perkebunan dikarenakan adanya :

1. Minat masyarakat untuk komoditas karet menurun akibat harga karet mengalami penurunan
2. Tingginya alih fungsi lahan kebun karet
3. Tidak tersedianya bibit di penyedia bibit (karet dan sawit) siap salur (penangkar)
4. Peredaran bibit kelapa sawit ilegal dan penurunan produktivitas tanaman yang tidak produktif.

Gambar 2.25
Laju Perkembangan Produksi Hasil Perkebunan (Kelapa Sawit dan Karet)
Tahun 2016 – 2020



3. Perdagangan

Perdagangan adalah sebagai proses tukar menukar yang terjadi atas dasar kesepakatan bersama, baik dalam bentuk jual beli barang maupun jasa. Suatu negara baik dalam negeri maupun luar negara belum dapat memproduksi semua jenis barang dan kebutuhan sendiri, dan mereka harus menerima bantuan dari negara lain.

Ekspor merupakan kegiatan perdagangan internasional, yang pada dasarnya mengirim barang dari dalam ke luar negeri atau ke negara tujuan, ekspor sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi secara nasional, penghasil devisa yang sangat diandalkan. Perkembangan digitalisasi dan peralatan komunikasi memicu setiap negara untuk meningkatkan produksinya untuk dipasarkan negara lain dengan asumsi bahwa di negara tersebut tidak dapat menyediakan barang atau jasa tersebut.

Sebagai faktor peningkatan perdagangan terjadi karena adanya beberapa faktor pendorong yang mengharuskan suatu wilayah atau negara mengadakan kerja sama di bidang perdagangan. Karena setiap wilayah atau negara tidak dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan wilayah/negaranya sendiri tanpa adanya sumber daya dari daerah /negara lain, bisa dari sumber daya alamnya, sumber daya manusia, pemodalan maupun dalam hal teknologi.

Dampak yang ditimbulkan dari perdagangan baik dalam maupun luar negeri dapat dirasakan dari segi kepentingan sosial, politik dan ekonomi untuk membantu mendorong kemajuan industrialisasi, transportasi, globalisasi dan terciptanya lapangan kerja.

Untuk ekspor bersih perdagangan volumenya setiap tahun bisa meningkat bisa juga menurun tergantung kebutuhan pasar dan stok pada tahun bersangkutan.

Tabel 2.135.
Aspek Pelayanan Umum Urusan Perdagangan

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Ekspor Bersih Perdagangan (CPO, CPKO, Palm Kernel, Iron Concentrate, batubara) (ton)	4.951.309,487	2.684.673,614	1.571.844,782	2.665.080,020	4.010.413,93
2	Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal	-	15	-	-	-
3	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	7,34	7,77	7,45	7,50	-1,78

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, 2021

Tabel 2.136.
Perkembangan Ekspor Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
Total Nilai Ekspor (miliar Rp)					
a. ADHB	15.156,77	17.711,07	21.296,79	20.085,28	16.977,43
b. ADHK 2010	13.078,90	14.183,04	14.956,65	15.069,76	13.868,26
Proporsi Terhadap PDRB (% ADHB)	77,77	83,01	93,15	83,26	70,83
Pertumbuhan (%)	0,13	8,44	5,45	0,76	-7,97

Sumber : BPS Kotabaru, 2020

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Secara riil, nilai ekspor selama periode 2016-2019 cenderung meningkat. Pada tahun 2016 nilai ekspor ADH Konstan 2010 mencapai 13.078,90 miliar

rupiah dan terus meningkat hingga menjadi 15.069,76 miliar rupiah pada tahun 2019 lalu menurun di tahun 2020. Sementara nilai ekspor ADH Berlaku menunjukkan fluktuasi meskipun pergerakannya cenderung meningkat dan juga menurun di tahun 2020.

Selama kurun waktu 2016-2020, seiring peningkatan secara nominal nilai ekspor, proporsinya dalam PDRB cenderung menurun, dari 77,77 persen di tahun 2016 meningkat menjadi 83,01 persen pada tahun 2017, 93,15 persen pada tahun 2018 dan menurun drastis menjadi 70,83 persen pada tahun 2020.

4. Perindustrian

Kinerja pelayanan sektor perdagangan sebenarnya tampak dari seberapa besar cakupan bina kelompok pengrajin. Semakin besar cakupan bina kelompok pengrajin maka akan semakin besar pula kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Sektor industri merupakan sektor unggulan yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB. Oleh karena itu layanan pengembangan industri harus tetap dilaksanakan dengan tetap mengedepankan tumbuhnya iklim investasi yang kondusif dengan memperbesar cakupan industri kecil menengah serta ramah lingkungan.

Tabel 2.137.
Aspek Pelayanan Umum dalam Urusan Perindustrian

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Cakupan bina kelompok pengrajin	2	4	5	5	5
2.	Pertumbuhan Industri	97	53	64	60	306
3.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	34,80	35,10	34,87	34,36	33,80

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, 2021

5. Transmigrasi

Transmigrasi (dari bahasa Belanda: *transmigratie*) adalah suatu program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk (kota) ke daerah lain (desa) di dalam wilayah Indonesia. Penduduk yang melakukan transmigrasi disebut Transmigran. Tujuan resmi program ini adalah untuk mengurangi kemiskinan dan kepadatan penduduk

di Pulau Jawa, memberikan kesempatan bagi orang yang mau bekerja, dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah sumber daya di pulau-pulau lain seperti Papua, Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi.

Untuk Kabupaten Kotabaru untuk periode tahun 2016-2021 tidak ada Program Transmigrasi Swakarsa.

6. Kelautan dan Perikanan

Kondisi Kabupaten Kotabaru yang terdiri atas kepulauan dan daratan memiliki potensi laut yang sangat besar. Peningkatan produksi budidaya perikanan laut menjadi penting, karena sektor ini merupakan salah satu andalan Kabupaten Kotabaru di masa mendatang.

Tabel 2.138.
Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotabaru

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi perikanan (Ton)	103.884,80	104.521,85	100.929,65	93.616,03	93.291,14
2	Konsumsi ikan (Kg/kapita)	64,88	63,16	64,18	64,93	64,96
3	Cakupan bina kelompok nelayan (%)	8,66	10,84	8,46	5,44	1,79
4	Produksi perikanan laut	59.432,00	60.395,00	60.874,00	64.684,00	64.798,95
5	Nilai tukar nelayan	-	-	-	-	

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Kotabaru Tahun 2021

Banyak pihak yang terlibat dalam upaya peningkatan konsumsi ikan di tingkat rumah tangga. Saat ini, ada beberapa kampanye yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai konsumsi ikan, baik ditingkat nasional maupun daerah, seperti gerakan Gemar Makan Ikan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Untuk metoda perhitungan angka konsumsi ikan ini berupa penambahan Konsumsi Ikan dalam Rumah Tangga, Konsumsi Ikan Luar Rumah Tangga dan Konsumsi Tidak Tercatat. Pada tahun 2017 terlihat menurun hal ini berdasarkan minat masyarakat (Konsumsi Ikan dalam Rumah Tangga) untuk mengkonsumsi ikan menurun pula.

Oleh karenanya, penerapan upaya-upaya untuk membudayakan konsumsi

ikan sehari-hari diharapkan mampu meningkatkan konsumsi ikan di masyarakat.

Hasil produksi perikanan tahun 2020 menurun pada produksi perikanan budidaya, hal ini dikarenakan perubahan iklim yang tidak menentu, musim kemarau yang cukup panjang berakibat pada kematian ikan, serangan penyakit dan penurunan kualitas lingkungan pada budidaya udang windu.

Namun jumlah produksi tersebut masih memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mengonsumsi ikan.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah terkait dengan daya saing daerah adalah kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada didalam dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan nilai tambah bagi peningkatan daya saing daerah. Salah satu indikator yang dapat menggambarkan aspek kemampuan ekonomi daerah dalam peranannya sebagai pendorong daya saing daerah adalah indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Indikator ini menggambarkan tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah.

Tabel 2.139.
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rupiah) Kabupaten Kotabaru

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Makanan	-	-	695.960	645.071	644.805
2	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga non Makanan	-	-	608.212	573.054	545.370

Sumber : BPS Kotabaru, 2020

Keterbukaan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari indikator berupa rasio dari jumlah ekspor dan impor terhadap PDRB suatu daerah tersebut.

Tabel 2.140.
Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDRB Kabupaten Kotabaru

No	Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
1	Jumlah ekspor barang dan jasa ADHB (Miliar)	15.156,77	17.711,07	21.296,79	20.085,28	16.977,43
2	Jumlah impor barang dan jasa (Miliar)	6.478,73	7.989,65	11.012,66	9.564,97	6.657,29
3	PDRB ADHB (Miliar)	19.489,36	21.336,57	22.863,02	24.123,12	23.969,66
4	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDRB	1,11	1,20	1,41	1,23	0,99

Sumber : BPS Kotabaru, 2020 (diolah)

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fasilitas wilayah dan infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di suatu daerah dan antar-wilayah. Semakin lengkap ketersediaan wilayah/infrastruktur, semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah.

1) Telekomunikasi

Tabel 2.141.
Penggunaan Telepon Rumah dan Seluler Kabupaten Kotabaru

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase penduduk yang menggunakan HP	63,10	63,07	63,02	62,99	62,99
2	Persentase Rumah tangga dengan akses internet	95,5	95,6	95,5	95,5	95,8

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021

2) Ketersediaan daya listrik

Rasio ketersediaan listrik di Kabupaten Kotabaru dalam lima tahun terakhir menunjukan bahwa Kabupaten Kotabaru secara keseluruhan sudah tersedia listrik. Berikut ini perkembangan ketersediaan dan penggunaan listrik di Kabupaten Kotabaru.

Tabel 2.142.
Ketersediaan dan Penggunaan Listrik Kabupaten Kotabaru

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio ketersediaan daya listrik (%)	167,49	310,71	228,54	246,74	204,04
2	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	53,60	57,53	68,51	96,43	96,01

Sumber: PLN kotabaru, 2021

3) Fasilitas Perdagangan dan Jasa

Fasilitas perdagangan dan jasa di Kabupaten Kotabaru dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kotabaru memiliki potensi sebagai destinasi wisata lokal maupun nasional.

Tabel 2.143.
Fasilitas Perdagangan dan Jasa Kabupaten Kotabaru

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Hotel/Penginapan	23	24	24	24	25
2	Jumlah Restoran/Rumah Makan	45	47	50	217	367
3	Jumlah Pasar / Pasar Desa	66	66	62	62	65

Sumber : berbagai sumber, 2021

4) Keamanan dan Ketertiban

Dengan pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Kotabaru yang meningkat dari tahun ke tahun, jumlah tindak kriminalitas dari tahun ke tahun semakin menurun. Hal ini merupakan kondisi yang baik bagi iklim investasi di Kabupaten Kotabaru.

Tabel 2.144.
Angka Kriminalitas Kabupaten Kotabaru

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	514	641	451	433	438
2	Jumlah Penduduk*	325.827	331.326	336.719	342.217	324.965**
3	Angka Kriminalitas (per 100.000)	157,75	193,46	133,94	126,53	134,78

Sumber: Polres Kotabaru, 2021 (diolah), *Proyeksi Tahun berjalan, ** sensus 2020

5) Pelayanan Perizinan

Kemudahan prosedur dan tata cara memperoleh perijinan atau pengurusan ijin untuk berinvestasi merupakan salah satu aktor pendukung minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Kotabaru. Kecepatan birokrasi dalam melayani permohonan perijinan untuk beberapa jenis ijin/surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru adalah < 7 hari, terkecuali ijin untuk mendirikan bangunan.

Dalam perspektif kedepan, pelayanan perijinan ini akan terus disempunakan dan diperbaiki sehingga terjamin kepastian prosedur, waktu dan keamanan perijinan serta pada akhirnya akan memberi kenyamanan dan kemudahan investor untuk berinvestasi di Kotabaru.

Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.145.
Lama Proses Perijinan Kabupaten Kotabaru

No	Uraian	Lama Mengurus (hari)	Jumlah Persyaratan (dokumen)	Biaya resmi (rata-rata maksimum Rupiah)
1	Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)	SS	Melalui OSS (Online Single Submission)	-
2	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	OSS	Melalui OSS (Online Single Submission)	-
3	Ijin Usaha Industri (IUI)	5 Hari	1. Fotocopy KTP 2. Fotocopy NPWP 3. Fotocopy Akta Perusahaan 4. Fotocopy IMB 5. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan 6. Surat Rekomendasi dari lurah dan camat setempat 7. Fotocopy UKL / UPL serta AMDAL 8. Fotocopy SIUP dan TDP	Tidak dipungut biaya
4	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	3 Hari	1. Surat permohonan diketahui Kades / Lurah dan Camat 2. Fotocopy pemohon 3. Fotocopy surat / bukti hak milik tanah 4. Fotocopy bukti lunas PBB tahun terakhir 5. Gambar rencana bangunan 6. Membayar retribusi IMB 7. Surat pernyataan bahwa tanah yang	Harga satuan retribusi

No	Uraian	Lama Mengurus (hari)	Jumlah Persyaratan (dokumen)	Biaya resmi (rata-rata maksimum Rupiah)
			didirikan tidak dalam sengketa 8. Bangunan rehabilitasi / renovasi / restorasi harus melalui IMB terdahulu	

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan UU Cipta Kerja beberapa istilah Ijin berubah menjadi Persetujuan. Kabupaten Kotabaru belum dapat merubah istilah tersebut karena masih menunggu perubahan peraturan daerah yang mengatur mengenai hal tersebut.

2.4.3 Fokus Sumber Daya Manusia

Tabel 2.146.
Rasio Penduduk Menurut Pendidikan yang ditamatkan

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah lulusan S1/S2/S3	6.188	6.349	7.356	7.630	7.819
2	Jumlah Penduduk	317.899	320.683	322.658	323.999	324.965
3	Rasio Lulusan S1/S2/S3	1,95	1,98	2,28	2,35	2,41

Sumber : Disdukcapil Kab. Kotabaru Tahun 2021

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan untuk melihat apakah suatu daerah merupakan kategori daerah maju dengan produktivitas penduduk yang tinggi atau daerah berkembang dengan produktivitas penduduk yang masih rendah. Rasio ini merupakan indikator demografi yang sangat penting. Semakin tinggi angka rasio ketergantungan menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif/tidak produktif lagi. Sementara itu semakin rendah angka rasio menunjukkan semakin rendah beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif/tidak produktif lagi.

Tabel 2.147.
Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk Usia < 15 Tahun	101.668	83.544	83.822	84.104	75.939
2	Jumlah Penduduk Usia > 64 Tahun	10.403	12.274	12.677	14.144	15.173
3	Jumlah Penduduk Usia tidak Produktif (1+2)	112.711	95.818	96.499	98.248	91.112

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
4	Jumlah Penduduk Usia 15-64 Tahun	213.116	224.865	226.159	225.751	233.853
5	Rasio Ketergantungan (%) ((3)/(4)x100)	52,89%	42,61%	43,00%	43,52%	38,96%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

2.5 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dari perangkat daerah diambil dari laporan konsolidasi dari kegiatan belanja langsung APBD Perangkat Daerah pada Aplikasi Sismonep. Sebagai rangkuman dari evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun 2020 dan realisasi RPJMD dirangkum dalam tabel 2.149 Realisasi Sasaran dan Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 – 2021 dan Tabel 2.150 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru.

Tabel 2.148.
REALISASI SASARAN DAN CAPAIAN KINERJA SASARAN RPJMD KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2016 - 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target						Realisasi					Tingkat Capaian				Bidang Urusan
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	%	%	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
Mengembangkan Dan Meningkatkan Sektor-sektor Produksi di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan kelautan untuk menunjang Eko Wisata dan Agrobisnis serta mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan memaksimalkan potensi strategis yang ada di Kabupaten Kotabaru																				
1	Meningkatkan Produksi Hasil Pertanian Tanaman Pangan unggulan	Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan (padi, Jagung, Kedelai)	%	4,79	5,48	5,78	6,73	7,09	7,19	7,32	36,98	16,18	7,71	25,19	-60,10					
2	Meningkatkan Produksi Perkebunan	Peningkatan Produksi Perkebunan (Karet, Kelapa Sawit dan Kakao serta komoditi pendukung lainnya seperti cengkeh, lada, aren dan nilam)	%	42,01	43,45	45,61	48,54	52,19	56,56	61,65	42,95	51,36	52,21	42,00	53,49					Pertanian
3	Meningkatkan Produksi Peternakan Unggulan	Peningkatan Produksi Peternakan (Sapi dan Kerbau)	%	5,03	5,78	6,53	7,28	8,03	8,78	9,53	3,77	5,48	7,05	6,18	3,84					Pertanian
4	Meningkatkan Produksi Perikanan unggulan	Peningkatan Produksi Perikanan	Ton	85.769,80	91.773,69	98.197,84	105.071,69	112.426,71	120.296,58	128.296,58	103.884,80	104.521,86	100.929,27	93.616,03	93.291,14					Kelautan dan Perikanan
5	Meningkatkan Sektor Industri Pengolahan berbasis produk lokal	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	32,97	33,60	34,20	34,90	35,50	36,10	37,00	34,80	35,10	34,87	34,36	33,80					Perindustrian
6	Pengembangan Potensi Sektor Pariwisata Kotabaru	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	39.058	48.823	63.469	85.683	119.957	173.937	60.906	37.505	193.604	541.487	684.569	479.189					Pariwisata
		Jumlah Destinasi Wisata yang dibangun	Destinasi Wisata		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Pariwisata

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target						Realisasi					Tingkat Capaian				Bidang Urusan
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	%	%	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
	Mewujudkan Struktur Ekonomi Yang Berdaya Saing Dan Pro Kerakyatan Dengan Konsep Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan																			
7	Meningkatkan Investasi Kabupaten Kotabaru	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	(Rp 000.000)	30.069.287	32.115.828	34.292.278	36.354.267	38.585.319	41.258.940	43.124.960	30.196.822	34.148.846	34.148.846	34.148.846	34.259.688					Penanaman Modal
8	Menciptakan Lapangan Kerja dan Meningkatkan Kualitas Tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,1	3,36	3,28	3,21	3,15	3,08	2,50	5,54 (6.884 orang)	4,28 (6.710 orang)	4,89 (7.990 orang)	4,94 (7.970 orang)	4,96 (7.810 orang)					Tenaga Kerja
9	Bertambahnya jumlah koperasi yang aktif	Persentase koperasi aktif	%	61	63	65	67	69	70	72	64	64	65	52	54					Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
10	Peningkatan Kewirausahaan & Keunggulan Kompetitif UKM	Persentase UMKM yang mendapat fasilitasi dan Pembinaan	%	35	40	45	50	55	60	65	44	47	52	58	60					Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
11	Terjaganya Ketersediaan Pangan dan Stabilitas Harga	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai Indeks	0,92	0,93	0,94	0,95	0,96	0,97	0,98	0,94	0,94	0,95	0,96	0,97					Pangan
12	Peningkatan kualitas lingkungan	Persentase rehabilitasi kawasan hutan dan lahan kritis	%		70	75	80	85	90	95		4,60	4,60	4,60	4,60					Lingkungan Hidup
		Tingkat Pencemaran lingkungan	%		20	19	17	14	12	10	8,19	9,30	8,63	8,99	9,08					Lingkungan Hidup
	Mewujudkan Pemenuhan Infrastruktur Dasar Untuk Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Layak Dan Sejahtera																			
13	Terpenuhinya peningkatan akses jalan Kabupaten, Kecamatan, dan Desa sebagai sarana penunjang ekonomi dan Wisata	Cakupan Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	%	57,64	63,41	69,17	74,93	80,7	86,46	90	32,02	35,57	44,12	46,82	49,13					Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14	Meningkatnya cakupan pelayanan air minum/air bersih	Cakupan Penyediaan air baku	%	59,84	60	65	70	75	80	85	9,78	18,27	18,3	18,2	18,28					Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Cakupan Pelayanan air bersih	%	24,06	50	55	60	65	70	75	73,37	75,62	76,42	78,63	78,63					Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target						Realisasi					Tingkat Capaian				Bidang Urusan
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	%	%	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
15	Peningkatan Pelayanan Persampahan	Cakupan Pelayanan persampahan	%		70	75	80	85	90	95		27,22	27,22	27,22	27,22					Lingku ngan hidup
16	Peningkatan Pembangunan Fasilitas Umum	Persentase pembangunan fasilitas umum	%		60	65	70	75	80	85	9,32	7,74	1,6	1,17	3,07					Peruma han Rakyat dan Kawasan Permukima n
17	Terbangunnya sarana dan prasarana dasar perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Cakupan rumah layak huni	%	77	84	88	90	92	95	97	77,57	83,76	93,00	94,05	94,79					Peruma han Rakyat dan Kawasan Permukima n
18	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik	Rasio Rumah tangga yang teraliri listrik	%	60	67	74	81	90	95	100	53,59	53,6	53,61							
19	Meningkatnya kuantitas dan kualitas perhubungan	Cakupan Pelayanan Transportasi Angkutan Massal	%	60	65	70	75	85	95	100	67	71	76	86	86					Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
20	Terwujudnya perencanaan ruang untuk Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten	Tingkat Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap RTRW	%	60	62	64	66	68	70	72	97,20	97,20	97,20	97,20	97,20					Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Tingkat Ketersediaan Rencana Tata ruang pada Kawasan Strategis	%	57	61	65	69	73	77	81	0	0	0	0	0,02					Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Mewujudkan Kemandirian Masyarakat Dengan Pendekatan Partisipatif dan Gotong Royong																				
21	Optimalisasi Penggunaan APBDes	Tingkat Penyerapan DAD dan ADD	%	70	80	90	100	100	100	100	97,36	78,94	77,05	85,61	95,32					Pemberday aan Masyaraka t dan Desa
		Tingkat Realisasi APBDes	%	70	80	90	100	100	100	100	-	-	80,65	89,26	96,36					Pemberday aan Masyaraka t dan Desa

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target						Realisasi					Tingkat Capaian				Bidang Urusan
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	%	%	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
22	Peningkatan Pembangunan dan penataan Wilayah Transmigrasi, eks transmigrasi dan wilayah perbatasan	Jumlah Kawasan Transmigrasi dan eks Transmigrasi yang dikembangkan	Kawasan	0	1	1	2	2	3	3										Transmigrasi
23	Peningkatan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	Tingkat keterlibatan masyarakat Desa dalam pembangunan	%	70	80	90	100	100	100	100	100	100	81,81	100	100					Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
24	Meningkatnya partisipasi dan kemitraan antara swasta, masyarakat dan pemerintah	Tingkat Keterlibatan Perusahaan dalam pembangunan	%	60	80	100	100	100	100	100	28,57	57,14	100	100	100					Pemerintahan Fungsi Penunjang
Mewujudkan Masyarakat Yang Religius, Sehat, Cerdas, Terampil																				
25	Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan pendidikan pada semua jenjang Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7,12	7,2	7,3	7,4	7,5	7,6	7,7	7,02	7,18	7,19	7,19	7,43					Pendidikan
		Angka Putus sekolah SD/MI	%	0,16	0,10	0,05	0	0	0	0	0,03	0,03	0,05	0,05	0,06					Pendidikan
		Rata-rata Angka Kelulusan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	94,74	100	100					Pendidikan
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar	%	96,71	97	97,4	98	98,2	99,5	99,5	97,83	96,67	98,5	90,85	92,41					Pendidikan
26	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	66,75	66,85	66,95	67	67,2	67,5	67,8	68,14	68,49	68,61	68,89	69,1					Kesehatan
27	Menurunkan angka kematian ibu	Angka Kematian Ibu	/ 100.000 KL	161	150	135	120	115	110	105	248,96	246,73	331,64	139,25	141,21					Kesehatan
28	Menurunkan angka kematian bayi	Angka Kematian Bayi	/1.000 KL	10,1	10	9	8	7	6	6	17,43	13,85	15,41	11,74	7,26					Kesehatan
29	Pengembangan pelestarian dan kekayaan budaya daerah	Persentase pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya daerah yang difasilitasi	%	45	50	55	60	65	70	80	50	55	60	65	70					Kebudayaan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target						Realisasi					Tingkat Capaian				Bidang Urusan
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	%	%	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
30	Meningkatnya Prestasi Dalam Bidang Olahrag	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	%	65	70	75	80	85	90	90	87,5	91,04	95,14	96,27	97,50					Kepemudaan dan Olahraga
31	Meningkatnya peran serta pemuda dalam bidang pembangunan	Persentase Organisasi pemuda yang sesuai kebijakan kepemudaan	%	30	35	45	55	65	75	75	99,53	98,44	95,61	85,83	98,00					Kepemudaan dan Olahraga
32	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Persentase Pendidikan Agama dan Sarana Keagamaan yang dibantu	%	25	30	35	40	45	50	55	55,33	69,57	66,86	70,52	70,52					Pemerintahan Fungsi Penunjang
33	Mengendalikan Pertambahan penduduk	Pertumbuhan Penduduk	%	2,7	2	2	2	2	2	2	2,5	2,1	1,82	1,82	2					Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
34	Menurunnya angka penyalahgunaan narkoba dan meminimalisir peredaran gelap narkoba	Angka Penyalahgunaan Narkoba	Jumlah								3	10	10	10	10					Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
35	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase focal point PUG Perangkat Daerah yang ditingkatkan kapasitasnya	%	3	10	20	35	50	70	80	3	10	10	10	10					Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase perempuan yang menduduki jabatan strategis	%	25	30	30	30	30	30	30	15,04	15,04	15,04	15,04	6,66					Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target						Realisasi					Tingkat Capaian				Bidang Urusan
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	%	%	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
36	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Cakupan perempuan dan anak yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Mewujudkan Perbaikan Sistem Subsidi, Perlindungan Sosial Dan Penanggulangan/Pengentasan Kemiskinan																				
37	Meningkatkan aksesibilitas penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial terhadap pelayanan sosial dasar	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial	%	50	53	57	60	64	67	70	0	79,88	74,91	69,61	69,61					Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
38	Meningkatkan aksesibilitas Masyarakat Kurang mampu terhadap pelayanan sosial dasar	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin	%	62,24	70,0	78	86	94	100	100	100	81,33	50,19	90,00	90,00					Sosial
39	Meningkatkan aksesibilitas Masyarakat Kurang mampu terhadap Pemberdayaan Ekonomi	Cakupan pelayanan masyarakat miskin yang mendapat Pemberdayaan Ekonomi	%	30	40	50	60	70	80	90			66,67	85,71	85,71					Kesehatan
40	Peningkatan Lembaga Usaha Ekonomi Desa	Persentase Desa yang memiliki BUMDES	%	20	40	60	80	100	100	100	12,62 (25 BUMDES)	35,85 (71 BUMDES)	48,48 (96 BUMDES)	76,77 (152 BUMDES)	76,77 (152 BUMDES)					Pemerintahan Fungsi Penunjang
41	Meningkatnya koordinasi pencegahan dan Penanggulangan Bencana antar instansi	Persentase pencegahan dan Penanggulangan Bencana yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	53,1	89,78	100	100	100					Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan																				

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target						Realisasi					Tingkat Capaian				Bidang Urusan
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	%	%	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
42	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Opini	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP					Pemerintah an Fungsi Penunjang
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	C	CC	B	B	BB	BB	BB	CC	CC	CC	B	B					Non Urusan
		Tingkat Maturitas SPIP	Level	N/A	2	2	3	3	3	3	2	2	3	3	3					Pemerintah an Fungsi Penunjang
43	Meningkatnya efektifitas kelembagaan pemerintahan & manajemen aparatur yang efektif dan professional	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki SOTK sesuai standart yang ditetapkan	%	60	70	75	80	85	90	90	100	100	100	100	100					Pemerintah an Fungsi Penunjang
		Persentase Jabatan yang diisi sesuai dengan Kompetensi	%	10	20	30	40	40	60	60	27,03	29,36	40,71	67,78	52,49					Pemerintah an Fungsi Penunjang
44	Penataan dan penetapan produk hukum daerah	Rasio Prolegda yang menjadi Peraturan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100							Pemerintah an Fungsi Penunjang
45	Penegakan perda melalui penegakan hukum secara tegas	Persentase Penegakan perda	%	18	20	25	30	35	40	40	20	25	30	35	35					Pemerintah an Fungsi Penunjang
46	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip	Persentase SKPD yang telah menerapkan Pengelolaan Arsip Secara Baku	%	60	65	70	80	90	95	95	58,33	58,33	61,11	61,11	73,33					Kearsipan
47	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan administrasi Kependudukan	Rasio Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	%	43,98	45,98	47,98	56,32	58,95	61,90	64,66	75,48	75,56	82,39	75,73	75,39					Administra si Kependudu kan dan Pencatatan Sipil
48	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian	Persentase Capaian Sasaran Tahunan terhadap target sasaran RPJMD	Kategori	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik										Pemerintah an Fungsi Penunjang

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target						Realisasi					Tingkat Capaian				Bidang Urusan
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	%	%	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
	program	Persentase Capaian Sasaran Tahunan terhadap target sasaran RPJMD	Kategori	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik										Statistik
49	Terlaksananya pencegahan dini dan penanggulangan konflik	Persentase konflik yang telah tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100					Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
50	Menurunnya angka pelanggaran hukum dan tindak kriminal serta meningkatnya penuntasan kasus kriminalitas	Persentase Penurunan Pelanggaran Hukum dan Kriminal	%											100	100					Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
51	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	%	70	N.A	N.A	N.A	80	80	N.A				74,45	73,29					Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Keterangan :

	Melampaui
	Tercapai
	Belum Tercapai
	Tidak Tersedia data

Tabel 2.149.
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Program Pembangunan Kabupaten Kotabaru

No	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PD AWAL RPJMD (2016-2020)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM				REALISASI CAPAIAN RPJMD SD 2019	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019			
A	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR														
1	Urusan Pendidikan														
	1. Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya APK PAUD	49,38	54,00	57,00	60,00	64,00	67,00	95,77	96,58	99,25	89,21	100		
	2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Peningkatan APK, APM Pendidikan Dasar	(105 : 95,14) dan (93,54 : 70,22)	106,32 ; 96 dan 94 ; 72,45	107,6 ; 96,7 dan 94,5 ; 73	108,25 ; 97,4 dan 95 ; 73,5	108,50 ; 98,3 dan 96 ; 74	108,60 ; 98,5 dan 96,25 ; 74,5	99,12	48,75	98,00		98,38		
	3. Program Pendidikan Menengah	Tersedianya Sarana dan Peningkatan Pelayanan Mutu Pendidikan Menengah	73,62 dan 63,08	74,00 ; 64,10					100						
	4. Program Pendidikan Non Formal	Melek Aksara	98,67	98,75	98,80	98,90	99,00	99,10	100	96,21	100		80,34		
	5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi	79,39	80,00	81,50	83,00	84,50	86,00	100	60,79	100		100		
	6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Jumlah Fasilitasi Layanan Pendidikan	82,69	84,00	86,00	88,00	90,00	92,00	99,52	98,50	92,59		99,96		
	7. Program Pembangunan Ruang Kelas Baru	Persentase Pendidikan Dasar yang	82,33	83,40	85,00	86,12	87,00	88,12	100		90,00		100		

No	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PD AWAL RPJMD (2016-2020)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM				REALISASI CAPAIAN RPJMD SD 2019	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STAT US
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019			
	(RKB) Pendidikan Dasar 9 Tahun	memenuhi SPM													
	8. Program Pembangunan Ruang Laboratorium IPA SMP Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase Pendidikan Dasar yang memenuhi SPM	60,72	61,50	62,35	63,55	64,00	64,23		99,38	97,59		100		
	9. Program Pengembangan Kurikulum dan Proses Pembelajaran	Persentase Pendidikan Dasar yang memenuhi SPM	55,71	56,25	57,12	58,75	60,00	62,13		84,03					
	10. Program Peningkatan SDM Kepala Sekolah dan Pengawas	Persentase Pendidikan Dasar yang memenuhi SPM	75,63	77,00	79,00	81,00	83,00	85,00	100						
	11. Program Penyediaan Buku-buku Teks Pendidikan Dasar Tingkat SD	Persentase Pendidikan Dasar yang memenuhi SPM	48,09	50,00	62,35	64,00	65,24	67,12	100	99,92	100				
	12. Program Penyediaan Buku-buku Teks Pendidikan Dasar Tingkat SLTP	Persentase Pendidikan Dasar yang memenuhi SPM	55,71	56,25	57,12	58,75	60,00	62,13	100	99,51					
	13. Program Pengembangan Sekolah	Persentase Pendidikan Dasar yang memenuhi SPM	63,22	65,00	67,00	69,00	71,00	73,00		95,43	100				
	14. Program Penyusunan Kurikulum	SPM Dikdas	65,77	67,00	68,12	69,23	70,55	71,33		88,08					
	15. Program Penyampaian Laporan Hasil Akhir Semester	SPM Dikdas	100	100	100	100	100	100	100	89,28	100		100		

No	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PD AWAL RPJMD (2016-2020)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM				REALISASI CAPAIAN RPJMD SD 2019	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STAT US
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019			
	(UAS), Ulanga Kenaikan Kelas (UKK) dan Ujian Akhir (US/UN)														
	16. Program Evaluasi Kinerja Bidang Pendidikan	SPM Dikdas	75,00	77,00	79,00	81,00	83,00	85,00	100	69,85	100		100		
	17. Program Peningkatan Kompetensi Pengawas	SPM Dikdas	75,00	77,00	79,00	81,00	83,00	85,00	100	88,06	100		100		
	18. Program Pengembangan Sekolah	Persentase Pendidikan Dasar yang memenuhi SPM	63,22	65,00	67,00	69,00	71,00	73,00	100		100				
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN														
	1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Cakupan Pelayanan Perpustakaan di Setiap Kecamatan	52,38	66,7	76,19	85,71	90,48	95,24	100	98,61	100		100		
2	URUSAN KESEHATAN														
	DINAS KESEHATAN														
	1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Peningkatan Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	100	100	100	100	100	100	100	93,04	84,44	100	95,66		
	2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	97,72	98,00	98,50	99,00	99,50	100	87,19	77,67	96,25	100	89,25		
	3. Program Pengawasan Obat dan Makanan	Peningkatan Pengembangan Obat Asli													

No	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PD AWAL RPJMD (2016-2020)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM				REALISASI CAPAIAN RPJMD SD 2019	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STAT US
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019			
		Indonesia													
	4. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Peningkatan Pengembangan Obat Asli Indonesia	62,08	65	65	70	70	80	100	38,70	100				
	5. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Cakupan Desa Siaga Aktif (SPM 18)	14	20	40	60	70	75	89,88	68,53	100	100	100		
	6. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin (SPM9)	32	50	60	70	80	90	95,86	91,37	100	100	100		
	7. Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Peningkatan wilayah Pengembangan Lingkungan Sehat	65	65	65	66	70	75	100	76,34	84,12	100	100		
	8. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit (SPM 13)	31,97	40	50	60	70	80	100	99,77	100	100	100		
	9. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan Standarisasi Yankes	-	-	35	50	80	100	37,51	56,85	100	92,76	74,10		
	10. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan (SPM 10)	100	100	100	100	100	100	75,00	75,55	89,83	100			
	11. Program Pengadaan,	Peningkatan dan perbaikan	60	65	70	75	80	82	100	86,51	85,97	92,38	100		

No	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PD AWAL RPJMD (2016-2020)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM				REALISASI CAPAIAN RPJMD SD 2019	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019			
	Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	sarana dan prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya													
	12. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin (SPM 14)	100	100	100	100	100	100	99,89	96,36	100	100	100		
	13. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Cakupan Pelayanan Anak Balita (SPM 8)	46,73	47	96	97	98	98	70,00	80,18	100	100	100		
	14. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	75	75	75	75	80	90	90,00	75,64					
	15. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan bagi para produksi makanan rumah tangga	70	70	70	70	75	75	100	48,75	99,55	100			
	16. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 (SPM 1)	79,39	83	85	90	95	100	60,00	83,80			100		
	17. Program Pelayanan Kunjungan Ibu								80,00	56,32					

No	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PD AWAL RPJMD (2016-2020)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM				REALISASI CAPAIAN RPJMD SD 2019	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019			
	Hamil														
	18. Program Penanganan Ibu Hamil Berisiko Tinggi	Cakupan Ibu Hamil dengan kompilasi kebidanan yang ditangani (SPM 2)	86,2	87	88	89	90	95	60,00	82,22	100	100			
	19. Program Pelayanan Ibu Bersalin (Bulin)	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan yang mempunyai kompetensi Kebidanan (SPM 3)	80,54	83	85	88	90	95	31,41	67,11	98,52	100	100		
	20. Program Pelayanan Neonatus dengan Komplikasi	Cakupan Neonatus dengan Kompilasi yang ditangani (SPM 5)	27,02	50	60	70	80	90	2,47	29,75					
	21. Program Pelayanan Kesehatan Bayi	Cakupan Kunjungan Bayi (SPM 6)	95,4	96	97	98	99	100	90,54	69,46	100	100			
	22. Program Kesehatan Anak Sekolah	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD & Setingkat (SPM 11)	73,27	75	80	85	90	95	50,00	69,84	100	100			
	23. Program Pelayanan Imunisasi Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (SPM 7)	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (SPM 7)	86,63	87	88	89	90	95	100	99,96	100	100	100		
	24. Program	Cakupan	5,17	20	30	40	60	70	100	78,36					

No	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PD AWAL RPJMD (2016-2020)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM				REALISASI CAPAIAN RPJMD SD 2019	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019			
	Pelayanan Kesehatan Pasien Rujukan	Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin (SPM 15)													
	25. Program Gawat Darurat di Sarana Kesehatan	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota (SPM 16)	100	100	100	100	100	100	90,00	73,96	25,00	100			
	26. Program Peningkatan Pelayanan KB	Cakupan Peserta KB Aktif (SPM 12)	42,48	53	60	65	70	75	100	81,82	100				
	27. Program Penyelidikan epidomologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa	Cakupan desa/ kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani < 24 jam (SPM 17)	100	100	100	100	100	100	100	98,04	100	100			
	28. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)	Cakupan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	-	100	100	100	100	100	98,58	100	100	100	99,88		
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH														
	1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	7	8	8	8	10	10	88,89	62,89	65,38	39,05	92,71		

No	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PD AWAL RPJMD (2016-2020)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM				REALISASI CAPAIAN RPJMD SD 2019	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019			
	2. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan		73	80	90	100	100	100	95,38	52,12	61,54	42,43	42,86		
	3. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	42,78	57,04	71,3	78,43	85,56	92,69	99,71	82,61	95,33	97,80	99,44		
	4. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit	50,01	66,68	83,35	88,35	91,69	96,69	90,52	85,48	82,45		100		
	5. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase pembiayaan Operasional Rumah Sakit Melalui Pendapatan BLUD	43,19	43,61	44,45	45,75	47,53	49,83	99,76	67,46	100	100	100		
3	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
	1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya Panjang Jalan dan jembatan dalam kondisi baik	57,64	63,41	69,17	74,93	80,70	86,64	74,15	33,03	97,43	91,45	99,93		
	2. Program	Persentase	14,6	1,02	2,19	3,50	4,67	5,98	96,98	95,76	100				

No	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PD AWAL RPJMD (2016-2020)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM				REALISASI CAPAIAN RPJMD SD 2019	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019			
	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	panjang drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik													
	3. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Berkurangnya prosentase ruas jalan dalam kondisi rusak ringan (berlubang)	21,54	0,44	0,95	1,46	2,04	2,62	96,35	73,39	99,05	100	100		
	4. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Persentase jumlah data jalan dan jembatan yang terupdate	-	16,67	33,34	50,01	66,68	83,35		38,28	100	100	100		
	5. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase kecukupan alat kebinamargaan	76,19	79,37	82,54	87,30	92,06	96,83	98,78	71,04	100	100	100		
	6. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya		53	53 desa	106 desa	159 desa	212 desa	265 desa	97,79	55,31	99,66	95,25	97,93		
	7. Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Jumlah volume	-	-	-	-	-	-	63,53	38,13	4,09	100	100		
	8. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Meningkatnya kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	30	40	45	50	55	60					93,34		

No	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PD AWAL RPJMD (2016-2020)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM				REALISASI CAPAIAN RPJMD SD 2019	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019			
	9. Program pengendalian banjir	jumlah panjang bangunan saluran dan pengaman sungai & pantai	24533	7400m	7500m	7500m	7400m	7500m	98,73	81,75	100		100		
	10. Program Peningkatan Pengembangan Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik		100	100	100	100	100	100	86,55						
	11. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	persentase panjang drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik	50	55	60	65	70	75	94,80	94,33	100	100			
	12. Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Berkembangnya wilayah strategis dan cepat tumbuh	45	50	55	60	65	70	90,04	66,83	100	100	96,93		
	13. Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Tersedianya Sarana dan prasarana air bersih pedesaan dan kecamatan	25	30	35	40	45	50	100	94,28	100	72,29			
	14. Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan (P2KP/PNPM)	Terbangunnya infrastruktur perkotaan	15	20	25	30	35	40	100						
	15. Program Pengaturan dan Pemberdayaan Masyarakat Jasa	Teraturnya masyarakat jasa konstruksi	65	70	75	80	85	90	29,74	100	11,59				

No	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PD AWAL RPJMD (2016-2020)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM				REALISASI CAPAIAN RPJMD SD 2019	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019			
	Konstruksi														
	16. Program Perencanaan Tata Ruang	Tingkat ketersediaan Rencana Tata Ruang	41	100	100	100	100	100	50,94	100	100	100			
	17. Program Pemanfaatan Ruang	Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW	60	2	2	2	2	2	65,11	100		100			
	18. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terlaksanannya pengendalian dan evaluasi pemanfaatan ruang dan tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran penataan ruang (SPM)	100	100	100	100	100	100	61,82		100	100			
	19. Program Peningkatan Infrastruktur Pendukung Kawasan Perkotaan dan Pedesaan	Meningkatnya infrastruktur pendukung kawasan perkotaan dan pedesaan	40	45	50	55	60	65	82,83	86,64	100	100	98,97		
	20. Program penyediaan dan pengolahan air baku	Tersedianya pengolahan air baku	60	65	70	75	80	85	96,04	80,56	90,69	100			
	21. Program pengembangan kinerja pengelolaan air	Meningkatnya kinerja pengelolaan air minum dan air	30	40	45	50	55	60	100	89,62	98,22	97,80			

No	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PD AWAL RPJMD (2016-2020)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM				REALISASI CAPAIAN RPJMD SD 2019	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019			
	minum dan air limbah	limbah													
	22. Pembangunan infrastruktur perkotaan (PNPB - P2KP)														
	23. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Terkelolanya ruang terbuka hijau	20	-	20	40	60	80		89,29	100				
	24. Program Pengembangan Perumahan	Tersedianya infrastruktur perumahan masyarakat	40	45	50	55	60	65	97,25						
	25. Program Lingkungan Sehat Perumahan	Terkondisinya lingkungan sehat perumahan masyarakat	40	45	50	55	60	65	59,52	94,38	100				
	26. Program pengelolaan areal pemukiman	Terkelolanya areal pemukiman	25	30	35	40	45	50	83,26	77,19	67,62				
	27. Program Pembangunan /Peningkatan Perumahan	Meningkatnya infrastruktur perumahan masyarakat	30	35	40	45	50	55	95,62						
	28. Program Pembangunan / Peningkatan Permukiman	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur permukiman masyarakat	35	40	45	50	55	60	94,97						
4	URUSAN WAJIB Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman														
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,														

No	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PD AWAL RPJMD (2016-2020)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM				REALISASI CAPAIAN RPJMD SD 2019	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019			
	PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN														
	1. Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan (P2KP/PNPM)		15	20	25	30	35	40		87,48					
	2. Program Pengembangan Perumahan	Tersedianya infrastruktur perumahan masyarakat	40	45	50	55	60	65		93,70	98,63		100		
	3. Program Lingkungan Sehat Perumahan	Terkondisinya lingkungan sehat perumahan masyarakat	40	45	50	55	60	65		79,25	100	92,03	100		
	4. Program Pembangunan/Peningkatan Perumahan	Meningkatnya infrastruktur perumahan masyarakat	30	35	40	45	50	55		94,16	100	99,70	99,66		
	5. Program Pembangunan/Peningkatan Permukiman	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pemukiman masyarakat	35	40	45	50	55	60		95,76	100	97,52	98,05		
	6. Pembangunan infrastruktur perkotaan (PNPM - P2KP)	Terbangunnya infrastruktur perkotaan	15	20	25	30	35	40				83,70	100		
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN														
	1. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan	Tingkat Ketersediaan Balakar	30	30	40	50	60	70		90,16	100	60,20			

No	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PD AWAL RPJMD (2016-2020)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM				REALISASI CAPAIAN RPJMD SD 2019	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019			
	bahaya kebakaran														
	URUSAN WAJIB KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT														
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN														
	1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan Penegakkan PERDA dan Peraturan Kepala Daerah	100	100	100	100	100	100	83,75	99,67					
	2. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat	100	100	100	100	100	100	95,28	97,22	97,71	100	100		
	3. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Tingkat Ketersediaan Balakar	30	30	40	50	60	70					100		
	4. Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan		-	-	-	-	-	-		99,60	100	100	100		
	5. Program Pemberdayaan	Cakupan Ratio Petugas	-	-	-	-	-	-	100	98,09	100	100			

No	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PD AWAL RPJMD (2016-2020)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM				REALISASI CAPAIAN RPJMD SD 2019	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019			
	Potensi Keamanan	Linmas													
	6. Program Kedaruratan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	Tingkat Penanganan dan Pengurangan Resiko Bencana	90	-	90	90	90	90			100		100		
	7. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Cakupan Wilayah Manajemen Bencana	10	10	20	30	40	50			56,16		100		
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK														
	1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan Penegakkan PERDA dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-	100	85,84	100	98,16	100		
	2. Program pengembangan wawasan kebangsaan		-	-	-	-	-	-	100	97,87	100	100	100		
	3. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan		-	-	-	-	-	-	100	99,08	100	96,30	100		
	4. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)		-	-	-	-	-	-	100						
	5. Program		-	-	-	-	-	-	100	99,50	100	99,98	100		

No	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PD AWAL RPJMD (2016-2020)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM				REALISASI CAPAIAN RPJMD SD 2019	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019			
	pendidikan politik masyarakat														
	6. Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum		-	-	-	-	-	-				99,90	100		
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH														
	1. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Tingkat Ketersediaan Balakar	30	30	40	50	60	70	99,10						
	2. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Peningkatan Rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana	90	90	90	90	90	90	51,65	89,10	100	100	100		
	3. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Cakupan Wilayah Manajemen Bencana	10	10	20	30	40	50	86,92	65,48	100	100	29,18		
	4. Program Kedaruratan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	Tingkat Penanganan dan Pengurangan Resiko Bencana	90	90	90	90	90	90		87,66	69,34	86,82	93,47		
	Kecamatan Pulau Laut Utara														
	1. Program	Cakupan	100	100	100	100	100	100					100		

No	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PD AWAL RPJMD (2016-2020)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM				REALISASI CAPAIAN RPJMD SD 2019	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019			
	peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Penegakkan PERDA dan Peraturan Kepala Daerah													
	Kecamatan Pulau Laut Timur														
	1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan Penegakkan PERDA dan Peraturan Kepala Daerah	100	100	100	100	100	100							
	Kecamatan Pulau Laut Tengah														
	1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan Penegakkan PERDA dan Peraturan Kepala Daerah	100	100	100	100	100	100		100			100		
	Kecamatan Pulau Laut Barat														
	1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan Penegakkan PERDA dan Peraturan Kepala Daerah	100	100	100	100	100	100							
	Kecamatan Pulau Sebuku														
	1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan Penegakkan PERDA dan Peraturan Kepala Daerah	100	100	100	100	100	100							
	Kecamatan Pulau Laut Kepulauan														
	1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan Penegakkan PERDA dan Peraturan Kepala Daerah	100	100	100	100	100	100							

No	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PD AWAL RPJMD (2016-2020)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM				REALISASI CAPAIAN RPJMD SD 2019	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STAT US
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019			
	Kecamatan Pulau Laut Selatan														
	1. Program Pemberdayaan Potensi Keamanan	Cakupan Ratio Petugas Linmas	-	-	-	-	-	-					100		
	Kecamatan Kelumpang Hulu														
	1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan Penegakkan PERDA dan Peraturan Kepala Daerah	100	100	100	100	100	100					100		
	Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar														
	1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan Penegakkan PERDA dan Peraturan Kepala Daerah	100	100	100	100	100	100							
	URUSAN WAJIB SOSIAL														
	DINAS SOSIAL														
	1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	13	13	14	16	18	20	79,58	46,71	100		100		
	2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		12	12	14	16	18	20	80,17	55,39	100	100	100		

No	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PD AWAL RPJMD (2016-2020)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM				REALISASI CAPAIAN RPJMD SD 2019	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019			
	3. Program pembinaan anak terlantar	Jumlah anak terlantar yang dibina	13	13	14	16	18	19	100	96,27	95,00	100	100		
	4. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma		8	8	10	17	21	22	100	11,10		100	100		
	5. Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Berfungsinya Panti/Rumah Singgah	13	13	14	16	18	19	100	28,78	100	100	100		
	6. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)		11	11	15	17	18	19	100	76,80	86,67	100	100		
	7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		15	15	16	20	16	16	100	91,99	70,27	97,35	99,81		
	8. Program Jaminan dan Bantuan Sosial bagi PMKS	Persentase KSM yang memperoleh bantuan dan jaminan sosial	12	12	14	17	17	19		92,59					
	9. Program Pelestarian, Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial									65,59					
	URUSAN WAJIB KETENAGAKERJAAN														

No	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PD AWAL RPJMD (2016-2020)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM				REALISASI CAPAIAN RPJMD SD 2019	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019			
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRAS I														
	1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rasio Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang dilatih	11	11	38	12	13	13	60,13	68,02	99,14	99,44	100		
	2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	11	11	15	18	18	19	100	97,25	100	100	100		
	3. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Sosial	Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja	12	12	14	16	18	20	100	96,91	100	100	100		
	URUSAN WAJIB PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK														
	DINAS PEMBERDAYA AN PEREMPUAN, PERLINDUNGA ANAK, PENGENDALIA N PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA														
	1. Program keserasian	Persentase rumusan	66	10	20	30	20	10	100	92,36					

No	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PD AWAL RPJMD (2016-2020)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM				REALISASI CAPAIAN RPJMD SD 2019	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019			
	kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	kebijakan dalam peningkatan kualitas anak dan perempuan													
	2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Persentase kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak yang ditingkatkan kapasitasnya	20	25	30	40	50	60	96,77	92,86	95,05	76,47	100		
	3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan yang memperoleh peningkatan kualitas hidup	20	25	30	40	50	60	100	97,90	100	100	100		
	4. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Persentase keterlibatan perempuan dalam pembangunan	30	33	35	40	45	50	100	96,28	93,54	85,59	100		
	5. Program Penanganan Pengaduan/Laporan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Cakupan perempuan dan anak yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	100	100	100	100	100	100	100	82,96	100	100	100		
	URUSAN WAJIB														

No	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PD AWAL RPJMD (2016-2020)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM				REALISASI CAPAIAN RPJMD SD 2019	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019			
	KETAHANAN PANGAN														
	DINAS KETAHANAN PANGAN														
	1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Indeks Ketahanan Pangan	100	20	40	60	80	100	95,50	87,66	98,05	97,94	95,09		
	2. Program Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan Daerah	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan dan informasi data	100	20	40	60	80	100	100	99,01	100	96,96			
	3. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan n Kerja	Cakupan Bina Penyuluhan	100	20	25	50	75	100	96,21						
	URUSAN WAJIB PERTANAHAN														
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN														
	1. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Terlaksananya Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	100	100	100	100	100	100	51,40	51,55	79,35	95,30	100		

No	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PD AWAL RPJMD (2016-2020)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM				REALISASI CAPAIAN RPJMD SD 2019	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019			
	2. Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Terselesaikannya mediasi konflik-konflik Pertanahan	12 (kasus)	12	12	12	12	12	66,67	70,32	100	100	100		
	URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP														
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP														
	1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan	20	20	40	60	80	90	100	65,71	100	100	100		
	2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Tingkat keseimbangan ekosistem	20	20	40	80	90	100	100	74,91		93,80	100		
	3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Tingkat pelayanan data dan informasi atas perubahan status lingkungan secara dini	20	20	40	60	80	90	100	84,27	100	91,86	100		
	4. Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Cakupan Pelayanan pencegahan pencemaran sumber udara tidak bergerak	20	20	40	60	80	90	100	88,76	100	100	100		
	5. Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan	Peningkatan Pemantapan Perencanaan Sumber Daya Alam dan	-	-	20	20	20	20		61,36	80,00				

No	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PD AWAL RPJMD (2016-2020)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM				REALISASI CAPAIAN RPJMD SD 2019	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019			
	Ekosistem	Ekosistem													
	6. Program Penanganan Sampah Perkotaan	Cakupan Pelayanan Persampahan	20	20	40	60	80	90		93,90					
	7. Program Konservasi SDM dan Ekosistem	Peningkatan Konservasi terhadap Sumber Daya Alam dan Ekosistem	30	30						94,33					
	URUSAN WAJIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL														
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL														
	1. Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Penataan Administrasi Kependudukan	58,64	61,31	63,97	66,64	69,31	72,31	87,26	92,09	98,52	98,28	98,71		
	URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA														
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA														

No	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PD AWAL RPJMD (2016-2020)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM				REALISASI CAPAIAN RPJMD SD 2019	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019			
	1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat	53 (orang)	51	60	60	60	60	100	94,23	100	100	100		
	2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentasi Desa yang berkembang ekonominya melalui BUMDes	139 (Orang)	20	20	20	20	20	93,43	96,25	100	94,27	100		
	3. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa	148 Kali Pelaksanaan/Pe mbinaan	21 Kecamatan, 202 Desa	21 Kecamatan, 202 Desa	21 Kecamatan, 202 Desa	21 Kecamatan, 202 Desa	21 Kecamatan, 202 Desa	100	90,93	100	100	98,88		
	4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Prosentasi Fasilitasi Peningkatan Kapastitas Aparatur Pemerintah Desa	119 Orang / 456 Pembinaan / 5 Desa	20%	20%	20%	20%	20%		72,72	90,12	100	100		
	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA														
	1. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa	100	100	100	100	100	100	100	99,85	100	6,52	59,80		
	KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR														
	1. Program peningkatan partisipasi	Peningkatan peran serta masyarakat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		

No	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PD AWAL RPJMD (2016-2020)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM				REALISASI CAPAIAN RPJMD SD 2019	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019			
	masyarakat dalam membangun desa	dalam pembangunan desa													
	KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH														
	1. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
	KECAMATAN PULAU SEBUKU														
	1. rogram peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
	KECAMATAN PULAU LAUT BARAT														
	1. rogram peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa	100	100	100	100	100	100	100	99,29	100	100	100		
	KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN														
	1. rogram peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		

No	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PD AWAL RPJMD (2016-2020)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM				REALISASI CAPAIAN RPJMD SD 2019	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019			
	KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN														
	1. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
	KECAMATAN PULAU SEMBILAN														
	1. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa	100	100	100	100	100	100	100	99,31	20,00	100	100		
	KECAMATAN KELUMPANG HILIR														
	1. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa	100	100	100	100	100	100	100	100					
	KECAMATAN KELUMPANG HULU														
	1. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa	100	100	100	100	100	100	100	99,43	100	100	100		
	KECAMATAN KELUMPANG SELATAN														

No	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PD AWAL RPJMD (2016-2020)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM				REALISASI CAPAIAN RPJMD SD 2019	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019			
	1. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
	KECAMATAN HAMPANG														
	1. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
	KECAMATAN KELUMPANG BARAT														
	1. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa	100	100	100	100	100	100		94,50	91,67	100	100		
	KECAMATAN KELUMPANG TENGAH														
	1. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa	100	100	100	100	100	100		100		100	100		
	KECAMATAN KELUMPANG UTARA														
	1. Program peningkatan partisipasi masyarakat	Peningkatan peran serta masyarakat dalam	100	100	100	100	100	100	100	99,27	100	100	100		

No	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PD AWAL RPJMD (2016-2020)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM				REALISASI CAPAIAN RPJMD SD 2019	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019			
	dalam membangun desa	pembangunan desa													
	KECAMATAN SAMPANAHAN														
	1. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa	100	100	100	100	100	100	100	100	100	73,89	100		
	KECAMATAN PAMUKAN BARAT														
	1. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa	100	100	100	100	100	100	100	44,67	100	100	100		
	KECAMATAN SUNGAI DURIAN														
	1. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa	100	100	100	100	100	100	1000	100	100	100	100		
	KECAMATAN PAMUKAN UTARA														
	1. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa	100	100	100	100	100	100	100	97,91	76,92	100	93,62		
	KECAMATAN PAMUKAN														

No	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PD AWAL RPJMD (2016-2020)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM				REALISASI CAPAIAN RPJMD SD 2019	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019			
	SELATAN														
	1. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa	100	100	100	100	100	100	100	100	99,78	100	99,98		
	KECAMATAN PULAU LAUT TJ SELAYAR														
	1. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
	URUSAN WAJIB PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA														
	1. Program Keluarga Berencana	Cakupan PUS Peserta KB Aktif menjadi 65 %	54	56	58	60	62	64	80,86	64,85	98,99	100	100		
	2. Program pelayanan	Cakupan Penyediaan	20	100	100	100	100	100	98,13	82,78	98,85	100	100		

No	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PD AWAL RPJMD (2016-2020)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM				REALISASI CAPAIAN RPJMD SD 2019	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019			
	kontrasepsi	Alat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30 % setiap tahun													
	3. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Cakupan PUS yang isterinya dibawah 20 tahun 3,5 %	9	7,5	7,0	6,0	5,0	4,0	98,37	96,55	74,39	70,27	100		
	4. Program Bina Keluarga Balita	Cakupan Anggota Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB 70 %	40	45	50	55	60	65	100	96,82		92,50	100		
	5. Program Keluarga Berencana PUS Ingin Ber KB Tidak Terpenuhi	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need) 5 %	21	17,5	15,0	11,0	8,0	5,5	100	93,59	100	100			
	6. Program Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga	Cakupan Penyediaan Informasi data mikro keluarga disetiap desa/kelurahan 100% setiap tahun	100	100	100	100	100	100	100	59,02	100	100	100		
	7. Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Presentase Remaja yang Mendapat Pengetahuan Kesehatan	62	64	66	68	70	72	96,55	66,09	100	100	100		

No	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PD AWAL RPJMD (2016-2020)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM				REALISASI CAPAIAN RPJMD SD 2019	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019			
		Reproduksi Remaja													
	8. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Tingkat kualitas kesehatan ibu, bayi dan Anak	18	34	50	66	78	90	100	85,67	100				
	9. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Jumlah Kelompok Pusat Pelayanan Informasi dan konseling KRR	40	5 kelp	5 kelp	5 kelp	5 kelp	5 kelp	85,82	85,33					
	10. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS	Persentasi Penanggulanga n Narkoba PMS Termasuk HIV/AIDS	62	64	66	68	70	72	100	95,55					
	11. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Tingkat Jumlah Tenaga Pendamping yang Terampil	31	35	40	45	50	58	100	92,18	66,67	100			
	URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN														
	DINAS PERHUBUNGAN														
	1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Meningkatnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	7	21	43	57	71	86	100	96,80	100	100	100		
	2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang terpelihara	100	100	100	100	100	100		90,42	100	100			

No	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PD AWAL RPJMD (2016-2020)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM				REALISASI CAPAIAN RPJMD SD 2019	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019			
	3. Program peningkatan pelayanan angkutan	Meningkatnya Pelayanan Angkutan	25	30	35%	40	45	50	98,26	95,28	100	84,34	100		
	4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	40	48	56	64	72	80	100	96,73	100	100			
	5. Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Penurunan Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas	10	15	25	35	45	55	99,65	95,47	100	95,80	100		
	6. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Peningkatan Kelaikan Kendaraan Bermotor	50	100	100	100	100	100	100	98,28	100	100			
	URUSAN WAJIB KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
	1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Tingkat Konsumsi Penggunaan Informasi dan Media Massa	50	55	60	65	70	75					100		
	2. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Ketersediaan Kajian Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi	-	17	34	51	68	85	100	85,83	100	100			
	3. Program Fasilitasi	Peningkatan SDM Bidang	100	100	100	100	100	100	100	85,83		100			

No	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PD AWAL RPJMD (2016-2020)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM				REALISASI CAPAIAN RPJMD SD 2019	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019			
	Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Komunikasi dan Informasi													
	4. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Penyebarluasan Informasi melalui Media Massa	25	30%	35%	40%	45	50	100	98,27	100	100			
	5. Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	Terlaksananya Pendistribusian informasi melalui layanan Internet	21/35/78	21 kec, 35 dan 78 desa	21 kec, 35 dan 78 desa	21 kec, 35 dan 78 desa	21 kec, 35 dan 78 desa	21 kec, 35 dan 78 desa	100	97,98	100	100	100		
	6. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	Pembinaan Kelompok Informasi Kecamatan	100	100	100	100	100	100	100	92,29					
	7. Program Pengembangan Pengamanan Rahasia Negara	Tingkat pengembangan pengamanan Rahasia Negara	416 buah peralatan sandi	150 orang, 66 buah	150 orang, 70 buah	150 orang, 70 buah	150 orang, 70 buah	150 orang, 70 buah	100	97,19		100			
	SEKRETARIAT DAERAH														
	1. Program Pengembangan Pengamanan Rahasia Negara	Tingkat pengembangan pengamanan Rahasia Negara	416 buah peralatan sandi	150 orang, 66 buah	150 orang, 70 buah	150 orang, 70 buah	150 orang, 70 buah	150 orang, 70 buah		87,20	100	100	100		
	URUSAN WAJIB KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH														
	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN														

No	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PD AWAL RPJMD (2016-2020)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM				REALISASI CAPAIAN RPJMD SD 2019	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019			
	DAN PERDAGANGAN														
	1. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Tingkat pertumbuhan UMKM	3	4	4	4	4	4	97,26	86,56	100	96,96			
	2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase UMKM yang mendapat fasilitas dan pembinaan	5,39	1,44	1,57	1,84	2,10	2,36	100	70,14	100	100			
	3. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase UMKM yang bermitra	4,80	1,20	1,20	1,60	1,60	1,60					100		
	4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Tingkat persentase Koperasi aktif	61	63	65	67	69	70	100	85,22	82,57	100	100		
	URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL														
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU														
	1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Peningkatan sistem informasi promosi dan kerjasama	70	80	80	85	85	85	100	97,76	100	100	100		

No	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PD AWAL RPJMD (2016-2020)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM				REALISASI CAPAIAN RPJMD SD 2019	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019			
		investasi penanaman modal													
	2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Peningkatan pelayanan perizinan penanaman modal dan realisasi investasi penanaman modal	43 (Perusahaan)	48	53	58	63	68	100	97,11	100	100	100		
	3. Program Pengembangan Pelayanan Perijinan Terpadu	Terselenggaranya sistem koneksi layanan perizinan untuk memenuhi standar operasional prosedur	20	30	50	75	75	75	100	91,06		100	100		
	4. Program Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu Investasi	Cakupan izin yang diterbitkan dalam pelayanan perizinan	1085	2145 izin	3308 izin	4518 izin	5818 izin	7143 izin	100	89,30	100	100	100		
	5. Program Pengendalian Pelayanan Perijinan	Peningkatan pengendalian evaluasi pelayanan perizinan	80	100	100	100	100	100	100	79,89	100	99,95	100		
	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA														
	1. Program Pengembangan Pelayanan	Terselenggaranya sistem koneksi	20	30	50	75	75	75		100	100	100			

No	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PD AWAL RPJMD (2016-2020)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM				REALISASI CAPAIAN RPJMD SD 2019	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019			
	Perijinan Terpadu	layanan perizinan untuk memenuhi standar operasional prosedur													
	KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR														
	1. Program Pengembangan Pelayanan Perijinan Terpadu	Terselenggara nya sistem koneksi layanan perizinan untuk memenuhi standar operasional prosedur	20	30	50	75	75	75			100	100			
	KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH														
	1. Program Pengembangan Pelayanan Perijinan Terpadu	Terselenggara nya sistem koneksi layanan perizinan untuk memenuhi standar operasional prosedur	20	30	50	75	75	75		100	100	100	100		
	KECAMATAN KELUMPANG HILIR														
	1. Program Pengembangan Pelayanan Perijinan	Terselenggara nya sistem koneksi	20	30	50	75	75	75			100				

No	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PD AWAL RPJMD (2016-2020)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM				REALISASI CAPAIAN RPJMD SD 2019	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STAT US
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019			
	Terpadu	layanan perizinan untuk memenuhi standar operasional prosedur													
	URUSAN WAJIB KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA														
	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA														
	1. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Cakupan bahan perundang-undangan yang dibuat	85	90	93	98	98	100	100	100	100				
	2. Program peningkatan peran serta kepemudaan	Prosentase Pemuda Yang Berperan Pada Pembangunan Daerah	70	80	85	90	95	97	100	96,85	95,22	99,98	100		
	3. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Presentase Pemuda Mandiri	65	68	70	75	78	80	100	96,17	100	100			
	4. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Cakupan Kebijakan Olah Raga	77	80	90	95	95	97	100	98,75	100	88,25			
	5. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan	Jumlah event Olah Raga	78,5	90	95	95	95	97	100	95,19	98,80	98,80	100		

No	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PD AWAL RPJMD (2016-2020)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM				REALISASI CAPAIAN RPJMD SD 2019	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019			
	Olahraga														
	6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olah Raga	78,3	80	82	85	87	90	94,75	88,14	80,07	76,95	100		
	7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda									84,58					
	KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH														
	1. Program peningkatan peran serta kepemudaan	Prosentase Pemuda Yang Berperan Pada Pembangunan Daerah	70	80	85	90	95	97		100		100	100		
	URUSAN WAJIB STATISTIK														
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
	1. Program pengembangan data informasi/statistik daerah	Peningkatan Ketersediaan data informasi (statistik) daerah	100	100	100	100	100	100		99,28	100	100	100		
	URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN														
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN														
	1. Program Pengembangan Nilai Budaya	Fasilitasi pengembangan budaya adat	53,19	54,12	55,34	56,21	57,19	59,00	100	99,77	81,82	76,82			

No	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PD AWAL RPJMD (2016-2020)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM				REALISASI CAPAIAN RPJMD SD 2019	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019			
	2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Tingkat Perkembangan Upaya Pelestarian Budaya dan Kesenian Daerah	70,28	71,13	72,25	73,00	74,23	76		89,67	100	46,11	100		
	3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Tingkat Intensitas Aktivitas Pengelolaan Keragaman Festival Seni Budaya	52,13	53,00	54,00	55,00	56,00	57,00	100	99,90	100	100	100		
	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA														
	1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Kesenian	Tingkat Intensitas Pengiriman Misi Kesenian dalam Rangka Pengembangan dan Pengelolaan Kesenian	93,51	100	100	100	100	100	100	99,88	100	100	100		
	URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN														
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN														
	1. Program Peningkatan Minat Baca dan Layanan	Cakupan Pelayanan Perpustakaan Keliling di	61,9	10	10	20	20	20	99,97	99,74	100	100	100		

No	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PD AWAL RPJMD (2016-2020)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM				REALISASI CAPAIAN RPJMD SD 2019	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019			
	Perpustakaan	Setiap Kecamatan													
	URUSAN WAJIB KEARSIPAN														
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN														
	1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Tercapainya Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	20	10	10	20	20	20		93,15	100	100	100		
	2. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Tercapainya Penyelamatan dan Pelestarian dokumen / arsip daerah	10	10	10	10	20	20	100	99,41	100	100	100		
	3. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Tercapainya Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	-	-	-	20	20	30				100			
	4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Tercapainya Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	-	-	-	-	10	10	100	96,91	100	100	100		
	URUSAN PILIHAN PERIKANAN														
	DINAS PERIKANAN														
	1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Peningkatan pengembangan budidaya perikanan	95,09	100	100	100	100	100	79,02	96,11	91,03	86,54	100		

No	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PD AWAL RPJMD (2016-2020)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM				REALISASI CAPAIAN RPJMD SD 2019	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019			
		dengan penerapan cara berbudidaya ikan yang baik untuk menghasilkan produk perikanan budidaya yang aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat (food safety)													
	2. Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Peningkatan kualitas hidup dan kehidupan nelayan perikanan tangkap	99,02	100	100	100	100	100	94,28	94,61	100	4,15	27,12		
	3. Program Peningkatan dan Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah Sektor Kelautan dan Perikanan		-	100	100	100	100	100	29,53	77,56	23,24				
	4. Program Pengembangan Daya Saing Produk Perikanan dan Kelautan		-	-	100	100	100	100		96,81	100	100	100		
	URUSAN PILIHAN PARIWISATA														
	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA														
	1. Program	Tingkat	100	100	100	100	100	100	100	99,57	100	100	100		

No	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PD AWAL RPJMD (2016-2020)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM				REALISASI CAPAIAN RPJMD SD 2019	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019			
	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pengembangan Pemasaran Pariwisata													
	2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Tingkat Pembangunan Kepariwisataa n Daerah	97,97	20	50	65	80	90	100	66,12	100	97,06	100		
	3. Program Pengembangan Kemitraan	Tingkat Pengembangan Kemitraan	97,81	100	100	100	100	100	100		100	100	100		
	4. Program Pengembangan dan Peningkatan Apresiasi terhadap Pelaku dan Karya Ekonomi Kreatif	Tingkat Pembinaan dan Pengembangan Apresiasi Pelaku dan Karya Ekonomi Kreatif	-	100	100	100	100	100	100						
	URUSAN PILIHAN PERTANIAN														
	DINAS PERTANIAN														
	1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya jumlah petani yang dibimbing	75	75 Orang	250 Orang	250 Orang	250 Orang	250 Orang	100	92,12	99,60				
	2. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Peningkatan Volume Pemasaran Produk Hasil Tanaman Pangan	-	2%	2%	2%	2%	2%	100	75,87	100				
	3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Peningkatan Produktivitas pada dan bahan pangan utama lainnya	3,93	4,26 Ton/Ha	4,29 Ton/Ha	4,33 Ton/Ha	4,41 Ton/Ha	4,45 Ton/Ha	99,62	81,02	45,76		96,49		

No	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PD AWAL RPJMD (2016-2020)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM				REALISASI CAPAIAN RPJMD SD 2019	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019			
	4. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Peningkatan produksi padi dan bahan pangan utama lainnya		43,45%	45,61%	48,54%	52,19%	56,56%	100	75,86	93,62		96,44		
	5. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Cakupan Bina Penyuluhan	100	20%	25%	50%	75%	100%		99,82	100		100		
	6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Tingkat Penekanan Angka Kematian Ternak	4,28	3,00%	2,90%	2,80%	2,70%	2,60	86,40	92,41	100				
	7. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Tingkat Pertumbuhan Populasi dan Produktivitas Ternak	5,03	5,78%	6,53%	7,28%	8,03%	8,78%	99,73	57,66	60,62		100		
	7. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Peningkatan Daya Serap Pasar Terhadap Hasil Produksi Komoditas Peternakan	146.686	151.820 ton	151.820 ton	162.633 ton	168.325 ton	174.217 ton	100						
	8. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Peningkatan Kelompok Pengguna Teknologi Peternakan Berbasis Lokalit	32	4 Kelompok	5 Kelompok	5 Kelompok	5 Kelompok	5 Kelompok	100		100				
	9. Program Pengembangan Agribisnis	Luas Areal Kawasan Sentra Agribisnis Komoditas Unggulan	-	40 Ha	40 Ha	40 Ha	40 Ha	40 Ha	98,62						
	10. Program	Tingkat		100%	100%	100%	100%	100%	100	98,33	100				

No	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PD AWAL RPJMD (2016-2020)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM				REALISASI CAPAIAN RPJMD SD 2019	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019			
	Perencanaan Pembangunan Pertanian/perkebunan daerah	ketersediaan data dan informasi tanaman pangan dan hortikultura													
	URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN														
	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN														
	1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Meningkatnya Perlindungan terhadap konsumen dan terciptanya konsumen yang cerdas	26 (Kali)	23	24	24	24	24	94,83	48,28	100	100	100		
	2. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Meningkatnya negara tujuan ekspor	6 (Kali)	8	8	8	8	8	100	84,01	100	100			
	3. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Meningkatnya Nilai Ekspor	13 (Kali)	8	8	8	8	8	100	87,25		100			
	4. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Meningkatnya Penggunaan Produk dalam negeri	7 (Kali)	3	15	15	15	15	100	89,92					
	5. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	48 (Kali)	49	49	49	53	57	100	97,59	100	100			

No	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PD AWAL RPJMD (2016-2020)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM				REALISASI CAPAIAN RPJMD SD 2019	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019			
	6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan	Meningkatnya sarana prasarana perdagangan	25 (Kali/Buah)	19	21	15	15	14	100	81,84	100	100	100		
	7. Program Pengembangan Data dan Informasi Perdagangan	Meningkatnya database perdagangan	12 (Kali/Dok)	3	3	3	3	3	100	92,83	100	100			
	8. Program Peningkatan dan Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah Sektor Perdagangan	Meningkatnya sumber pendapatan daerah disektor perdagangan	0 (Kali)	1	0	2	3	2	100			100			
	9. Program Penyediaan Sarana dalam Mendukung Pembentukan Unit Metrologi Legal											100			
	URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN														
	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN														
	1. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Cakupan bina kelompok pengrajin	3,86	4,14%	5,16%	5,49%	6,06%	6,45%	100	70,38	100	100			
	2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Tingkat Laju Pertumbuhan Industri	5,06	6%	6%	6%	6%	6%	100	63,28	90,00		96,98		

No	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PD AWAL RPJMD (2016-2020)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM				REALISASI CAPAIAN RPJMD SD 2019	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019			
	3. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	32,97	33,17%	33,37%	33,57%	33,77%	33,97%	100	99,86		100			
	4. Program Penataan Struktur Industri	Tingkat pengembangan klaster industri kecil	3	2%	3%	4%	5%	6%	100	67,80	83,33	96,15			
	5. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Tingkat pertumbuhan sentra IKM	-	-	22,50%	22,50%	22,50%	16,25%		94,82		100			
	6. Program Pengembangan Kelembagaan Industri Kecil dan Menengah	Cakupan peningkatan keterampilan dan promosi hasil produk IKM	100	15%	17%	17%	17%	17%	100	79,81	85,71	100	100		
	URUSAN PILIHAN TRANSMIGRAS I														
	DINAS KETENAGA KERJAAN DAN TRANSMIGRAS I														
	1. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang di kembangkan	11	11%	24%	21%	20%	12%	100	96,70	100	100	100		
	URUSAN PENUNJANG LAINNYA														
	SEKRETARIAT DAERAH														
	1. Program Fasilitasi	Terlaksananya pelayanan dan	80/9/50	80 kali, 9 organisasi	80 kali, 9	80 kali, 9	80 kali, 9	80 kali, 9	65,35	91,82	99,90	99,76	98,07		

No	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PD AWAL RPJMD (2016-2020)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM				REALISASI CAPAIAN RPJMD SD 2019	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019			
	Peningkatan dan Penanganan Sosial, Budaya, Agama	Partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan kesejahteraan Sosial, Nilai Budaya dan Kearifan Lokal		dan 50 jenis keagamaan	organisasi dan 50 jenis keagamaan	organisasi dan 50 jenis keagamaan	organisasi dan 50 jenis keagamaan	organisasi dan 50 jenis keagamaan							
	2. Program Penataan Daerah Otonom	Terlaksananya penataan daerah Otonom	21 kec, 10 kali	-	21 kec	21 kec	21 kec	21 kec		70,32	100	100	100		
	3. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,91	84,16	98,58	97,40	94,52		
	4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Terlaksananya tingkat efektivitas pelaksanaan program kerja pengawasan Tahunan dan Penyampaian Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah	100	100%					98,23						
	5. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Terlaksananya pelayanan dan motivasi PNS terhadap minat baca dan pemanfaatan teknologi informasi	100 (Kliping)	100 buku	100 buku	100 buku	100 buku	100 buku	100	75,67	100	100			

No	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PD AWAL RPJMD (2016-2020)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM				REALISASI CAPAIAN RPJMD SD 2019	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019			
	6. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Terlaksananya monitoring pegawasan dan pembinaan tindak lanjut kerjasama Daerah	9 / 1	19 kali dan 1 dokumen	21 kali dan 1 dokumen	21 kali dan 1 dokumen	23 kali dan 1 dokumen	23 kali dan 1 dokumen	99,35	74,85	100	100	100		
	7. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Terciptanya tingkat ketaatan masyarakat dan Pemerintah terhadap Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94,44	99,07	100	94,62	100		
	8. Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Pemenuhan pembentukan organisasi sesuai ketentuan dan kebutuhan Daerah, pemenuhan penyampaian Laporan Pemerintah Daerah serta terlaksananya kepastian hukum dalam batas permasalahan wilayah administrasi pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	87,71	80,14	100	100	100		
	9. Program Penataan	Terlaksananya penataan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,60	83,48	100	98,51	98,48		

No	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PD AWAL RPJMD (2016-2020)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM				REALISASI CAPAIAN RPJMD SD 2019	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019			
	Organisasi Perangkat Daerah	organisasi perangkat daerah													
	10. Program Fasilitas Pembinaan dan Peningkatan Bidang Ekonomi	Terlaksananya pembinaan Bidang Ekonomi	32/40	32 kali dan 40 org	32 kali dan 40 org	32 kali dan 40 org	32 kali dan 40 org	32 kali dan 40 org	100	71,55	99,99	100	100		
	11. Program Peningkatan Usaha Milik Daerah/Desa (BUMD/BUMDes a)	Terciptanya kegiatan fasilitasi dibidang Migas, kepelabuhanan, PDAM, Mups dan BPR	9	9 kali	9 kali	9 kali	9 kali	9 kali	100	87,79	100	100	100		
	12. Program Promosi Daerah dan Penyebarluasan Hasil-hasil Pembangunan Daerah Otonom	Terlaksananya Promosi dan Penyebarluasan hasil-hasil pembangunan Daerah	8	8 kali	8 kali	8 kali	8 kali	8 kali	100	82,90	100	100	100		
	13. Program Aksi Reformasi Birokrasi)	Terselenggara nya Aksi Reformasi Birokrasi	-	-	100%	100%	100%	100%		90,65	100	100	100		
	14. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	-	100%	100%	100%	100%		92,84	100	100	100		
	15. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pimpinan Daerah	Efektifitas pelaksanaan tugas kedinasan Pimpinan Daerah	65	65 Sistem	65 Sistem	65 Sistem	65 Sistem	65 Sistem	100	86,80	100	100			
	SEKRETARIAT														

No	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PD AWAL RPJMD (2016-2020)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM				REALISASI CAPAIAN RPJMD SD 2019	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019			
	DPRD														
	1. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	100	100%	100%	100%	100%	100%	98,82	84,58	91,72	94,72	98,43		
	SEKRETARIAT KPU														
	SEKRETARIAT KORPRI														
	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA														
	1. Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Peningkatan Penataan Organisasi Perangkat Daerah	100	100%	100%	100%	100%	100%					100		
	KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR														
	1. Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Peningkatan Penataan Organisasi Perangkat Daerah	100	100%	100%	100%	100%	100%			100	100			
	KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH														
	1. Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Peningkatan Penataan Organisasi Perangkat Daerah	100	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100		
	KECAMATAN PULAU SEBUKU														
	1. Program Penataan	Peningkatan Penataan	100	100%	100%	100%	100%	100%			100		100		

No	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PD AWAL RPJMD (2016-2020)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM				REALISASI CAPAIAN RPJMD SD 2019	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019			
	Organisasi Perangkat Daerah	Organisasi Perangkat Daerah													
	KECAMATAN PULAU LAUT BARAT														
	1. Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Peningkatan Penataan Organisasi Perangkat Daerah	100	100%	100%	100%	100%	100%			100	100			
	KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN														
	1. Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Peningkatan Penataan Organisasi Perangkat Daerah	100	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100			
	KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN														
	1. Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Peningkatan Penataan Organisasi Perangkat Daerah	100	100%	100%	100%	100%	100%					100		
	KECAMATAN PULAU SEMBILAN														
	1. Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Peningkatan Penataan Organisasi Perangkat Daerah	100	100%	100%	100%	100%	100%					100		
	KECAMATAN KELUMPANG HILIR														
	1. Program Penataan	Peningkatan Penataan	100	100%	100%	100%	100%	100%			100				

No	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PD AWAL RPJMD (2016-2020)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM				REALISASI CAPAIAN RPJMD SD 2019	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019			
	Organisasi Perangkat Daerah	Organisasi Perangkat Daerah													
	KECAMATAN KELUMPANG HULU														
	1. Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Peningkatan Penataan Organisasi Perangkat Daerah	100	100%	100%	100%	100%	100%		100	100	100			
	KECAMATAN KELUMPANG SELATAN														
	1. Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Peningkatan Penataan Organisasi Perangkat Daerah	100	100%	100%	100%	100%	100%			100		100		
	KECAMATAN HAMPANG														
	1. Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Peningkatan Penataan Organisasi Perangkat Daerah	100	100%	100%	100%	100%	100%		99,85		100			
	KELUMPANG BARAT														
	1. Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Peningkatan Penataan Organisasi Perangkat Daerah	100	100%	100%	100%	100%	100%	100		98,36	100	100		
	KELUMPANG TENGAH														
	1. Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Peningkatan Penataan Organisasi Perangkat Daerah	100	100%	100%	100%	100%	100%					100		

No	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PD AWAL RPJMD (2016-2020)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM				REALISASI CAPAIAN RPJMD SD 2019	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019			
		Daerah													
	KELUMPANG UTARA								100	100	100	100	100		
	1. Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Peningkatan Penataan Organisasi Perangkat Daerah	100	100%	100%	100%	100%	100%							
	SAMPANAHAN														
	1. Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Peningkatan Penataan Organisasi Perangkat Daerah	100	100%	100%	100%	100%	100%		77,14	100	100	100		
	PAMUKAN BARAT														
	1. Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Peningkatan Penataan Organisasi Perangkat Daerah	100	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100		
	SUNGAI DURIAN														
	1. Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Peningkatan Penataan Organisasi Perangkat Daerah	100	100%	100%	100%	100%	100%	100		51,47	100	100		
	PAMUKAN UTARA														
	1. Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Peningkatan Penataan Organisasi Perangkat Daerah	100	100%	100%	100%	100%	100%					100		
	PAMUKAN SELATAN														
	1. Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Peningkatan Penataan Organisasi	100	100%	100%	100%	100%	100%	100	99,34	99,12	100	100		

No	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PD AWAL RPJMD (2016-2020)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM				REALISASI CAPAIAN RPJMD SD 2019	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019			
		Perangkat Daerah													
	PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR														
	1. Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Peningkatan Penataan Organisasi Perangkat Daerah	100	100%	100%	100%	100%	100%				99,99	100		
	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH														
	1. Program Promosi Daerah dan Penyebarluasan Hasil-hasil Pembangunan Daerah Otonom	Peningkatan Promosi Daerah dan Penyebarluasan Hasil-hasil Pembangunan Daerah	100	100%	100%	100%	100%	100%		83,48		100			
	PENGAWASAN														
	INSPEKTORAT														
	1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Penurunan Jumlah Temuan yang telah ditindaklanjuti	92,77	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	99,60	88,59	88,51	81,99	98,48		
	2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur	Persentase Jumlah Auditor dan P2UPD yang memenuhi standar	92,73	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100	71,10	46,12		100		

No	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PD AWAL RPJMD (2016-2020)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM				REALISASI CAPAIAN RPJMD SD 2019	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019			
	Pengawasan														
	URUSAN PERENCANAAN														
	SEKRETARIAT DAERAH														
	1. Program Kerjasama Pembangunan	Peningkatan Kerjasama antar Daerah dan Dunia Usaha	4	4 kali fasilitasi/rapat	4 kali fasilitasi/rapat	4 kali fasilitasi/rapat	4 kali fasilitasi/rapat	4 kali fasilitasi/rapat	100	83,50	99,96		100		
	BAPPEDA														
	1. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Tingkat Kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	100	100%	100%	100%	100%	100%	100	63,17					
	2. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Peningkatan Perencanaan dan Pengembangan pada Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	100	100%	100%	100%	100%	100%		95,89		100			
	3. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Peningkatan Perencanaan dan Pengembangan Kota-Kota Besar dan Menengah	100	100%	100%	100%	100%	100%	100	96,56		100			
	4. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Peningkatan Ketersediaan data informasi (statistik) daerah	100	100%	100%	100%	100%	100%	100			100			

No	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PD AWAL RPJMD (2016-2020)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM				REALISASI CAPAIAN RPJMD SD 2019	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019			
	5. Program Pengembangan data/informasi	Peningkatan Ketersediaan data dan informasi keperluan pembangunan	100	100%	100%	100%	100%	100%	100	99,91		100			
	6. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Peningkatan Perencanaan dan Tahapan Penyelesaian Batas Wilayah	100	100%	100%	100%	100%	100%	100	96,36					
	7. Program Perencanaan Tata Ruang	Tingkat ketersediaan Rencana Tata Ruang	41	100%	100%	100%	100%	100%	100						
	8. Program Pemanfaatan Ruang	Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW	60	2%	2%	2%	2%	2%	100						
	9. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terlaksanannya pengendalian dan evaluasi pemanfaatan ruang dan tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran penataan ruang (SPM)	100	100%	100%	100%	100%	100%	100						
	10. Program perencanaan pembangunan daerah	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan	100	100%	100%	100%	100%	100%	100	97,18	100	100	100		

No	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PD AWAL RPJMD (2016-2020)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM				REALISASI CAPAIAN RPJMD SD 2019	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019			
		daerah													
	11. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Peningkatan Perencanaan Pembangunan Ekonomi	100	100%	100%	100%	100%	100%	100	96,52	100	100	100		
	12. Program Perencanaan Sosial Budaya	Tingkat Penyediaan Data dan Informasi Hasil Penelitian dan Pengembangan	100	100%	100%	100%	100%	100%	100	94,66	100	100	100		
	13. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Tingkat Hasil Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	100	100%	100%	100%	100%	100%	100				100		
	14. Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Tingkat Keselarasan Pengendalian Pembangunan Daerah	100	100%	100%	100%	100%	100%	100	98,87	100	100	100		
	15. Program Evaluasi Pembangunan Daerah	Cakupan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Daerah	100	100%	100%	100%	100%	100%	100	98,52	100	100			
	URUSAN KEUANGAN														
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH														
	1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Tingkat Kualitas Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan	100	100%	100%	100%	100%	100%	99,52	91,91	98,78	95,83	100		

No	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PD AWAL RPJMD (2016-2020)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM				REALISASI CAPAIAN RPJMD SD 2019	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019			
	Daerah	Daerah													
	2. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota	Persentase Tingkat Pengadministrasian Pengelolaan Keuangan Daerah	100	100%	100%	100%	100%	100%	100	84,77	100	100	100		
	3. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Proporsi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah	98	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
	BADAN PENDAPATAN DAERAH														
	1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio antara realisasi pendapatan daerah terhadap target pendapatan daerah	100	100%	100%	100%	100%	100%	88,11	90,03	99,70	100	96,09		
	URUSAN KEPEGAWAIAN														
	SEKRETARIAT DAERAH														
	1. Program Pembinaan, Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan Aparatur	Prosentase Pembinaan, Peningkatan Kinerja Dan Kesejahteraan Aparatur	-	-	20	20	20	20		100	100	100	100		
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANG														

No	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PD AWAL RPJMD (2016-2020)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM				REALISASI CAPAIAN RPJMD SD 2019	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019			
	AN SDM														
	1. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	Tingkat disiplin aparatur	100	100	100	100	100	100	100	9,03		20,70			
	2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Tingkat Pembinaan dan Pengembangan aparatur	18	20	30	45	50	60	92,54	71,33	89,36		99,05		
	3. Program Pendidikan Kedinasan	Tingkat pendidikan kedinasan yang diikuti	20	20	30	35	40	50	100	83,90	99,23	100			
	4. Program Pembinaan, Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan Aparatur	Prosentase Pembinaan, Peningkatan Kinerja Dan Kesejahteraan Aparatur	-	-	20	20	20	20		97,24	99,93	98,20	100		
	5. Program Peningkatan Sistem Informasi Dan Fasilitasi Kepangkatan/Purna Tugas	Cakupan Sistem Informasi Dan Fasilitasi Kepangkatan/Purna Tugas	60	-	70	74	78	80		88,92	99,92	79,68	100		
	6. Program Peningkatan Pelayanan Kepegawaian Satu Pintu	Cakupan Pelayanan Kepegawaian Satu Pintu	-	-	45	50	55	60		92,84	100	100			

Tabel 2.150.
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kotabaru

No	Aspek /Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Capaian Kinerja					Inter pretasi
		2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)						
I	Aspek Kesejahteraan Masyarakat						
I.a	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi						
1	Pertumbuhan PDRB (Rp Jt)	4,25	5,02	4,89	4,17	-1,87	
2	PDRB (Rp. Juta) ADHB	19.489.362,72	21.336.569,18	22.863.020,00	24.123.120,00	23.969.660,00	
3	Inflasi	3,80	3,03	2,26	5,46	1,44	
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,25	5,02	4,89	4,17	-1,87	
5	Pengeluaran per Kapita	11.065	10.777	11.065	11.731	11.530	
6	Indeks Pembangunan Manusia	67,10	67,79	68,32	68,95	68,86	
7	Pertumbuhan Penduduk	0,61	0,87	0,61	0,41	0,30	
8	Jumlah Penduduk	317.899	320.683	322.658	323.999	324.965	
9	Tingkat pengangguran terbuka	3,94	4,28	4,71	5,02	4,96	
10	Angka kemiskinan	4,56	4,38	4,52	4,49	4,22	
I.b	Fokus Kesejahteraan Masyarakat						
	Pendidikan						
1	Angka Melek Aksara	98,67	98,75	98,99	99,05	98,99	
2	Rata Lama Sekolah	7,02	7,18	7,19	7,42	7,43	
	Angka Partisipasi sekolah						

No	Aspek /Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020	
3	Pendidikan dasar	93,41	92,56	86,46	88,13	92,59	
4	APK (SD/MI/Paket A)	106,88	105,13	105	96,89	95,48	
5	APK (SD/MI)	106,88	105,13	105	96,89	95,48	
6	APM (SD/MI/Paket A)	93,41	92,56	86,46	89,13	91,51	
7	APM (SD/MI)	93,41	92,56	86,46	89,13	91,51	
	Angka Partisipasi sekolah						
8	APK (SLTP/MTS/Paket B)	94,32	97,18	85,83	93,27	91,48	
9	APK (SLTP/MTS)	94,32	97,18	85,83	93,27	91,48	
10	APM (SLTP/MTS/Paket B)	71,22	77,91	77,11	85,87	86,61	
11	APM (SLTP/MTS)	71,22	77,91	77,11	85,87	86,61	
12	APK (SMU/Paket C)	Kewenangan Propinsi					
13	APK (SMU)						
14	APM (SMU/Paket C)						
15	APM (SMU)						
	Kesehatan						
16	Usia Harapan Hidup	68,61	68,72	68,89	69,10	69,21	
17	Angka Kematian Bayi	13,85	15,41	11,74	12,2	7,26	
18	Angka kematian Ibu	246,73	331,64	139,25	149,37	141,21	
19	Balita Gizi Buruk (%)	0,05	0,003	0,07	0,08	0,06	
	Pertanahan						
20	Persentase luas lahan aset Pemda yang bersertifikat	0	0,41%	0,50%	0,51%	0,67%	

No	Aspek /Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020	
	Kemiskinan						
21	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	4,56	4,38	4,52	4,49	4,22	
22	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)	369.147	384.977	401.300	416.388	466.121	
23	Jumlah Penduduk miskin	14.780	14.440	15.164	15.287	14.597	
	Ketenagakerjaan						
24	Tingkat pengangguran terbuka	3,94	4,28	4,71	5,02	4,96	
25	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	65,79	68,90	69,97	67,49	64,68	
I.c	Fokus Seni, Budaya dan Olahraga						
	Kebudayaan						
1	Jumlah grup kesenian	25	25	25	30	30	
2	Jumlah gedung kesenian	5	5	5	5	5	
	Pemuda dan olah raga						
3	Jumlah klub olahraga	303	303	303	303	303	
4	Jumlah gedung olahraga	34	34	34	34	34	
II	Aspek Pelayanan Publik						
II.a	Fokus Layanan Urusan Wajib						
	Pendidikan						
	Pendidikan Dasar						

No	Aspek /Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Angka Partisipasi Sekolah (Pendidikan Dasar)	93,41	92,56	86,46	88,13	92,59	
2	Rasio Guru Terhadap murid (SD/MI)	0,07	0,06	0,07	0,07	0,08	
3	Rasio Guru Terhadap murid per kelas rata-rata (SD/MI)	0,07	0,06	0,07	0,07	0,08	
4	Rasio guru murid (SMP/MTS)	0,08	0,06	0,07	0,08	0,08	
5	Rasio Guru Terhadap murid per kelas rata-rata (SLTP/MTS)	1 : 13	1 : 13	1 : 16	1 : 14	1 : 13	
6	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah (SD/MI)	0,05	0,05	0,045	0,045	0,047	
7	Rasio Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah SMP/MTS	0,028	0,029	0,028	0,029	0,033	
	Pendidikan menengah						
8	Angka Partisipasi Sekolah (Pendidikan Menengah)	71,22	77,91	77,11	85,87	90,24	
9	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek Aksara	98,67	98,75	98,83	99,05	99,06	
	Fasilitas Pendidikan:						
10	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100	100	100,00	100	100	
11	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	100	100	100,00	100	100	
	Angka Putus Sekolah:						

No	Aspek /Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020	
12	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	22	10	13	18	20	
13	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	6	3	6	6	13	
14	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	3	1	5	0	1	
	AngkaKelulusan:						
15	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	6.278	6.129	5.833	6.367	5.980	
16	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	2.743	2.801	-	-	3.378	
17	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	4.613	4.489	4.947	5.110	4.965	
18	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	5.363	5.249	5.255	4.962	5.015	
19	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	3.903	3.751	4.170	4.158	4.096	
	Kesehatan						
20	Rasio puskesmas per satuan penduduk	8,59	8,45	8,32	8,18	8,06	
21	Rasio Dokter Gigi	0,049	0,054	0,071	0,053	0,046	
22	Rasio Dokter Spesialis per satuan penduduk	0,025	0,036	0,024	0,020	0,043	
23	Jumlah Rumah Sakit	1	1	1	1	1	
24	Jumlah Puskesmas	28	28	28	28	28	
25	Jumlah Pustu	41	41	41	41	41	
26	Jumlah Dokter	43	41	41	47	49	
27	Jumlah Tenaga Medis	68	70	68	73	73	
28	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	44,67	40,78	54,36	49,13	100	

No	Aspek /Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020	
29	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	58,86	95,44	96,38	96,29	96,4	
30	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	86,14	86,63	89,11	95,05	87,13	
31	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	
32	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	42,79	18,83	36,69	27,85	43,28	
33	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100	
34	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	27,06	33,79	26,5	6,67	7,10	
35	Cakupan kunjungan bayi	98,2	99,58	69,12	99,16	99,2	
36	Cakupan desa/kelurahan mengalami kejadian luar biasa (KLB) yang ditangani < 24 jam	100	100	100	100	100	
37	Cakupan desa siaga aktif	13,86	28,22	28,22	51,49	51,49	
38	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	100	100	100	100	100	
39	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	94,15	81,33	76,63	0	0	
40	Cakupan kunjungan ibu hamil k4	61,9	83,18	63,6	76,8	77,7	

No	Aspek /Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020	
41	Cakupan pelayanan nifas	65,79	95,44	63,59	76,41	99,8	
42	Cakupan ibu hamil dengan komplikasi kebidanan yang ditangani	44,67	40,78	54,36	49,13	100	
43	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan	58,86	95,44	96,38	96,29	96,4	
44	Cakupan pelayanan anak balita	41	43	45	42	36	
45	Cakupan kunjungan bayi	98,2	99,58	69,12	99,16	99,2	
46	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS).	100	100	100	100	100	
47	Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat	≤ 5	≤ 5	≤ 5	1,31	3	
48	Dokter Spesialis pemberi pelayanan di Poliklinik Spesialis	100	100	100	88	95	
49	Kematian pasien > 48 jam	19	16	15	9,42	22,50	
50	Waktu tunggu operasi elektif	2	2	2	1,95	2	
51	Tenaga Medis dengan sertifikat Perawat mahir ICU / setara (D4)	100	100	44	22	39	
52	Rata-rata Kepuasan Pelanggan terhadap layanan RSUD	70	72	77,64	76,60	79,35	
53	Cost recovery (RSUD)	46,17	57,11	84,72	62	70,04	
54	Presentase Rumah Tangga Sehat (PHBS)	6,67	6,67	6,67	8,12	11	
	Pekerjaan Umum						

No	Aspek /Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020	
55	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	23,52	35,57	23,83	23,26	32,98	
56	Rasio Jaringan Irigasi	28,66	35,80	40,78	44,60	48,42	
	Jumlah tempat ibadah						
57	Mesjid	276	276	276	281	281	
58	Langgar/Mushalla	349	349	349	385	385	
59	Gereja (Kristen)	15	15	15	15	15	
60	Gereja (Katolik)	9	9	9	9	9	
61	Pura	7	7	7	7	7	
62	Vihara	8	8	8	8	8	
63	Klenteng	1	1	1	1	1	
64	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	-	297,273	232,922	194,785	236,408	
	Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi						
65	Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi Baik (Km)	-	297,273	232,922	194,785	236,408	
66	Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi Sedang (Km)	-	190,903	54,415	85,566	161,229	
67	Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi Rusak Sedang (Km)	-	323,045	318,207	283,706	327,887	
68	Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi Rusak Berat (Km)	-	561,369	600,029	641,516	480,049	
	Panjang jalan						

No	Aspek /Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020	
69	Panjang Jalan Negara	183,24	183,24	183,24	183,24	183,24	
70	Panjang Jalan Propinsi	46,70	46,70	-	-	-	
71	Panjang Jalan Kabupaten	1.372,59	1.372,59	1.205,57	1.205,57	1.205,57	
72	Panjang Jalan (Total)	1.602,53	1.602,53	1.388,81	1.388,81	1.388,81	
73	Persentase pengangkutan sampah	38,26	38,26	41,35	41,86	41,86	
74	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	16,10	18,10	20,10	-	-	
75	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	-	21,66	19,32	16,16	19,61	
76	persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	63,07	69,99	70,84	71,34	72,19	
	Perumahan						
77	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	39,16	41,25	40,52	40,63	40,51	
78	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	30,37	31,98	32,47	65,86	58,54	
79	Proporsi Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum dari PDAM Kotabaru				20,57	20,96	
80	Jumlah pelanggan yang mendapatkan akses air PDAM	13.834	15.936	18.071	19.048	19.697	
81	Jumlah Rumah Tangga	88.157	89.636	91.096	92.583	93.985	
82	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	87,58	92,97	93,71	94,05	94,07	

No	Aspek /Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020	
83	Jumlah rumah tangga pengguna listrik / Jumlah seluruh rumah tangga x100%	48,20	48,52	59,55	64,13	68,36	
84	Persentase penduduk berakses air minum	14,93	18,36	59,59	63,45	-	
	Penataan Ruang						
85	persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan	229	341	348	269	206	
86	Ketersediaan informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rinci melalui peta analog dan peta digital	-	100	100	100	100	
87	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan daerah tentang RTR wilayah kabupaten beserta rencana rinci	-	100	96	135	100	
	Perencanaan Pembangunan						
88	Dokumen perencanaan RPJPD 2005-2025 yg telah ditetapkan dgn PERDA (Ada/ tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
89	Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA (Ada/ tidak)	Ada	-	-	-	-	
90	Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	1	1	1	1	1	

No	Aspek /Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020	
91	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (Ada/ tidak)	ada	ada	ada	ada	ada	
92	Dokumen Evaluasi RKPD	1	1	1	1	1	
93	Dokumen Evaluasi RPJMD					1	
94	Dokumen Evaluasi Pelaksanaan APBD	1	1	1	1	1	
95	Dokumen LKPJ	1	1	1	1	1	
96	Dokumen Laporan Keterangan Akhir Masa Jabatan	1	0	0	0	1	
	Perhubungan						
97	Jumlah Arus penumpang angkutan umum	259.024	261.692	264.387	267.111	240.399	
98	Rasio ijin trayek	0,0015	0,0017	0,0018	-	-	
99	Jumlah uji kir Angkutan umum	2.861	3.866	1.445	1.140	1.152	
100	Jumlah pelabuhan udara/terminal/Dermaga	38	42	43			
101	Jumlah Dermaga	35	38	36	36	36	
102	Jumlah Pelabuhan Udara	1	1	1	1	1	
103	Jumlah Terminal Bis	1	1	1	1	1	
104	Kepemilikan KIR angkutan umum	1226	1362	95	96	-	
105	Jumlah pelabuhan penyeberangan	4	6	8	8	8	
	Lingkungan Hidup						
106	Pencemaran status mutu air	16 Sungai (25 Titik) (25 Titik)	13 Sungai (21 Titik) (21 Titik)	9 Sungai (20 Titik) (20 Titik)	9 Sungai (17 Titik) (17 Titik)	16 Sungai (31 Titik) (31 Titik)	

No	Aspek /Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020	
107	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	20 perusahaan	15 perusahaan	-	16 perusahaan	8 perusahaan	
108	Penegakan hukum lingkungan			1 Sangsi			
109	Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	5 Pengaduan	5 Pengaduan	5 Pengaduan	5 Pengaduan	5 Pengaduan	
110	Indeks Kualitas Lingkungan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
111	Tingkat pencemaran lingkungan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
	Pertanahan						
112	Persentase luas lahan bersertifikat (Pemekab)	0	0,72	1	1,31	2,85	
113	Penyelesaian kasus tanah Negara	3	6	6	6	6	
114	Penyelesaian izin lokasi	71,43	100	6	3	0	
115	Jumlah penyelesaian konflik-konflik pertanahan	3	0	0	0	0	
	Kependudukan dan Catatan Sipil						
116	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	64,86	62,60	86,03	87,52	90,51	
117	Rasio Bayi berAkte Kelahiran	15,34	15,05	17,60	26,34	31,49	
118	Rasio Pasangan berakte nikah (non muslim)	0	24,63	30,12	26,57	34,50	
119	Kepemilikan KTP	149.291	149.895	193.383	203.928	205.690	
120	Kepemilikan akta kelahiran per 1000	537	579	606	451	461	

No	Aspek /Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020	
	penduduk						
121	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Ada/tidak ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	
122	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Sudah/belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	
123	Kepemilikan dokumen kependudukan (KK, KTP-el, Akta Pencatatan Sipil)	75,48	75,56	82,39	75,75	75,39	
124	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	83,38	81,73	82,95	70,36	64,91	
125	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	53,69	57,91	60,59	45,13	46,12	
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
126	Persentase Partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah	3,8	4,3	4,50	5	5,6	
127	Partisipasi Perempuan di lembaga swasta	15	16,5	17,00	17,5	19	
128	Rasio KDRT	6	6	5	4	4	
129	Partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAK/ Tk. Partisipasi Angk Kerja)	20	25	30,00	35	35	
130	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	80	85	85,00	85	85	
	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera						

No	Aspek /Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020	
131	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,3	2,2	2,2	2,2	2,1	
132	Rasio Akseptor KB	77	79	80	81	83	
133	Cakupan peserta KB aktif	54.229	55.636	56.471	57.318	58.178	
134	Keluarga Pra Sejahtera	10.00	9.00	8.00	7.00	9.00	
135	Keluarga Sejahtera I	24.10	22.60	22.60	21,76	22.60	
	Sosial						
136	Jumlah Panti Sosial yang tersedia	1	1	1	1	1	
137	penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yg memperoleh bantuan sosial	2.061	4.272	8.717	8.758	12.239	
	Ketenagakerjaan						
138	Angka partisipasi angkatan kerja		68,90	70,25	68,03	64,68	
139	Pencari kerja yang ditempatkan	45	408	253	332	155	
140	Keselamatan dan perlindungan	Kewenangan Propinsi					
141	Tingkat pemenuhan hak dan perlindungan pekerja	Kewenangan Propinsi					
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
142	Persentase Koperasi Aktif	64	64	65	51	53	
143	Usaha Mikro dan Kecil	5.971	6.245	6.371	6.720	8.227	
144	Persentase jumlah koperasi yang RAT	42	40	35	47	39	

No	Aspek /Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Capaian Kinerja					Inter pretasi
		2016	2017	2018	2019	2020	
145	Jumlah peningkatan dayaasaing unit Kewirausahaan & UKM	8	10	10	14	15	
146	Fasilitas sarana produksi dan kebijakan UMKM	20	33	16	24	0	
147	Peningkatan kemitraan UKMK	2	4	6	10	10	
148	Pertumbuhan UKM baru	508	274	126	349	1.507	
149	Cakupan bina kelompok pengrajin	2	2	2	7	6	
150	Jumlah koperasi aktif yang RAT	62	60	53	46	40	
151	Jumlah fasilitasi kemitraan koperasi	12	12	12	28	28	
152	Jumlah usaha mikro, kecil dan menengah yang didukung ilmu pengetahuan dan teknologi	111	120	66	210	180	
	Penanaman Modal						
153	Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA)	81	87	93	93	93	
154	Jumlah Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA)	30.196.822	34.148.846	34.148.846	34.148.846	34.259.688	
155	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Data ada di penanaman modal sesuai RPJMD bukan tupoksi naker					
156	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	562.167	800.195	898.870	900.195	976.012	
	Kebudayaan						
157	Jumlah grup kesenian	2	2	2	30		

No	Aspek /Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Capaian Kinerja					Inter pretasi
		2016	2017	2018	2019	2020	
158	Jumlah gedung kesenian	0	0	0	5		
	Kepemudaan dan Olah Raga						
159	Presentase peningkatan prestasi Olahraga tingkat regional dan nasional	87,5	91,04	95,14	96,27	97,5	
160	Jumlah organisasi pemuda	49	49	50	51	52	
161	Jumlah organisasi olahraga	26	29	29	30	31	
162	Jumlah Gedung olahraga	11	14	2	7	7	
	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri						
163	Jumlah LSM Aktif	16	16	16	16	21	
164	Kegiatan pembinaan politik daerah	214	40	1.600	1.150	-	
165	Kegiatan pembinaan partai politik daerah	11	11	11	12	12	
166	Jumlah LSM yang memiliki SKT (Surat Keterangan Terdaftar)	105	-	58	50	6	
167	Jumlah konflik dan penyakit masyarakat yang telah tertangani	15	16	18	16	18	
168	Jumlah agama, suku dan kepercayaan yang dibina	27	27	28	28	29	

No	Aspek /Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020	
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
169	Cakupan rasio petugas linmas	1 Linmas/ RT	1 Linmas/ RT	1 Linmas/ RT	1 Linmas/ RT	1 Linmas/ RT	
170	Jumlah satuan linmas	1220	1220	1220	1220	1220	
171	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	0,0103	0,0103	0,0103	0,0103	0,0103	
172	Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	
173	Jumlah RT	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542	
174	Jumlah Pelanggaran Perda dan/ atau peraturan kepala daerah yang diselesaikan	20	20	20	20	20	
175	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masarakat	64	72	96	96	96	
176	Banyaknya kelompok patroli dikalikan 3 kali patroli dalam sehari	1	1	2	2	2	
177	Banyaknya kelompok kecamatan (jumlah kecamatan)	1	2	2	2	2	
178	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	100	100	100	100	100	
179	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	15	15	15	15	15	

No	Aspek /Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020	
180	Tingkat Kesadaran dan Kewaspadaan Masyarakat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
181	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	76	79	79	79	75	
	Tingkat kualitas penyelenggaraan keuangan daerah	99,01	100	98,78	95,83	100	
182	Tingkat pengadministrasian pengelolaan keuangan daerah	100	100	100	100	100	
183	Proporsi pembinaan pengelolaan keuangan desa	100	100	100	100	100	
184	Jumlah SDM Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	100	100	100	100	100	
185	Jumlah SOP pada SKPD	40%	45%	90%	75%	80%	
186	Jumlah Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di bidang Pemerintahan	170	170	170	170	170	
187	Tingkat pendidikan kedinasan yang diikuti	2	98	111	89	-	
188	Persentase Jumlah Aset yang dikelola Pemerintah Daerah	97,33	100	98,25	100	100	
189	Persentase SKPD yang memiliki SOTK sesuai standart yang ditetapkan	70 (100%)	75 (100%)	80 (100%)	85 (100%)	90 (100%)	
190	Persentase SKPD yang telah mempunyai sistem informasi berbasis WEB	-	-	13	48	56	
191	Tingkat kerjasama pembangunan antara lembaga	18	8	25	18	11	

No	Aspek /Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020	
192	Tingkat Capaian SPM	75	75	80	80	85	
193	Tingkat Kepuasan Layanan Publik (IKM)	20	17	44	53	41	
194	Persentase tempat ibadah yang difasilitasi pembangunannya	24,6	26,88	12,06	19,85	13,32	
195	Opini BPK RI terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	-	
196	Kategori Nilai Reviu LKj Pemda dan Evaluasi LKj SKPD	21-50	51-60	51-60	61-70	61-70	
197	Kepatuhan terhadap Peraturan yang mendasari penyusunan RKA	8 SKPD	8 SKPD	8 SKPD	8 SKPD	8 SKPD	
198	kerjasama antar pemerintah daerah	3	1	2	1	0	
199	Tingkat Pelaksanaan Daerah Otonomi Baru	1	1	1	1	1	
200	Capaian Reformasi Birokrasi	0	0	0	54,73	55-56	
201	Persentase perda dan perbup yang tertata	60	70	80	90	95,58	
202	Jumlah pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	100	100	100	100	100	
203	Tertanganinya korban bencana	100	100	100	100	100	
204	Prosentase Temuan Pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	
205	Prosentase Penerapan Sistem Pengendalian Intern SKPD	20	30	40	50	60	
206	Prosentase jumlah Proyek/Kegiatan yang telah dan bisa dievaluasi	100	100	100	100	100	
207	Jumlah Auditor yang bersertifikasi Penjenjangan JFA	13 Orang	12 Orang	12 Orang	11 Orang	10 Orang	

No	Aspek /Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020	
208	Jumlah P2UPD yang bersertifikasi	8 Orang	8 Orang	8 Orang	7 Orang	7 Orang	
209	Jumlah Aparatur Pengawas yang mengikuti Diklat Substantif	10 Orang	8 Orang	6 Orang	7 Orang	10 Orang	
210	Prosentase pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat	100	100	100	100	100	
211	Prosentase laporan gratifikasi yang dapat ditangani	100	100	100	100	100	
212	Prosentase jumlah Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang diverifikasi	100	100	100	100	100	
213	Tingkat promosi daerah dan penyebarluasan hasil-hasil pembangunan daerah otonomi	1	1	1	0	0	
	Ketahanan Pangan						
214	Tingkat ketahanan pangan daerah	0,93	0,94	0,95	79,56	79,96	
215	Regulasi ketahanan pangan	Tidak Ada	ada	ada	ada	ada	
216	Ketersediaan Pangan Utama (Kg/1000 penduduk)	47.797	45.279	42.761	109,061	76,287	
217	Pola Pangan Harapan (PPH)	73	75	77	75,2	75,6	
218	Rata-rata konsumsi beras	75	70	65	76,2	70,3	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
219	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	202	202	202	202	202	

No	Aspek /Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020	
220	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	21 Kecamatan	21 Kecamatan	21 Kecamatan	21 Kecamatan	22 Kecamatan	
221	LPM Berprestasi	21	21	21	21	21	
222	PKK aktif	202	202	202	202	202	
223	Posyandu aktif	216	226	236	246	256	
	Statistik						
224	Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK/HSU/HSBN)		1	1	1	1	
225	Dokumen PDRB Kabupaten		1	1	1	1	
226	Dokumen PDRB Kecamatan		1	1	1	1	
227	Dokumen Kabupaten Dalam Angka		1	1	1	1	
228	Dokumen Kecamatan Dalam angka		1	1	1	1	
229	Dokumen Inflasi Kabupaten		1	1	1	1	
230	Dokumen Analisa Situasi Ibu dan Anak		-	-	-	-	
231	Dokumen Updating data Kemiskinan		-	-	-	-	
232	Dokumen Profil Kab. Kotabaru		1	1	1	1	
233	Dokumen Indeks Pembangunan Manusia		1	1	1	1	
	Kearsipan						
234	Pengelolaan arsip secara baku	-	-	-	-	4	Baru diterapkan Th 2020

No	Aspek /Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Capaian Kinerja					Inter pretasi
		2016	2017	2018	2019	2020	
235	Peningkatan SDM pengelola perpustakaan dan kearsipan	1	1	1	1	1	
236	Peningkatan SDM pengelola perpustakaan	30	30	40	112	55	
237	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	62	36	40	112	55	
238	Persentase SKPD yang telah menerapkan Pengelolaan Arsip Secara Baku	-	-	-	-	50	Baru diterapkan Th 2020
	Komunikasi dan Informatika						
239	Jumlah surat kabar nasional/lokal	-	-	18	18	18	
240	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	-	-	3	3	3	
241	Web site milik pemerintah daerah	-	-	13	48	56	
242	Pameran/expo	1	1	1	-	-	
243	Tingkat pelayanan informasi publik	-	-	100	100	100	
244	Jumlah informasi dan komunikasi pertumbuhan	-	-	32	35	50	
245	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi tingkat kecamatan	-	-	50	70	80	
	Perpustakaan						
246	Jumlah Perpustakaan	9	9	9	9	9	
	Pengunjung perpustakaan per tahun						
247	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Umum	58.471	43.983	20.667	19.864	6.481	

No	Aspek /Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Capaian Kinerja					Inter pretasi
		2016	2017	2018	2019	2020	
248	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kecamatan/Desa	25.839	22.874	19.949	1.288	837	
	Koleksi buku (buah)						
249	Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Umum	8.708	1.324	1.153	959	451	
250	Jumlah koleksi buku Perpustakaan Kecamatan / Desa	500	2.500	2.500	3.500	3.000	
251	Jumlah Gedung Perpustakaan	4	9	3	9	2	
II.b	Fokus Layanan Urusan Pilihan						
	Pertanian						
1	Jumlah Produksi Padi dan Bahan Pangan Utama lainnya	173.135	126.451	186.484	233.451	90.157	
2	Persentase Peningkatan Produktivitas Padi dan Bahan Pangan Utama Lainnya	4,36	- 0,75	- 4,79	23,09	- 2.23	
3	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya per Ha	4,02	3,39	3,80	4,68	4,57	
4	Kontribusi sektor pertanian (Tanaman Bahan Makanan) terhadap PDRB pada Harga Berlaku	1,65	1,67	1,61	1,58	1,69	
5	Kontribusi sektor pertanian (Tanaman Bahan Makanan) terhadap PDRB pada Harga Konstan	1,57	1,64	1,59	1,58	1,62	
6	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB pada Harga Berlaku	18,99	18,82	18,71	18,70	19,07	

No	Aspek /Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020	
7	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB pada Harga Konstan	18,85	18,79	18,62	18,54	19,01	
	Sub Sektor Perkebunan						
8	Pelatihan Petani	100	50	75	25	-	
9	Luas Perkebunan Karet	34	-	30	-	-	
10	Luas Perkebunan Kelapa Sawit	137	556		63	50	
11	Perkebunan lainnya	-	-	10 (5.000 btg)	20 (2.800 btg)	-	
12	Jumlah Benih//Bibit Tanaman Perkebunan siap salur Bibit Karet	60.000	-	-	-	-	
13	Jumlah Benih//Bibit Tanaman Perkebunan siap salur Bibit Kelapa Sawit	60.000	15.000	5.000	-	7.000	
14	Jumlah panjang jalan produksi perkebunan yang dibangun	14,8	10	1,07	4,4	-	
15	Jumlah gorong-gorong untuk perkebunan	9	6	1	-	-	
16	Cakupan bina kelompok petani	170	-	-	-	-	
	Sub Sektor Peternakan						
17	Produktivitas Pertumbuhan Populasi Ternak Unggulan Daerah (Sapi Potong)	4,26	6,28	8,10	7,01	4,23	
18	Produktivitas Pertumbuhan Populasi Ternak Unggulan Daerah (Kerbau Darat)	1,29	1,34	1,38	1,41	1,45	
19	Tingkat Konsumsi Protein Hewani Perkapita	3,87	3,73	6,22	8,22	7,16	
20	Tingkat Penekanan Angka Kematian Ternak	0,66	0,72	2,62	2,72	2,55	

No	Aspek /Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Capaian Kinerja					Inter pretasi
		2016	2017	2018	2019	2020	
21	Cakupan Pengembangan SDM Peternak Mandiri	89	94	99	104	107	
22	Kontribusi Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB (Juta Rupiah)	82.478,21	85.263,60	89.716,10	96.236,38	98.345,88	
	Kehutanan						
23	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Kewenangan Provinsi					
24	Kerusakan kawasan hutan	Kewenangan Provinsi					
25	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	Kewenangan Provinsi					
	Energi dan Sumber Daya Mineral						
26	Kontribusi sektor pertambangan thd PDRB (HB)	Kewenangan Provinsi					
27	Kontribusi sektor pertambangan thd PDRB (HK)	Kewenangan Provinsi					
				101.000.000			
	Pariwisata						
28	Kunjungan wisata Domestik	37.374	193.574	266.933	684.441	479.100	
29	Kunjungan wisata Mancanegara	131	230	230	128	89	
30	Retribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	123.432.000	224.432.000	224.432.000	769.311.000	903.944.000	
	Kelautan dan Perikanan						
31	Produksi perikanan	103.884,80	104.521,85	100.929,27	93.616,03	93.291,14	

No	Aspek /Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020	
32	Konsumsi ikan	64,88	63,16	64,18	64,93	64,96	
33	Cakupan bina kelompok nelayan	8,66	10,84	8,46	5,44	1,79	
34	Produksi perikanan laut	59.432,00	60.395,00	60.874,00	64.684,00	64.798,95	
35	Jumlah pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Kewenangan Provinsi					
36	Presentase tingkat pendapatan masyarakat melalui pengamanan sumber daya kelautan	Kewenangan Provinsi					
37	Jumlah pengembangan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	Kewenangan Provinsi					
38	Jumlah pengembangan budidaya perikanan	84	106	127	157	169	
39	Presentase pengembangan perikanan tangkap	15,85	35,45	43,25	40,36	64,83	
40	Presentase Tingkat Transaksi jual beli komoditi perikanan melalui berbagai promosi	Kewenangan Provinsi					
41	Jumlah pendapatan daerah dari sektor kelautan dan perikanan	79.513.120	70.095.500	75.064.000	27.525.000	10.000.000	
42	Tingkat Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut	Kewenangan Provinsi					
	Perdagangan						
43	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	906.647,67	1.032.204,20	1.143.633,08	1.266.389,69	1.270.486,50	
44	Ekspor Bersih Perdagangan	422.339.360,23	485.669.510,11	448.077.510,62	-	-	

No	Aspek /Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Capaian Kinerja					Inter pretasi
		2016	2017	2018	2019	2020	
45	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	25	25	25	25	25	
46	Jumlah pengawasan dan penyaluran kebutuhan pokok manusia dan terjaminnya kualitas perdagangan	12	12	12	12	12	
47	Jumlah koordinasi dan kerjasama terhadap isu-isu perdagangan	8	6	9	10	0	
48	Jumlah koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi terkait terhadap pengembangan ekspor	7	1	1	0	0	
49	Jumlah pengembangan pembangunan pasar dan pertumbuhan ekonomi masyarakat	4	1	2	0	0	
50	Jumlah partisipasi pedagang dalam berusaha	1,646	1,772	1,535	1,714	1,312	
51	Jumlah penerimaan pendapatan sektor perdagangan	2.631.450.701	2.175.700.014	2.477,541.316	2.061.715.684	2.259.827.606	
52	Tingkat stabilitas harga dan pasokan pangan	100	100	100	100	100	
	Perindustrian						
53	Jumlah industri kecil	1.528	1.581	1.645	1.705	2.011	
54	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	34,80	35,10	34,87	34,36	33,80	
55	Pertumbuhan Industri.	2	1	2	2	2	

No	Aspek /Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020	
56	Jumlah industri atau kelompok masyarakat yang menerapkan inovasi dan bisnis	60	45	0	0	0	
57	Jumlah produk unggulan daerah	5	5	6	6	6	
58	Pengembangan inovasi produksi IKM	4	4	1	1	2	
59	Jumlah hasil kualitas produksi industri kecil menengah	5	5	5	5	5	
60	Jumlah fasilitas sarana dan prasarana IKM	0	7	5	27	1	
61	Jumlah keterampilan dan promosi hasil produk IKM	6	3	6	6	1	
62	Jumlah teknologi tepat guna yang diterapkan sesuai tema SIDA	100	100	100	100	100	
63	Peningkatan pengendalian evaluasi pelayanan perindustrian	10	2	2	2	2	
III	Aspek Daya Saing						
III.a	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah						
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
1	Jumlah dan Macam Pajak Retribusi Daerah	11 Pajak, 3 Retribusi	11 Pajak, 3 Retribusi	11 Pajak, 3 Retribusi	11 Pajak, 3 Retribusi	11 Pajak, 3 Retribusi	
2	Jumlah usaha milik daerah /desa (BUMD/BUMDes)	25	71	96	152	159	

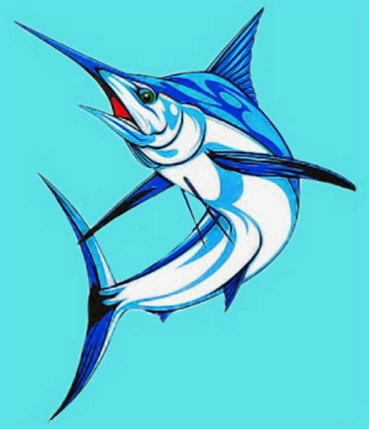
No	Aspek /Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020	
3	Persentase Penerimaan PBB	64,53	107,16	101,20	134,55	111,06	
III.b	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur						
	Perhubungan						
1	Jumlah Orang/Barang yang terangkut angkutan umum (Orang)	259.024	261.692	264.387	267.111	261.768	
2	Jumlah Orang /Barang melalui Dermaga/Bandara/Terminal per tahun (Orang)	584.192	590.136	596.127	602.168	596.158	
	Penataan Ruang						
3	Tingkat Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap RTRW	70	97,3	97,2	97,2	97,2	
4	Luas Wilayah Produktif	75,4	75,4	75,4	75,4	75,4	
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
5	Jenis dan jumlah Bank dan Cabang-cabangnya	-	-	-	37	33	
6	Jenis, kelas, dan jumlah restoran	45	47	50	50	48	
7	Jenis, kelas dan jumlah penginapan hotel	43	38	37	38	24	
	Lingkungan Hidup						
8	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	11,14	14,93	18,36	59,59	59,77	

No	Aspek /Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020	
	Komunikas dan Informatika						
9	Ketersediaan Daya listrik	167,49	310,71	228,54	246,74	204,04	
10	Persentase Rumah Tangga yg menggunakan HP/telepon	63,10	63,07	63,02	62,99	62,99	
III.c	Fokus Iklim Investasi						
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
1	Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	514	641	451	433	438	
2	Angka Kriminalitas (per 100.000)	157,75	193,46	133,94	126,53	134,78	
3	Izin Jasa Usaha yang Diterbitkan	1009	929	1653	1016	607	
4	Izin tertentu yang diterbitkan	670	693	750	445	400	
5	Jumlah Perda pendukung iklim usaha	4 Perda/ Perbup	4 Perda/ Perbup	4 Perda/ Perbup	4 Perda/ Perbup	2 Perda/ Perbup	
6	Terselenggaranya sistem koneksi layanan perijinan untuk memenuhi standar operasi prosedur (SOP)	-	70	15	15	-	
7	Jumlah SOP pelayanan perizinan	-	25	-	-	-	
8	Jumlah database perizinan	1	1	1	1	1	
9	Jumlah profil perizinan	-	1	-	-	-	

BAB 3

GAMBARAN KEUANGAN

DAERAH



Produksi Padi



Potensi Pertanian



BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Kondisi keuangan daerah menjadi faktor yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa gambaran keuangan daerah dimaksudkan untuk menjelaskan tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Dalam lingkup mikro gambaran keuangan daerah meliputi analisis pengelolaan keuangan daerah baik dari segi pendapatan maupun belanja daerah. Berbagai literatur dan *best practice* mengemukakan bahwa manajemen pembelanjaan pemerintah daerah adalah instrumen kunci dari kebijakan pemerintah daerah, karena itu disarankan kepada otoritas penganggaran untuk mencermati adanya hubungan integral dan keseimbangan antara “*revenue* dan *expenditure*”. Hal ini penting untuk menjaga terciptanya keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*) daerah serta perspektif pembangunan yang berorientasi jangka menengah dan panjang.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menyatu dalam kerangka APBD. APBD hakikatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. APBD disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk tahun tertentu.

Gambaran kinerja keuangan daerah dapat ditunjukkan dengan pertumbuhan dan proporsi komponen APBD berupa: pendapatan, belanja dan

pembiayaan daerah selama periode tersebut. Analisis terhadap kinerja keuangan periode sebelumnya merupakan acuan bagi penyusunan rencana anggaran berikutnya.

Perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam; (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan; (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi; (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru dalam memproyeksikan perencanaan pembangunan daerah di masa mendatang, khususnya dalam memproyeksikan target kinerja keuangan periode mendatang. Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan tahun sebelumnya, dapat diketahui berapa rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, yang dapat dijadikan ukuran dalam penentuan target keuangan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi aspek pendapatan dan aspek belanja serta aspek pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan, Pendapatan yang sah lainnya. Adapun Aspek Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak terduga dan Belanja Transfer. Selanjutnya untuk aspek Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

3.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Di dalam PAD terdapat

komponen pajak daerah dan retribusi daerah serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Untuk dana perimbangan merupakan dana yang diperoleh pemerintah Kabupaten Kotabaru dari pemerintah pusat sebagai perwujudan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal. Selain sumber pendapatan yang diperoleh dari PAD dan dana perimbangan, pemerintah Kabupaten Kotabaru juga memperoleh lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa Hibah, bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya dan dana penyesuaian dan otonomi khusus.

Secara rinci perkembangan realisasi pendapatan Kabupaten Kotabaru tahun 2016 s/d tahun 2020 tercantum pada tabel berikut:

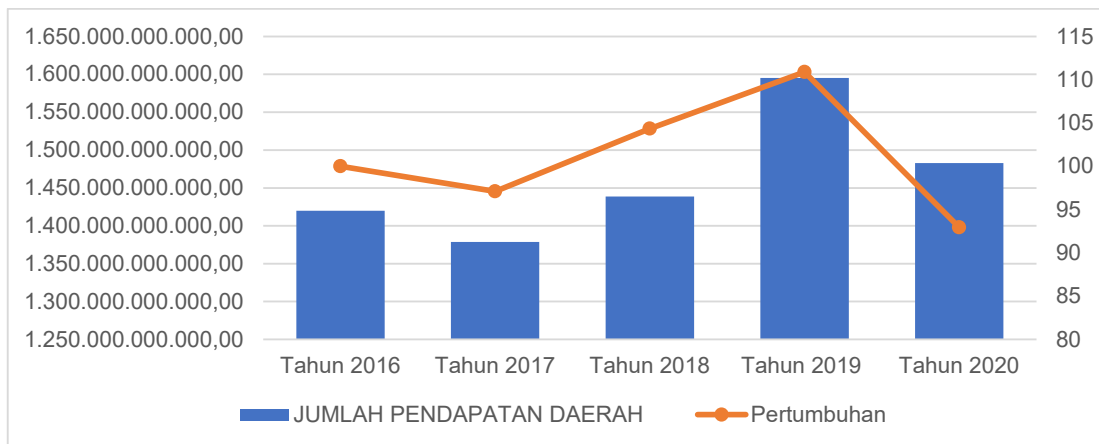
Tabel 3.1.
Realisasi Pendapatan Kabupaten Kotabaru
Tahun 2016 s.d tahun 2020

No	Uraian	Jumlah					
		Realisasi APBD P Tahun 2016	Realisasi APBD P Tahun 2017	Realisasi APBD P Tahun 2018	Realisasi APBD P Tahun 2019	Realisasi APBD P* Tahun 2020	Rata-rata Pertumbuhan(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1	Pendapatan asli daerah	140.286.228.727,58	118.011.275.041,74	131.884.059.671,26	130.669.444.314,80	141.663.783.904,02	0,84
1.1.1	Pajak daerah	45.928.113.225,00	42.882.279.669,00	63.436.269.358,00	62.536.370.544,00	59.634.455.037,00	
1.1.2	Retribusi daerah	5.289.836.184,00	4.974.832.392,00	5.085.736.912,00	6.995.835.427,00	5.322.859.753,00	
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	11.565.687.967,00	11.041.338.802,00	12.609.153.948,00	5.146.790.214,00	7.851.196.105,00	
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang Sah	77.502.591.351,58	59.112.824.178,74	50.752.899.453,26	55.990.448.129,80	68.855.273.009,02	
1.2	Dana perimbangan	1.068.684.884.404,00	951.257.673.795,00	1.004.540.072.270,00	1.106.940.376.412,00	973.319.571.783,00	-1,82
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	340.423.925.680,00	214.237.796.865,00	224.111.821.775,00	266.053.312.872,00	214.168.516.181,00	
1.2.2	Dana alokasi umum	607.886.563.000,00	597.207.951.000,00	612.929.409.000,00	637.069.672.000,00	590.032.258.000,00	
1.2.3	Dana alokasi khusus	120.374.395.724,00	139.811.925.930,00	167.498.841.495,00	203.817.391.540,00	169.118.797.602,00	
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	210.884.577.316,00	309.345.225.135,00	302.135.076.200,00	357.609.036.091,00	367.692.351.351,00	16,38

No	Uraian	Jumlah					
		Realisasi APBD P Tahun 2016	Realisasi APBD P Tahun 2017	Realisasi APBD P Tahun 2018	Realisasi APBD P Tahun 2019	Realisasi APBD P* Tahun 2020	Rata-rata Pertum- buhan(%)
1.3.1	Hibah	467.360.754,00	49.302.224.956,00	43.688.329.910,00	42.775.999.515,00	46.120.490.000,00	
1.3.2	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	92.355.053.183,00	99.965.272.979,00	113.499.696.290,00	136.929.118.576,00	101.784.157.851,00	
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	118.062.163.379,00	160.077.727.200,00	144.947.050.000,00	177.903.918.000,00	219.787.703.500,00	
	- Dana Insentif Daerah (DID)		7.500.000.000,00				
	- Dana Desa (DD)		152.577.727.200,00	144.947.050.000,00			
1.3.4	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)	-	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.419.855.690.447,58	1.378.614.173.971,74	1.438.559.208.141,26	1.595.218.856.817,80	1.482.675.707.038,02	1,32

Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2020 menunjukkan fluktuasi dari sebesar Rp. 1.419.855.690.447,58 pada tahun 2016 menjadi Rp. 1.482.675.707.038,02 di tahun 2020. Perkembangan pendapatan daerah digambarkan oleh grafik dibawah ini:

Gambar 3.1.
Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru
Tahun 2016 – 2020

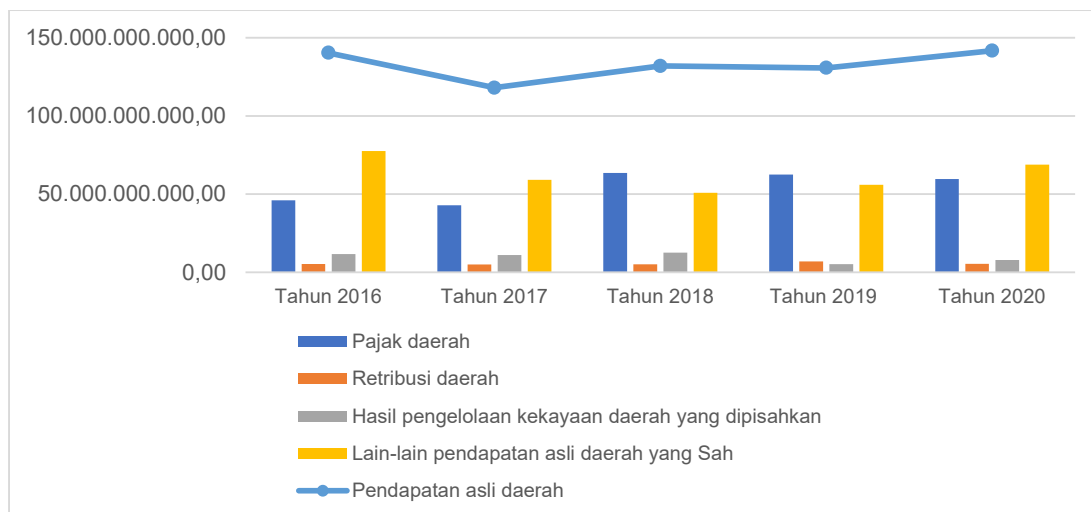


Berdasarkan data realisasi pendapatan daerah tahun 2016-2020 dan jika dibandingkan antara realisasi tahun 2016 dan tahun 2020, pendapatan daerah Kabupaten Kotabaru mengalami peningkatan sebesar 4,24 persen dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah per tahun sebesar 1,32 persen. Pendapatan daerah Kabupaten Kotabaru didominasi dari dana perimbangan dengan proporsi terhadap total pendapatan daerah cenderung menurun pada tahun 2016 sebesar 75,27 persen menjadi 65,65 persen pada tahun 2020 yaitu Rp. 1.068.684.884.404,00 di tahun 2016 menjadi Rp. 973.319.571.783,00 di tahun 2020 atau rata-rata turun sebesar -1,82 persen.

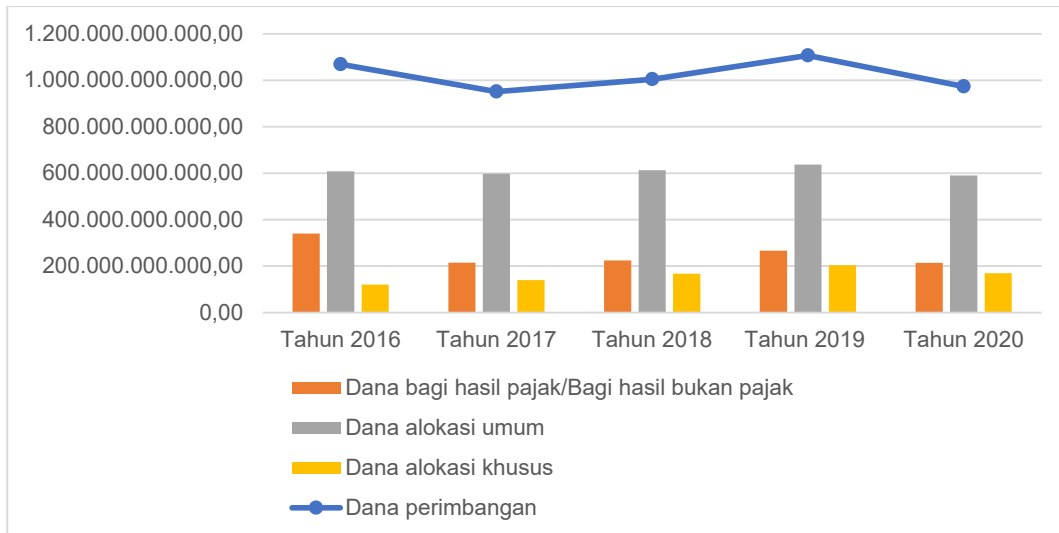
Proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah cenderung menurun dari tahun ke tahun yaitu sebesar 9,88 persen pada tahun 2016 menjadi 8,19 persen pada tahun 2020 namun secara jumlah PAD tumbuh dari Rp. 140.286.228.727,58 di tahun 2016 dan menjadi Rp. 141.663.783.904,02 atau rata-rata sebesar 0,84 persen. Adapun proporsi lain-lain pendapatan yang sah terhadap total pendapatan daerah cenderung meningkat 14,85 persen pada tahun 2016 menjadi 24,80 persen pada tahun 2020 yaitu Rp. 210.884.577.316,00 di tahun 2016 menjadi Rp. 367.692.351.351,00 atau rata-rata 16,38 persen.

Perkembangan unsur-unsur yang ada pada pendapatan daerah terhadap dari tahun ke tahun tercantum pada gambar berikut:

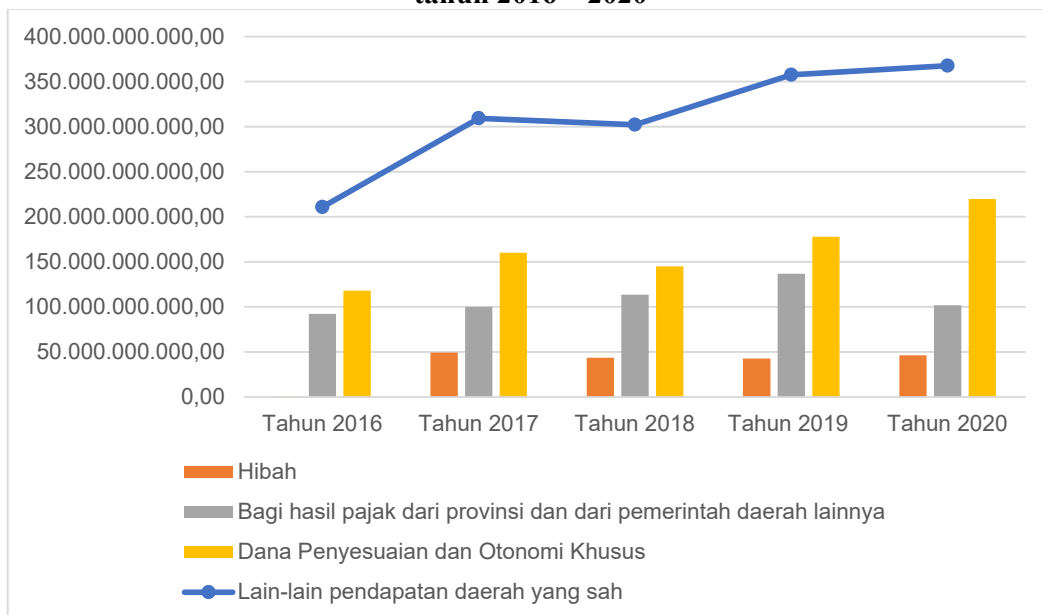
Gambar 3.2.
Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kotabaru
tahun 2016 – 2020



Gambar 3.3.
Perkembangan Realisasi Dana Perimbangan Daerah Kabupaten
Kotabaru tahun 2016 – 2020



Gambar 3.4.
Perkembangan Realisasi lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Kabupaten Kotabaru
tahun 2016 – 2020



3.1.2. Belanja Daerah

Tabel 3.2.
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru
Tahun 2016 s.d Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah					
		Realisasi APBD P Tahun 2016	Realisasi APBD P Tahun 2017	Realisasi APBD P Tahun 2018	Realisasi APBD P Tahun 2019	Realisasi APBD P Tahun 2020	Rata-rata Pertumbuhan(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.1	Belanja Tidak Langsung						
2.1.1	Belanja pegawai	516.400.663.564,00	467.891.658.224,00	478.150.269.130,00	481.288.217.116,00	475.495.205.400,00	
2.1.2	Belanja bunga	-	-	-	-	-	
2.1.2	Belanja subsidi	-	-	-	-	-	
2.1.4	Belanja hibah	7.796.662.000,00	15.913.202.000,00	9.355.800.000,00	25.721.764.000,00	76.214.254.213,00	
2.1.5	Belanja bantuan sosial	-	1.900.000.000,00	860.000.000,00	3.420.000.000,00	6.678.000.000,00	
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*	5.228.121.000,00	5.349.972.000,00	1.337.492.959,00	4.374.233.760,00	5.379.531.379,00	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*	181.091.069.257,00	268.807.447.718,00	210.692.821.802,00	250.138.878.705,00	248.690.182.118,00	
2.1.8	Belanja tidak terduga	-	-	270.759.948,00	-	45.876.449.207,00	
B	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	710.516.515.821,00	759.862.279.942,00	700.667.143.839,00	764.943.093.581,00	858.333.622.317,00	5,13
2.2	Belanja Langsung						
2.2.1	Belanja pegawai	103.568.290.150,00	114.894.838.300,00	128.021.651.510,00	126.037.227.975,00	0,00	
2.2.2	Belanja barang dan jasa	338.768.338.570,00	461.315.533.077,98	373.549.345.702,70	357.012.670.613,70	382.994.282.035,00	
2.2.3	Belanja modal	378.918.713.324,00	264.060.180.268,00	241.071.155.602,00	331.427.632.421,18	139.566.307.322,00	
C	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	821.255.342.044,00	840.270.551.645,98	742.642.152.814,70	814.477.531.009,88	522.560.589.357,00	-8,87
D	TOTAL JUMLAH BELANJA	1.531.771.857.865,00	1.600.132.831.587,98	1.443.309.296.653,70	1.579.420.624.590,88	1.380.894.211.674,00	-2,12

3.1.3. Kinerja Pembiayaan Daerah

Tabel 3.3.
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kotabaru
Tahun 2016 s.d Tahun 2020

No	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah					
		Realisasi APBD P Tahun 2016	Realisasi APBD P Tahun 2017	Realisasi APBD P Tahun 2018	Realisasi APBD P Tahun 2019	Realisasi APBD P Tahun 2020	Rata-rata Pertumbuhan(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.1	Penerimaan pembiayaan						
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	388.192.023.965,48	250.880.548.933,50	20.725.916.317,26	10.378.186.304,82	20.462.938.118,74	
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-	-	
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	1.550.550.000,00	1.084.025.000,00	1.727.358.500,00	464.435.000,00	10.000.000,00	
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-	-	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	389.742.573.965,48	251.964.573.933,50	22.453.274.817,26	10.842.621.304,82	20.472.938.118,74	-22,33
3.2	Pengeluaran pembiayaan						
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-	
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) Daerah	25.000.000.000,00	8.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	-	
3.2.3	Pembayaran pokok utang	-	-	-	-	-	
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	1.975.000.000,00	1.720.000.000,00	1.325.000.000,00	-	-	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	26.975.000.000,00	9.720.000.000,00	7.325.000.000,00	6.000.000.000,00	-	-51,67
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	362.767.573.965,48	242.244.573.933,50	15.128.274.817,26	4.842.621.304,82	20.472.938.118,74	31,95

3.1.4. Neraca Daerah

Analisis Neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio ekuitas serta kemampuan aset daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Neraca daerah menggambarkan posisi Pemerintah Daerah terkait dengan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal diterbitkannya neraca tersebut. Sebuah Neraca memiliki beberapa unsur, yaitu Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Nilai Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Kotabaru tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dan rata rata pertumbuhannya terdapat pada tabel berikut.

Tabel 3.4.
Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 - 2020

No	Uraian	Kode Akun	CALK	Tahun 2019	2020 (<i>audited</i>)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	ASET		7.5.3.1			
2	ASET LANCAR		7.5.3.1.1			
3	Kas di Kas Daerah	1.1.1.01	7.5.3.1.1.1	3.511.367.986,03	100.032.724.339,05	
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.1.1.02	7.5.3.1.1.2	-	411.659.168,00	
5	Kas di Bendahara Penerimaan	1.1.1.03	7.5.3.1.1.3	-	-	
6	Kas di BLUD	1.1.1.04	7.5.3.1.1.4	13.203.168.828,81	14.927.552.564,81	
7	Kas di FKTP	1.1.1.05	7.5.3.1.1.5	2.181.460.387,90	4.016.346.102,90	
8	Kas di Bendahara BOS	1.1.1.06	7.5.3.1.1.6	1.566.940.916,00	2.866.151.308,00	
9	Kas Lain-lain	1.1.1.07	7.5.3.1.1.7	5.773.000.000,00	8.700.000.000,00	
10	Piutang Pajak	1.1.3.01	7.5.3.1.1.8	16.601.821.389,63	18.682.145.421,63	
11	Penyisihan Piutang Pajak	1.1.4.01		(11.797.845.656,47)	(12.774.692.182,00)	
12	Piutang Pajak Netto			4.803.975.733,16	5.907.453.239,63	
13	Piutang Retribusi	1.1.3.02	7.5.3.1.1.9	565.271.993,00	416.998.443,00	
14	Penyisihan Piutang Retribusi	1.1.5.02		(512.735.106,00)	(405.415.334,13)	
15	Piutang Retribusi Netto			52.536.887,00	11.583.108,87	
16	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.1.3.03	7.5.3.1.1.10	17.739.602.151,17	1.397.966.288,61	
17	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.1.5.03		(254.971.813,25)	(170.453.728,23)	
18	Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto			17.484.630.337,92	1.227.512.560,38	
19	Piutang Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	1.1.3.04	7.5.3.1.1.11	40.636.380.929,00	33.787.135.129,88	
20	Penyisihan Bagi Hasil pajak dari Provinsi	1.1.5.04		-	-	
21	Piutang Bagi Hasil pajak dari Provinsi Netto			40.636.380.929,00	33.787.135.129,88	
22	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	1.1.3.05	7.5.3.1.1.12	2.956.423.118,00	25.825.842.848,00	
23	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	1.1.5.05		-	-	
24	Piutang Transfer Pemerintah Pusat Netto			2.956.423.118,00	25.825.842.848,00	
25	Piutang TP/ TGR	1.1.3.06	7.5.3.1.1.13	5.450.303.148,00	285.167.116,00	

No	Uraian	Kode Akun	CALK	Tahun 2019	2020 (audited)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
26	Penyisihan Piutang TP/ TGR	1.1.5.06		(5.450.303.148,00)	(285.167.116,00)	
27	Piutang TP/ TGR Netto			-	-	
28	Piutang Lainnya	1.1.3.07	7.5.3.1.1.14	286.833.606,46	276.833.606,46	
29	Penyisihan Piutang Lainnya	1.1.5.07		(286.833.606,46)	(276.833.606,46)	
30	Piutang Lainnya Netto			-	-	
31	Persediaan	1.1.7	7.5.3.1.1.15	22.202.160.356,25	20.353.715.215,30	
32	Jumlah Aset Lancar			114.372.045.480,07	218.067.675.584,82	90,67
33						
34	INVESTASI JANGKA PANJANG		7.5.3.1.2		720.654.855,00	
35	Investasi Pemanen		7.5.3.1.2.1			
36	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.2.2.01	7.5.3.1.2.1.1	144.378.885.794,20	140.002.142.474,60	
37	Jumlah Investasi Permanen			144.378.885.794,20	140.002.142.474,60	
38	Jumlah Investasi Jangka Panjang			144.378.885.794,20	140.002.142.474,60	(3,03)
39						
40	ASET TETAP		7.5.3.1.3			
41	Tanah	1.3.1	7.5.3.1.3.1	357.356.053.731,19	677.386.678.972,19	
42	Peralatan dan Mesin	1.3.2	7.5.3.1.3.2	407.706.147.153,18	450.922.695.954,03	
43	Gedung dan Bangunan	1.3.3	7.5.3.1.3.3	1.048.387.595.895,96	1.077.867.978.092,96	
44	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.3.4	7.5.3.1.3.4	2.657.409.379.064,54	2.717.280.329.277,54	
45	Aset Tetap Lainnya	1.3.5	7.5.3.1.3.5	38.949.663.651,81	39.522.537.876,82	
46	Konstruksi dalam Pengerjaan	1.3.6	7.5.3.1.3.6	307.940.874.333,06	309.839.610.973,06	
47	Akumulasi Penyusutan	1.3.7	7.5.3.1.3.7	(2.091.655.246.358,81)	(2.310.309.907.185,12)	
48	Jumlah Aset Tetap			2.726.094.467.470,93	2.962.509.923.961,48	8,67
49						
50	DANA CADANGAN					
51	Dana Cadangan	1.4		-	-	
52	Jumlah Dana Cadangan			-	-	
53						
54	ASET LAINNYA		7.5.3.1.4			
55	Tagihan Penjualan Angsuran	1.5.1.01		-	-	
56	Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran	1.5.1.01.a			-	
57	Tagihan Penjualan Angsuran Netto					
58	Tuntutan Perbendaharaan	1.5.1.02.01	7.5.3.1.4.1	-	-	
59	Penyisihan Tuntutan Perbendaharaan	1.5.1.02.01.a			-	
60	Tuntutan Perbendaharaan Netto					

No	Uraian	Kode Akun	CALK	Tahun 2019	2020 (audited)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
61	Tuntutan Ganti Rugi	1.5.1.02.02	7.5.3.1.4.2	-	-	
62	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	1.5.1.02.02.a			-	
63	Tuntutan Ganti Rugi Netto					
64	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.5.2		-	-	
65	Aset Tak Berwujud	1.5.3	7.5.3.1.4.3	48.018.192.061,28	50.171.765.061,28	
66	Amortisasi Aset tidak Berwujud	1.5.3.06		(36.685.983.700,96)	(41.333.454.646,76)	
67	Aset Tak Berwujud Netto			11.332.208.360,32	8.838.310.414,52	
68	Aset Lain-Lain	1.5.4	7.5.3.1.4.4	123.396.622.105,98	126.226.612.443,15	
69	Jumlah Aset Lainnya			134.728.830.466,30	135.064.922.857,67	0,25
70	JUMLAH ASET			3.119.574.229.211,50	3.455.644.664.878,57	10,77
71						
72	KEWAJIBAN		7.5.3.2			
73	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		7.5.3.2.1			
74	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	2.1.1	7.5.3.2.1.1	-	-	
75	Utang Beban	2.1.5	7.5.3.2.1.2	19.591.626.748,40	12.719.155.164,00	
76	Utang Kelebihan Transfer Pemerintah Pusat	2.1.6.02	7.5.3.2.1.3	197.294.418.083,00	179.717.093.534,00	
77	Utang Jangka Pendek Lainnya	2.1.6.04	7.5.3.2.1.4	60.247.980.881,00	58.428.179.681,00	
78	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek			277.134.025.712,40	250.864.428.379,00	(9,48)
79						
80	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		7.5.3.2.2			
81	Utang Jangka Panjang Lainnya	2.2.2	7.5.3.2.2.1	-	-	
82	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang			-	-	-
83	JUMLAH KEWAJIBAN			277.134.025.712,40	250.864.428.379,00	(9,48)
84						
85	EKUITAS		7.5.3.3			
86	Ekuitas			2.842.440.203.499,10	3.204.780.236.499,57	
87	JUMLAH EKUITAS			2.842.440.203.499,10	3.204.780.236.499,57	12,75
88	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS			3.119.574.229.211,50	3.455.644.664.878,57	10,77

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Salah satu yang perlu dicermati adalah proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dari total alokasi belanja daerah dan pembiayaan pengeluaran daerah. Hal ini penting untuk melihat sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin kesejahteraan pegawai untuk kelancaran kegiatan

pemerintahan dan pembangunan daerah yang dikendalikan oleh aparat pemerintah daerah yang tersebar pada setiap unit dan perangkat daerah terkait. Komponen-komponen belanja daerah yang tergolong dalam alokasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, baik dalam kelompok belanja tidak langsung maupun belanja langsung. pada bagian ini dapat diuraikan dengan tabel/grafik/gambar pendukung analisis sesuai dengan kebutuhan. Dalam bentuk tabel dapat menggunakan tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5.
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Kotabaru

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase
		(a)	(b)	$((a) / (b) \times 100) \%$
1	Tahun anggaran 2018	606.171.920.640,00	1.443.309.296.653,70	42,00
2	Tahun anggaran 2019	607.325.445.091,00	1.579.420.624.590,88	38,45
3	Tahun anggaran 2020	475.495.205.400,00	1.380.894.211.674,00	34,43

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan pembangunan daerah ditujukan untuk memberikan gambaran tentang keseimbangan keuangan daerah, antara antara aspek pendapatan dan belanja daerah selama satu periode terakhir. Pada bagian ini akan dicermati kebijakan pembiayaan pembangunan daerah yang ditempuh dalam tiga tahun terakhir, lebih mengarah pada pembiayaan surplus atau pembiayaan defisit. Selanjutnya pada setiap kebijakan penganggaran tersebut, digambarkan komponen-komponen penerimaan untuk menutup defisit atau bahkan alokasi pengeluaran pembiayaan kalau mencapai penganggaran surplus pada saat realisasi pendapatan melebihi kebutuhan alokasi belanja daerah. Oleh karena itu, pada bagian ini dapat diuraikan dengan tabel/grafik/gambar pendukung analisis sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6.
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kotabaru

No	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	1.438.559.208.141,26	1.595.218.856.817,80	1.482.675.707.038,02
	Dikurangi realisasi:			
2.	Belanja Daerah	1.443.309.296.653,70	1.579.420.624.590,88	1.380.894.211.674,00
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	7.325.000.000,00	6.000.000.000,00	-
	Defisit riil	(12.075.088.512,44)	9.798.232.226,92	101.781.495.364,02

Tabel 3.7.
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kotabaru

No	Uraian	Realisasi Tahun					
		2018 (Rp)	Proporsi dari total defisit riil (%)	2019 (Rp)	Proporsi dari total defisit riil (%)	2020 (Rp)	Proporsi dari total defisit riil (%)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	20.725.916.317,26	171,64	10.378.186.304,82	105,92	20.462.938.118,74	20,10
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.727.358.500,00	14,31	464.435.000,00	4,74	10.000.000,00	0,01
	Total Realisasi Penerimaan	22.453.274.817,26	185,95	10.842.621.304,82	110,66	20.472.938.118,74	20,11

Tabel 3.8.
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Kotabaru

No.	Uraian	2018		2019		2020	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA	20.725.916.317,26		10.378.186.304,82		20.462.938.118,74	
2	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	20.725.916.317,26	100,00	10.378.186.304,82	100,00	20.462.938.118,74	100,00

3.3. Kerangka Pendanaan

3.3.1. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru tahun 2021-2026 diasumsikan terhadap masing-masing pos jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dengan menggunakan data APBD kabupaten periode sebelumnya. Disamping itu juga dilakukan justifikasi kualitatif *expert judgement* secara rasional pada beberapa pos pendapatan dan belanja daerah yang *inline* dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotabaru dalam periode lima tahun yang akan datang.

Pada tahun 2022, diasumsikan pandemi Covid-19 sudah bisa ditangani dengan baik di level lokal Kalimantan Selatan maupun nasional. Hal ini berimplikasi terhadap kembali normalnya kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga mobilisasi sumber-sumber pendapatan daerah juga sudah dapat berlangsung secara normal. Selanjutnya beberapa arah kebijakan lain yang mendasari proyeksi pendapatan dan belanja daerah tersebut antara lain sebagai berikut:

A. Pendapatan Daerah

- 1) Pendapatan asli daerah pada tahun 2021 masih sangat terpengaruh oleh adanya dampak Covid-19 dan diperkirakan baru mulai pulih pada tahun 2022. Secara tahunan, PAD diperkirakan akan mengalami kenaikan rerata pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 5-6 persen pertahun atau setara dengan angka pertumbuhan ekonomi regional. Beberapa faktor pendorong peningkatan PAD antara lain:
 - a. Bertambahnya objek dan wajib pajak serta retribusi;
 - b. Meningkatnya cakupan dan kualitas penyelenggaraan mobilisasi pendapatan daerah oleh SKPD terkait;
 - c. Pemantapan kerangka regulasi dan kelembagaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - d. Peningkatan sistem administrasi dan teknologi informasi mobilisasi pajak dan retribusi daerah;
 - e. Peningkatan tarif untuk beberapa jenis pajak dan retribusi;

- f. Peningkatan nilai jual objek pajak (NJOP) pada subjek dan objek PBB-P2 dan BPHTB; dan
 - g. Peningkatan penerimaan lain-lain PAD yang sah, seperti bagi hasil deviden, jasa giro, dan lain-lain
- 2) Dana transfer dari Pemerintah Pusat diasumsikan mengalami kenaikan setiap tahun.
- 3) Dana transfer Kalimantan Selatan diasumsikan mengalami kenaikan setiap tahun.

B. Belanja Daerah

Belanja daerah diprioritaskan pada:

- 1) Prioritas I: Belanja wajib dan mengikat serta belanja untuk pemenuhan penerapan pelayanan dasar (SPM)
- 2) Prioritas II: Belanja untuk Dialokasikan untuk membiayai program prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi kepala daerah dan wakil kepala daerah periode 2021-2026 yang merupakan program pembangunan daerah
- 3) Prioritas III: Belanja penyelenggaraan urusan pemerintah lainnya.

C. Pembiayaan Daerah

- 1) Penganggaran surplus/defisit sesuai dengan kondisi ruang fiskal daerah serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Penambahan penyertaan modal pada Bank Pembangunan Daerah, PDAM dan/atau BUMD lainnya; dan
- 3) Peningkatan efektivitas pengelolaan dana bergulir yang berbasis pada hasil evaluasi berkala dan berkelanjutan.

Tabel 3.9.
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026

No	Uraian	Proyeksi APBD						Pertumbuhan (%)
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Total Pendapatan Daerah	1.573.547.323.163,00	1.617.891.577.694,89	1.693.979.668.817,51	1.771.093.425.577,63	1.849.087.265.931,10	1.927.077.437.394,09	4,14
04:01	Pendapatan Asli Daerah	129.680.311.737,00	134.404.452.669,76	140.739.896.998,24	148.101.006.964,24	156.342.200.523,57	164.579.725.192,42	4,88
04:01:01	Hasil Pajak Daerah	55.194.651.563,00	55.389.428.152,96	57.195.508.138,64	60.035.781.225,99	63.747.610.442,52	67.455.770.768,58	4,12
04:01:02	Hasil Retribusi Daerah	6.469.664.694,00	7.116.825.174,28	7.763.985.654,55	7.989.215.678,51	8.636.376.158,78	9.283.536.639,06	7,52
04:01:03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.120.000.000,00	12.541.936.532,95	12.963.873.065,89	13.799.212.591,00	14.221.149.123,95	14.643.085.656,89	3,86
04:01:04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	55.895.995.480,00	59.356.262.809,58	62.816.530.139,16	66.276.797.468,74	69.737.064.798,32	73.197.332.127,89	5,54
04:02	Pendapatan Transfer	1.389.011.710.231,00	1.436.174.010.025,13	1.502.625.741.819,27	1.569.077.473.613,40	1.635.529.205.407,53	1.701.980.937.201,66	4,15
04:02:01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.273.191.486.000,00	1.318.727.468.057,52	1.383.552.882.115,03	1.448.378.296.172,55	1.513.203.710.230,06	1.578.029.124.287,58	4,39
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	180.934.608.000,00	203.013.343.564,17	225.092.079.128,34	247.170.814.692,51	269.249.550.256,67	291.328.285.820,84	10,00
	Dana Alokasi Umum	602.279.945.000,00	591.927.921.289,87	600.865.329.579,75	609.802.737.869,62	618.740.146.159,49	627.677.554.449,36	0,84
	Dana Alokasi Khusus	284.304.931.000,00	303.922.471.306,45	323.540.011.612,91	343.157.551.919,36	362.775.092.225,81	382.392.632.532,26	6,11
	Dana Desa	170.648.341.000,00	182.423.376.684,47	194.198.412.368,95	205.973.448.053,42	217.748.483.737,89	229.523.519.422,37	6,11
	Dana Insentif Daerah	35.023.661.000,00	37.440.355.212,55	39.857.049.425,10	42.273.743.637,65	44.690.437.850,20	47.107.132.062,75	6,11
04:02:02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	115.820.224.231,00	117.446.541.967,62	119.072.859.704,23	120.699.177.440,85	122.325.495.177,47	123.951.812.914,08	1,37
	Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemda lainnya	115.820.224.231,00	117.446.541.967,62	119.072.859.704,23	120.699.177.440,85	122.325.495.177,47	123.951.812.914,08	1,37
04:03	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	54.855.301.195,00	47.313.115.000,00	50.614.030.000,00	53.914.945.000,00	57.215.860.000,00	60.516.775.000,00	2,33
04:03:01	Pendapatan Hibah	54.855.301.195,00	47.313.115.000,00	50.614.030.000,00	53.914.945.000,00	57.215.860.000,00	60.516.775.000,00	2,33
5	BELANJA DAERAH	1.621.152.808.881,00	1.686.988.989.638,58	1.763.091.337.123,23	1.840.029.046.129,21	1.917.654.832.664,27	1.994.201.025.970,84	4,23
05:01	Belanja Operasi	1.095.433.781.552,00	1.140.030.170.992,85	1.191.580.699.695,06	1.243.697.089.103,37	1.296.279.571.366,68	1.348.130.754.221,34	4,24

No	Uraian	Proyeksi APBD						Pertumbuhan (%)
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
05.01.01	Belanja Pegawai	605.504.722.242,00	630.155.527.115,95	658.650.255.952,09	687.457.766.204,53	716.522.910.856,66	745.183.827.290,93	
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	428.670.719.502,00	446.122.405.464,90	466.295.420.576,94	486.689.871.178,83	507.266.715.607,60	527.557.384.231,91	
05.01.05	Belanja Hibah	43.897.208.048,00	45.684.314.688,71	47.750.093.854,50	49.838.548.699,60	51.945.681.236,92	54.023.508.486,40	
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	17.361.131.760,00	18.067.923.723,28	18.884.929.311,54	19.710.903.020,41	20.544.263.665,49	21.366.034.212,11	
05.02	Belanja Modal	267.174.231.029,00	278.051.206.211,06	290.624.282.828,83	303.335.371.804,42	316.160.139.947,31	328.806.545.545,20	4,24
05.03	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	-
05.04	Belanja Transfer	254.544.796.300,00	264.907.612.434,68	276.886.354.599,33	288.996.585.221,42	301.215.121.350,28	313.263.726.204,29	4,24
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	5.575.000.000,00	5.801.964.765,30	6.064.321.287,76	6.329.557.649,69	6.597.166.101,75	6.861.052.745,82	
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	248.969.796.300,00	259.105.647.669,38	270.822.033.311,57	282.667.027.571,73	294.617.955.248,53	306.402.673.458,47	
	Surplus (Defisit)	(47.605.485.718)	(69.097.411.944)	(69.111.668.306)	(68.935.620.552)	(68.567.566.733)	(67.123.588.577)	
6	PEMBIAYAAN DAERAH							
06.01	Penerimaan Pembiayaan	47.605.485.718,00	69.097.411.943,69	69.111.668.305,72	68.935.620.551,58	68.567.566.733,17	67.123.588.576,75	8,45
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	47.605.485.718,00	69.097.411.943,69	69.111.668.305,72	68.935.620.551,58	68.567.566.733,17	67.123.588.576,75	
06.01.02	Penerimaan Piutang Daerah							
06.02	Pengeluaran Pembiayaan							
06.02.01	Penyertaan Modal							
06.02.02	Pembayaran Hutang Pokok yg jth tempo							
	Pemberian Pinjaman Daerah							
	SURPLUS (DEFISIT) PEMBIAYAAN	47.605.485.718,00	69.097.411.943,69	69.111.668.305,72	68.935.620.551,58	68.567.566.733,17	67.123.588.576,75	8,45

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kotabaru selama 5 (lima) tahun kedepan. Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Selanjutnya, setelah diketahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk selama 5 (lima) tahun kedepan, tahap berikutnya adalah rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun dari dana yang tersedia tersebut akan dipergunakan untuk prioritas penggunaan dana.

Tabel 3.10.
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai
Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2026 (Rp)
1	Pendapatan	1.617.891.577.694,89	1.693.979.668.817,51	1.771.093.425.577,63	1.849.087.265.931,10	1.927.077.437.394,09
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	69.097.411.943,69	69.111.668.305,72	68.935.620.551,58	68.567.566.733,17	67.123.588.576,75
	Total penerimaan	1.686.988.989.638,58	1.763.091.337.123,23	1.840.029.046.129,21	1.917.654.832.664,27	1.994.201.025.970,84
	Dikurangi:					
4	Belanja Pegawai	630.155.527.115,95	658.650.255.952,09	687.457.766.204,53	716.522.910.856,66	745.183.827.290,93
5	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.056.833.462.522,63	1.104.441.081.171,14	1.152.571.279.924,68	1.201.131.921.807,61	1.249.017.198.679,91

Tabel 3.11.
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Kotabaru

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2026 (Rp)
1	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.056.833.462.522,63	1.104.441.081.171,14	1.152.571.279.924,68	1.201.131.921.807,61	1.249.017.198.679,91
2	Prioritas I	634.100.077.513,58	662.664.648.702,68	691.542.767.954,81	720.679.153.084,57	749.410.319.207,95
3	Prioritas II	264.208.365.630,66	276.110.270.292,79	288.142.819.981,17	300.282.980.451,90	312.254.299.669,98
4	Prioritas III	158.525.019.378,39	165.666.162.175,67	172.885.691.988,70	180.169.788.271,14	187.352.579.801,99

BAB 4

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH



BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Gambaran kondisi Kabupaten Kotabaru yang telah diuraikan pada bab sebelumnya menunjukkan fakta bahwa masih ada persoalan pembangunan daerah yang harus diselesaikan dalam lima tahun kedepan. Permasalahan pembangunan daerah juga tidak terlepas dari pengaruh global, regional, dan nasional, seperti kondisi sosial, politik, dan ekonomi global, serta berbagai kebijakan di tataran global dan nasional. Kondisi lingkungan global, regional, dan nasional yang semakin dinamis dan *unpredictable* dalam jangka menengah akan menjadi tantangan sekaligus peluang dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kotabaru dalam lima tahun kedepan.

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN KOTABARU

Dalam penerapan rencana pembangunan daerah, biasanya timbul permasalahan karena adanya “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan pembangunan yang direncanakan (RTRW, RPJM, atau RPJP). Adanya *gap* ini juga terjadi karena adanya perbedaan antara target pembangunan yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil daerah saat dokumen rencana sedang disusun. Permasalahan pembangunan daerah ini harus diidentifikasi sehingga dapat dicari solusinya, dalam rangka menyelenggarakan pembangunan yang berkelanjutan.

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan (potensi daerah) yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari

luar daerah yang tidak diantisipasi. Dalam rangka penyusunan RPJMD Kabupaten Kotabaru, perlu diidentifikasi terlebih dahulu permasalahan pembangunan daerah agar rencana pembangunan yang disusun dapat meminimalkan atau menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat. Teridentifikasinya permasalahan pembangunan daerah diharapkan teridentifikasi pula berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, terutama yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah.

Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan yang telah disajikan pada bab II yang diuraikan menurut permasalahan pokok pembangunan daerah sebagai masalah yang bersifat makro bagi daerah untuk dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran, serta permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan setiap urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat dengan tujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah dikelompokkan berdasarkan urusan yang ditangani adalah sebagai berikut:

4.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan pemerintahan bidang pendidikan

- 1) Sulitnya akses dalam menjangkau lokasi sekolah,
- 2) Mutu Tenaga Pendidik khususnya bidang PAUD yang masih rendah,
- 3) Rendahnya Angka Partisipasi Kasar PAUD,
- 4) Rendahnya Angka Rata-rata Lama Sekolah.

2. Urusan pemerintahan bidang kesehatan;

- 1) Rendahnya jumlah tenaga kesehatan dan kompetensi tenaga

kesehatan,

- 2) Rendahnya cakupan pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin,
- 3) Usia harapan hidup masih dibawah rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan.

3. Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

- 1) Masih rendahnya presentase jalan dalam kondisi mantap,
- 2) Keterbatasan kewenangan SKPD dalam infrastruktur bangunan gedung dan RTH,
- 3) Revisi Dokumen RTRW belum tersedia termasuk kawasan dengan fungsi cagar alam.

4. Urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

- 1) Identifikasi terhadap luas wilayah penanganan kawasan kumuh belum menyeluruh,
- 2) Penyediaan rehabilitasi rumah bagi korban bencana belum optimal,
- 3) Belum terintegrasinya pengembangan perumahan dan PSU,
- 4) Dokumen RP3KPK dan RP2KPKP serta Dokumen Lingkungan belum tersedia.

5. Urusan pemerintahan bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat;

- 1) Kurangnya personil Satpol PP yang memahami Perundang-undangan,
- 2) Tidak adanya petugas PPNS pada Satpol PP dan Damkar
- 3) Kurangnya personil anggota pemadam kebakaran baik secara kuantitas dan kualitas,
- 4) Kurangnya pos-pos di kecamatan untuk memenuhi kebutuhan pengendalian bencana kebakaran di masing-masing kecamatan tersebut
- 5) Kondisi mobil operasional damkar yang jumlahnya berkurang dengan kondisi ideal untuk penanggulangan kebakaran dan kondisi mobil yang

semakin menurun kelayakannya,

- 6) Belum memadainya SDM aparatur dan lembaga penanggulangan bencana dalam pengurangan resiko bencana,
- 7) Pembangunan infastruktur yang ada di wilayah Kabupaten Kotabaru belum mengacu terhadap mitigasi bencana,
- 8) Belum terinventarisir daerah rawan bencana secara akurat.

6. Urusan pemerintahan bidang Sosial.

- 1) Masih tingginya angka kemiskinan,
- 2) Masih tingginya angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

4.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar;

1. Urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja;
 - 1) Minimnya pengembangan Teknologi Tepat Guna,
 - 2) Kurangnya SDM pelaksana program dan kegiatan termasuk Pengantar Kerja tidak ada, Mediator Kurang dan Instruktur sangat kurang,
 - 3) Terbatasnya Kesempatan Kerja, Rendahnya Kualitas Angkatan Kerja, dan Angka pengangguran yang semakin tinggi,
 - 4) Belum *Link and Match*nya pelatihan di BLK.
2. Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 1) Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarus utamaan gender, termasuk ketersediaan data dan statistik gender,
 - 2) Masih lemahnya jejaring pengaduan tindak kekerasan di kecamatan yang belum memiliki akses pengaduan dan perlindungan untuk memberanikan diri dalam pengaduan kasus kekerasan perempuan dan anak,
 - 3) Masih lemahnya Ruang Bermain Anak yang aman baik yang terbuka ataupun ditempat umum fasilitas kesehatan.

3. Urusan pemerintahan bidang Pangan;
 - 1) Belum stabilnya harga pangan strategis pada hari-hari tertentu terutama menjelang Hari-hari Besar Keagamaan Nasional,
 - 2) Belum terupdate-nya data ketahanan dan kerentanan pangan (FSVA),
 - 3) Belum Optimalnya Pengawasan Keamanan Pangan Segar,
 - 4) Konsumsi pangan masyarakat masih belum beragam dan konsumsi di bawah Angka Kecukupan Gizi (AKG) masih tinggi,
 - 5) Distribusi pangan terutama di wilayah terpencil masih belum lancar, terutama pada kondisi-kondisi alam tertentu (misalnya: musim gelombang air laut tinggi) contohnya di Pulau Sembilan,
 - 6) Persediaan cadangan pangan pemerintah masih di bawah angka standar nasional,
 - 7) Masih kurang optimalnya perencanaan dan penganggaran untuk prioritas program/kegiatan yang dapat membantu pemulihan ekonomi seperti pengembangan desa mandiri pangan, pengembangan lumbung pangan desa dan pekarangan pangan lestari (P2L),
 - 8) Kekurangan SDM dengan status PNS di SKPD.
4. Urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
 - 1) Masih banyaknya aset (tanah) milik pemerintah daerah yang belum bersertifikat.
5. Urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
 - 1) Belum terpenuhinya SDM Pengelola Kawasan TAHURA Sebatung serta Pengembangan Masyarakat Penyangga TAHURA Sebatung sebagai Mitra Konservasi,
 - 2) Belum tersedianya pengembangan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di beberapa kecamatan Kabupaten Kotabaru,
 - 3) Tidak layaknnya unit pengelolaan sampah yang beroperasi saat ini,
 - 4) Belum tersedianya ruang informasi DDDTLH Kabupaten Kotabaru,
 - 5) Penurunan kualitas lingkungan hidup,

- 6) Kinerja pengelolaan sumber pencemar lingkungan usaha/kegiatan masih kurang,
- 7) Kualitas air sungai dalam kategori cenderung “Cemar Sedang”,
- 8) Sumber pencemar lingkungan usaha skala kecil belum terkelola sesuai SOP,
- 9) Kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan,
- 10) Kualitas tutupan lahan menurun,
- 11) Kerusakan ekosistem pesisir dan kelautan,
- 12) Kurangnya ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap perizinan lingkungan,
- 13) Kurangnya kapasitas dan sarana prasarana untuk melakukan pengawasan lingkungan hidup,
- 14) Belum optimalnya pelayanan pengaduan masyarakat terkait pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup,
- 15) Belum terakutinya Masyarakat Hukum Adat,
- 16) Belum terverifikasinya kearifan lokal dan pengetahuan tradisional Masyarakat Hukum Adat,
- 17) Belum terverifikasinya hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional,
- 18) Pelaku usaha tidak memiliki perizinan lingkungan,
- 19) Kurangnya penghargaan di bidang lingkungan hidup,
- 20) Kurangnya Kelompok Sadar Lingkungan,
- 21) Kurangnya jumlah sekolah berwawasan lingkungan,
- 22) Tidak lengkapnya data informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah.

6. Urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- 1) Rendahnya kepemilikan KTP-el di Kecamatan Pulau Sembilan, Hampang, Kelumpang Hilir dan Pulau Laut Kepulauan,
- 2) Rendahnya kepemilikan Kartu Keluarga di Kecamatan Pulau Sembilan, Hampang, Pamukan Barat, dan Pulau Laut Kepulauan,

- 3) Rendahnya kepemilikan Akta Kelahiran di Kecamatan Sampanahan, Pamukan Utara, Hampang, Sungai durian, dan Pamukan Barat,
 - 4) Rendahnya Kualitas SDM pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru,
 - 5) Banyaknya jabatan struktural yang kosong sehingga mempengaruhi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru,
 - 6) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan *update* data kependudukan.
7. Urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 1) Belum terlaksananya pembinaan terhadap kader Pembangunan Manusia dalam rangka turut serta pengurangan stunting di desa sedangkan Kabupaten Kotabaru menjadi Lokus Nasional Penanganan Stunting Tahun 2021,
 - 2) Kekurangan SDM dengan status PNS di SKPD,
 - 3) Masih rendahnya kualitas dan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa dalam menjalankan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan benar,
 - 4) Terhambatnya pembinaan terhadap Pemerintah Desa dalam pengelolaan dan pelaksanaan APBDes.
 - 5) Kompetensi aparatur perangkat desa yang masih terbatas dalam penatausahaan keuangan dan kegiatan Dana Desa,
 - 6) Perangkat desa yang memiliki kualifikasi teknis untuk pelaksanaan pembangunan fisik masih kurang.
8. Urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 1) Masih kurangnya Tenaga Penyuluh KB yang mengkoordinir PPKB di setiap kecamatan,
 - 2) Belum tersedianya persentasi jumlah peningkatan dan penurunan penduduk di setiap kecamatan / desa,

- 3) Belum meratanya pembentukan Kelompok Tribina (BKB, BKR dan BKL) terutama *locus stunting*,
 - 4) Masih rendahnya penggunaan alat kontrasepsi pada kelompok pasangan usia subur.
9. Urusan pemerintahan bidang Perhubungan dengan;
- 1) Perencanaan Transportasi Terpadu belum tersedia,
 - 2) Tingkat Keselamatan Jalan dan Keselamatan Angkutan Umum masih belum optimal,
 - 3) Konektivitas wilayah antar kecamatan masih rendah.
10. Urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika;
- 1) Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum optimal,
 - 2) Kurang optimalnya pelayanan informasi publik,
 - 3) Masih adanya zona *blankspot* di beberapa wilayah Kabupaten Kotabaru.
11. Urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 1) Kurangnya modal usaha, serta peralatan pendukung usaha, untuk lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi dalam memenuhi kebutuhan pasar,
 - 2) Terbatasnya akses permodalan,
 - 3) Jaringan kerjasama yang terbatas,
 - 4) Rendahnya kualitas SDM koperasi termasuk penguasaan informasi teknologi (IT) terbatas.
12. Urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
- 1) Aspek Kebijakan
 - a. Belum tersedianya Perda terkait Investasi,
 - b. Birokrasi yang terlalu Panjang,
 - c. Kepastian berusaha,

- 2) Beban pajak yang terlalu tinggi,
- 3) Masalah pertanahan atau zonasi lahan,
- 4) Masih terbatasnya infrastruktur di Kabupaten Kotabaru sehingga menghambat investor untuk berinvestasi.

13. Urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;

- 1) Menurunnya prestasi atlet olahraga,
- 2) Minimnya pembinaan Wirausaha Pemula dan Pemuda Pelopor,
- 3) Pembangunan *Sport Center* yang telah di rencanakan sejak 2010 belum terealisasi,
- 4) Minimnya sarana prasarana olahraga.

14. Urusan pemerintahan bidang Statistik;

- 1) Belum terpadunya data dan informasi statistik antar Perangkat Daerah.

15. Urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;

- 1) Belum adanya penetapan cagar budaya kabupaten.

16. Urusan pemerintahan bidang Perpustakaan;

- 1) Rendahnya minat baca,
- 2) Belum terkoneksi Perpustakaan Desa dengan internet.

17. Urusan pemerintahan bidang Kearsipan:

- 1) Pengelolaan arsip Perangkat Daerah belum sesuai standar;
- 2) Tenaga arsiparis belum tersedia;
- 3) Depo Arsip belum dibangun.

4.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan;

- Urusan pemerintahan bidang Perikanan;
 - 1) Kemasan UMKM Pengolah Perikanan yang belum menarik dan peralatan pengolahan yang masih seadanya,

- 2) Masih adanya nelayan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan,
- 3) Potensi adanya konflik penangkapan ikan karena berkurangnya wilayah yang ada potensi ikannya,
- 4) Sebagian kapal perikanan > 10 GT tidak memiliki izin / tidak berlaku lagi,
- 5) Data dasar nelayan belum mutakhir termasuk belum tersedianya data tentang potensi perikanan darat seperti sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya,
- 6) Kesadaran / kemampuan nelayan untuk memiliki asuransi terbatas,
- 7) Masih kurangnya pemenuhan sarana dan prasarana budidaya ikan (rehab tambak, kolam),
- 8) Masih kurangnya program alih teknologi kepada pembudidaya ikan,
- 9) Masih kurangnya pembiayaan untuk sektor perikanan budidaya dalam peningkatan kapasitas usaha,
- 10) Sistem logistik kegiatan budidaya ikan belum tertata dengan baik dan efisien,
- 11) Kualitas produk dan harga jual tidak menentu,
- 12) Ketersediaan benih ikan dan udang bermutu tinggi (unggul) masih terbatas,
- 13) Tingkat pemahaman untuk pengamanan kualitas ikan pada pembudidaya ikan masih kurang,
- 14) Masa pemeliharaan ikan semakin lama,
- 15) Ikan lebih mudah terkena penyakit,
- 16) Konversi pakan semakin tinggi (boros pakan),
- 17) Kurangnya jumlah bantuan sarana dan prasarana pendukung usaha nelayan seperti IFM serta suku cadangnya,
- 18) Masih banyak para UMKM yang belum memiliki izin produksi industri rumah tangga dan sarana dan prasarana yang dimiliki masih apa adanya sehingga hasil produk olahan UMKM perikanan masih terbatas untuk ke luar daerah,
- 19) Terganggunya / menurunnya kualitas lingkungan perairan darat,

- 20) Kurang pahamnya pembudidaya tentang pemahaman CBIB dan kemauan dalam berbudidaya yang baik,
 - 21) Belum pahamnya pengelola perikanan budidaya dalam menggarap perkolaman ikan air tawar,
 - 22) Banyaknya pengolah hasil perikanan yang ruang produksi dan tempat tinggal menjadi satu, sedangkan hal itu menjadi persyaratan untuk mendapatkan sertifikat SNI dan sertifikat Kelayakan Usaha Pengolahan.
- Urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 - 1) Fasilitas, Amenitas dan Aksesibilitas ke Objek Wisata masih terbatas.
 - Urusan pemerintahan bidang pertanian;
 - 1) Masih rendahnya produksi dan mutu hasil pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan),
 - 2) Kurangnya pengembangan usaha tani secara intensif dan berkelanjutan,
 - 3) Kurang intensifnya promosi atau workshop terhadap hasil pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan),
 - 4) Masih terdapatnya peredaran benih/bibit pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan) yang tidak bersertifikat,
 - 5) Kurangnya kemitraan antara pengusaha dan pekebun,
 - 6) Masih rendahnya kualitas SDM pertanian dan petugas (penyuluh) pertanian,
 - 7) Kurangnya tenaga teknis pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan) dan tenaga penyuluh pertanian PNS dan P3K,
 - 8) Perlu adanya pelatihan bagi anggota kelompok tani terhadap teknologi-teknologi terapan,

- 9) Kurangnya wawasan kepada kelompok tani terhadap regulasi-regulasi dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan perkebunan),
- 10) Dukungan Infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air sektor pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan perkebunan) belum maksimal,
- 11) Minimnya prasarana dan sarana di BPP yang ada serta masih diperlukannya pembangunan BPP baru,
- 12) Belum maksimalnya sarana dan operasional penanganan kebakaran lahan pertanian dan masih kurangnya monitoring serta pengawasan perubahan anomali iklim yang mengakibatkan kebakaran kebun,
- 13) Belum terinventarisir lahan-lahan potensial untuk kegiatan pengembangan perkebunan yang sesuai dengan Tata Ruang Wilayah Kabupaten,
- 14) Adanya alih fungsi lahan sawah,
- 15) Pelaksanaan kawin alam tidak diimbangi dengan sistem seleksi dan penggunaan pejantan yang baik,
- 16) Masih berkembangnya hama dan penyakit tanaman dan ternak secara sporadik dan potensi penyakit yang masih tinggi,
- 17) Lalu lintas ternak/hewan antar kabupaten/provinsi/pulau masih sulit dikendalikan yang berakibat pada buruknya sistem pengendalian penyakit hewan,
- 18) Belum maksimalnya tata kelola/pola kemitraan antara perusahaan perkebunan (inti) dengan kebun masyarakat,
- 19) Kurangnya minat petani muda/milenial untuk sektor pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan),
- 20) Kurangnya minat petani dalam diversifikasi pengembangan komoditas perkebunan yang berorientasi ekspor.

- Urusan pemerintahan bidang Perdagangan;
 - 1) Terbatasnya akses pasar,
 - 2) Jumlah personel penera kurang,
 - 3) Pengembangan Pasar Desa tidak optimal,
 - 4) Belum beroperasinya UML (*Unified Modelling Language*).

- Urusan pemerintahan bidang Perindustrian;
 - 1) Tidak berkembangnya inovasi produk serta desain dengan mengikuti perkembangan teknologi,
 - 2) Tidak tersedianya SDM teknis industry.

- Urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;
 - 1) Tidak adanya lagi kegiatan pengembangan kawasan transmigrasi baru.

4.1.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan;

- Sekretariat Daerah;
 - 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan publik,
 - 2) Belum optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintah daerah,
 - 3) Belum optimalnya penerapan sistem akuntabilitas.

- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - 1) Belum optimalnya Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD.

4.1.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan;

- Bidang Perencanaan;
 - 1) Kurang optimalnya penyelarasan perencanaan, penganggaran dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan,

- 2) Kurang efektifnya pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah.
- Bidang Keuangan;
 - 1) Minimnya pelatihan/pendidikan yang mengarah kepada penatausahaan/pengelolaan/pengendalian barang milik daerah, serta kebijakan akuntansi keuangan daerah,
 - 2) Kurangnya pemahaman dalam proses akuntabilitas penyusunan Laporan Keuangan SKPD,
 - 3) Belum optimalnya manajemen kas Keuangan Daerah,
 - 4) Besarnya belanja pemeliharaan aset daerah,
 - 5) Kurangnya alat transaksi perekam pendapatan dan infrastruktur pendapatan berbasis teknologi online serta elektronifikasi transaksi pendapatan.
 - Bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - 1) Kurangnya jumlah aparatur/PNS pada Satuan Kerja Perangkat Daerah,
 - 2) Kompetensi PNS yang belum memadai,
 - 3) Penempatan ASN tidak sesuai kompetensi.
 - Bidang penelitian dan pengembangan;
 - 1) Identifikasi kebutuhan penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah,
 - 2) Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk pembangunan daerah kurang optimal.

4.1.6. Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan;

- Inspektorat Daerah.
 - 1) Belum optimalnya / maksimalnya tugas-tugas pengawasan oleh APIP,

- 2) Pendidikan dan Pelatihan khusus pengawasan/APIP masih sedikit serta terbatasnya penyelenggaraan Diklat APIP yang kompeten,
- 3) Administrasi tata kelola pemerintahan tidak ekonomis, efisien dan efektif,
- 4) Masih ditemukan adanya praktik penyimpangan (fraud), pengelolaan keuangan dan pencatatan aset yang belum tertib pada Perangkat Daerah/Desa serta masih adanya Perangkat Daerah/Desa/Pegawai yang terkena kasus hukum dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,
- 5) Belum optimalnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kabupaten Kotabaru,
- 6) Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di jajaran Perangkat Daerah (PD).

4.1.7. Unsur Kewilayahan;

- Kecamatan
 - 1) Kurang optimalnya pelayanan publik di tingkat kecamatan,
 - 2) Pengembangan potensi ekonomi kecamatan belum optimal,
 - 3) Distribusi hasil perekonomian masih terbatas,
 - 4) Akses jalan dan jembatan masih ada yang belum memadai/rusak
 - 5) Pengelolaan sampah dan sanitasi di wilayah kecamatan tidak memadai,
 - 6) Kekurangan ketersediaan air bersih,
 - 7) Sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informasi kurang memadai, masih ada *blankspot*,
 - 8) Ketersediaan listrik dan penerangan jalan masih kurang,
 - 9) Sarana dan prasarana kepelabuhan belum memadai,
 - 10) Sarana dan prasarana UMKM, BUMDes dan pasar masih minim,
 - 11) Tidak ada pelatihan berbasis ekonomi/kompetensi dari SKPD kepada aparatur kecamatan,

- 12) Kewenangan pembangunan masih menjadi kendala contoh jalan aset kabupaten,
- 13) Kurangnya kompetensi dan koordinasi aparat desa dalam lingkup kecamatan,
- 14) Pelayanan Perekaman e-KTP terbatas,
- 15) Masalah tapal batas,
- 16) Perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan pembangunan desa masih tidak optimal.

4.1.8. Unsur Pemerintahan Umum;

- Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 1) Penanganan dan pengawasan orang asing,
 - 2) Terbatasnya pengawasan dan penanganan Lapas Kotabaru yang overload kapasitas warga binaan,
 - 3) Penanganan dan dampak peredaran gelap narkoba/narkotika (P4GN).
 - 4) Potensi konflik kepentingan dualisme kepemimpinan organisasi, parpol, LSM dan ormas lainnya,
 - 5) Potensi konflik tapal batas kabupaten dalam provinsi, tapal batas kecamatan dalam kabupaten dan antar desa dalam wilayah kecamatan,
 - 6) Partisipasi konflik agama terhadap paham keagamaan dalam masyarakat,
 - 7) Masuknya paham ideologi radikalisme, budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia dan Pancasila di Kotabaru,
 - 8) Adanya gap antara kelompok masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik SARA,
 - 9) Budaya lokal (kearifan lokal) tidak dapat dipertahankan keberadaannya dan hilang.

4.2. ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan kondisi faktual yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis dapat diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu; (1) permasalahan pembangunan Kabupaten Kotabaru; (2) Dinamika internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi pembangunan Kabupaten Kotabaru; (3) Kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi pembangunan Kabupaten Kotabaru; (4) Kebijakan pembangunan Kabupaten Kotabaru; yang antara lain terdiri dari RPJPD dan RTRW Kabupaten Kotabaru; dan (5) KLHS RPJMD.

4.2.1. Isu Internasional

Terdapat begitu banyak isu-isu internasional yang memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun untuk Kabupaten Kotabaru, terdapat 3 (tiga) isu-isu internasional yang memberikan dampak bagi Kabupaten Kotabaru.

1). **Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / *Sustainable Development Goals (SDGs)***

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* merupakan deklarasi internasional pada tanggal 25 September 2015 yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menetapkan 17 TPB/SDG.

Gambar 4.1 SDGs Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)



2). Perkembangan Teknologi Informasi dan Pengaruhnya pada Kehidupan Sosial, Budaya dan Ekonomi Masyarakat.

Perkembangan Teknologi Informasi saat ini sangat berkembang pesat dan mempengaruhi kehidupan sosial, budaya dan masyarakat. Salah satu isu adalah pengembangan *smart city*. *Smart City* adalah konsep pengembangan dan pengelolaan kota untuk menghasilkan *smart services* dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara intensif, termasuk jaringan komputer, sensor, *internet of things*, *cloud computing*, *big data*, *data analytic*, *space/geographical information integration*, dan lainnya.

Hal lain adalah Revolusi Industri 4.0 yaitu upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama. Faktor penggerak yang harus diperkuat untuk menyambut Industry 4.0 di Indonesia adalah peningkatan otomatisasi, komunikasi *machine- to-machine*, komunikasi *human- to- machine*, *AI*, serta pengembangan teknologi berkelanjutan. Beberapa dasar faktor penggerak. Pertama adalah peningkatan volume data, daya komputasi, dan konektivitas. Peran SDM industri melalui

pendidikan vokasi yang mengarah pada high skill serta meningkatkan keterampilan SDM industri yang dominan *low/middle* ke *level high skill*.

3). Penanganan dan Pencegahan Pandemi Covid-19 serta Pemulihan Dampaknya pada Kehidupan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat.

Pada Awal Tahun 2020 hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia mengalami penyebaran *pandemic Novel Coronavirus-2019 (Covid-19)*. Pandemi ini menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi dan resesi di seluruh dunia. Dampak negatif yang menjadi permasalahan nasional bahkan global yaitu terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi global dan nasional.

4.2.2. Isu Nasional

Visi Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024 yang akan menjadi landasan pencapaian Visi Indonesia 2045, adalah:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

(1) Pembangunan Sumber Daya Manusia

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

(2) Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

(3) Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

(4) Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

(5) Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuh Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020–2024 adalah sebagai berikut:

(1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan,

Isu strategisnya :

1. Keberlanjutan Sumber Daya Alam Ketersediaan

Sumber Daya Alam (SDA) yang menjadi modal utama dalam

pembangunan makin berkurang. SDA tidak hanya menjadi sumber bahan mentah bagi kebutuhan industri dalam negeri, tetapi juga menjadi sumber devisa.

2. Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi

Pengelolaan sumber daya ekonomi menghadapi tantangan terkait daya dukung lingkungan, ketersediaan lahan, keterbatasan infrastruktur, penataan ruang, serta kesejahteraan petani-nelayan dan masyarakat yang bergantung penghidupannya pada pemanfaatan sumber daya alam.

3. Transformasi Struktural Berjalan Lambat

Setelah era reformasi pada tahun 1998, Indonesia belum mampu melanjutkan transformasi sosial ekonomi yang terhenti akibat krisis. Rata-rata pertumbuhan ekonomi potensial Indonesia terus turun dari sebelumnya mencapai 6,0 persen pada periode 1990-2000 hingga mencapai rata-rata sekitar 5,0 persen pada periode 2000-2015. Kondisi ini disebabkan oleh kualitas tenaga kerja yang tidak bagus, kualitas investasi rendah dimana proporsi PMDN masih lebih rendah dibandingkan dengan PMA, peningkatan kualitas UMKM belum optimal.

4. Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital

Kesiapan Indonesia untuk mengadopsi dan mengeksplorasi teknologi digital yang mampu mendorong transformasi dalam pemerintahan, model usaha dan pola hidup masyarakat juga dianggap kurang.

(2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan,

Isu strategis utama pembangunan kewilayahan adalah masih adanya ketimpangan antar wilayah yang ditandai dengan: (a) tingginya angka kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) sebesar 18,0 persen, hampir dua kali lipat dari Kawasan Barat Indonesia (KBI) yang sebesar 10,3 persen; dan kemiskinan perdesaan yang tinggi (12,9 persen), hampir dua kali lipat dari perkotaan (6,7 persen) (BPS, 2019); (b) masih adanya ketimpangan pendapatan yang ditandai dengan Rasio Gini perdesaan sebesar 0,317 dan perkotaan sebesar 0,392; (c) terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di KBI terutama Pulau Jawa; (d) terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas di

daerah tertinggal, desa dan Kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan; dan (e) belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan.

(3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing,

Isu strategisnya :

1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
Penduduk tumbuh seimbang merupakan salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas dan pengarahannya mobilitas penduduk. Dengan penduduk tumbuh seimbang, daya tampung dan daya dukung lingkungan dapat tetap terjaga.
2. Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk
Perlindungan sosial ditujukan untuk melindungi seluruh penduduk Indonesia dari guncangan ekonomi, guncangan sosial, bahkan guncangan karena adanya bencana alam dan perubahan iklim. Meskipun kesejahteraan penduduk meningkat, jumlah penduduk yang rentan untuk jatuh miskin saat terjadi guncangan masih cukup tinggi. Perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan diberikan melalui bantuan sosial untuk mengurangi beban pengeluaran mereka. Selain program bantuan sosial, terdapat pula program-program subsidi, seperti LPG dan listrik yang ditujukan bagi kelompok miskin dan rentan. Pelaksanaan bantuan sosial dan subsidi akan terus disempurnakan melalui penyelenggaraan yang terintegrasi dan tepat sasaran, agar lebih efektif dan efisien dalam menurunkan angka kemiskinan.
3. Pemenuhan Layanan Dasar
Derajat kesehatan dan tingkat pendidikan membaik, namun belum menjangkau seluruh penduduk.
4. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda
Intervensi berdasarkan kebutuhan yang sesuai dengan tahap kehidupan dan karakteristik individu diperlukan dalam mewujudkan SDM yang

berkualitas dan berdaya saing. Anak, perempuan, dan pemuda merupakan kelompok penduduk yang memiliki kriteria spesifik sehingga dibutuhkan pendekatan yang berbeda demi menjamin kualitas hidup mereka.

5. Pengentasan Kemiskinan

Dalam satu dekade terakhir ekonomi Indonesia tumbuh positif. Namun, elastisitasnya terhadap tingkat kemiskinan menurun sehingga laju penurunan kemiskinan cenderung melambat.

6. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing

Produktivitas dan daya saing manusia Indonesia masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan Global Human Capital Index oleh World Economic Forum (WEF) 2017, peringkat SDM Indonesia berada pada posisi 65 dari 130 negara. Meskipun produktivitas tenaga kerja Indonesia mengalami peningkatan, yaitu dari 81,9 juta rupiah/orang pada tahun 2017 menjadi 84,07 juta rupiah/orang pada tahun 2018. Selain itu, pertumbuhan PDB Indonesia sebesar 4,9 persen di tahun 2017, hanya 0,6 persen yang bersumber dari Total Factor Productivity (TFP). Sisanya 2,8 persen pertumbuhan ekonomi bersumber dari modal kapital dan 1,5 persen dari modal manusia.

(4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan,

Isu strategisnya :

1. Melemahnya Ideologi Pancasila dan Ketahanan Budaya Bangsa
2. Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan Indonesia.
3. Belum Mantapnya Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti.
4. Masih Lemahnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama.
5. Belum kukuhnya kerukunan umat beragama.
6. Rendahnya budaya literasi.
7. Belum optimalnya peran keluarga.

(5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar,

Isu strategisnya :

1. Infrastruktur Pelayanan Dasar

- a. Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau.
 - b. Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman.
 - c. Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan.
 - d. Keselamatan dan Keamanan Transportasi.
 - e. Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur.
 - f. Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi.
2. Infrastruktur Ekonomi
- a. Konektivitas Transportasi Jalan.
 - b. Konektivitas Kereta Api.
 - c. Konektivitas Laut.
 - d. Konektivitas Udara.
 - e. Konektivitas Darat.
3. Infrastruktur Perkotaan
- a. Transportasi Perkotaan.
 - b. Energi dan Ketenagalistrikan Perkotaan.
 - c. Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan.
 - d. Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak dan Aman di Perkotaan.
 - e. Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau di Perkotaan.
4. Energi dan Ketenagalistrikan
- a. Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan.
 - b. Akses Serta Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan.
 - c. Kecukupan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan.
5. Transformasi Digital
- a. Penuntasan Infrastruktur TIK.
 - b. Pemanfaatan Infrastruktur TIK.
 - c. Fasilitas Pendukung Transformasi Digital.
- (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim,

Isu strategisnya :

1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.
 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim.
 3. Pembangunan Rendah Karbon.
- (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Isu strategisnya :

1. Konsolidasi Demokrasi.
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri.
3. Penegakan Hukum Nasional.
4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.
5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

4.2.3. Isu Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Hasil telaah dari gambaran kondisi daerah, serta isu-isu global, nasional, dan regional, maka diidentifikasi isu strategis pembangunan daerah Kalimantan Selatan dalam lima tahun mendatang yaitu:

1. Ekonomi Melambat

Jika melihat salah satu tujuan pembangunan internasional terkait pembangunan berkelanjutan, maka perubahan struktur perekonomian Kalimantan Selatan adalah pergeseran dominasi sektor pertambangan dan penggalian menjadi sektor pertanian sebagai sektor yang memiliki kontribusi terbesar kedua sekaligus sektor yang mengeksploitasi sumber daya alam terbaharukan. Meskipun kedua sektor tersebut memiliki *gap* yang jauh dalam andil struktur ekonomi, namun jika *shifting* sektor ekonomi dominan ini dilaksanakan dengan kontinu dan komitmen tinggi, maka bukan tidak mungkin pergeseran dominasi struktur akan terjadi dengan dampak positif pada lingkungan hidup.

2. Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga secara otomatis akan memberikan dampak positif kepada pemerataan kesejahteraan masyarakat sehingga kehidupan setiap penduduk Kalimantan Selatan menjadi lebih baik. Selain itu, sumber daya manusia yang berdaya saing akan menjadikan Provinsi Kalimantan Selatan siap dalam menghadapi segala permasalahan yang akan muncul selama pelaksanaan pembangunan dan mampu

memanfaatkan peluang maupun potensi yang ada untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Saat ini, sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Selatan masih butuh pembenahan terutama terkait kualitasnya.

3. Lingkungan Hidup

Tidak dapat dipungkiri, penambahan penduduk, peningkatan urbanisasi, dan pertumbuhan ekonomi berdampak pada kualitas lingkungan. Permasalahan utama lingkungan di Kalimantan Selatan adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ini dinilai berdasarkan kualitas udara, kualitas air sungai dan tutupan lahan/hutan. Permasalahan lingkungan yang juga terkait dengan IKLH adalah meningkatnya potensi bencana daerah di Kalimantan Selatan yaitu banjir dan kabut asap yang harus mendapatkan penanganan yang lebih baik di masa depan karena berdampak pada kesehatan masyarakat.

4. Sarana Prasarana dan Energi

Pembangunan infrastruktur berkualitas di Provinsi Kalimantan Selatan dengan kapasitas yang memadai dan merata merupakan faktor penting untuk mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Keuntungan dalam peningkatan aksesibilitas wilayah tersebut adalah terbentuknya jaringan infrastruktur yang efektif guna meningkatkan keterkaitan sektor primer berbasis pertanian dengan sektor industri pendukungnya melalui kluster dan pengembangan kawasan berdasarkan potensi dan unggulan komoditas daerah. Hingga saat ini, di Provinsi Kalimantan Selatan belum terpenuhi pemerataan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, air bersih, energi, dan kelistrikan di setiap lapisan masyarakat sehingga hasil pembangunan belum dinikmati secara maksimal.

5. Pandemi Covid 19

Pada Awal Tahun 2020 hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia mengalami penyebaran *pandemic Novel Coronavirus-2019* (Covid-19). Pandemi ini menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi dan resesi di seluruh dunia. Dampak negatif yang menjadi permasalahan nasional bahkan global yaitu terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya

mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Beberapa permasalahan yang muncul antara lain meningkatnya pengangguran karena banyak pekerja pada perusahaan yang dirumahkan dan di PHK, meningkatnya Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan serta menurunnya kontribusi UMKM dan IKM dalam menunjang perekonomian.

6. Tata Kelola Pemerintahan

Pembangunan daerah akan terlaksana melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi setiap tahapan yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai domain penting dalam mengatur setiap langkah jalannya program dan kegiatan pembangunan. Oleh karena itulah perlu adanya perwujudan good governance pada Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan agar capaian kinerja lebih optimal.

7. Ibu Kota Negara Di Kalimantan Timur

Pada 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ibu kota baru akan dibangun di wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara yang berada di Kalimantan Timur. Sebagai Ibu Kota Negara baru, Provinsi Kalimantan Timur memiliki potensi sumber daya alam melimpah. Batas wilayah Provinsi Kalimantan Timur sebelah timurnya berbatasan dengan sebagian (12 mil) Selat Makasar dan Laut Sulawesi. Sementara itu, sisi selatannya berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan.

4.2.4. Isu Daerah Tetangga Kabupaten Kotabaru

Dalam menentukan isu-isu strategis di Kabupaten Kotabaru perlu diperhatikan pula isu-isu strategis daerah lain. Penelaahan program yang menjadi kewenangan bersama dengan daerah lain karena diperlukan adanya persamaan kepentingan/tujuan atau upaya-upaya strategis yang harus disinergikan dan adanya persamaan permasalahan pembangunan yang memerlukan upaya pemecahan dan adanya agenda pembangunan kewilayahan yang menentukan kewenangan bersama (khususnya pada daerah-daerah yang letaknya di daerah

perbatasan dua wilayah).

4.2.4.1. Kabupaten Tanah Bumbu

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan utama pembangunan daerah, isu strategis Internasional, Isu Strategi pembangunan nasional dalam RPJMN Nasional Tahun 2020-2024, maka dirumuskan rancangan isu strategis pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing,
- b. Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan,
- c. Percepatan Peningkatan Kualitas Infrastruktur,
- d. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi, dan
- e. Peningkatan Kualitas Lingkungan.

4.2.4.2. Kabupaten Paser

Kabupaten Paser merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kotabaru di daerah Kecamatan Pamukan Barat. Kabupaten Paser membagi isu strategis RPJMD menjadi dua, sebagai berikut:

a. Isu Strategis Internal Kabupaten Paser

1. Isu Strategis Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

Permasalahan utama Kabupaten Paser dalam pembangunan adalah terjadinya ketimpangan atau kesenjangan pembangunan infrastruktur antar wilayah di Kabupaten Paser yang berdampak pada terjadinya kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah dan tidak meratanya kesejahteraan masyarakat.

Kesenjangan pembangunan infrastruktur dapat dilihat dari tidak merata dan rendahnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman, kurangnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar antar wilayah, dan belum optimalnya sarana dan prasarana perhubungan yang aman dan nyaman. Pada aspek lingkungan hidup, kualitas lingkungan hidup kabupaten Paser lebih rendah dari Provinsi maupun Nasional.

2. Isu Strategis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil identifikasi, analisis masalah, sinergitas antar masalah dalam bidang sumber daya manusia maka dirumuskanlah isu-isu strategis, sebagai berikut. Hingga saat ini kualitas pembangunan manusia yang didekati dengan indikator indeks pembangunan manusia (IPM), menunjukkan bahwa Paser masih relatif tertinggal dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Kalimantan Timur dengan

pertumbuhan yang cenderung melambat. Relatif lambatnya peningkatan kualitas sumber daya manusia di kabupaten Paser dapat diidentifikasi dari 3 komponen pembentuk IPM itu yakni aspek pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat.

3. Isu Strategis Bidang Tata Kelola Pemerintahan

Permasalahan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Paser adalah kinerja tata Kelola pemerintahan yang belum optimal.

4. Isu Strategis Bidang Perekonomian

Perekonomian Paser yang bertumpu pada pertambangan mengancam pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

b. Isu Strategis Eksternal Kabupaten Paser

1. Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Ke Wilayah Penajam Paser Utara.
2. Rencana Pembangunan Bendungan Lambakan dan Telake di Kecamatan Long Kali, menjadi isu strategis eksternal yang sangat didambakan pada sektor pertanian.
3. Pengembangan Food Estate dan Mini Ranch.
4. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).
5. New Urban Agenda (Agenda Baru Perkotaan).
6. Ancaman Virus Corona.

4.2.5. Isu Daerah Kabupaten Kotabaru

4.2.5.1. Isu Strategis pada RPJPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2005 - 2025

Mengacu pada RPJPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2005 – 2025, secara garis besar dapat dilihat bahwa isu daerah Kabupaten Kotabaru adalah:

- 1) **Demografi**; Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kesehatan, Angka Pengangguran, Pemerataan dan Kualitas Pendidikan, dan Tingkat Pengeluaran Riil per Kapita.
- 2) **Makro Ekonomi**; Pertumbuhan Ekonomi lambat, Pergeseran Struktur Ekonomi dari sektor premier ke sekunder dan tersier, Sentra dan sarana prasarana Industri dan Perdagangan, Kualitas SDM dan Teknologi Informasi masih rendah, perkembangan Koperasi dan UMKM lambat.
- 3) **Tanaman Pangan, Perkebunan & Peternakan**; Penyediaan Benih, Sarana dan Prasarana Pertanian, SDM Pertanian, Intensifikasi, Ekstensifikasi dan Diversifikasi Pertanian.

- 4) **Kelautan dan Perikanan**; pemanfaatan potensi Kelautan dan Perikanan belum optimal, Kewenangan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, sarana dan prasarana serta SDM kelautan dan perikanan, penegakan dan pengendalian serta pengawasan.
- 5) **Kehutanan dan Lingkungan Hidup**; ancaman pada kelestarian dan keberlanjutan lingkungan.
- 6) **Industri dan Perdagangan**; infrastruktur, sarana dan prasarana serta jaringan industri dan perdagangan, SDM, perkembangan kewirausahaan, perkembangan alternatif distribusi dan penjualan, permodalan.
- 7) **Sumber Daya Alam**; potensi Sumber Daya Alam, pemanfaatan SDA yang berkelanjutan, SDM.
- 8) **Sosial, Budaya dan Agama**; Penanganan PMKS, Pengembangan Budaya Lokal, Pengembangan Kehidupan Beragama.

Gambar 4.2 Tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2005 - 2025



4.2.5.2. Isu pada KLHS RPJMD Tahun 2021 – 2024

Gambaran umum capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Kabupaten Kotabaru adalah:

Tabel 4.1
Capaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
Kabupaten Kotabaru.

No.	Tujuan	Mencapai target	Belum mencapai target	Tidak ada data	Tidak ada di wilayah kajian	Total
TPB1	Tanpa Kemiskinan	9	7	8	0	24
TPB2	Tanpa Kelaparan	6	4	1	0	11
TPB3	Kehidupan Sehat dan sejahtera	16	6	12	0	34
TPB4	Pendidikan Berkualitas	3	7	3	0	13
TPB5	Kesetaraan Gender	1	2	11	0	14
TPB6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	4	5	9	0	18
TPB7	Energi Bersih & Terjangkau	0	0	2	0	2
TPB8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	9	3	7	0	19
TPB9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	7	0	5	1	13
TPB10	Berkurangnya Kesenjangan	3	2	6	0	11
TPB11	Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	3	3	7	0	13
TPB12	Konsumsi & Produksi	2	1	2	0	5

No.	Tujuan	Mencapai target	Belum mencapai target	Tidak ada data	Tidak ada di wilayah kajian	Total
	Berkelanjutan					
TPB13	Perubahan Iklim & Pengurangan Risiko Bencana	1	1	0	0	2
TPB14	Pelestarian & Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Laut	2	0	1	0	3
TPB15	Pelestarian & Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Darat	1	0	3	0	4
TPB16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan	10	2	9	0	21
TPB17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	6	5	5	0	16
	Total	83	48	91	1	223

Sumber : KLHS RPJMD

Isu pembangunan berkelanjutan menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026. Isu pembangunan berkelanjutan dalam pelaksanaan KLHS RPJMD dilaksanakan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

A. Identifikasi dan Perumusan Isu PB Strategis Berdasarkan Pokja

Berdasarkan FGD 1 Identifikasi dan perumusan isu PB strategis disepakati pada sebagai berikut:

1. Persampahan
2. Kemiskinan
3. Ketersediaan air bersih
4. Perubahan penggunaan lahan

5. Kebakaran hutan dan lahan

B. Isu PB Strategis Berdasarkan Capaian TPB

Berdasarkan capaian indikator SDGs/TPB, maka diperoleh isu PB strategis adalah:

1. TPB1 Kemiskinan
2. TPB4 Pendidikan
3. TPB5 Gender
4. TPB6 Air Bersih
5. TPB7 Energi
6. TPB11 Kota dan Pemukiman
7. TPB14 Pelestarian & Pemanfaatan Ekosistem Laut

C. Isu PB Strategis Berdasarkan 6 Muatan Lingkungan Hidup

Berdasarkan kondisi 6 muatan terdiri atas DDDT, Jasa Ekosistem (JE) dan lainnya diperoleh isu PB strategis sebagai berikut:

1. Daya dukung dan daya tampung pangan dan air
2. Konversi lahan dan kawasan hutan
3. Bencana alam dan upaya mitigasi
4. Pencemaran dan degradasi sumberdaya alam
5. Perubahan iklim dan kerentanan wilayah
6. Sinkronisasi pola ruang dalam RTRW Provinsi dengan RTRW Kabupaten maupun dengan alokasi ruang dalam RZWP3K Povinsi
7. Ketimpangan antar wilayah

D. Isu Prioritas

Berdasarkan kondisi umum wilayah Kabupaten Kotabaru, kondisi umum 17 TPB dan kondisi 6 muatan lingkungan hidup serta mempertembingkan point 3.6.1; 3.6.2; dan 3.6.3, maka pelaksanaan konsultasi publik tahap I dalam KLHS RPJMD

Kabupaten Kotabaru maka pemangku kepentingan menyepakati isu PB Prioritas sebagai berikut:

1. Kemiskinan
2. Ketersediaan air bersih
3. Pendidikan Berkualitas
4. Penanggulangan Bencana
5. Degradasi Sumberdaya alam dan lingkungan
6. Persampahan, limbah, dan sanitasi yang layak
7. Ketimpangan Infrastruktur pengembangan antar wilayah
8. Kesehatan

Berdasarkan analisis terhadap capaian TPB/SGDs di Kabupaten Kotabaru maka dirumuskan isu strategis KLHS RPJMD Kabupaten Kotabaru, sebagai berikut :

- 1) Masih rendahnya Cakupan Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi
- 2) Masih adanya penduduk yang Kelaparan dan termasuk dalam kelompok penduduk miskin Kemiskinan
- 3) Belum optimalnya upaya Pelestarian dan pemanfaatan ekosistem
- 4) Daerah rawan bencana
- 5) Belum optimalnya upaya Pelestarian dan pemanfaatan ekosistem serta Alih Fungsi Lahan
- 6) Kemiskinan dan Kesehatan
- 7) Kemiskinan
- 8) Belum meratanya Pendidikan Berkualitas
- 9) Masih tingginya AKB dan AKI Kesehatan dan Kesejahteraan
- 10) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 11) Kesenjangan Gender
- 12) Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak
- 13) Kesenjangan dan infrastruktur
- 14) Hukum & Tata Kelola
- 15) Tata Kelola dan Pembangunan berkelanjutan

4.2.5.3. Isu Strategis pada RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 - 2026

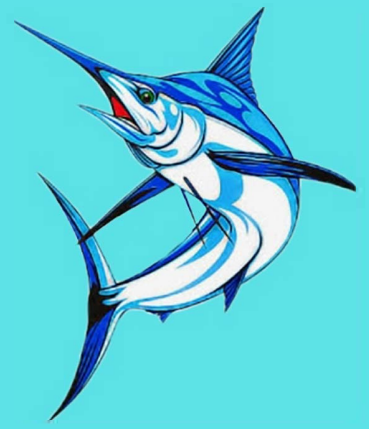
Berdasarkan analisis pada permasalahan di Kabupaten Kotabaru dan menimbang isu-isu yang berkembang di sekitar Kabupaten Kotabaru maka dirumuskan isu strategis pada RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Masih Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
2. Masih belum meratanya pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan wilayah.
3. Masih Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial Yang Berkeadilan.
4. Masih rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Perubahan Iklim.
5. Masih belum optimalnya Pelayanan Publik Melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

BAB 5

VISI, MISI, TUJUAN

DAN SASARAN



Teluk Tamiang

Katir Race



BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Dasar filosofi pembangunan daerah yang ada di Kabupaten Kotabaru adalah, SA-IJAAN yang memiliki makna: Semufakat, satu hati dan se-iya sekata yang menjadi nilai luhur untuk diimplementasikan kedalam tata nilai kehidupan budaya masyarakat. Kalimat tersebut berarti membangun daerah dalam secara bersama-sama dan satu tujuan dalam suasana kondusif untuk mewujudkan Kabupaten Kotabaru mandiri serta masyarakat yang semakin berkualitas dan sejahtera.

RPJM Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026 secara substansi tidak terlepas dari moto daerah untuk mencerminkan tekad dan semangat yang tinggi dari masyarakat Kabupaten Kotabaru dalam ikut serta dan berperan aktif melanjutkan dan meningkatkan pembangunan daerah Kabupaten Kotabaru dengan tetap dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan dan se-iya sekata.

Tekad dan semangat yang tinggi tersebut tercermin dalam lambang daerah Kabupaten Kotabaru yang maknanya adalah:

- Lambang daerah berbentuk perisai segi lima, melambangkan Ketuhanan dan pertahanan rakyat.
- Lima buah sudut pada perisai melambangkan kelima sila dari pancasila.
- Sisi atas berbentuk busur, gambaran dinamika dan stamina rakyat.
- Sisi samping berbentuk tegak lurus, menggambarkan sifat gotong royong, kejujuran dan keadilan.
- Sisi bawah perisai berbentuk lancip, menggambarkan suatu tujuan untuk membina masyarakat adil dan makmur.
- Garis tebal berwarna kuning emas pada sisi dalam sekeliling perisai, melambangkan persatuan rakyat.
- Dasar perisai berwarna merah, menggambarkan sifat keberanian.
- Garis kuning tebal yang membagi dua lukisan bagian atas dan bawah, menggambarkan bidang agraris pertanian (padi).

- Ikan todak, menggambarkan hasil tradisional dari sektor perikanan kelautan.
- Lautan dengan garis gelombang, menggambarkan panorama alam dan gelora semangat rakyat.

5.1. Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Kotabaru 2021 - 2026

Visi merupakan rumusan umum yang mengarahkan kondisi daerah Kabupaten Kotabaru yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah, yakni 5 tahun ke depan. Visi bukan hanya mimpi ataupun serangkaian harapan, namun suatu komitmen dan upaya merancang serta mengelola perubahan untuk mencapai tujuan pembangunan 5 tahun ke depan. Visi harus didasarkan pada realita dan harus dapat menunjukkan gambaran masa depan yang ideal bagi pembangunan daerah dan masyarakat.

Visi merupakan dasar bagi para *stakeholders* dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah. Perumusan visi dilakukan untuk menindaklanjuti hasil analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah (PPD) untuk menemukan perwujudan visi.

Berdasarkan kondisi Kabupaten Kotabaru sampai dengan saat ini, dan tantangan yang akan dihadapi dalam 5 tahun mendatang serta dengan mempertimbangkan potensi dan faktor strategis yang dimiliki daerah, Rancangan Visi Kabupaten Kotabaru juga mempertimbangkan RPJP Daerah Kabupaten Kotabaru yaitu “**Kotabaru Maju, Adil, dan Sejahtera**”. Untuk mencapai visi jangka panjang tersebut, telah dilakukan pentahapan dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah. Dokumen RPJMD ini merupakan bagian dari rencana jangka menengah ketiga di dalam rencana pembangunan jangka panjang yang terdapat di dalam RPJP Daerah yang memiliki arahan untuk terjadinya pemantapan perubahan struktural secara sosial-ekonomi, sehingga pembangunan akan lebih diarahkan pada penguatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan pertanian berbasis agribisnis dan agroindustri mulai berjalan, pengembangan pengembangan perekonomian telah mengarah pada perbaikan struktur antara produk hulu-hilir.

Berdasarkan visi jangka panjang diatas, dan bercermin kondisi yang terjadi saat ini serta isu-isu strategis yang telah dirumuskan ditambah dengan penggalian aspirasi dan persepsi masyarakat yang telah dilakukan, maka visi Pemerintah Kabupaten Kotabaru pada Tahun 2021 - 2026 adalah:

“Terwujudnya masyarakat kotabaru yang semakin mandiri dan sejahtera melalui peningkatan di bidang agrobisnis dan kepariwisataan”

Dalam artian bahwa visi Kabupaten Kotabaru 2016-2021 merupakan tahap ke empat dari bagian visi RPJP Daerah Kabupaten Kotabaru 2005-2025. Adapun makna yang dimaksud dalam visi tersebut adalah diuraikan seperti berikut:

Tabel 5.1.
Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026

Visi	Pokok-pokok visi	Penjelasan visi
Terwujudnya masyarakat kotabaru yang semakin mandiri dan sejahtera melalui peningkatan di bidang agrobisnis dan kepariwisataan	Masyarakat Mandiri	Masyarakat Mandiri adalah kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengatur dan mengelola daerah maupun rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh agar secara bertahap bisa mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain (luar) tanpa mehilangkan kerjasama dengan daerah lain yang saling menguntungkan.
	Sejahtera	Sejahtera adalah semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dengan adanya perhatian utama terhadap tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat seperti sandang, pangan, papan serta pemenuhan kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan yang didukung oleh infrastruktur fisik, sosial budaya dan ekonomi yang memadai. Peningkatan ini lebih difokuskan dalam pengentasan masyarakat miskin sehingga secara simultan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kesejahteraan masyarakat diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat dengan mendorong secara sungguh-sungguh simpul-

Visi	Pokok-pokok visi	Penjelasan visi
		simpul ekonomi rakyat utamanya di sektor agrobisnis serta kepariwisataan yang didukung oleh infrastruktur fisik yang memadai
	Agrobisnis	Agrobisnis adalah aktivitas perencanaan dan pendayagunaan potensi pertanian dalam arti luas meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan yang dijadikan sebagai potensi strategis serta landasan acuan bagi kebijakan pembangunan ekonomi
	Kepariwisata	Kepariwisata adalah aktivitas perencanaan dan pendayagunaan kekayaan sumber daya alam pesisir, laut maupun darat baik yang berupa biofisik, maupun sosial budaya sebagai asset wisata yang bernilai tambah ekonomi, ilmu pengetahuan dan budaya secara simultan dan berkelanjutan

Visi RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026 yaitu terwujudnya masyarakat kotabaru yang semakin mandiri dan sejahtera melalui peningkatan di bidang agrobisnis dan kepariwisataan merupakan visi kepala daerah dan selaras dengan visi pembangunan jangka panjang daerah yaitu “Maju, Adil dan Sejahtera”. Kriteria capaian visi pembangunan jangka panjang daerah tahun 2005-2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2010 tentang RPJPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2005-2025 secara jelas direfleksikan pada visi tersebut.

Dalam rangka mewujudkan visi, maka disusun misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Adapun keterkaitan visi dengan misi pembangunan Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026 adalah :

Tabel 5.2.
Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah

VISI	MISI
Terwujudnya masyarakat kotabaru yang semakin mandiri dan sejahtera melalui peningkatan di bidang agrobisnis dan kepariwisataan	• Mewujudkan ekonomi masyarakat yang berdaya saing dengan pemenuhan layanan infrastruktur yang berkelanjutan
	• Meningkatkan kualitas masyarakat yang religius, lebih sehat, cerdas dan kreatif serta terampil
	• Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang melayani, akuntabel dan transparan

Misi 1 Mewujudkan ekonomi masyarakat yang berdaya saing dengan pemenuhan layanan infrastruktur yang berkelanjutan

Arti struktur ekonomi yang berdaya saing yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan memaksimalkan potensi strategis yang ada di Kabupaten Kotabaru melalui upaya meningkatkan pembangunan sektor pertanian, perikanan dan kelautan, peternakan; perkebunan rakyat termasuk peningkatan kerjasama antara perkebunan inti dan plasma; berkurangnya lahan kritis; terbangunnya hutan kota serta terpeliharanya terumbu karang dan keanekaragaman hayati, flora dan fauna, serta termanfaatkannya sumberdaya kelautan dan sumberdaya alam yang terbaharukan secara bijaksana dan berkelanjutan; meningkatkan sarana

dan prasarana penunjang pertanian dalam arti luas, menata dan membangun sarana dan prasarana pengolahan pasca produksi pertanian dan kelautan serta penataan kawasan potensi kepariwisataan sebagai sumber devisa.

Upaya lebih lanjut dengan melaksanakan revitalisasi dan sertifikasi pertanian dalam arti luas melalui pemanfaatan pengelolaan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan melalui regulasi pemanfaatan sumberdaya alam, rehabilitasi dan reboisasi lahan kritis; meningkatkan investasi melalui regulasi yang menjamin kemudahan perizinan dalam berinvestasi; melakukan identifikasi peluang usaha berbasis sumberdaya alam dan memantapkan pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru sebagai wilayah pertambangan dan perikanan.

Pemenuhan Layanan Infrastruktur yang berkelanjutan adalah memenuhi kebutuhan pelayanan air minum/air bersih; pemenuhan kebutuhan listrik dengan membangun komunikasi dan kerjasama dengan Pemerintah, PLN dan Dunia Usaha. Rehabilitasi perumahan layak huni, sederhana dan sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan membangun komunikasi dan kerjasama dengan Pemerintah, Perbankan dan Dunia Usaha dalam penuntasan dan pembangunan / peningkatan / pemeliharaan jalan dan jembatan, bandara, pelabuhan dan dermaga pendarat dan penyeberangan, penyediaan fasilitas armada laut berupa alat transportasi laut untuk penyeberangan antar pulau sehingga dapat menunjang kepentingan dan aktifitas masyarakat.

Selanjutnya dengan meningkatkan upaya pemberdayaan kepada masyarakat yang mengarah kepada partisipasi kemitraan dengan swasta dan kegotong royongan dalam pembangunan dan usaha ekonomi produktif, meningkatkan peran dan pendanaan sesuai dengan Program Pemerintah serta peningkatan peran lembaga-lembaga kemasyarakatan untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan seperti PKK, Posyandu, UPPKS, BPR, Lembaga Keagamaan, Lembaga Adat, Organisasi Profesi dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya.

Misi 2 Meningkatkan kualitas masyarakat yang religius, lebih sehat, cerdas

dan kreatif serta terampil adalah upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama merealisasikan anggaran pendidikan 20 persen; membangun sekolah unggulan serta meningkatkan kuantitas, kualitas guru dan tenaga kependidikan yang terakreditasi ditingkatkan pendidikan dasar, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi melalui pelayanan puskesmas dan puskesmas perawatan 24 jam rawat inap dan UGD terutama untuk kecamatan yang jauh dari ibukota kabupaten, meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga medis, paramedis dan tenaga kesehatan lainnya termasuk peningkatan serta pengembangan kualitas dan kuantitas Rumah Sakit Umum Daerah beserta 28 Puskesmas yang tersedia, puskesmas keliling (mobil dan kapal), puskesmas siaga, puskesmas pembantu. Mendorong kegiatan olahraga, peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan serta mendorong terciptanya lapangan kerja serta usaha-usaha produktif dengan mengembangkan pembangunan (ekonomi berbasis agrobisnis dan pariwisata)

Misi 3 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui

penyelenggaraan pemerintahan yang melayani, akuntabel dan transparan adalah meningkatkan kinerja, koordinasi, sinkronisasi, pengembangan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, pemerintahan kecamatan, pemerintahan desa dan kelurahan, reformasi birokrasi, rencana aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi, pungli, penataan kelembagaan dan penegakkan hukum; meningkatkan kerjasama daerah, mengembangkan dan meningkatkan penataan wilayah administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tata kelola pemerintahan yang baik serta proses penyusunan kebijakan serta perencanaan pembangunan dilaksnakan sesuai dengan konsep *fairness* (kejujuran), *transparency* (keterbukaan), *accountability* (dapat dipertanggung jawabkan), *responsibility* (tanggap).

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Kotabaru tahun 2021 - 2026 sesuai arahan RPJPD Kabupaten Kotabaru 2005-2025 tersebut dibutuhkan :

1. Keselarasan visi dan misi (*alignment vision and mission*) antara provinsi dan kabupaten/kota;
2. Komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Kotabaru, masyarakat dan pelaku dunia usaha melalui kepemimpinan Bupati, melalui prinsip-prinsip: kebersamaan (*togetherness*), kemandirian (*self-help*), keadilan dan keberlanjutan (*sustainability*). Ketiga prinsip tersebut diwujudkan melalui pendekatan secara komprehensif, yaitu peningkatan modal sosial (*social capital*), pemberdayaan (*empowerment*), tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), membangun saling kepercayaan (*trust each others*), dan komunikasi yang sehat (*health of communication*);
3. Pelaksanaan pembangunan daerah secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

Tabel 5.3.

Keselaran Misi RPJMD Kabupaten Kotabaru 2021–2026 dengan Misi RPJPD Kabupaten Kotabaru 2005–2025

MISI RPJMD 2021 - 2026		MISI RPJPD 2005 - 2025	
1	Mewujudkan ekonomi masyarakat yang berdaya saing dengan pemenuhan layanan infrastruktur yang berkelanjutan	2	Mengembangkan ekonomi kearah industri dan perdagangan yang yang berbasis pada potensi agraris dan maritim dengan dukungan transportasi yang baik
		3	Mengembangkan prasarana dan sarana pembangunan yang dapat mendukung pengembangan ekonomi kabupaten
		4	Mendorong pengelolaan SDA secara efisien untuk menjamin kelanjutan

MISI RPJMD 2021 - 2026		MISI RPJPD 2005 - 2025	
			pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan.
2	Meningkatkan kualitas masyarakat yang religius, lebih sehat, cerdas dan kreatif serta terampil	1	Meningkatkan mutu SDM pada berbagai lapisan masyarakat dan wilayah serta pada berbagai aspek pembangunan dengan fokus pada kesehatan, pendidikan dan sosial budaya agama secara keseluruhan dengan berlandaskan pada IPTEK dan IMTAQ
3	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang melayani, akuntabel dan transparan	5	Menciptakan pemerintahan daerah, kehidupan berpolitik, sosial, budaya dan agama yang tertib hukum sehingga dapat memperluas kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan menikmati hasil hasilnya

5.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kotabaru 2021 - 2026

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan RPJMD. Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja, maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran.

Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Kuatnya hubungan kedua lembaga antara Kepala Daerah dan Perangkat Daerah dalam perumusan tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi; melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Kotabaru, sebagai berikut:

- Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kabupaten Kotabaru 2021 - 2026 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.
- Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis.

Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

Tabel 5.4.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 – 2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi akhir	
					2022	2023	2024	2025	2026		
					Target	Target	Target	Target	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					(7)	
Visi : Terwujudnya Masyarakat Kotabaru yang Semakin Mandiri dan Sejahtera melalui Peningkatan di Bidang Agrobisnis dan Kepariwisataan											
Misi 1											
Meningkatkan ekonomi masyarakat yang berdaya saing dengan pemenuhan layanan infrastruktur yang berkelanjutan.											
Tujuan											
1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ekonomi yang handal berbasis agrobisnis dan ekowisata.	1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	-1,87	3,90-4,20	4,05-5,5	4,78-5,83	5,3-5,97	5,63-5,91	5,63-5,91
Sasaran											
1	Meningkatnya kinerja sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan)	1	PDRB sektor Pertanian	%	9,80	10,02	10,02	10,03	10,03	10,04	10,04
2	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	2	Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Ton	93.291,14	104.020,98	104.546,34	104.546,46	105.264,16	105.895,75	524.467,70
3	Meningkatnya ketahanan pangan	3	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	79,98	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00	82,00
4	Meningkatnya kinerja sektor industri pengolahan berbasis produk lokal	4	Distribusi PDRB (ADHB) sektor industri	%	33,80	33,90	34,00	34,20	34,50	35,00	35,00

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran		Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi akhir
						2022	2023	2024	2025	2026	
						Target	Target	Target	Target	Target	
			pengolahan								
5	Meningkatnya kinerja sektor pariwisata	5	Persentase Kontribusi PAD sektor Pariwisata	%	6,60	6,67	6,60	6,64	6,63	6,62	6,62
Tujuan											
2	Meningkatnya investasi, usaha kecil menengah dan koperasi yang berdaya saing dan pro rakyat, berkelanjutan dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat.	2	Tingkat pengangguran Terbuka	%	4,96	5,01	4,84	4,65	4,45	4,35	4,35
Sasaran											
6	Meningkatnya kuantitas dan besaran investasi di Kabupaten Kotabaru.	6	Nilai Investasi	Rp (Juta)	34.259.688	1.224.000	1.285.200	1.349.460	1.457.417	1.603.158	6.919.235
7	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	7	Angka Kesempatan kerja	%	95,04	94,99	95,16	95,35	95,55	95,65	95,65
8	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sektor Usaha Mikro Kecil	8	Tingkat pertumbuhan Usaha Mikro Kecil	%	18,31	40,00	60,00	80,00	90,00	100,00	100,00

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi akhir	
					2022	2023	2024	2025	2026		
					Target	Target	Target	Target	Target		
Tujuan											
3	Meningkatnya infrastruktur dasar dan penunjang yang layak untuk kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan, partisipatif dan gotong royong yang sesuai dengan penataan ruang	3	Indeks Gini		0,287	0,295	0,288	0,281	0,274	0,268	0,268
Sasaran											
9	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat ke pusat kegiatan ekonomi	9	Persentase Jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	32,19	32,43	32,85	33,43	34,18	35,09	35,09
10	Mewujudkan Konektivitas Kabupaten	10	Rasio Konektivitas Kabupaten		0,68	0,75	0,81	0,88	0,94	1,00	1,00
11	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum	11	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum	%	36,81	37,06	37,21	37,81	38,91	41,31	41,31
12	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan sanitasi	12	Persentase rumah tangga yang memiliki akses Pengolahan Limbah Domestik	%	24,58	24,65	24,74	24,86	25,00	25,14	25,14

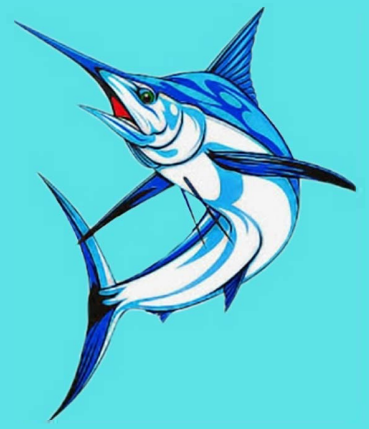
No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran		Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi akhir
						2022	2023	2024	2025	2026	
						Target	Target	Target	Target	Target	
13	Meningkatnya kualitas perumahan	13	Persentase peningkatan rumah layak Huni	%	96,12	96,80	97,48	98,17	98,85	99,53	99,53
14	Meningkatnya kualitas penataan ruang	14	Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)	%	97,20	97,20	97,20	97,20	97,20	97,20	97,20
15	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	15	Indeks desa membangun	Indeks	0,6677	0,6681	0,6685	0,6688	0,6693	0,6699	0,6699
16	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	16	Indeks kualitas lingkungan Hidup	Indeks	67,20	67,33	67,46	67,60	67,73	67,86	67,86
Tujuan											
4	Meningkatnya kewaspadaan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan non alam.	4	Indeks resiko bencana	indeks	158,79	156,20	155,34	154,12	153,79	152,99	152,99
Sasaran											
17	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewaspadaan bencana	17	Persentase kelompok masyarakat sadar bencana	Persen		20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi akhir	
					2022	2023	2024	2025	2026		
					Target	Target	Target	Target	Target		
Misi 2											
Meningkatkan kualitas masyarakat yang lebih religius, lebih sehat, cerdas dan kreatif serta terampil.											
Tujuan											
5	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Kotabaru, sehingga memiliki karakter mental, spiritual dan fisik agar mampu berperan dan mempunyai daya saing yang tinggi di segala segala bidang, baik di tataran Provinsi Kalimantan Selatan maupun nasional.	5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	68,86	69,10-69,50	69,50-70,54	70,54-71,01	71,01-71,48	71,48-71,95	71,48-71,95
Sasaran											
18	Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan pendidikan pada semua jenjang pendidikan dasar	18	indeks pendidikan	Tahun	9,68	10,23	10,44	10,75	11,00	11,25	11,25
19	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	19	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	69,21	69,50	69,80	70,10	70,40	70,70	70,70
Tujuan											
6	Meningkatnya pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga menurunkan tingkat kemiskinan	6	Angka Kemiskinan	%	4,22	4,20	4,15	4,09	4,03	3,97	3,97
Sasaran											
20	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	20	Persentase Pemerlu Pelayanan	Persen	70,85	70,85	73,73	75,16	77,55	77,55	77,55

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran		Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi akhir
						2022	2023	2024	2025	2026	
						Target	Target	Target	Target	Target	
			Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial								
Misi 3											
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang melayani, akuntabel dan transparan.											
Tujuan											
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang jujur, responsif, terbuka, akuntabel, transparan dan baik.	7	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Nilai	CC (55,56)	CC (60,00)	CC (64,00)	B (65,01)	B (67,50)	B (70,00)	B (70,00)
Sasaran											
21	Meningkatnya Birokrasi yang bersih, akuntabel yang melayani	21	Nilai SAKIP	Nilai	B	B	B	BB	BB	BB	BB
22	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah	22	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

BAB 6

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH



*Wisata Unggulan
pantai*



Pantai Gedambaan



BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua:

1. Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
2. Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Perencanaan sekaligus dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja yang *actionable*. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis.

Disamping strategi, hal yang penting lainnya adalah menentukan arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Kotabaru melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

Visi RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026 terdiri atas 3 Misi yang didukung dengan 49 strategi dan 115 arah kebijakan. Perencanaan Strategis pada bagian ini dituangkan secara lebih rinci ke dalam Misi 1 sampai dengan Misi 3 berdasarkan pendekatan tujuan dan sasaran sebagai berikut;

Tabel 6.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kotabaru yang Semakin Mandiri dan Sejahtera Melalui Peningkatan di Bidang Agrobisnis dan Kepariwisata

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
(1)		(2)		(3)		(4)	
Misi ke-1:							
Meningkatkan ekonomi masyarakat yang berdaya saing dengan pemenuhan layanan infrastruktur yang berkelanjutan.							
1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ekonomi yang handal berbasis agrobisnis dan ekowisata.	1	Meningkatnya kinerja sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan)	1	Mengembangkan Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Horikultura sesuai Potensi Wilayah serta Peningkatan Kualitas produksi	1	Fasilitasi sarana Produksi serta pemilihan dan pemanfaatan bibit unggul pertanian tanaman pangan / fasilitasi pengembangan food estate dalam rangka mendukung IKN (Pamukan dan Kelumpang)
						2	Fasilitasi Prasarana Produksi serta pemilihan dan pemanfaatan bibit unggul pertanian tanaman pangan
						3	Fasilitasi produksi peternakan serta pengolahan limbah ternak
						4	Pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi sekunder, tersier, pintu air dilokasi kawasan pertanian sentra produksi tanaman pangan
						5	Fasiltasi pemasaran hasil produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura unggulan serta pelaksanaan penyuluhan untuk peningkatan kapasitas

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
							petani
		2	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	1	Mengembangkan sektor perikanan sesuai potensi wilayah serta peningkatan kualitas produksi	1	Pengembangan desa inovasi nelayan (Sakadoyan) dalam rangka mendukung produk unggulan perikanan daerah dan Pembangunan bagang ramah lingkungan, sekaligus media wisata kelautan
						2	Revitalisasi tambak rakyat dan Fasilitasi sarana prasarana produksi , pemilihan dan pemanfaatan bibit unggul perikanan
						3	Pembinaan kelompok pengawas masyarakat
						4	Fasilitasi pemasaran hasil produk perikanan Dukungan BUMD
		3	Meningkatnya ketahanan pangan	1	Peningkatan ketahanan pangan daerah dan stabilitas harga pangan pokok	1	Pengembangan kemandirian pangan
						2	Penyediaan pangan yang beragam, dalam jumlah cukup dan terdistribusi merata, dengan harga terjangkau
						3	Penanganan daerah rawan pangan
						4	Penanganan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
		4	Meningkatnya kinerja sektor industri pengolahan berbasis produk lokal	1	Mendorong pengembangan industri pengolahan dalam rangka memberi nilai tambah hasil produk lokal	1	Fasilitasi pembangunan industri hasil pengolahan untuk pengembangan agrobisnis serta Memfasilitasi penciptaan jejaring pemasaran hasil produksi
						2	Pengembangan dalam pembinaan industri pengolahan

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
						3	Pengembangan teknologi informasi terkait industri
		5	Meningkatnya kinerja sektor pariwisata	1	Meningkatkan sarana dan prasarana, destinasi wisata unggulan serta kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat	1	Pembangunan sarana dan prasarana destinasi wisata unggulan terutama di 5 Kawasan Pengembangan obyek daya tarik wisata (Kawasan Siring Laut, Kawasan Pantai Gedambaan, Kawasan Ekowisata Hutan Meranti Putih dan Air Terjun Tumpang Dua, Kawasan Teluk Tamiang, Tanjung Kunyit, Nusa Dua Selayar & Teluk Aru, Kawasan Goa Lowo dan sekitarnya, Kawasan+ Wisata Bukit Mamake-Bapake) Beserta Event Pariwisata Pendukungnya
						2	Promosi dan pelaksanaan event berskala nasional
						3	Pembangunan wisata di area pertanian dan perikanan
						4	Pembangunan masyarakat sadar wisata dan kerjasama dengan pihak swasta dan sektor pendidikan
2	Meningkatnya investasi, usaha kecil menengah dan koperasi yang berdaya saing dan pro rakyat, berkelanjutan dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat.	6	Meningkatnya kuantitas dan besaran investasi di Kabupaten Kotabaru.	1	Menyediakan informasi potensi investasi dan meningkatkan iklim investasi yg kondusif	1	Penyusunan profil potensi investasi
						2	Fasilitasi kerjasama investor dengan pemerintah kabupaten
						3	Fasilitasi dan kemudahan proses izin investasi serta dukungan pelayanan <i>mobile system</i>

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
						4	Pemantauan pelaksanaan penanaman modal
						5	Pengembangan teknologi informasi terkait perizinan dan non perizinan serta pembangunan MAL Perizinan
						1	Menciptakan lapangan kerja baru
						1	Optimalisasi BLK sebagai pusat pelatihan pencari kerja
						2	Kerjasama dengan Dunia usaha untuk peningkatan kualitas pencari kerja
		7	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	1	Meningkatkan kualitas tenaga kerja	3	Penguatan kelembagaan tripartit
						1	Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dengan peningkatan kualitas SDM
						2	Mengembangkan sistem pendukung UKM
						1	Meningkatkan Perdagangan berbasis produk lokal
						2	Peningkatan kualitas dan kuantitas sektor Usaha Mikro Kecil
		8	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sektor Usaha Mikro Kecil	1	Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dengan peningkatan kualitas SDM	1	Fasilitasi penguatan modal
						2	Pemantauan kelembagaan koperasi
						3	Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM koperasi
						4	fasilitasi dan pendampingan kelembagaan koperasi
						1	Fasilitasi dan pembinaan usaha mikro dalam menciptakan produk yang berkualitas
						2	Fasilitasi penguatan modal usaha mikro
						1	Fasilitasi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
						2	Penyediaan sarana prasarana perdagangan
						3	Pengendalian harga kebutuhan pokok
						4	Pengembangan produk ekspor unggulan
						5	Peningkatan perlindungan konsumen dan tertib niaga

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
						6	Fasilitasi promosi produk lokal
3	Meningkatnya infrastruktur dasar dan penunjang yang layak untuk kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan, partisipatif dan gotong royong yang sesuai dengan penataan ruang	9	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat ke pusat kegiatan ekonomi	1	Meningkatkan akses jalan yang menghubungkan ibu kota Kecamatan	1	Peningkatan Kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan secara berkelanjutan dengan didukung alternatif pelaksanaan tahun jamak termasuk pembangunan jembatan pulau laut - Kalimantan dalam rangka mendukung konektivitas
		10	Mewujudkan Konektivitas Kabupaten	2	Fasilitasi penyediaan perumahan dan pemukiman layak huni	1	Penataan Kawasan pemukiman melalui kerjasama dengan pemerintah pusat dan swasta
				1	Penyediaan sarana dan prasarana transportasi untuk pelayanan dasar	1	Implementasi tataran transportasi lokal
		11	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum	1	Peningkatan dan penyediaan air baku	1	Perluasan dan penyediaan air baku
				2	Perluasan layanan penyediaan air bersih	1	Pemanfaatan sumber sumber air secara optimal
		12	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan sanitasi	1	Perluasan layanan sanitasi	1	Peningkatan sanitasi kawasan perumahan dan pemukiman
						2	Peningkatan drainase Perkotaan dan Lingkungan
		13	Meningkatnya kualitas perumahan	1	Fasilitasi penyediaan rumah dan lingkungan layak huni	1	Peningkatan kerjasama dengan swasta dan pemerintah pusat dalam penyediaan rumah layak huni
						2	Penataan Kawasan kumuh
						3	Peningkatan Prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) Kawasan Perumahan dan pemukiman

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
		14	Meningkatnya kualitas penataan ruang	1	Meningkatkan Pengelolaan Tata ruang secara terpadu	1	Peningkatan pengendalian dan evaluasi pemanfaatan ruang
				2	Meningkatkan pembangunan fasilitas umum secara terpadu	1	Pembangunan perkantoran beserta Fasilitas umum lainnya dengan didukung alternatif pelaksanaan tahun jamak
						2	Peningkatan Penataan Bangunan dan lingkungan
				3	Fasilitas sertifikasi tenaga konstruksi	1	Peningkatan Kapasitas sumber daya manusia bidang jasa konstruksi
		15	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	1	Meningkatkan kualitas Perencanaan dan penganggaran desa	1	Fasilitasi penyelenggaraan penataan desa
						2	Fasilitasi kerjasama desa dengan pihak ketiga
						3	Peningkatan kualitas aparatur desa dan BPD dalam perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban
				2	Meningkatkan Partisipasi lembaga masyarakat di desa dalam pembangunan	1	Peningkatan kapasitas lembaga masyarakat ditingkat desa
		16	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	Peningkatan Kualitas Lingkungan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha	1	Penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH)
						2	Pembangunan Sarana Prasarana Uji Lingkungan Hidup
						3	Pengelolaan ruang terbuka hijau
						4	Penerapan pengelolaan limbah
						5	Pemantauan kualitas lingkungan

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
						6	Pengelolaan lingkungan sehat pada masyarakat dan dunia usaha
						7	Pelaksanaan desa bersih
						8	Peningkatan nilai skor rata rata adipura dan adiwiyata
						9	Penanganan Kasus kerusakan lingkungan
						10	Pelayanan penanganan sampah secara terpadu
						11	Pengelolaan Taman Hutan Meranti Putih dan pengelolaan tahura untuk kawasan konservasi
4	Meningkatnya kewaspadaan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan non alam.	17	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewaspadaan bencana	1	Meningkatkan koordinasi penanganan Bencana antar instansi dan masyarakat dalam menghadapi bencana	1	Peningkatan peran serta aktif masyarakat dalam menghadapi bencana
						2	Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
						3	Penanganan Korban pasca bencana
Misi ke-2:							
Meningkatkan kualitas masyarakat yang lebih religius, lebih sehat, cerdas dan kreatif serta terampil.							
1	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Kotabaru, sehingga memiliki karakter mental, spiritual dan fisik agar mampu berperan dan mempunyai daya saing yang tinggi di segala segala bidang, baik di tataran Provinsi Kalimantan Selatan maupun nasional.	1	Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan pendidikan pada semua jenjang pendidikan dasar	1	Meningkatkan akses pelayanan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah	1	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar
				2	Meningkatkan budaya minat baca masyarakat	1	Meningkatkan layanan, kualitas dan kapasitas Perpustakaan serta pelestariannya
				3	mengembangkan pelestarian dan kekayaan budaya daerah	1	Meningkatkan apresiasi terhadap kekayaan budaya dan sistem pengelolaannya

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
		2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	4	Meningkatkan pengelolaan taman makam pahlawan	2	Pelestarian situs budaya
						1	Peningkatan pengelolaan taman makam pahlawan
				1	Meningkatkan akses layanan kesehatan	1	Peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan sesuai standar termasuk Layanan Rumah Sakit Pratama
						2	Pemenuhan kualitas dan pemerataan sebaran tenaga kesehatan
						3	Peningkatan penyelenggaraan pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar layanan di fasilitas kesehatan
						4	Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
				2	Mengoptimalkan Kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas dan aktivitas pemuda	1	Fasilitasi dan dukungan kegiatan kepemudaan
						2	Pembinaan organisasi kepramukaan
				3	Meningkatkan prestasi olahraga yang Profesional	1	Fasilitasi dan dukungan kegiatan keolahragaan
				4	Meningkatkan Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak	1	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG)
				5	Meningkatkan peran lembaga perlindungan perempuan dan anak	1	Peningkatan peran lembaga perlindungan perempuan dan anak
						2	Penerapan kebijakan kota layak anak
				6	Meningkatkan Program keluarga berencana yang	1	Peningkatan Keikutsertaan masyarakat dalam

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
					berkualitas		program keluarga berencana
2	Meningkatnya pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga menurunkan tingkat kemiskinan	1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	1	Meningkatkan akses PPKS terhadap layanan sosial dasar	1	Pengelolaan kegiatan pemberdayaan PPKS
						2	Peningkatan layanan kepada PPKS yang membutuhkan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial
Misi ke-3:							
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang melayani, akuntabel dan transparan.							
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang jujur, responsif, terbuka, akuntabel, transparan dan baik.	1	Meningkatnya Birokrasi yang bersih, akuntabel yang melayani	1	Optimalisasi Penerapan Birokrasi yang bersih, akuntabel dan melayani	1	Peningkatan Penerapan SAKIP Perangkat Daerah
						2	Peningkatan Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
						3	Peningkatan Indeks Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa serta pengelolaan BUMD dan BLUD
				2	Mempercepat penerapan Birokrasi yang sederhana dan mudah diakses	1	Penyelenggaraan Birokrasi berbasis Elektronik (SPBE)
				3	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1	Peningkatan konsistensi perencanaan, pengendalian dan evaluasi dengan basis data geospasial yang terintegrasi dengan simpul jaringan
						2	Penyelarasan perencanaan daerah, provinsi dan nasional
				4	Meningkatkan Pengelolaan Arsip	1	Penerapan pengelolaan arsip secara baku di SKPD
				5	Menerapkan pelayanan publik yang prima	2	Peningkatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
				6	Meningkatkan Kualitas dan kuantitas layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	1	Peningkatan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil
				7	Meningkatkan kualitas layanan lembaga perwakilan daerah	1	Peningkatan Kapasitas lembaga perwakilan daerah
				8	Meningkatkan Layanan Kepegawaian	1	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur serta pembinaan dan pengembangan kepegawaian berbasis teknologi informasi
						2	Pemantapan standar kompetensi dan pengembangan kompetensi bagi aparatur
				9	Meningkatkan Pemanfaatan hasil kelitbangan	1	Peningkatan penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah
				10	Meningkatkan kewaspadaan dan wawasan kebangsaan	1	Fasilitasi Pengawasan Aliran kepercayaan masyarakat (PAKEM)
						2	Pembinaan partai politik melalui pendidikan politik
						3	Peningkatan Pemberdayaan dan pengawasan organisasi masyarakat
						4	Fasilitasi Forum kerukunan umat beragama
						5	Fasilitasi Forum koordinasi pimpinan daerah
				11	Meningkatkan penyelenggaraan Penegakan Peraturan daerah	1	Peningkatan kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati
		2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan	1	Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan	1	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
			keuangan Pemerintah Daerah		pemerintah daerah		
						2	Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan kepala daerah oleh aparat pengawasan internal
			2	Meningkatkan Pengelolaan keuangan daerah		1	Pembinaan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah
						2	Peningkatan sistem penataan aset daerah
						3	Pembinaan Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah

Adapun program pembangunan daerah yang sesuai dengan kewenangan urusan Pemerintahan Daerah pada RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 – 2026 meliputi urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib pelayanan non dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang pemerintahan serta unsur pemerintahan umum, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.2
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Kotabaru

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program Program (<i>outcome</i>)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Misi 1																
			Meningkatkan ekonomi masyarakat yang berdaya saing dengan pemenuhan layanan infrastruktur yang berkelanjutan.																
			Tujuan 1																
			Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ekonomi yang handal berbasis agrobisnis dan ekowisata.																
			Sasaran 1																
			Meningkatnya kinerja sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan)																
3	27	02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	100% (TP : 1% Horti : 2% Bun : 1 Nak : 2)	100% (TP : 1% Horti : 2% Bun : 1,2 % Nak : 2%)	2.243.350.000	100% (TP : 1% Horti : 2% Bun : 1,2 % Nak : 2%)	2.513.350.000	100% (TP : 1% Horti : 2% Bun : 1,2 % Nak : 2%)	2.681.350.000	100% (TP : 1% Horti : 2% Bun : 1,2 % Nak : 2%)	2.875.530.000	100% (TP : 1% Horti : 2% Bun : 1,2 % Nak : 2%)	3.131.284.000	100% (TP : 5% Horti : 10% Bun : 6 % Nak : 10%)	13.444.864.000	Dinas Pertanian

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
3	27	03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Presentase prasarana yang digunakan	%	100	100	1.417.500.000	100	1.130.000.000	100	1.172.500.000	100	1.215.000.000	100	1.257.500.000	100	6.192.500.000	Dinas Pertanian
3	27	04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	79,90	74,90	270.000.000	72,40	270.000.000	69,90	270.000.000	69,90	270.000.000	69,90	270.000.000	69,90	1.350.000.000	Dinas Pertanian
3	27	05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	%	100% (TP = 90%, Horti = 90%, Bun = 80%)	100% (TP = 90%, Horti = 90%, Bun = 80%)	385.000.000	100% (TP = 90%, Horti = 90%, Bun = 80%)	420.000.000	100% (TP = 90%, Horti = 90%, Bun = 80%)	420.000.000	100% (TP = 90%, Horti = 90%, Bun = 80%)	490.000.000	100% (TP = 90%, Horti = 90%, Bun = 80%)	525.000.000	100% (TP = 90%, Horti = 90%, Bun = 80%)	2.240.000.000	Dinas Pertanian
3	27	07	Program Penyuluhan Pertanian	Presentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	%	100% (400 Kelompok Tani)	100% (400 Kelompok Tani)	1.458.363.000	100% (400 Kelompok Tani)	1.589.062.300	100% (400 Kelompok Tani)	2.117.331.530	100% (400 Kelompok Tani)	2.148.427.683	100% (400 Kelompok Tani)	2.182.633.451	100% (400 Kelompok Tani)	9.495.817.964	Dinas Pertanian

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			Sasaran 2																
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya																
3	25	03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	73.686	74.438	258.500.000	74.814	484.350.000	74.889	612.785.000	75.263	644.063.500	75.715	678.469.850	375.119	2.678.168.350	Dinas Perikanan
3	25	04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	29.284	29.583	890.999.956	29.732	1.080.099.952	29.851	1.178.109.947	30.001	1.285.920.941	30.181	1.404.513.036	149.348	5.839.643.832	Dinas Perikanan
3	25	05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	%	20	20	110.000.000	20	121.000.000	20	133.100.000	20	146.410.000	20	161.051.000	100	671.561.000	Dinas Perikanan
3	25	06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Agrobisnis (Hasil olahan ikan) dibidang perikanan	%	20	20	515.000.000	20	566.500.000	20	623.150.000	20	686.465.000	20	754.011.500	100	3.144.126.500	Dinas Perikanan

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Sasaran 3																
			Meningkatnya ketahanan pangan																
2	09	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase penyediaan infrastruktur kemandirian pangan	%	30,00	35,00	234.000.000	40,00	928.000.000	45,00	990.000.000	50,00	1.110.000.000	55,00	1.230.000.000	55,00	4.492.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	63,00	64,00	660.875.000	64,00	1.660.000.000	65,00	1.620.000.000	65,00	1.720.000.000	66,00	1.840.000.000	66,00	7.500.875.000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase daerah tidak rentan rawan pangan	%	77,00	79,00	100.000.000	82,00	510.000.000	85,00	570.000.000	87,00	630.000.000	90,00	690.000.000	90,00	2.500.000.000	Dinas Ketahanan Pangan

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	09	05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	25,00	25,00	50.000.000	50,00	1.100.000.000	60,00	450.000.000	70,00	550.000.000	80,00	650.000.000	80,00	2.800.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
			Sasaran 4																
			Meningkatnya kinerja sektor industri pengolahan berbasis produk lokal																
3	31	02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Pertumbuhan IKM	%	20	40	595.000.000	60	1.920.000.000	80	1.915.000.000	100	2.025.000.000	100	2.025.000.000	100	8.480.000.000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
3	31	03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	4,39	4,39	-	4,39	60.000.000	4,39	65.000.000	4,39	70.000.000	4,39	70.000.000	4,39	265.000.000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
3	31	04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase penyediaan sistem informasi data industri secara lengkap dan terkini	%	68	76	155.000.000	84	240.000.000	92	290.000.000	96	350.000.000	100	350.000.000	100	1.385.000.000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
			Sasaran 5																
			Meningkatnya kinerja sektor pariwisata																
3	26	02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Daya Tarik Destinasi Pariwisata Daerah yang Menerapkan Standar Sapta Pesona	%	10	30	23.526.162.500	50	5.088.000.000	60	5.378.000.000	70	5.688.000.000	100	6.148.000.000	100	45.828.162.500	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	26	03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase ODTW Unggulan Kotabaru yang menjadi Paket Wisata	%	20	40	1.021.896.000	50	823.079.500	60	944.948.000	80	1.066.816.500	100	1.188.685.000	100	5.045.425.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
3	26	04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Fasilitasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	%	0	5	205.000.000	25	1.350.000.000	50	1.450.000.000	75	1.500.000.000	100	1.550.000.000	100	6.055.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	26	05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Penyelenggaraa n Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di ODTW Unggulan	%	10	30	2.117.350.000	50	1.425.000.000	60	1.500.000.000	80	1.525.000.000	100	1.550.000.000	100	8.117.350.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			Tujuan 2																
			Meningkatnya investasi, usaha kecil menengah dan koperasi yang berdaya saing dan pro rakyat, berkelanjutan dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat.																
			Sasaran 1																
			Meningkatnya kuantitas dan besaran investasi di Kabupaten Kotabaru.																

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	18	02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan iklim investasi dengan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal	%	-	-	-	100	30.000.000	100	42.000.000	-	-	-	-	100	72.000.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah investasi	%	100	100	70.000.000	100	90.000.000	100	120.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	580.000.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan untuk memenuhi standar operasional prosedur	%	100	100	1.094.080.000	100	1.094.080.000	100	1.094.080.000	100	1.094.080.000	100	1.094.080.000	100	5.470.400.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	18	05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal	%	5	12	420.000.000	12	480.000.000	12	490.000.000	12	500.000.000	12	520.000.000	65	2.410.000.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan dengan sistem database	%	70	80	140.000.000	85	145.000.000	90	156.000.000	95	170.000.000	100	190.000.000	100	801.000.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			Sasaran 2																
			Meningkatnya penyerapan tenaga kerja																
2	07	02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	-	60	100.000.000	65	100.000.000	70	100.000.000	75	100.000.000	80	100.000.000	80	500.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	07	03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%		10	2.225.000.000	12	1.525.000.000	14	1.525.000.000	16	1.525.000.000	18	1.525.000.000	18	8.325.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2	07	04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota	%	65,08	67	575.000.000	70	600.000.000	73	630.000.000	75	763.000.000	78	799.000.000	78	3.367.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	07	05	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	15	18	491.000.000	19	620.100.000	20	682.110.000	21	750.321.000	22	825.353.100	22	3.368.884.100	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
			Sasaran 3																
			Meningkatnya kualitas dan kuantitas sektor Usaha Mikro Kecil																
2	17	02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Fasilitas Koperasi yang memiliki perizinan Usaha	%		26,27	-	46,67	50.000.000	66,67	60.000.000	86,67	70.000.000	100,00	70.000.000	100,00	250.000.000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	17	03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	persentasi koperasi yang melaksanakan RAT	%	28,75	36,36	290.000.000	39,13	290.000.000	41,67	300.000.000	44,00	310.000.000	48,00	320.000.000	48,00	1.510.000.000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	%	20	40	30.000.000	60	80.000.000	80,00	100.000.000	92,00	120.000.000	100,00	120.000.000	100,00	450.000.000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan perkoperasi	%	47,62	47,62	100.000.000	47,62	320.000.000	47,62	330.000.000	47,62	340.000.000	47,62	340.000.000	47,62	1.430.000.000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	06	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	%	57,14	57,14	90.000.000	57,14	120.000.000	57,14	130.000.000	57,14	140.000.000	57,14	140.000.000	57,14	620.000.000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	17	07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	20	40	200.000.000	60	1.170.000.000	80	1.170.000.000	90	1.170.000.000	100	1.170.000.000	100	4.880.000.000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	08	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha mikro yang mendapatkan pembinaan	%	20	40	410.060.000	60	773.000.000	80	723.000.000	90	723.000.000	100	723.000.000	100	3.352.060.000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
3	30	02	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	%	77,78	83,33	150.000.000	88,89	1.285.000.000	94,44	1.450.000.000	96,67	1.550.000.000	100	1.550.000.000	100	5.985.000.000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
3	30	03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pembangunan sarana distribusi perdagangan	%	38,46	46,15	1.970.000.000	53,85	16.780.000.000	61,54	15.830.000.000	69,23	15.860.000.000	76,92	15.860.000.000	76,92	66.300.000.000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
3	30	04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Stabilitas dan ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	100	100	100.000.000	100	730.000.000	100,00	830.000.000	100,00	920.000.000	100,00	920.000.000	100,00	3.500.000.000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
3	30	05	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Pengembangan Ekspor Unggulan	%	0	100	-	100	660.000.000	100,00	720.000.000	100	780.000.000	100	780.000.000	100	2.940.000.000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
3	30	06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Standarisasi dan perlindungan konsumen dan barang/jasa yang beredar	%	20	40	325.000.000	60	440.000.000	80,00	470.000.000	90	500.000.000	100	500.000.000	100	2.235.000.000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
3	30	07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	%	0	100	50.000.000	100	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	650.000.000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			Tujuan 3																
			Meningkatnya infrastruktur dasar dan penunjang yang layak untuk kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan, partisipatif dan gotong royong yang sesuai dengan penataan ruang																
			Sasaran 1																
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat ke pusat kegiatan ekonomi																
1	03	10	Program Penyelenggaraa n Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	32,19	32,43	103.700.000.000	32,85	103.700.000.000	33,43	103.700.000.000	34,18	103.700.000.000	35,09	103.700.000.000	35,09	518.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	07	Program Pengembangan Permukiman	Persentase fasum (fasilitas umum) yang berfungsi	%	30,44	30,86	10.282.932.000	31,48	10.282.932.000	32,31	10.282.932.000	33,55	10.282.932.000	35,21	10.282.932.000	35,21	51.414.660.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Sasaran 2																
			Mewujudkan Konektivitas Kabupaten																
2	15	02	Program Penyelenggaraa n Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Penyelenggaraa n Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	%	100	100	6.125.500.000	100	11.796.675.000	100	6.039.123.750	100	6.626.498.625	100	7.227.784.113	100	37.815.581.488	Dinas Perhubungan

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	15	03	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Pengelolaan Pelayaran	%	10,00	30	768.600.000	50	5.321.520.000	70	3.262.760.000	90	3.589.036.000	100	3.947.939.600	100	16.889.855.600	Dinas Perhubungan
			Sasaran 3																
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum																
1	03	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur	%	17,87	18,37	24.765.000.000	18,87	19.040.000.000	19,87	22.490.000.000	20,37	22.540.000.000	21,37	22.590.000.000	21,37	111.425.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	03	03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	36,81	37,06	5.005.000.000	37,21	5.005.000.000	37,81	5.005.000.000	38,91	5.005.000.000	41,31	5.005.000.000	41,31	25.025.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Sasaran 4																
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan sanitasi																
1	03	05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	25	24,65	9.400.000.000	24,75	11.400.000.000	24,86	2.400.000.000	25,00	2.400.000.000	25,14	2.400.000.000	25,14	28.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	03	06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase jaringan drainase berfungsi baik	%	0,0105	0,0105	2.650.000.000	0,0106	2.150.000.000	0,0107	2.150.000.000	0,0108	2.150.000.000	0,0109	2.150.000.000	0,0109	11.250.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Sasaran 5																
			Meningkatnya kualitas perumahan																
1	04	02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah korban bencana dan relokasi program kabupaten/kota yang tertangani	%	1,33	19,93	1.061.809.200	19,93	18.780.000.000	19,93	14.780.000.000	19,93	14.780.000.000	18,93	14.710.000.000	100	64.111.809.200	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan
1	04	03	Program Kawasan Permukiman	Persentase Penurunan kawasan permukiman Kumuh	%	13,14	12,40	4.690.000.000	12,48	11.060.000.000	19,24	11.060.000.000	25,64	11.060.000.000	17,07	11.060.000.000	100	48.930.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	04	04	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase peningkatan perumahan dan penurunan kawasan permukiman kumuh	%	5,13	18,95	1.514.750.000	18,97	11.400.000.000	18,97	11.400.000.000	18,97	11.400.000.000	18,97	11.400.000.000	100	47.114.750.000	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan
1	04	05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	%	6,04	6,34	7.010.000.000	19,80	3.180.000.000	19,80	3.180.000.000	19,80	3.180.000.000	28,22	3.380.000.000	100	19.930.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan
1	04	06	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikas, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	%			-	25,05	303.600.000	24,95	302.400.000	25,05	303.600.000	24,95	302.400.000	100	1.212.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	10	04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Presentasi penyelesaian sengketa tanah garapan melalui mediasi	%	100	16,67	50.840.100	16,67	200.000.000	16,67	200.000.000	16,67	300.000.000	16,67	300.000.000	100	1.050.840.100	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan
2	10	05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan satuan tanah untuk pembangunan	%	9,09	18,18	350.000.000	18,18	2.500.000.000	18,18	5.000.000.000	18,18	5.000.000.000	18,18	5.000.000.000	100	17.850.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan
2	10	06	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah AbsenteSe	Presentasi Redistribusi tanah, dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	%			-	18,18	150.000.000	18,18	150.000.000	18,18	200.000.000	18,18	250.000.000	72,73	750.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	10	10	Program Penatagunaan Tanah	Presentasi penatagunaan tanah	%	21.38	15.72	200.000.000	15.72	350.000.000	15.72	375.000.000	15.72	400.000.000	15.72	400.000.000	100	1.725.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan
3	32	02	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Rencana kawasan Transmigrasi (RKT) yang disahkan	RKT		1	685.000.000	1	190.000.000	1	190.000.000	1	200.000.000		200.000.000	1	1.465.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
3	32	03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang dibangun	Kawasa n		1	320.000.000	1	320.000.000	1	320.000.000	1	320.000.000	1	320.000.000	1	1.600.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
3	32	04	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah kawasan Transmigrasi yang dikembangkan	Kawasa n		1	260.000.000	1	260.000.000	1	260.000.000	1	260.000.000	1	260.000.000	1	1.300.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
			Sasaran 6																	
			Meningkatnya kualitas penataan ruang																	
1	03	12	Program Penyelenggaraa n Penataan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah	%	97.2	97.2	1.675.000.000	97.2	1.450.000.000	97.2	1.450.000.000	97.2	1.450.000.000	97.2	1.450.000.000	97.2	7.475.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	03	08	Program Penataan Bangunan Gedung	Ratio bangunan gedung pemerintah dan publik yang dibangun	%	58	59,00	33.048.860.000	61	56.460.800.000	64	56.460.800.000	65	19.270.000.000	67	19.270.000.000	67	184.510.460.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	03	09	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rasio kepatuhan Rekomendasi Perizinan	%	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	03	11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknis i/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	25.89	26.40	225.000.000	27.16	225.000.000	28.43	225.000.000	30.20	225.000.000	32.49	225.000.000	32.49	1.125.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Sasaran 7																
			Meningkatnya kualitas pembangunan desa																
2	13	02	Program Penataan Desa	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	%		5	39.999.000	15	200.000.000	20	270.000.000	30	335.000.000	30	400.000.000	100	1.244.999.000	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
2	13	03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Fasilitasi Desa yang Melaksanakan kerjasama antar desa	%		5	35.000.000	5	53.000.000	5	57.025.000	5	61.452.500	5	66.322.750	25	272.800.250	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
2	13	04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraa n Administrasi Pemerintahan Desa	%	100	100	6.274.141.882	100	5.523.213.610	100	5.179.165.081	100	5.666.581.589	100	5.527.739.742	100	28.170.841.904	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	13	05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	%	25	15	956.330.000	15	1.512.250.000	15	1.703.000.000	15	1.908.750.000	15	2.069.500.000	100	8.149.830.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Sasaran 8																
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup																
2	11	2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Kotabaru	%		20,00	681.483.800	40,00	185.000.000	60,00	240.000.000	80,00	295.000.000	100,00	825.000.000	100,00	2.226.483.800	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		67,20	67,33	710.515.000	67,46	2.453.800.000	67,60	2.488.300.000	67,73	2.564.100.000	67,86	2.851.400.000	67,86	11.068.115.000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	II	04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Tercapainya Pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten Kotabaru	%	100	100,00	403.037.200	100,00	700.000.000	100,00	800.000.000	100,00	880.000.000	100,00	968.000.000	100,00	3.751.037.200	Dinas Lingkungan Hidup
2	II	05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha/Institusi yang taat terhadap pengelolaan limbah B3	%	35	42,74	75.000.000	50,81	100.000.000	58,87	125.000.000	66,94	150.000.000	75,00	155.000.000	75,00	605.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	II	06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha /atau kegiatan terhadap ijin lingkungan PPLH	%	13	29,03	177.200.000	45,16	245.000.000	61,29	275.000.000	80,65	306.000.000	100,00	338.000.000	100,00	1.341.200.000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	II	07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Terdatanya Jumlah kearifan Lokal dan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di wilayah Kabupaten Kotabaru	%		7,35	70.000.000	14,71	220.000.000	22,06	220.000.000	29,41	150.000.000	36,76	170.000.000	36,76	830.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	II	08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase masyarakat yang dibina dalam pengelolaan lingkungan hidup	%		20,00	77.000.000	40,00	85.000.000	60,00	93.500.000	80,00	103.000.000	100,00	114.000.000	100,00	472.500.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	II	09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah yang dikumpulkan	%	100	100,00	49.999.500	100,00	150.000.000	100,00	170.000.000	100,00	200.000.000	100,00	220.000.000	100,00	789.999.500	Dinas Lingkungan Hidup

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	II	10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	%	100	100,00	93.000.000	100,00	130.000.000	100,00	150.000.000	100,00	180.000.000	100,00	200.000.000	100,00	753.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	II	11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	%	70	68,30	1.858.183.000	66,90	8.557.000.000	65,90	27.087.000.000	64,30	6.712.000.000	63,10	28.232.000.000	63,10	72.446.183.000	Dinas Lingkungan Hidup
1	03	04	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	%	27	26,92	41.290.000.000	30,77	47.300.000.000	34,62	3.400.000.000	38,46	46.700.000.000	42,31	2.400.000.000	42,31	141.090.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	28	04	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Persentase perlindungan dan konservasi kawasan pelestarian alam dan ekosistem	%	-	-		16,67	2.167.342.000	33,33	2.147.342.000	50,00	530.000.000	66,67	540.000.000	66,67	5.384.684.000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Tujuan 4																
			Meningkatnya kewaspadaan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan non alam.																
			Sasaran 1																
			Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewaspadaan bencana																
1	05	03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana	%	100	100	1.000.331.100	100	1.263.534.600	100	1.263.534.600	100	1.263.534.600	100	1.263.534.600	100	6.054.469.500	Badan Penanggulan gan Bencana Daerah
1	05	04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	1.172.174.900	100	3.053.750.000	100	3.225.687.500	100	3.690.087.750	100	4.733.237.018	100	15.874.937.168	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	06	06	Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana	%	100	100	347.808.000	100	348.309.000	100	348.411.000	100	350.013.000	100	350.616.000	100	1.746.157.000	Dinas Sosial

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Misi 2																
			Meningkatkan kualitas masyarakat yang lebih religius, lebih sehat, cerdas dan kreatif serta terampil.																
			Tujuan 1																
			Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Kotabaru, sehingga memiliki karakter mental, spiritual dan fisik agar mampu berperan dan mempunyai daya saing yang tinggi di segala segala bidang, baik di tataran Provinsi Kalimantan Selatan maupun nasional.																
			Sasaran 1																
			Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan pendidikan pada semua jenjang pendidikan dasar																
1	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7,42	8,51	76.226.572,350	8,52	124.097,383,100	8,53	122.596,083,100	8,54	122.696,083,100	8,55	122.796,083,100	8,55	568,412,204,750	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	23	02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan yang dibina	%	10,41	17,92	154.809,669	17,92	170.290,635	17,92	187,319,698	17,92	206,051,667	17,92	226,656,833	100	945,128,502	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	23	03	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Jumlah Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno yang dilestarikan	Buah	0	1	17.000.000	1	18.700.000	1	20.570.000	1	22.627.000	1	24.889.700	5	103.786.700	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	22	02	Program Pengembangan Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	100	100	700.000.000	100	1.100.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	6.300.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Cakupan kesenian tradisional yang dikembangkan	%		100	300.000.000	100	300.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	2.400.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	04	Program Pembinaan Sejarah	cakupan sejarah yang dibina	%			-	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	2.400.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	05	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	cakupan cagar budaya yang dilestarikan	%			-	100	1.400.000.000	100	1.400.000.000	100	1.400.000.000	100	1.400.000.000	100	5.600.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	06	07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Cakupan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	%	100	100	150.000.000	100	150.000.000	100	151.002.000	100	151.505.000	100	152.014.000	100	754.522.000	Dinas Sosial
			Sasaran 2																
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat																
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Keluarga Sehat		0.2	0.3	159.989.294.972	0.4	187.007.622.740	0.5	196.358.003.877	0.65	206.175.904.071	0.85	216.484.699.274	0.85	966.015.524.934	Dinas Kesehatan
				Rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk	1 : 1000 Penduduk	0.32	0.32	9.600.000.000	0.33	14.540.000.000	0.34	16.223.500.000	0.35	15.158.675.000	0.36	13.295.609.000	0.36	68.817.784.000	RSUD Pangeran Jaya Sumitra
1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Fasyankes dengan Jenis SDM Sesuai Standar	%	71.0	72.0	7.589.999.800	73.0	8.259.499.790	74.0	8.677.974.780	75.0	9.116.373.518	76.0	9.566.192.195	76.0	43.210.040.083	Dinas Kesehatan

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase Unit Pelayanan dengan jenis SDM sesuai Standar	1 : 1000 Penduduk	80,0	82,0	3.600.000.000	84,0	4.560.000.000	86,0	4.920.000.000	88,0	5.280.000.000	90,0	5.640.000.000	90	24.000.000.000	RSUD Pangeran Jaya Sumitra
1	02	04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Fasyankes Yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar	%	100	100	136.638.200	100	242.695.110	100	254.829.866	100	267.571.360	100	280.949.927	100	1.182.684.463	Dinas Kesehatan
1	02	05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase FKTP yang Melaksanakan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga	%	100	100	522.414.690	100	706.035.424	100	741.337.196	100	778.404.056	100	817.324.259	100	3.565.515.625	Dinas Kesehatan

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	19	02	Program Pengembangan Kapasitas Daya saing Kepemudaan	Persentase Pembinaan Organisasi Kepemudaan yang Aktif	%	16,67	33,33	888.381.500	50,00	2.505.000.000	66,67	3.090.000.000	83,33	2.915.000.000	100,00	2.790.000.000	100,00	12.188.381.500	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	19	04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Pembinaan Kepramukaan yang ditingkatkan	%	4,55	18,18	80.000.000	36,00	400.000.000	59,09	315.000.000	77,27	315.000.000	100,00	350.000.000	100,00	1.460.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	19	03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Pembinaan, Kemitraan dan Pembangunan Keolahragaan yang ditingkatkan	%	15,0	30,0	11.850.566.950	36,0	12.562.727.500	42,0	8.985.000.000	52,0	13.575.000.000	60,0	18.900.000.000	60,0	65.873.294.450	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	08	02	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase partisipasi perempuan di Lembaga pemerintah	%	1,29	1,40	425.000.000	1,40	425.000.000	1,40	425.000.000	1,40	425.000.000	1,40	425.000.000	1,40	2125.000.000	Dinas P3AP2KB

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	08	03	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPD (per 100.000 penduduk perempuan)	%	0,02	0,02	20.000.000	0,03	20.000.000	0,05	20.000.000	0,06	20.000.000	0,08	20.000.000	0,08	100.000.000	Dinas P3AP2KB
2	08	04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga	%	0	0,99	195.000.000	1,49	195.000.000	1,98	285.000.000	2,48	285.000.000	2,48	285.000.000	2,48	1.245.000.000	Dinas P3AP2KB
2	08	05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Cakupan Lembaga/SKPD /Kelompok masyarakat yang Menerapkan Data Gender dan Anak	%	34,09	36,00	50.000.000	38,00	50.000.000	41,00	50.000.000	42,00	50.000.000	44,00	50.000.000	44,00	250.000.000	Dinas P3AP2KB
2	08	07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	200.000.000	Dinas P3AP2KB

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	08	06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Lembaga/lembaga Pemerintah dan swasta untuk memenuhi Pemenuhan Hak Anak	%	19,84	20,00	218.000.000	20,00	218.000.000	21,00	243.000.000	21,00	248.000.000	22,00	253.000.000	22,00	1.180.000.000	Dinas P3AP2KB
2	14	02	Program Pengendalian Penduduk	Persentase pengendalian pertumbuhan penduduk	%	1,08	1,20	155.000.000	1,11	155.000.000	1,11	155.000.000	1,10	155.000.000	1,90	155.000.000	1,90	775.000.000	Dinas P3AP2KB
2	14	03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	80,71	80,81	234.304.000	81,11	234.304.000	81,21	264.304.000	81,61	269.304.000	82,01	274.304.000	82,01	1.276.520.000	Dinas P3AP2KB
2	14	04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan keluarga dalam kegiatan Ketahanan Keluarga Sejahtera	%	10,09	11,00	84.306.700	11,00	84.306.700	11,00	130.000.000	12,00	135.000.000	12,00	135.000.000	12,00	568.613.400	Dinas P3AP2KB

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Tujuan 2																
			Meningkatnya pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga menurunkan tingkat kemiskinan																
			Sasaran 1																
			Meningkatnya kesejahteraan masyarakat																
1	06	02	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan Pemberdayaan Sosial	%	100	100	440.548.000	100	445.671.650	100	451.550.000	100	454.200.000	100	459.750.000	2.251.719.650	Dinas Sosial	
1	06	04	Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti	%	100	100	1.493.717.300	100	1.362.882.200	100	1.639.586.000	100	1.644.074.800	100	1.648.790.000	7.789.050.300	Dinas Sosial	
1	06	05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Cakupan Perlindungan Dan Jaminan Sosial	%	100	100	1.793.211.300	100	1.744.169.400	100	1.755.190.900	100	1.766.800.000	100	1.792.321.900	8.851.693.500	Dinas Sosial	

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Misi 3																
			Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang melayani, akuntabel dan transparan.																
			Tujuan I																
			Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang jujur, responsif, terbuka, akuntabel, transparan dan baik.																
			Sasaran I																
			Meningkatnya Birokrasi yang bersih, akuntabel yang melayani																
x	xx	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	%	100	100	792.532.765.826	100	816.155.216.755	100	842.369.794.057	100	853.462.425.665	100	889.993.710.610	100	4.194.513.912.914	Semua SKPD
4	01	02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Layanan Bidang Pemerintahan, Kesra dan Hukum yang dilaksanakan	%	20	80	34.887.325.000	80	47.256.825.000	80	48.656.241.000	80	48.731.241.000	80	48.731.241.000	80	228.262.873.000	Sektetariat Daerah

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
4	01	03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Layanan Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Pengadaan Barang Jasa yang dilaksanakan	%	20	80	2.340.000.000	80	2.445.000.000	80	2.445.000.000	80	2.445.000.000	80	2.445.000.000	80	12.120.000.000	Sektetariat Daerah
2	16	02	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase layanan informasi dan komunikasi publik	%	75	80	2.216.000.000	85	2.500.000.000	90	2.600.000.000	95	2.575.000.000	100	3.050.000.000	100	12.941.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Pengelolaan Aplikasi Informatika di Pemkab. Kotabaru	%	45	50	495.000.000	55	1.690.000.000	60	1.855.000.000	65	1.605.000.000	70	2.238.000.000	70	7.883.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
3	20	02	Program Penyelenggaraa n Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	320.000.000	100	800.000.000	100	875.000.000	100	950.000.000	100	1.020.000.000	100	3.965.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	02	Program Penyelenggaraa n Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	31	38	120.000.000	46	320.000.000	54	355.000.000	60	380.000.000	65	405.000.000	65	1.580.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	01	02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	1.833.340.000	100	2.153.341.000	100	2.471.592.150	100	2.837.280.973	100	3.256.523.118	100	12.552.077.241	Bappeda
5	01	03	Program Koordinasi Dan	Persentasae kesesuaian	%	100	100	1.503.999.9	100	1.764.399.8	100	1.940.839.8	100	2.134.923.8	100	2.348.416.25	100	2.797.579.7	Bappeda

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	sasaran antara RPJMD, RKPD dan Renstra dengan Rencana Kerja Perencanaan Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Ekonomi, Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan															
2	24	02	Program Pengelolaan Arsip	Cakupan ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjaw aban Pada perangkat daerah	%	6,51	9,18	163.501.369	9,18	179.851.505	9,18	197.836.656	9,18	217.620.323	9,18	239.382.355	52,41	998.192.208	Dinas Perpustakaa n dan Kearsipan

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	24	03	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase jumlah arsip yang dilindungi dan diselamatkan	%		20	6.308.300	20	9.139.130	20	10.053.043	20	11.058.348	20	12.163.783	100	48.722.604	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	04	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase ijin penggunaan arsip	%	12,42	17,52	2.000.000	17,52	2.200.000	17,52	2.420.000	17,52	2.662.000	17,52	2.928.200	100	12.210.200	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
7	01	02	Program Penyelenggaraa n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Dilaksanakan	%	100	100	1.135.602.081	100	1.231.136.545	100	1.308.454.101	100	1.378.556.198	100	1.450.839.082	100	6.504.588.007	Kecamatan
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	%	100	100	2.387.826.600	100	2.646.534.797	100	2.806.783.145	100	2.958.409.495	100	3.135.379.154	100	13.934.933.191	Kecamatan

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan keamanan, kenyamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	%	100	100	272.495.000	100	295.741.725	100	311.452.808	100	327.706.868	100	345.056.998	100	1.552.453.399	Kecamatan
7	01	05	Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	262.491.200	100	318.773.405	100	335.712.075	100	353.397.681	100	370.867.563	100	1.641.241.924	Kecamatan
7	01	06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase sistem Pembinaan dan Pengawasan internal pemerintahan Desa oleh Kecamatan	%	100	100	950.332.100	100	1.223.816.380	100	1.274.516.124	100	1.345.337.286	100	1.424.380.420	100	6.218.382.310	Kecamatan
2	12	02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	%	60,26	65,00	1.352.181.800	70,00	1.658.622.800	80,00	1.885.062.800	85,00	1.997.812.800	90,00	2.106.812.800	90,00	9.000.493.000	Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	12	03	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	%	96,79	97,29	1.323.000.000	97,79	1.672.500.000	98,29	1.946.000.000	98,79	2.099.000.000	99,29	2.265.000.000	99,29	9.305.500.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase layanan informasi Administrasi Kependudukan	%	100	100	906.641.200	100	1.116.478.500	100	1.311.320.700	100	1.387.902.200	100	1.418.707.700	100	6.141.050.300	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	05	Program pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase penyusunan dokumen Administrasi Kependudukan	%	100	100	186.106.600	100	199.294.600	100	219.376.600	100	235.356.600	100	307.257.600	100	1.147.392.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	02	02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	100	100	44.405.507.400	100	44.405.507.400	100	44.405.507.400	100	44.405.507.400	100	44.405.507.400	100	222.027.537.000	Sekretariat DPRD

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
5	03	02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Rekrutment, Penempatan dan Promosi sesuai kompetensi	%	53	55	4.544.408.000	57	4.504.400.000	60	5.012.460.000	62	5.247.065.000	65	5.356.010.000	65	24.664.343.000	BKPSDM
5	04	02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	%	53	65	6.450.000.000	70	8.400.000.000	75	9.375.000.000	80	10.315.000.000	85	12.550.000.000	85	47.090.000.000	BKPSDM
5	05	02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dalam proses perencanaan pembangunan oleh SKPD	%	100	100	7.746.412.300	100	3.230.000.000	100	2.985.000.000	100	2.790.000.000	100	2.250.000.000	100	19.001.412.300	Bappeda

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
8	01	02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase kesadaran masyarakat yang memahami Ideologi Pancasila	%	100	100	242.990.000	100	255.139.500	100	255.139.500	100	255.139.500	100	255.139.500	100	1.263.548.000	Badan Kesbangpol
8	01	03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Pembinaan Lembaga Politik yang Melaksanakan Pendidikan Politik, Etika dan Budaya Politik	%	100	100	757.299.133	100	795.164.089	100	795.164.089	100	795.164.089	100	795.164.089	100	3.937.955.489	Badan Kesbangpol
8	01	04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	%	100	100	57.500.000	100	60.375.000	100	60.375.000	100	60.375.000	100	60.375.000	100	299.000.000	Badan Kesbangpol

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
8	01	05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase capaian pelaksanaan dan pembinaan program ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	%	100	100	188.496.233	100	197.921.044	100	197.921.044	100	197.921.044	100	197.921.044	100	980.180.409	Badan Kesbangpol
8	01	06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase peningkatan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen dalam penanganan konflik sosial di daerah	%	100	100	242.000.000	100	254.100.000	100	254.100.000	100	254.100.000	100	254.100.000	100	1.258.400.000	Badan Kesbangpol
1	05	02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	1.265.748.000	100	3.561.000.000	100	3.736.900.000	100	3.821.037.000	100	4.001.625.790	100	16.386.310.790	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2022		2023		2024		2025					2026	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
			Sasaran 2																
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah																
6	01	02	Program Penyelenggaraa n Pengawasan	Persentase SKPD Dengan Maturitas Spip Minimal Level 3	%	90	100	3.506.441.500	100	3.594.102.538	100	3.683.955.101	100	3.776.053.979	100	3.870.455.327	100	18.431.008.445	Inspektorat Kabupaten
6	01	03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase tercapainya kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah (APIP) minimal level 3	%	100	100	2.461.081.400	100	2.522.608.436	100	2.585.673.646	100	2.650.315.487	100	2.716.573.374	100	12.936.252.343	Inspektorat Kabupaten
5	02	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	%	80	82	282.331.305.700	85	187.839.605.700	87	194.324.905.700	90	205.993.005.700	95	205.993.005.700	95	1.076.481.828.500	BPKAD

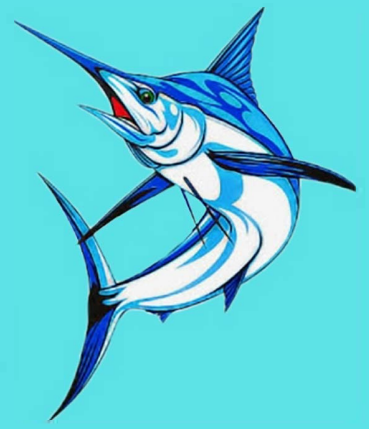
Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
5	02	03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	%	80	82	7.487.872.600	85	7.806.117.600	87	8.156.186.600	90	8.541.263.600	95	8.541.263.600	95	40.532.704.000	BPKAD
				Persentase Dana Perimbangan dan dana transfer lainnya yang dapat direalisasikan	%	100	100	379.500.000	100	360.300.000	100	360.300.000	100	360.300.000	100	360.300.000	100	1.820.700.000	Bapenda
5	02	04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi pendapatan asli daerah	%	95,08	100,00	6.979.226.000	100,00	5.422.584.500	100,00	5.422.584.500	100,00	5.422.584.500	100,00	5.422.584.500	100,00	28.669.564.000	Bapenda

Program unggulan pada RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026 merupakan program prioritas yang mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2021, berikut ini adalah 11 (sebelas) program unggulan Pemerintah Kabupaten Kotabaru:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian,
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian,
3. Program Penyuluhan Pertanian,
4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya,
5. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,
6. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan,
7. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan,
8. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat,
9. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata,
10. Program Penyelenggaraan Jalan, dan
11. Program Penataan Bangunan Gedung.

BAB 7

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH



*Potensi Perkebunan
Sawit*



*Potensi Perkebunan
Karet*



BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan

Arah kebijakan umum Pembangunan Kabupaten Kotabaru tahun 2021-2026 berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan instansi yang terkait didalam merumuskan kebijakan dan program sesuai dengan fungsi masing-masing. Arah kebijakan umum ini merupakan instrumen untuk mencapai visi misi melalui strategi yang akan ditempuh sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Penjabaran lebih detail dari visi misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati tertuang dalam arah kebijakan umum yang terimplementasi dalam program pembangunan daerah. Program Pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru bertujuan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai lima tahun kedepan dalam RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026.

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 - 2026
Kabupaten Kotabaru

Kode	Kapasitas Riil / Belanja	Proyeksi					
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	BELANJA DAERAH	1.621.152.808.881,00	1.686.988.989.638,58	1.763.091.337.123,23	1.840.029.046.129,21	1.917.654.832.664,27	1.994.201.025.970,84
05.01	Belanja Operasi	1.095.433.781.552,00	1.140.030.170.992,85	1.191.580.699.695,06	1.243.697.089.103,37	1.296.279.571.366,68	1.348.130.754.221,34
05.01.01	Belanja Pegawai	605.504.722.242,00	630.155.527.115,95	658.650.255.952,09	687.457.766.204,53	716.522.910.856,66	745.183.827.290,93
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	428.670.719.502,00	446.122.405.464,90	466.295.420.576,94	486.689.871.178,83	507.266.715.607,60	527.557.384.231,91
05.01.05	Belanja Hibah	43.897.208.048,00	45.684.314.688,71	47.750.093.854,50	49.838.548.699,60	51.945.681.236,92	54.023.508.486,40
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	17.361.131.760,00	18.067.923.723,28	18.884.929.311,54	19.710.903.020,41	20.544.263.665,49	21.366.034.212,11
05.02	Belanja Modal	267.174.231.029,00	278.051.206.211,06	290.624.282.828,83	303.335.371.804,42	316.160.139.947,31	328.806.545.545,20
05.03	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
05.04	Belanja Transfer	254.544.796.300,00	264.907.612.434,68	276.886.354.599,33	288.996.585.221,42	301.215.121.350,28	313.263.726.204,29
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	5.575.000.000,00	5.801.964.765,30	6.064.321.287,76	6.329.557.649,69	6.597.166.101,75	6.861.052.745,82
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	248.969.796.300,00	259.105.647.669,38	270.822.033.311,57	282.667.027.571,73	294.617.955.248,53	306.402.673.458,47

7.2. Program Perangkat Daerah

Sejalan dengan Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Program yang terdapat pada Rencana Strategis di masing-masing Perangkat Daerah diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Kotabaru, yang juga mengacu pada Program yang tertera pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyajian kebijakan umum dan Program Pembangunan masing-masing Perangkat Daerah di Kabupaten Kotabaru berdasarkan urusan terhadap masing-masing misi tertuang dibawah ini beserta tabel matriknya.

Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Kotabaru

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2022		2023		2024		2025					2026	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
x	x	x	Non Urusan																
x	x	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	%	100	100	792.532.765.826	100	816.155.216.755	100	842.369.794.057	100	853.462.425.665	100	889.993.710.610	100	4.194.513.912.914	Semua SKPD
			Urusan Wajib																
			Terkait Pelayanan Dasar																
			Pendidikan																
1	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7,42	8,51	76.226.572.350	8,52	124.097.383.100	8,53	122.596.083.100	8,54	122.696.083.100	8,55	122.796.083.100	8,55	568.412.204.750	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								2022		2023		2024		2025					2026
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target
				Kesehatan															
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Keluarga Sehat		0,20	0,30	159.989.294.972	0,40	187.007.622.740	0,50	196.358.003.877	0,65	206.175.904.071	0,85	216.484.699.274	0,85	966.015.524.934	Dinas Kesehatan
				Rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk	1 : 1000 Penduduk	0,32	0,32	9.600.000.000	0,33	14.540.000.000	0,34	16.223.500.000	0,35	15.158.675.000	0,36	13.295.609.000	0,36	68.817.784.000	RSUD Pangeran Jaya Sumitra
1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Fasyankes dengan Jenis SDM Sesuai Standar	%	71,00	72,00	7.589.999.800	73,00	8.259.499.790	74,00	8.677.974.780	75,00	9.116.373.518	76,00	9.566.192.195	76,00	43.210.040.083	Dinas Kesehatan
				Persentase Unit Pelayanan dengan jenis SDM sesuai Standar	%	80,00	82,00	3.600.000.000	84,00	4.560.000.000	86,00	4.920.000.000	88,00	5.280.000.000	90,00	5.640.000.000	90,00	24.000.000.000	RSUD Pangeran Jaya Sumitra

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	0	0	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Fasyankes Yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar	%	100,00	100,00	135.638.200	100,00	242.695.110	100,00	254.829.866	100,00	267.571.360	100,00	280.949.927	100,00	1.182.684.463	Dinas Kesehatan
1	0	0	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase FKTP yang Melaksanakan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga	%	100,00	100,00	522.414.690	100,00	706.035.424	100,00	741.337.196	100,00	778.404.056	100,00	817.324.259	100,00	3.565.515.625	Dinas Kesehatan
			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																
1	0	0	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur	%	17,87	18,37	24.765.000.000	18,87	19.040.000.000	19,87	22.490.000.000	20,37	22.540.000.000	21,37	22.590.000.000	21,37	111.425.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program <i>(outcome)</i>	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	03	03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	36,81	37,06	5.005.000.000	37,21	5.005.000.000	37,81	5.005.000.000	38,91	5.005.000.000	41,31	5.005.000.000	41,31	25.025.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	04	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	%	26,92	26,92	41.290.000.000	30,77	47.300.000.000	34,62	3.400.000.000	38,46	46.700.000.000	42,31	2.400.000.000	42,31	141.090.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	03	05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	24,58	24,65	9.400.000.000	24,75	11.400.000.000	24,86	2.400.000.000	25,00	2.400.000.000	25	2.400.000.000	25,14	28.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase jaringan drainase berfungsi baik	%	0,0105	0,0105	2.650.000.000	0,0106	2.150.000.000	0,0107	2.150.000.000	0,0108	2.150.000.000	0,0109	2.150.000.000	0,0109	11.250.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	07	Program Pengembangan Permukiman	Persentase fasum (fasilitas umum) yang berfungsi	%	30,44	30,86	10.282.932.000	31,48	10.282.932.000	32,31	10.282.932.000	33,55	10.282.932.000	35,21	10.282.932.000	35,21	51.414.660.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	08	Program Penataan Bangunan Gedung	Ratio bangunan gedung pemerintah dan publik yang dibangun	%	58,00	59,00	33.048.860.000	61,00	56.460.800.000	64,00	56.460.800.000	65,00	19.270.000.000	67,00	19.270.000.000	67,00	184.510.460.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	03	09	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rasio kepatuhan Rekomendasi Perizinan	%	100	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100	100.000.000	100	500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	10	Program Penyelenggaraa n Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	32,19	32,43	103.700.000.000	32,85	103.700.000.000	33,43	103.700.000.000	34,18	103.700.000.000	35,09	103.700.000.000	35,09	518.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	25,89	26,40	225.000.000	27,16	225.000.000	28,43	225.000.000	30,20	225.000.000	32,49	225.000.000	32,49	1.125.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	12	Program Penyelenggaraa n Penataan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah	%	97,20	97,20	1.675.000.000	97,20	1.450.000.000	97,20	1.450.000.000	97,20	1.450.000.000	97,20	1.450.000.000	97,20	7.475.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Perumahan dan Kawasan Permukiman																
1	04	02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah korban bencana dan relokasi program kabupaten/kota yang tertangani	%	1,33	19,93	1.061.809.200	19,93	18.780.000.000	19,93	14.780.000.000	19,93	14.780.000.000	18,93	14.710.000.000	100,00	64.111.809.200	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan
1	04	03	Program Kawasan Permukiman	Persentase Penurunan kawasan permukiman Kumuh	%	13,14	12,40	4.690.000.000	12,48	11.060.000.000	19,24	11.060.000.000	25,64	11.060.000.000	17,07	11.060.000.000	100,00	48.930.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan
1	04	04	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase peningkatan perumahan dan penurunan kawasan permukiman kumuh	%	5,13	18,95	1.514.750.000	18,97	11.400.000.000	18,97	11.400.000.000	18,97	11.400.000.000	18,97	11.400.000.000	100,00	47.114.750.000	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	0	0	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	%	6,04	6,34	7.010.000.000	19,80	3.180.000.000	19,80	3.180.000.000	19,80	3.180.000.000	28,22	3.380.000.000	100,00	19.930.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan
1	0	0	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikas, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	%		-		25,05	303.600.000	24,95	302.400.000	25,05	303.600.000	24,95	302.400.000	100,00	1.212.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan
			Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																
1	0	0	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	1.265.748.000	100	3.561.000.000	100	3.736.900.000	100	3.821.037.000	100	4.001.625.790	100	16.386.310.790	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	0	0	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana	%	100	100	1.000.331.100	100	1.263.534.600	100	1.263.534.600	100	1.263.534.600	100	1.263.534.600	100	6.054.469.500	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah
1	0	0	Program Pencegahan, Penanggulangan , Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	1.172.174.900	100	3.053.750.000	100	3.225.687.500	100	3.690.087.750	100	4.733.237.018	100	15.874.937.168	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
			Sosial																
1	0	0	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan Pemberdayaan Sosial	%	100	100	440.548.000	100	445.671.650	100	451.550.000	100	454.200.000	100	459.750.000	100	2.251.719.650	Dinas Sosial

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	0	0	Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti	%	100	100	1.493.717.300	100	1.362.882.200	100	1.639.586.000	100	1.644.074.800	100	1.648.790.000	100	7.789.050.300	Dinas Sosial
1	0	0	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Cakupan Perlindungan Dan Jaminan Sosial	%	100	100	1.793.211.300	100	1.744.169.400	100	1.755.190.900	100	1.766.800.000	100	1.792.321.900	100	8.851.693.500	Dinas Sosial
1	0	0	Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana	%	100	100	347.808.000	100	348.309.000	100	349.411.000	100	350.013.000	100	350.616.000	100	1.746.157.000	Dinas Sosial

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	0	0	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Cakupan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	%	100	100	150.000.000	100	150.000.000	100	151.002.000	100	151.505.000	100	152.014.000	100	754.522.000	Dinas Sosial
			Tidak Terkait Pelayanan Dasar																
			Tenaga Kerja																
2	0	0	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	-	60	100.000.000	65	100.000.000	70	100.000.000	75	100.000.000	80	100.000.000	80	500.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2	0	0	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%		10,00	2.225.000.000	12,00	1.525.000.000	14,00	1.525.000.000	16,00	1.525.000.000	18,00	1.525.000.000	18,00	8.325.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2	0	0	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah	%	65,08	67,00	575.000.000	70,00	600.000.000	73,00	630.000.000	75,00	763.000.000	78,00	799.000.000	78,00	3.367.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				kabupaten/kota															
2	0	0	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	15,00	18,00	491.000.000	19,00	620.100.000	20,00	682.110.000	21,00	750.321.000	22,00	825.353.100	22,00	3.368.884.100	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																
2	0	0	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase partisipasi perempuan di Lembaga pemerintah	%	1,29	1,40	425.000.000	1,40	425.000.000	1,40	425.000.000	1,40	425.000.000	1,40	425.000.000	1,40	2.125.000.000	Dinas P3AP2KB
2	0	0	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPD (per 100.000 penduduk perempuan)	%	0,02	0,02	20.000.000	0,03	20.000.000	0,05	20.000.000	0,06	20.000.000	0,08	20.000.000	0,08	100.000.000	Dinas P3AP2KB

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	0	0	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga	%	0,50	0,99	195.000.000	1,49	195.000.000	1,98	285.000.000	2,48	285.000.000	2,48	285.000.000	2,48	1.245.000.000	Dinas P3AP2KB
2	0	0	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Cakupan Lembaga/SKPD/ Kelompok masyarakat yang Menerapkan Data Gender dan Anak	%	34,09	36,00	50.000.000	38,00	50.000.000	41,00	50.000.000	42,00	50.000.000	44,00	50.000.000	44,00	250.000.000	Dinas P3AP2KB
2	0	0	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Lembaga/lembaga Pemerintah dan swasta untuk memenuhi Pemenuhan Hak Anak	%	19,84	20,00	218.000.000	20,00	218.000.000	21,00	243.000.000	21,00	248.000.000	22,00	253.000.000	22,00	1.180.000.000	Dinas P3AP2KB
2	0	0	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	200.000.000	Dinas P3AP2KB

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Pangan																
2	09	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase penyediaan infrastruktur kemandirian pangan	%	30,00	35,00	234.000.000	40,00	928.000.000	45,00	990.000.000	50,00	1.110.000.000	55,00	1.230.000.000	55,00	4.492.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	63,00	64,00	660.875.000	64,00	1.660.000.000	65,00	1.620.000.000	65,00	1.720.000.000	66,00	1.840.000.000	66,00	7.500.875.000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase daerah tidak rentan rawan pangan	%	77,00	79,00	100.000.000	82,00	510.000.000	85,00	570.000.000	87,00	630.000.000	90,00	690.000.000	90,00	2.500.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	25,00	25,00	50.000.000	50,00	1.100.000.000	60,00	450.000.000	70,00	550.000.000	80,00	650.000.000	80,00	2.800.000.000	Dinas Ketahanan Pangan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			Pertanahan																	
2	10	04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Presentasi penyelesaian sengketa tanah garapan melalui mediasi	%	100	16,67	50.840,100	16,67	200.000.000	16,67	200.000.000	16,67	300.000.000	16,67	300.000.000	100	1.050.840,100	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan	
2	10	05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan satuan tanah untuk pembangunan	%	9	18,18	350.000.000	18,18	2.500.000.000	18,18	5.000.000.000	18,18	5.000.000.000	18,18	5.000.000.000	100	17.850.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan	
2	10	06	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Presentasi Redistribusi tanah, dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	%			-	18,18	150.000.000	18,18	150.000.000	18,18	200.000.000	18,18	250.000.000	72,73	750.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	10	10	Program Penatagunaan Tanah	Presentasi penatagunaan tanah	%	21,38	15,72	200.000.000	15,72	350.000.000	15,72	375.000.000	15,72	400.000.000	15,72	400.000.000	100	1.725.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan
			Lingkungan Hidup																
2	11	2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Kotabaru	%		20,00	681.483.800	40,00	185.000.000	60,00	240.000.000	80,00	295.000.000	100	825.000.000	100	2.226.483.800	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		67,20	67,33	710.515.000	67,46	2.453.800.000	67,60	2.488.300.000	67,73	2.564.100.000	67,86	2.851.400.000	67,86	11.068.115.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Tercapainya Pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten Kotabaru	%	100	100	403.037.200	100	700.000.000	100	800.000.000	100	880.000.000	100	968.000.000	100	3.751.037.200	Dinas Lingkungan Hidup

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	II	05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha/Institusi yang taat terhadap pengelolaan limbah B3	%	34,68	42,74	75.000.000	50,81	100.000.000	58,87	125.000.000	66,94	150.000.000	75,00	155.000.000	75,00	605.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	II	06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha /atau kegiatan terhadap ijin lingkungan PPLH	%	12,90	29,03	177.200.000	45,16	245.000.000	61,29	275.000.000	80,65	306.000.000	100	338.000.000	100	1.341.200.000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	II	07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Terdatanya Jumlah kearifan Lokal dan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di wilayah Kabupaten Kotabaru	%		7,35	70.000.000	14,71	220.000.000	22,06	220.000.000	29,41	150.000.000	36,76	170.000.000	36,76	830.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	II	08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase masyarakat yang dibina dalam pengelolaan lingkungan hidup	%		20	77.000.000	40	85.000.000	60	93.500.000	80	103.000.000	100	114.000.000	100	472.500.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	II	09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah yang dikumpulkan	%	100	100	49.999.500	100	150.000.000	100	170.000.000	100	200.000.000	100	220.000.000	100	789.999.500	Dinas Lingkungan Hidup

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	11	10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	%	100	100	93.000.000	100	130.000.000	100	150.000.000	100	180.000.000	100	200.000.000	100	753.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	%	69,60	68,30	1.858.183.000	66,90	8.557.000.000	65,90	27.087.000.000	64,30	6.712.000.000	63,10	28.232.000.000	63,10	72.446.183.000	Dinas Lingkungan Hidup
			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																
2	12	02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	%	60,26	65,00	1.352.181.800	70,00	1.658.622.800	80,00	1.885.062.800	85,00	1.997.812.800	90,00	2.106.812.800	90,00	9.000.493.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	%	96,79	97	1.323.000.000	97,79	1.672.500.000	98,29	1.946.000.000	98,79	2.099.000.000	99,29	2.265.000.000	99,29	9.305.500.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	12	04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase layanan informasi Administrasi Kependudukan	%	100	100	906.641.200	100	1.116.478.500	100	1.311.320.700	100	1.387.902.200	100	1.418.707.700	100	6.141.050.300	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	05	Program pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase penyusunan dokumen Administrasi Kependudukan	%	100	100	186.106.600	100	199.294.600	100	219.376.600	100	235.356.600	100	307.257.600	100	1.147.392.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																
2	13	02	Program Penataan Desa	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	%		5	39.999.000	15	200.000.000	20	270.000.000	30	335.000.000	30	400.000.000	100	1.244.999.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Fasilitas Desa yang Melaksanakan kerjasama antar desa	%		5	35.000.000	5	53.000.000	5	57.025.000	5	61.452.500	5	66.322.750	25	272.800.250	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	13	04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	%	100	100	6.274.141.882	100	5.523.213.610	100	5.179.165.081	100	5.666.581.589	100	5.527.739.742	100	28.170.841.904	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	%	25	15	956.330.000	15	1.512.250.000	15	1.703.000.000	15	1.908.750.000	15	2.069.500.000	100	8.149.830.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																
2	14	02	Program Pengendalian Penduduk	Persentase pengendalian pertumbuhan penduduk	%	1,08	1,20	155.000.000	1,11	155.000.000	1,11	155.000.000	1,10	155.000.000	1,90	155.000.000	1,90	775.000.000	Dinas P3AP2KB
2	14	03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	80,71	80,81	234.304.000	81,11	234.304.000	81,21	264.304.000	81,61	269.304.000	82,01	274.304.000	82,01	1.276.520.000	Dinas P3AP2KB

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	14	04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan keluarga dalam kegiatan Ketahanan Keluarga Sejahtera	%	10,09	11,00	84.306.700	11,00	84.306.700	11,00	130.000.000	12,00	135.000.000	12,00	135.000.000	12,00	568.613.400	Dinas P3AP2KB
			Perhubungan																
2	15	02	Program Penyelenggaraa n Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	%	100	100	6.125.500.000	100	11.796.675.000	100	6.039.123.750	100	6.626.488.625	100	7.227.784.113	100	37.815.581.488	Dinas Perhubungan
2	15	03	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Pengelolaan Pelayaran	%	10	30	768.600.000	50	5.321.520.000	70	3.262.760.000	90	3.589.036.000	100	3.947.939.600	100	16.889.855.600	Dinas Perhubungan
			Komunikasi dan Informatika																
2	16	02	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase layanan informasi dan komunikasi publik	%	75	80	2.216.000.000	85	2.500.000.000	90	2.600.000.000	95	2.575.000.000	100	3.050.000.000	100	12.941.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	16	03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Pengelolaan Aplikasi Informatika di Pemkab. Kotabaru	%	45	50	495.000.000	55	1.690.000.000	60	1.855.000.000	65	1.605.000.000	70	2.238.000.000	70	7.883.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																
2	17	02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Fasilitasi Koperasi yang memiliki perizinan Usaha	%		26,27	-	46,67	50.000.000	66,67	60.000.000	86,67	70.000.000	100,00	70.000.000	100,00	250.000.000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	persentasi koperasi yang melaksanakan RAT	%	28,75	36,36	290.000.000	39,13	290.000.000	41,67	300.000.000	44,00	310.000.000	48,00	320.000.000	48,00	1.510.000.000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	%	20,00	40,00	30.000.000	60,00	80.000.000	80,00	100.000.000	92,00	120.000.000	100,00	120.000.000	100,00	450.000.000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	17	05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan perkoperasi	%	47,62	47,62	100.000.000	47,62	320.000.000	47,62	330.000.000	47,62	340.000.000	47,62	340.000.000	47,62	1.430.000.000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	06	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	%	57,14	57,14	90.000.000	57,14	120.000.000	57,14	130.000.000	57,14	140.000.000	57,14	140.000.000	57,14	620.000.000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	20	40	200.000.000	60,00	1.170.000.000	80,00	1.170.000.000	90,00	1.170.000.000	100,00	1.170.000.000	100,00	4.880.000.000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	08	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha mikro yang mendapatkan pembinaan	%	20	40	410.060.000	60,00	773.000.000	80,00	773.000.000	90,00	773.000.000	100,00	773.000.000	100,00	3.352.060.000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Penanaman Modal																
2	18	02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan iklim investasi dengan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal	%	-	-	-	100	30.000.000	100	42.000.000	-	-	-	-	100	72.000.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah investasi	%	100	100	70.000.000	100	90.000.000	100	120.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	580.000.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan untuk memenuhi standar operasional prosedur	%	100	100	1.094.080.000	100	1.094.080.000	100	1.094.080.000	100	1.094.080.000	100	1.094.080.000	100	5.470.400.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal	%	5	12	420.000.000	12	480.000.000	12	490.000.000	12	500.000.000	12	520.000.000	65	2.410.000.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	18	06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan dengan sistem database	%	70	80	140.000.000	85	145.000.000	90	155.000.000	95	170.000.000	100	190.000.000	100	801.000.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			Kepemudaan dan Olahraga																
2	19	02	Program Pengembangan Kapasitas Dayasaing Kepemudaan	Persentase Pembinaan Organisasi Kepemudaan yang Aktif	%	16,67	33,33	888.381.500	50,00	2.505.000.000	66,67	3.090.000.000	83,33	2.915.000.000	100	2.790.000.000	100	12.188.381.500	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	19	03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Pembinaan, Kemitraan dan Pembangunan Keolahragaan yang ditingkatkan	%	15,00	30,00	11.850.566.950	36,00	12.562.727.500	42,00	8.985.000.000	52,00	13.575.000.000	60,00	18.900.000.000	60,00	65.873.294.450	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	19	04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Pembinaan Kepramukaan yang ditingkatkan	%	4,55	18,18	80.000.000	36,00	400.000.000	59,09	315.000.000	77,27	315.000.000	100	350.000.000	100	1.460.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Statistik																
3	20	02	Program Penyelenggaraa n Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	320.000.000	100	800.000.000	100	875.000.000	100	950.000.000	100	1.020.000.000	100	3.965.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Persandian																
2	21	02	Program Penyelenggaraa n Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	31	38,00	120.000.000	46,00	320.000.000	54,00	355.000.000	60,00	380.000.000	65,00	405.000.000	65,00	1.580.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Kebudayaan																
2	22	02	Program Pengembangan Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	100	100	700.000.000	100	1.100.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	6.300.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	2	0	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Cakupan kesenian tradisional yang dikembangkan	%		100	300.000.000	100	300.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	2.400.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	2	0	Program Pembinaan Sejarah	cakupan sejarah yang dibina	%			-	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	2.400.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	2	0	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	cakupan cagar budaya yang dilestarikan	%			-	100	1.400.000.000	100	1.400.000.000	100	1.400.000.000	100	1.400.000.000	100	5.600.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Perpustakaan																
2	2	0	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan yang dibina	%	10,41	17,92	154.809.669	17,92	170.290.635	17,92	187.319.698	17,92	206.051.667	17,92	226.656.833	100	945.128.502	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	2	0	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Jumlah Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno yang dilestarikan	Buah		1	17.000.000	1	18.700.000	1	20.570.000	1	22.627.000	1	24.889.700	5	103.786.700	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2022		2023		2024		2025					2026	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
			Kearsipan																
2	24	02	Program Pengelolaan Arsip	Cakupan ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban Pada perangkat daerah	%	6,51	9,18	163.501.369	9,18	179.851.505	9,18	197.836.656	9,18	217.620.323	9,18	239.382.355	52,41	998.192.208	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	03	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase jumlah arsip yang dilindungi dan diselamatkan	%		20	6.308.300	20	9.139.130	20	10.053.043	20	11.058.348	20	12.163.783	100	48.722.604	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	04	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase ijin penggunaan arsip	%	12,42	17,52	2.000.000	17,52	2.200.000	17,52	2.420.000	17,52	2.662.000	17,52	2.928.200	100	12.210.200	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Pilihan																
			Kelautan dan Perikanan																
3	25	03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	73.686	74.438	258.500.000	74.814	484.350.000	74.889	612.785.000	75.263	644.063.500	75.715	678.469.850	375,119	2.678.168.350	Dinas Perikanan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
3	2	0	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	29.284	29.583	890.999.956	29.732	1.080.099.952	29.851	1.178.109.947	30.001	1.285.920.941	30.181	1.404.513.036	149.348	5.839.643.832	Dinas Perikanan
3	2	0	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	%	20	20	110.000.000	20	121.000.000	20	133.100.000	20	146.410.000	20	161.051.000	100	671.561.000	Dinas Perikanan
3	2	0	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Agrobisnis (Hasil olahan ikan) dibidang perikanan	%	20	20	515.000.000	20	566.500.000	20	623.150.000	20	685.465.000	20	754.011.500	100	3.144.126.500	Dinas Perikanan
			Pariwisata																
3	2	0	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Daya Tarik Destinasi Pariwisata Daerah yang Menerapkan Standar Sapta Pesona	%	10	30	23.526.162.500	50	5.088.000.000	60	5.378.000.000	70	5.688.000.000	100	6.148.000.000	100	45.828.162.500	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
3	2	0	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase ODTW Unggulan Kotabaru yang menjadi Paket Wisata	%	20	40	1.021.896.000	50	823.079.500	60	944.948.000	80	1.066.816.500	100	1.188.685.000	100	5.045.425.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	2	0	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Fasilitasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	%		5	205.000.000	25	1.350.000.000	50	1.450.000.000	75	1.500.000.000	100	1.550.000.000	100	6.055.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	2	0	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Penyelenggaraan Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di ODTW Unggulan	%	10	30	2.117.350.000	50	1.425.000.000	60	1.500.000.000	80	1.525.000.000	100	1.550.000.000	100	8.117.350.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Pertanian																
3	2	0	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	100% (TP : 1% Horti : 2% Bun : 1 Nak : 2)	100% (TP : 1% Horti : 2% Bun : 1,2 % Nak : 2%)	2.243.350.000	100% (TP : 1% Horti : 2% Bun : 1,2 % Nak : 2%)	2.513.350.000	100% (TP : 1% Horti : 2% Bun : 1,2 % Nak : 2%)	2.681.350.000	100% (TP : 1% Horti : 2% Bun : 1,2 % Nak : 2%)	2.875.530.000	100% (TP : 1% Horti : 2% Bun : 1,2 % Nak : 2%)	3.131.284.000	100% (TP : 5% Horti : 10% Bun : 6 % Nak : 10%)	13.444.864.000	Dinas Pertanian
3	2	0	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Presentase prasarana yang digunakan	%	100	100	1.417.500.000	100	1.130.000.000	100	1.172.500.000	100	1.215.000.000	100	1.257.500.000	100	6.192.500.000	Dinas Pertanian
3	2	0	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	79,90	74,90	270.000.000	72,40	270.000.000	69,90	270.000.000	69,90	270.000.000	69,90	270.000.000	69,90	1.350.000.000	Dinas Pertanian

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
3	2	0	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	%	100% (TP = 90%, Horti = 90%, Bun = 80%)	100% (TP = 90%, Horti = 90%, Bun = 80%)	385.000.000	100% (TP = 90%, Horti = 90%, Bun = 80%)	420.000.000	100% (TP = 90%, Horti = 90%, Bun = 80%)	420.000.000	100% (TP = 90%, Horti = 90%, Bun = 80%)	490.000.000	100% (TP = 90%, Horti = 90%, Bun = 80%)	525.000.000	100% (TP = 90%, Horti = 90%, Bun = 80%)	2.240.000.000	Dinas Pertanian
3	2	0	Program Penyuluhan Pertanian	Presentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	%	100% (400 Kelomp ok Tani)	100% (400 Kelomp ok Tani)	1.458.363.000	100% (400 Kelomp ok Tani)	1.589.062.300	100% (400 Kelompo k Tani)	2.117.331.530	100% (400 Kelompo k Tani)	2.148.427.683	100% (400 Kelompo k Tani)	2.182.633.451	100% (400 Kelompo k Tani)	9.495.817.964	Dinas Pertanian
			Kehutanan																
3	2	0	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Persentase perlindungan dan konservasi kawasan pelestarian alam dan ekosistem	%	-	-		17	2.167.342.000	33	2.147.342.000	50	530.000.000	67	540.000.000	67	5.384.684.000	Dinas Lingkungan Hidup
			Perdagangan																
3	3	0	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	%	77,78	83,33	150.000.000	88,89	1.285.000.000	94,44	1.450.000.000	96,67	1.550.000.000	100,00	1.550.000.000	100,00	5.985.000.000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
							2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.								
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.										
3	3	0	3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pembangunan sarana distribusi perdagangan	%	38,46	46,15		1.970.000.000	53,85		16.780.000.000	61,54		15.830.000.000	69,23		15.860.000.000	76,92		15.860.000.000	76,92		66.300.000.000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
3	3	0	4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Stabilitas dan ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	100,00	100,00		100.000.000	100,00		730.000.000	100,00		830.000.000	100,00		920.000.000	100,00		920.000.000	100,00		3.500.000.000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
3	3	0	5	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Pengembangan Ekspor Unggulan	%		100,00	-		100,00		660.000.000	100,00		720.000.000	100,00		780.000.000	100,00		780.000.000	100,00		2.940.000.000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
3	3	0	6	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Standarisasi dan perlindungan konsumen dan barang/jasa yang beredar	%	20,00	40,00		325.000.000	60,00		440.000.000	80,00		470.000.000	90,00		500.000.000	100,00		500.000.000	100,00		2.235.000.000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
3	3	0	7	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	%		100		50.000.000	100		150.000.000	100		150.000.000	100		150.000.000	100		150.000.000	100		650.000.000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Perindustrian																
3	31	02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Pertumbuhan IKM	%	20,00	40,00	595.000.000	60,00	1.920.000.000	80,00	1.915.000.000	100,00	2.025.000.000	100,00	2.025.000.000	100,00	8.480.000.000	Dinas Koperasi, Perindustriann dan Perdagangan
3	31	03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	4,39	4,39	-	4,39	60.000.000	4,39	65.000.000	4,39	70.000.000	4,39	70.000.000	4,39	265.000.000	Dinas Koperasi, Perindustriann dan Perdagangan
3	31	04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase penyediaan sistem informasi data industri secara lengkap dan terkini	%	68,00	76,00	155.000.000	84,00	240.000.000	92,00	290.000.000	96,00	350.000.000	100,00	350.000.000	100,00	1.385.000.000	Dinas Koperasi, Perindustriann dan Perdagangan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Transmigrasi																
3	32	02	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Rencana kawasan Transmigrasi (RKT) yang disahkan	RKT		1	685.000.000	1	190.000.000	1	190.000.000	1	200.000.000		200.000.000	1	1.465.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
3	32	03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang dibangun	Kawasan		1	320.000.000	1	320.000.000	1	320.000.000	1	320.000.000	1	320.000.000	1	1.600.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
3	32	04	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah kawasan Transmigrasi yang dikembangkan	Kawasan		1	260.000.000	1	260.000.000	1	260.000.000	1	260.000.000	1	260.000.000	1	1.300.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
			Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan																
			Sekretariat Daerah																
4	01	02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Layanan Bidang Pemerintahan, Kesra dan Hukum yang dilaksanakan	%	20	80	34.887.325.000	80	47.256.825.000	80	48.656.241.000	80	48.731.241.000	80	48.731.241.000	80	228.262.873.000	Sektetariat Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
4	01	03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Layanan Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Pengadaan Barang Jasa yang dilaksanakan	%	20	80	2.340.000.000	80	2.445.000.000	80	2.445.000.000	80	2.445.000.000	80	2.445.000.000	80	12.120.000.000	Sektetariat Daerah
			Sekretariat DPRD																
4	02	02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	100	100	44.405.507.400	100	44.405.507.400	100	44.405.507.400	100	44.405.507.400	100	44.405.507.400	100	222.027.537.000	Sekretariat DPRD
			Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan																
			Perencanaan																
5	01	02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	1.833.340.000	100	2.153.341.000	100	2.471.592.150	100	2.837.280.973	100	3.256.523.118	100	12.552.077.241	Bappeda

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
5	01	03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian sasaran antara RPJMD, RKPD dan Renstra dengan Rencana Kerja Perencanaan Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Ekonomi, Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	%	100	100	1.603.999.900	100	1.764.399.890	100	1.940.839.879	100	2.134.923.867	100	2.348.416.254	100	9.792.579.790	Bappeda
			Keuangan																
5	02	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	%	80,00	82,00	282.331.305.700	85,00	187.839.605.700	87,00	194.324.905.700	90,00	205.993.005.700	95,00	205.993.005.700	95,00	1.076.481.828.500	BPKAD
				Persentase Dana Perimbangan dan dana transfer lainnya yang dapat direalisasikan	%	100	100	379.500.000	100	360.300.000	100	360.300.000	100	360.300.000	100	360.300.000	100	1.820.700.000	Bapenda

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
5	0	0	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	%	80,00	82,00	7.487.872.600	85,00	7.806.117.600	87,00	8.156.186.600	90,00	8.541.263.600	95,00	8.541.263.600	95,00	40.532.704.000	BPKAD
5	0	0	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi pendapatan asli daerah	%	95,08	100,00	6.979.226.000	100,00	5.422.584.500	100,00	5.422.584.500	100,00	5.422.584.500	100,00	5.422.584.500	100,00	28.669.564.000	Bapenda
			Kepegawaian																
5	0	0	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Rekrutment, Penempatan dan Promosi sesuai kompetensi	%	53,01	55,00	4.544.408.000	57,00	4.504.400.000	60,00	5.012.460.000	62,00	5.247.065.000	65,00	5.356.010.000	65,00	24.664.343.000	BKPSDM
			Pendidikan dan Pelatihan																
5	0	0	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	%	53,16	65,00	6.450.000.000	70,00	8.400.000.000	75,00	9.375.000.000	80,00	10.315.000.000	85,00	12.550.000.000	85,00	47.090.000.000	BKPSDM

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							2022		2023		2024		2025					2026
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target
			Penelitian dan Pengembangan															
5	05	02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dalam proses perencanaan pembangunan oleh SKPD	%	100	100	7.746.412.300	100	3.230.000.000	100	2.985.000.000	100	2.790.000.000	100	2.250.000.000	19.001.412.300	Bappeda
			Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan															
			Inspektorat Daerah															
6	01	02	Program Penyelenggara n Pengawasan	Persentase SKPD Dengan Maturitas Spip Minimal Level 3	%	90	100	3.506.441.500	100	3.594.102.538	100	3.683.955.101	100	3.776.053.979	100	3.870.455.327	18.431.008.445	Inspektorat Kabupaten
6	01	03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase tercapainya kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah (APIP) minimal level 3	%	100	100	2.461.081.400	100	2.522.608.436	100	2.585.673.646	100	2.650.315.487	100	2.716.573.374	12.936.252.343	Inspektorat Kabupaten

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Unsur Kewilayahan																
			Kecamatan																
7	01	02	Program Penyelenggaraa n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Dilaksanakan	%	100	100	1.135.602.081	100	1.231.136.545	100	1.308.454.101	100	1.378.556.198	100	1.450.839.082	100	6.504.588.007	Kecamatan
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	%	100	100	2.387.806.600	100	2.646.534.797	100	2.806.783.145	100	2.958.409.495	100	3.135.379.154	100	13.934.933.191	Kecamatan
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan keamanan, kenyamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	%	100	100	272.495.000	100	295.741.725	100	311.452.808	100	327.706.868	100	345.056.998	100	1.552.453.399	Kecamatan
7	01	05	Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelengaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	262.491.200	100	318.773.405	100	335.712.075	100	353.397.681	100	370.867.563	100	1.641.241.924	Kecamatan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
7	01	06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase sistem Pembinaan dan Pengawasan internal pemerintahan Desa oleh Kecamatan	%	100	100	950.332.100	100	1.223.816.380	100	1.274.516.124	100	1.345.337.286	100	1.424.380.420	100	6.218.382.310	Kecamatan
			Unsur Pemerintahan Umum																
			Kesatuan Bangsa dan Politik																
8	01	02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase kesadaran masyarakat yang memahami Ideologi Pancasila	%	100	100	242.990.000	100	255.139.500	100	255.139.500	100	255.139.500	100	255.139.500	100	1.263.548.000	Badan Kesbangpol
8	01	03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Pembinaan Lembaga Politik yang Melaksanakan Pendidikan Politik, Etika dan Budaya Politik	%	100	100	757.299.133	100	795.164.089	100	795.164.089	100	795.164.089	100	795.164.089	100	3.337.955.489	Badan Kesbangpol

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
8	01	04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	%	100	100	57.500.000	100	60.375.000	100	60.375.000	100	60.375.000	100	60.375.000	100	299.000.000	Badan Kesbangpol
8	01	05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase capaian pelaksanaan dan pembinaan program ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	%	100	100	188.496.233	100	197.921.044	100	197.921.044	100	197.921.044	100	197.921.044	100	980.180.409	Badan Kesbangpol
8	01	06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase peningkatan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen dalam penanganan konflik sosial di daerah	%	100	100	242.000.000	100	254.100.000	100	254.100.000	100	254.100.000	100	254.100.000	100	1.258.400.000	Badan Kesbangpol

BAB 8

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah atau rencana strategis. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran organisasi dimasa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi dimasa yang akan datang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama. Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja organisasi maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah, (2) menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan (3) memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah dan (4) terkait dengan pertanggung-jawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Proyeksi terhadap indikator makro pembangunan Kabupaten Kotabaru dan Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kotabaru tahun 2021-2026 sebagaimana diuraikan sebagai berikut ini :

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kotabaru

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	PDRB sektor pertanian	%	9,80	10,02	10,02	10,03	10,03	10,04
2	Total produksi perikanan (tangkap dan budidaya)	Ton	93.291,14	104.020,98	104.546,34	104.546,46	105.264,16	105.895,75
3	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	79,98	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00
4	Distribusi PDRB (ADHB) sektor industri pengolahan	%	33,80	33,90	34,00	34,20	34,50	35,00
5	Persentase kontribusi PAD sektor pariwisata	%	6,60	6,67	6,60	6,64	6,63	6,62
6	Nilai investasi	Rp (Juta)	34.259.688	1.224.000	1.285.200	1.349.460	1.457.417	1.603.158
7	Angka kesempatan kerja	%	95,04	94,99	95,16	95,35	95,55	95,65
8	Tingkat pertumbuhan usaha mikro kecil	%	18,31	40,00	60,00	80,00	90,00	100
9	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	32,19	32,43	32,85	33,43	34,18	35,09
10	Rasio konektivitas kabupaten		0,682	0,749	0,812	0,875	0,937	1,00
11	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum	%	36,81	37,06	37,21	37,81	38,91	41,31
12	Persentase rumah tangga yang memiliki akses pengolahan limbah domestik	%	24,58	24,65	24,74	24,86	25,00	25,14

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
13	Persentase peningkatan rumah layak huni	%	96,12	96,80	97,48	98,17	98,85	100
14	Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)	%	97,20	97,20	97,20	97,20	97,20	97,20
15	Indeks desa membangun	Indeks	0,6677	0,6681	0,6685	0,6688	0,6693	0,6699
16	Indeks kualitas lingkungan Hidup	Indeks	67,20	67,33	67,46	67,60	67,73	67,86
17	Persentase kelompok masyarakat sadar bencana	Persen		20	40	60	80	100
18	indeks pendidikan	Tahun	9,68	10,23	10,44	10,75	11,00	11,25
19	Usia harapan hidup (UHH)	Tahun	69,21	69,50	69,80	70,10	70,40	70,70
20	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial	Persen	70,85	70,85	73,73	75,16	77,55	77,55
21	Nilai SAKIP	Nilai	B	B	B	BB	BB	BB
22	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Kotabaru

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Pertumbuhan PDRB	%	-1,87	3,90-4,20	4,05-5,5	4,78-5,83	5,3-5,97	5,63-5,91	5,63-5,91
2	Laju inflasi	%	1,44	2,36	2,13	1,90	1,67	1,44	1,44
3	PDRB per kapita	Ribu Rp	68.997,00	73.810,15	76.272,56	78.734,97	81.197,39	83.659,80	83.659,80
4	Indeks Gini		0,287	0,295	0,288	0,281	0,274	0,268	0,268
4	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	95,78	95,70	95,74	95,78	95,82	95,86	95,86
5	Rasio kesenjangan kemiskinan	%	4,22	4,20	4,15	4,09	4,03	3,97	3,97
6	Indeks pembangunan manusia (IPM)		68,86	69,10-69,50	69,50-70,54	70,54-71,01	71,01-71,48	71,48-71,95	71,48-71,95
7	Angka melek huruf	%	99,15	99,15	99,15	99,15	99,15	99,15	99,15
8	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7,43	8,51	8,52	8,53	8,53	8,53	8,53
9	Angka usia harapan hidup	Tahun	69,1	69,5	69,8	70,1	70,4	70,7	70,7
10	Persentase balita gizi buruk	%	0,09	0,08	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06
11	Prevalensi balita gizi kurang	%	9,47	9,37	9,28	9,19	9,09	9,00	9,00
12	Cakupan desa siaga aktif	%	100	100	100	100	100	100	100
13	Angka partisipasi angkatan kerja	%	64,68	67,18	67,77	68,37	68,98	69,59	69,59

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
14	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	64,68	66,81	67,58	68,02	67,03	67,82	67,82
15	Tingkat pengangguran terbuka	%	4,96	5,01	4,84	4,65	4,45	4,35	4,35
16	Rasio penduduk yang bekerja	%	95,04	94,99	95,16	95,35	95,55	95,65	95,65
17	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	%	0,68	1,49	1,58	2,01	2,77	3,87	3,87
18	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	%	61,47	63,46	64,31	64,86	64,05	64,87	64,87
19	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	8,72%	8,32%	8,33%	8,38%	8,47%	8,56%	8,41%
20	Opini BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
21	Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)	%	83,8	87,6	91,4	93,5	95,9	99	99
22	Penguatan cadangan pangan	%	38	15	20	20	20	20	95
23	Penanganan daerah rawan pangan	%	25	27	29	31	33	35	35
24	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	11,4	11,41	11,42	11,43	11,43	11,44	11,44
25	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	1,59	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
26	Produksi sektor pertanian	Ton	39.410	40.324	41.314	42.327	4.345	44.665	44.665
27	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	9	9,02	9,02	9,02	9,02	9,02	9,02

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
28	Produksi sektor perkebunan	Ton	84.732	85.579	86.435	87.299	88.172	89.054	89.054
29	Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	100	100	100	100	100	100	100
30	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	%	18,18	17,52	17,16	16,81	16,46	16,11	16,11
31	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	0,7	0,72	0,75	0,76	0,77	0,79	0,79
32	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	5,30	5,50	5,69	5,89	6,08	6,28	6,28
33	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	33,80	34,61	35,41	36,19	36,95	37,7	37,70
34	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	%	0,49	0,50	0,50	0,51	0,52	0,53	0,53
35	Pertumbuhan industri	IKM	12	12	12	12	12	12	72
36	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB	%	19,07	19,08	19,16	19,23	19,30	19,38	19,38
ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp	1.190.175	1.321.181,09	1.391.996,39	1.466.607,40	1.545.217,55	1.628.041,22	1.628.041,22
2	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	45,82	46,57	46,95	47,33	47,71	48,10	48,10

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
3	Produktivitas total daerah		115,77	119,45	121,07	122,68	124,30	125,91	125,91
4	Rasio ekspor + impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)		0,99	1,28	1,43	1,58	1,73	1,88	1,88
5	Angka kriminalitas yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Rasio ketergantungan	%	38,96	36,26	34,92	33,57	32,22	30,87	30,87
	ASPEK PELAYANAN UMUM								
	Wajib Terkait dengan Pelayanan Dasar								
1	Pendidikan								
1.1.	Pendidikan anak usia dini (PAUD)	%	49	50	51	52	53	54	54
1.2.	Angka pendidikan yang ditamatkan	%	100	100	100	100	100	100	100
1.3.	<i>Angka partisipasi murni</i>								
1.3.1.	Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A	%	94	95	96	97	98	99	99
1.3.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	90	90	91	91	92	93	93
1.3.3.	Angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	69	70	71	71	72	73	73
1.4.	<i>Angka partisipasi sekolah</i>								
1.4.1.	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	97	98	99	99	99	99	99
1.4.2.	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	94	95	96	96	97	98	98

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
1.4.3.	Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	%	84	85	86	86	87	88	88
1.5.	<i>Angka putus sekolah:</i>								
1.5.1.	Angka putus sekolah (APS) SD/MI	%	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2.	Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs	%	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3.	Angka putus sekolah (APS) SMA/SMK/MA	%	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	<i>Angka kelulusan:</i>								
1.6.1.	Angka kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100	100	100	100	100
1.6.2.	Angka kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	100	100	100	100	100
1.6.3.	Angka kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%	100	100	100	100	100	100	100
1.7.	<i>Angka melanjutkan (AM):</i>								
1.7.1.	Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	89	91	92	93	94	95	95
1.7.2.	Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	89	91	92	93	94	94	94
1.8.	<i>Fasilitas pendidikan:</i>								
1.8.1.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Buah	267	267	267	267	267	267	267
1.8.2.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan	Buah	119	119	119	119	119	119	119

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
	SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik								
1.9.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar		23	23	24	24	25	25	25
1.10.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah		35	35	36	36	37	37	37
1.11.	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar		14	14	15	15	16	16	16
1.12.	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah		14	14	14	15	15	15	15
1.13.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar		1,7	2	2	2	2	2	1,8
1.14.	Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata (SLTP)		2,2	2	2	2	2	2	2,4
1.15.	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	%	100	100	100	100	100	100	100
1.16.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,15	99,15	99,15	99,15	99,15	99,15	99,15
1.17.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	92,27	92,27	92,27	92,27	92,27	92,27	92,27
1.18.	Nilai rata - rata Asesmen Nasional SD		6,00	6,25	6,5	6,75	7,0	7,25	7,25
1.19.	Nilai rata - rata Asesmen Nasional SMP		6,25	6,5	6,75	7,0	7,25	7,5	7,5

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
2	Kesehatan								
2.1.	Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	7,26	6,26	5,76	5,26	4,76	4,26	4,26
2.2.	Angka kelangsungan hidup bayi		992,74	993,74	994,24	994,74	995,24	995,74	995,74
2.3.	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	7,67	7,39	7,12	6,85	6,59	6,34	6,34
2.4.	Angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	6,45	6,19	5,93	5,67	5,42	5,18	5,18
2.5.	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	Per 100.000 Kelahiran Hidup	141,21	136,21	133,71	131,21	128,71	126,21	126,21
2.6.	Rasio posyandu per satuan balita	Per 100 Balita	0,82	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
2.7.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Per 100.000 Penduduk	19,86	19,62	19,4	19,18	18,98	18,98	18,98
2.8.	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	Per 100.000 Penduduk	0,29	0,57	0,56	0,56	0,55	0,55	0,55
2.9.	Rasio dokter per satuan penduduk	Per 100.000	7,2	7,48	7,77	8,35	8,92	9,5	9,5

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
		Penduduk							
2.9.1.	Rasio dokter gigi per satuan penduduk	Orang/10 0.000 Penduduk	4,32	4,89	5,76	6,62	7,48	8,06	8,06
2.9.2.	Rasio dokter spesialis per satuan penduduk	Orang/10 0.000 Penduduk	0,012	0,012	0,013	0,014	0,015	0,016	0,016
2.10.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Orang/10 0.000 Penduduk	11,51	12,38	13,53	14,97	16,41	17,56	17,56
2.11.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100	88	90	92	94	96	96
2.12.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	96,4	65	67	69	71	73	73
2.13.	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	87,1	90	90	90	90	90	90
2.14.	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100	100
2.16.	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	34,7	85,6	90,3	95	95	95	95
2.17.	Non polio AFP rate per	%	0	0	0	0	0	0	0

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
	100.000 penduduk								
2.18.	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	2,3	70	80	90	100	100	100
2.19.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	39,46	80	80	80	80	80	80
2.20.	Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Per 100.000 Penduduk	71,68	80	80	80	80	80	80
2.21.	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Per 100.000 Penduduk	4,03	2,88	2,3	1,73	1,15	0,58	0,58
2.22.	Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	39,46	100	100	100	100	100	100
2.23.	Proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	4,82	80	80	80	80	80	80
2.24.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	100	100
2.25.	Penderita diare yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100
2.26.	Angka kejadian malaria	Per 100.000 Penduduk	0,41	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
2.27.	Tingkat kematian akibat malaria	Per 1000 Penduduk	0	0	0	0	0	0	0
2.28.	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	%	100	100	100	100	100	100	100
2.29.	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	%	0	100	100	100	100	100	100
2.30.	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0,0043	0,0043	0,0042	0,0042	0,0041	0,0041	0,0041
2.31.	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	%	0	60	65	70	75	80	80
2.32.	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	%	0	50	60	70	80	90	90
2.33.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	7,1	8	8	8	8	8	8
2.34.	Cakupan kunjungan bayi	%	99,2	98	100	100	100	100	100
2.35.	Cakupan puskesmas	Per 1000 Penduduk	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
2.36.	Cakupan pembantu puskesmas	Per 1000 Penduduk	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
		k							
2.37.	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	77,7	86	88	90	92	94	94
2.38.	Cakupan pelayanan nifas	%	99,8	98	100	100	100	100	100
2.39.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	100	98	100	100	100	100	100
2.40.	Cakupan pelayanan anak balita	%	36	42	44	46	48	50	50
2.41.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	100	100	100	100	100	100	100
2.42.	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	100	100	100	100	100	100	100
2.43.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	57	60	65	70	75	80	80
2.44.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100	100	100	100	100	100	100
2.45.	Cakupan desa/ kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
3.1.	Pekerjaan Umum:								
3.1.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	21,15	21,39	21,56	21,73	21,89	22,06	22,06
3.1.2.	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	km/jiwa	0,0036	0,0036	0,0035	0,0035	0,0034	0,0034	0,0034
3.1.4.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	21,15	21,39	21,56	21,73	21,89	22,06	22,06
3.1.5.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	Km	254,92	257,92	257,92	261,92	263,92	265,92	265,92
3.1.6.	Persentase Jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (dibawah 1,5 m)		12,28	12,53	12,78	13,03	13,28	13,52	13,52
3.1.7.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	69,44	69,57	69,69	69,81	69,93	70,05	70,05
3.1.8.	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar		50,43	50,43	50,43	50,43	50,43	50,43	50,43
3.1.9.	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat		0,79	0,66	0,62	0,58	0,54	0,50	0,50
3.1.10.	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun		0	0	0	0	0	0	0
3.1.11.	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran	%	0,039	0,039	0,039	0,042	0,042	0,045	0,045

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
	sungai rawan longsor								
3.1.12	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	63	64	65	66	67	68	68
3.1.13	Rasio Jaringan Irigasi	m/Ha	64,73	64,73	64,73	64,73	64,73	64,73	64,73
3.1.14	Persentase penduduk berakses air minum		58,64	58,66	58,67	58,74	58,81	58,87	58,87
3.1.15	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	58,64	58,66	58,67	58,74	58,81	58,87	58,87
3.1.16	Persentase areal kawasan kumuh		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.17	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	Buah	7,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	11,00
3.1.18	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk		44,92	44,21	43,52	42,83	42,16	41,49	41,49
3.1.19	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	%	2,29	2,26	2,23	2,20	2,17	2,14	2,14
3.2.	Penataan Ruang:								
3.2.1.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	48,10	48,10	48,10	48,14	48,14	48,14	48,14
3.2.2.	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah	%	45,01	45,01	45,01	45,01	45,01	45,01	68,00

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
	kota/kawasan perkotaan								
3.2.3.	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	%	3,23	3,47	3,71	3,94	4,16	4,38	4,38
3.2.4.	Ruang publik yang berubah peruntukannya		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5.	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	%	49,71	49,71	49,71	49,71	49,71	49,71	49,71
3.2.6.	Ketaatan terhadap RTRW	%	97,20	97,20	97,20	97,20	97,20	97,20	97,20
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman								
4.1.	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten kotabaru	Unit	8	118	118	118	118	120	600
4.2.	Fasilitasi penyediaan rumah tidak layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten kotabaru	unit	0	150	150	150	150	150	750
4.3.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten kotabaru yang di	Ha	15,55	14,77	14,68	22,8	30,35	20,2	118,35

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
	tangani								
4.4.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (rumah tidak layak Huni)	Unit	148	540	539	539	539	539	2844
4.5.	Jumlah perumahan yang sudah di lengkapi PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum)	Ruas Jalan	61	64	200	200	200	285	1010
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat								
5.1.	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	%		10	23	46	69	82	82
5.2.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	120	100	100	100	100	100	100
5.3.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	%	62 Kali	24 kali	24 kali	12 kali	12 kali	12 kali	84
5.4.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah manajemen kebakaran (WMK)	Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit
5.5.	Persentase penegakan PERDA	%	72,72	100	100	100	100	100	100
5.6.	Jumlah kejadian bencana	Kali Kejadian	44	55	65	70	75	75	75

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
5.7.	Persentase warga negara yang memperoleh Informasi Rawan Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
5.8.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	90	100	100	100	100	100	100
5.9.	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	90	100	100	100	100	100	100
6	Sosial								
6.1.	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	%	70,85	70,85	70,85	73,73	75,16	77,55	77,55
6.2.	Persentase PPKS yang tertangani	%	70,85	70,85	70,85	73,73	75,16	77,55	77,55
6.3.	Persentase PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	70,85	70,85	70,85	73,73	75,16	77,55	77,55
6.7.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	100	100
6.9.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial	%	100	100	100	100	100	100	100

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
	yang telah menerima jaminan sosial								
	Wajib Tidak Terkait dengan Pelayanan Dasar								
1	Tenaga Kerja								
1.1.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	2,77	2,77	2,65	2,57	2,5	2,4	2,4
1.2.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	%	60	60	60	60	60	60	60
1.3.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	65,08	67	70	73	75	78	78
1.4.	Keselamatan dan perlindungan	Kewenangan prop							
1.5.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek	%	50	52	54	56	58	60	60
1.6.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Kasus	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	Besaran pemeriksaan perusahaan	Kewenangan prop							
1.8.	Besaran pengujian peralatan di perusahaan	Kewenangan prop							
1.9.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	%	97,39	97,55	97,63	97,68	97,91	98,02	98,02

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
	berbasis kompetensi								
1.11.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Orang	15	15	15	15	15	15	75
1.12.	Rasio lulusan S1/S2/S3	%	7,66	7,86	8,06	8,26	8,46	8,66	8,66
1.13.	Angka kesempatan kerja	%	95,04	94,99	95,16	95,35	95,55	95,65	95,65
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
2.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	0,29	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
2.2.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	8	8	8	8	8	8	8
2.3.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%		0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
2.4.	Rasio KDRT	%	3	7	7	7	7	7	7
2.5.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03
2.6.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	47,48	49,48	49,48	49,48	49,48	49,48	49,48
2.7.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan	%	100	100	100	100	100	100	100

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
	terpadu								
3	Pangan								
3.1.	Ketersediaan pangan utama	kg/kapita/tahun	43.386	44.962	44.167	45.771	46.595	48.278	48.278
3.2.	Ketersediaan energi perkapita	Kkal/kapita/tahun	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3.3.	Ketersediaan protein perkapita	gram/kapita/tahun	63	63	63	63	63	63	63
3.4.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%(Persen)	25	25	50	60	70	80	80
4	Pertanahan								
4.1.	Persentase luas lahan bersertifikat (lahan pemerintah daerah)	Persen	21,38	15,72	15,72	15,72	15,72	15,72	100
4.2.	Luas lahan bersertifikat	persil	301	221	221	221	222	222	1107
4.3.	Penyelesaian kasus tanah negara	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5	Lingkungan Hidup								
5.26.	Tersusunnya RPPLH kabupaten/kota	Dokumen	0	1	-	-	-	-	1 dokumen
5.27.	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana	Pengawasan	0	0	1	1	1	0	3 pengawasan

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
	pembangunan kabupaten/kota								
5.28.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah	Dokumen	0	0	0	0	1	0	1 dokumen
5.29.	Hasil pengukuran indeks kualitas air	Indeks	65,66	67,74	67,86	67,98	68,1	68,22	68,22
5.30.	Hasil pengukuran indeks kualitas udara	Indeks	86,16	85,53	85,63	85,73	85,83	85,93	85,93
5.31.	Hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	62,62	63,1	63,34	63,58	63,82	64,06	64,06
5.32.	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100
5.33.	Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana pejabat pengawas lingkungan hidup di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	orang	0	1	1	1	1	1	5
5.34.	Terfasilitasi pendampingan pengakuan MHA	Fasilitasi	0	5	5	5	5	5	25
5.35.	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau	Verifikasi	0	15	15	15	15	15	75

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
	pengetahuan tradisional								
5.36.	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	penetapan	0	10	10	10	10	10	10
5.37.	Penetapan hak MHA	penetapan	0	5	5	5	5	5	5
5.38.	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	%	0	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
5.39.	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	%	0	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
5.40.	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	diklat	0	5	5	5	5	5	25
5.41.	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup		ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
5.42.	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	%	100	100	100	100	100	100	100
5.43.	Timbulan sampah yang ditangani	Ton	42,28	57,18	66,5	77,34	89,95	104,62	104,62
5.44.	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Ton	-	29,88	39,84	49,8	59,76	69,72	69,72

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
5.45.	Persentase cakupan area pelayanan	%	1,69	1,69	1,69	1,69	4,66	4,66	4,66
5.46.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	26,56	26,56	26,56	26,56	29,29	29,29	29,29
5.47.	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	unit	0	1	1	1	1	1	1
5.48.	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	%	0	0	0	0	0	0	-
5.49.	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	%	0	0	0	0	0	0	-
6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
6.1.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	90,51	93,45	94,55	95,65	96,75	97,85	97,85
6.2.	Rasio bayi berakte kelahiran	%	31,49	33,49	35,49	37,49	39,49	41,49	41,49
6.3.	Rasio pasangan berakte nikah	%	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	44,5
6.4.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi		Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
6.5.	Penerapan KTP nasional berbasis NIK		Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
	Kepemilikan KTP	Jiwa	205.690	220.116	240.116	260.116	280.116	300.116	300.116
6.6.	Cakupan penerbitan kartu	%	90,51	93,45	94,55	95,65	96,75	97,85	97,85

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
	kanda penduduk (KTP)								
6.7.	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	46,12	48,12	50,12	54,12	56,12	58,12	58,12
	Cakupan penerbitan kartu keluarga	%	64,91	66,41	68,41	69,91	71,41	72,91	72,91
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
7.1.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Desa	198	198	198	198	198	198	198
7.2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Desa	198	39	39	40	40	40	198
7.3.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Desa/Kel	202	40	40	40	41	41	202
7.4.	Persentase LSM aktif	%	15,33	16,67	18,00	19,33	20,67	22,00	22,00
7.5.	Persentase LPM berprestasi	%	100	100	100	100	100	100	100
7.6.	Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100	100	100
7.7.	Persentase posyandu aktif	%	100	100	100	100	100	100	100
7.8.	Persentase pengentasan desa tertinggal menjadi desa berkembang	%	72	73	74	76	78	79	79
7.9.	Persentase peningkatan	%	0,18	0,2	0,21	0,22	0,24	0,25	1,12

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
	Status desa berkembang menjadi desa maju								
7.10.	Pemeliharaan pasca pogram pemberdayaan masyarakat	Desa	198	198	198	198	198	198	198
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
8.1.	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)		1,08	1,2	1,11	1,11	1,1	1,9	1,9
8.2.	Total fertility rate (TFR)		2,75	2,74	2,73	2,72	2,7	2,69	2,69
8.3.	Persentase perangkat daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	%	86,54	90	90	95	95	100	100
8.4.	Persentase perangkat daerah (dinas/badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	%	13,46	15	15,5	16	16	17	17
8.5.	Jumlah kebijakan (peraturan daerah/peraturan kepala daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
8.6.	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	SKPD	7	7	7	7	7	7	7
8.7.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	%	1,8	0,1	2,21	2,19	2,1	2,1	2,1
8.8.	Ratio Akseptor KB	%	80,71	80,71	80,71	80,71	80,71	80,71	80,71
8.9.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	%	80,71	66,36	66,36	66,36	66,36	66,36	66,36
8.10.	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	Orang	237	43,8	40,75	37,69	34,64	34,64	34,64
8.11.	Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Orang	27	27	27	27	27	27	27
8.12.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	10,46	12,24	11,24	10,24	9,24	9,24	9,24
8.13.	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	%	11,85	12,9	13,8	14,6	15,2	15,2	15,2
8.14.	Persentase tingkat	%	79,78	79,78	79,78	79,78	79,78	79,78	79,78

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
	keberlangsungan pemakaian kontrasepsi								
8.15.	Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber-KB	Orang	3960	3960	3960	3960	3960	3960	3960
8.16.	Cakupan anggota bina keluarga remaja (BKR) ber-KB	Orang	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420
8.17.	Cakupan anggota bina keluarga lansia (BKL) ber-KB	Orang	1862	1862	1862	1862	1862	1862	1862
8.18.	Pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan	Kelompok	51	51	51	51	51	51	51
8.19.	Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa	Kelompok	39	39	39	39	39	39	39
8.20.	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Orang	47	47	47	47	47	47	47
8.21.	Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang	Orang	599	599	599	599	599	599	599

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
	ber-KB mandiri								
8.22.	Rasio petugas pembantu pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100
8.23.	Persentase faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	Buah	32	32	32	32	32	32	32
8.24.	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa	%	100	100	100	100	100	100	100
8.25.	Persentase remaja yang terkena infeksi menular seksual (IMS)								
8.26.	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Kelompok	33	33	33	33	33	33	33
8.27.	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Orang	1776	1776	1776	1776	1776	1776	1776
8.28.	Rata-rata usia kawin	Umur	21	21,9	22	22	22,1	22,1	22,1

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
	pertama wanita								
8.29.	Persentase pembiayaan program kependudukan, keluarga bencana dan pembangunan keluarga melalui APBD dan APBDes	%	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
9	Perhubungan								
9.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	unit	50	60	65	70	70	75	80
9.2.	Rasio ijin trayek	%	113	113	113	115	115	115	115
9.3.	Jumlah uji kir angkutan umum	unit	286	309	332	430	453	476	476
9.4.	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis	Lokasi	5	6	7	8	9	10	10
9.5.	Persentase layanan angkutan darat	%	70	70	80	80	80	80	80
9.6.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	28,5	29,5	31,5	36,5	38,5	40,5	40,5
9.7.	Pemasangan rambu- rambu	unit	9	50	60	70	80	90	100
9.8.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	km	1778	1778	1778	1778	1778	1778	1778
9.9.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	orang	250	250	260	260	270	270	270
9.10.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	orang	250	250	260	260	270	270	270
9.11.	Jumlah orang/barang	orang	27.204	28.564	29.992	31.491	33.065	34.718	34.718

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
	melalui dermaga per tahun								
10	Komunikasi dan Informatika								
10.1.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	%	14,29	28,57	47,62	66,67	85,71	100,00	100,00
10.2.	Cakupan layanan telekomunikasi	%	65	65	70	80	90	95	95
10.3.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	63	63	65	70	80	90	90
10.4.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	95,5	95,5	96	97	98	99	99
10.5.	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	75	75	80	85	90	95	95
11	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah								
11.1.	Persentase koperasi aktif	%	53	55	56	58	60	63	63
11.4.	Persentase usaha mikro dan kecil	%	20	40	60	80	90	100	100
12	Penanaman Modal								
12.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Buah	93	5	3	3	4	6	21
12.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional	Rp (Juta)	34.259.688	1.224.000	1.285.200	1.349.460	1.457.416,80	1.603.158,48	6.919.235,28

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
	(PMDN/PMA)								
12.3.	Rasio daya serap tenaga kerja	TK/TKA	-	929	911	911	920	937	4608
12.4.	Kenaikan/ penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)	Rp (Milyar)	976012	61,2	38,556	40,484	58,297	96,19	96,19
13	Kepemudaan dan Olah Raga								
13.1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	100	100	100	100	100	100	100
13.2.	Persentase wirausaha muda	%	0,048	0,08	0,091	0,109	0,121	0,145	0,145
13.3.	Cakupan pembinaan olahraga	%	100	100	100	100	100	100	100
13.4.	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	39,71	39,71	47,06	54,41	61,76	69,12	69,12
13.5.	Cakupan pembinaan atlet muda	%	33,98	42,47	34,75	42,47	34,75	42,47	42,47
13.6.	Jumlah atlet berprestasi	Orang	30	75	30	30	50	40	225
13.7.	Jumlah prestasi olahraga	Medali	54	161	53	39	52	177	482
14	Statistik								
14.1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
14.2.	Buku "kabupaten dalam angka"		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
14.3.	Buku "PDRB"		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
15	Persandian								
15.1.	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	Persentase (%)	25	30	40	50	60	70	70
16	Kebudayaan								
16.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	1	2	3	4	5	6	6
16.2.	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Buah	4	4	5	5	6	6	6
16.3.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Buah	4	4	5	5	6	6	6
16.4.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Buah	4	4	5	5	6	6	6
17	Perpustakaan								
17.1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	16.594	42.100	50.497	60.600	72.720	87.360	329.871
17.2.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Exemplar	78.031	80.531	83.531	86.781	90.281	94.031	94.031
17.3.	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Persen	1,27	1,28	1,29	1,29	1,30	1,31	7,74
17.4.	Jumlah rata-rata	Orang	1.383	4.250	6.416	6.666	6.916	7.083	32.714

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
	pengunjung perpustakaan/tahun								
17.5.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	160.089	1.250	1.500	1.600	1.700	1.875	168.014
17.6.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Persen	0,70	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	1,1
18	Kearsipan								
18.1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	6,17	18,69	18,69	18,69	18,69	18,69	100
18.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Jumlah Kegiatan	39	55	55	55	55	55	314
	Pilihan								
1	Pariwisata								
1.1.	Kunjungan wisata	Orang	622.969	685.266	753.793	829.173	912.091	1.003.300	1.003.300
1.2.	Lama kunjungan Wisata	Hari	2	2	2	3	3	3	3
1.3.	PAD sektor pariwisata	Rp.	822.550.000	1.000.000.000	1.250.000.000	1.500.000.000	1.750.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
2	Pertanian								
2.1.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Juta Rupiah	1.929.847,68	1.952.732,13	1.993.174,55	1.993.839,70	2.014.730,17	2.035.848,59	2.035.848,59
2.1.1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan	%	10	10,02	10,02	10,03	10,03	10,04	10,04

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
	terhadap PDRB atas dasar harga berlaku								
2.1.2.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB atas harga konstan	%	11,4	11,41	11,42	11,43	11,43	11,44	11,44
2.2.	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	1,59	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
2.3.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	9	9,02	9,02	9,02	9,02	9,02	9,02
2.4.	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	100	100	100	100	100	100	100
2.5.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Ton/Ha	4,47	4,48	4,5	4,53	4,56	4,59	4,59
2.6.	Cakupan bina kelompok petani	%	12,54	13,12	13,99	14,58	15,45	16,03	16,03
3	Kehutanan								
3.3.	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan		0,0148	0,0148	0,0148	0,0148	0,0148	0,0148	0,0148
4	Energi dan Sumber Daya Mineral								

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
4.1.	Persentase rumah tangga pengguna listrik	Persen	96,01	100	100	100	100	100	100
4.2.	Rasio ketersediaan daya listrik	Persen	204,04	130	130	130	130	130	130
5 Perdagangan									
5.1.	Ekspor Bersih Perdagangan	%	63,97	65,10	66,97	70,73	76,36	83,86	83,86
5.2.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	Kali	0	2	2	2	2	2	2
6 Perindustrian									
6.1.	Cakupan bina kelompok pengrajin	kali	6	7	8	8	9	10	10
8 Kelautan dan Perikanan									
8.1.	Produksi perikanan	Ton	93.291,14	104.020,98	104.546,34	104.546,46	105.264,16	105.895,75	524.467,70
8.2.	Konsumsi ikan	kg/kapita	64,96	70,18	70,89	71,59	72,31	73,03	358,01
8.3.	Cakupan bina kelompok nelayan	%	1,79	5,71	6,05	6,36	6,68	7,01	31,81
8.5.	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-	-	-
8.6.	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-	-	-
Urusan Pemerintahan									

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Perencanaan Pembangunan								
1.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	Ada	-	-	-	-	-	Ada
1.2.	Tersedianya dokumen perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Dokumen	Ada	-	-	-	-	-	Ada
1.3.	Tersedianya dokumen perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.5.	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100
1.6.	Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100
1.7.	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan	%	100	80	85	90	95	100	100
	1.1 Persentase dokumen renja SKPD yang ditandaklanjuti dalam dokumen RKPD	%	100	100	100	100	100	100	100

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
	1.2 Persentase kesesuaian program pada renstra SKPD terhadap program RPJMD	%	100	100	100	100	100	100	100
1.8.	Persentase capaian program SKPD	%	1	85	90	95	100	100	100
1.9.	Persentase kegiatan RKPD yang diakomodir didalam APBD	%	1	80	85	90	95	100	100
1.10.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	%	1	80	85	90	95	100	100
2	Keuangan								
2.1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.2.	Persentase SILPA	%	7,53	2	2	2	2	2	2
2.3.	Persentase SILPA terhadap APBD	%	7,53	2	2	2	2	2	2
2.5.	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	20,03	20	20	20	20	20	20
2.6.	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	14,02	10	10	10	10	10	10
2.8.	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	0,343	0,347	0,35	0,352	0,355	0,357	0,352
2.9.	Penetapan APBD		Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan								
3.1.	Rata-rata lama pegawai	JP	15,83	20	20	20	20	20	20

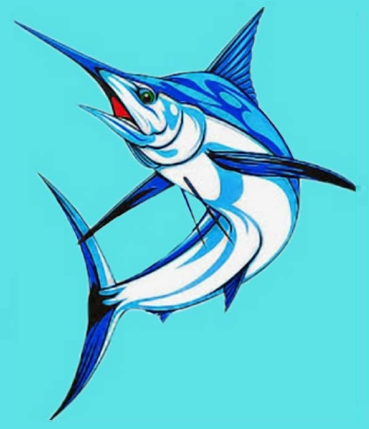
No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
	mendapatkan pendidikan dan pelatihan								
3.2.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	27,88	35	40	45	50	55	60
3.3.	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	96,86	97	97,5	98	98,8	99	99
3.4.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	31	36	36	36	36	36	36
3.5.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	574,00	310	310	310	310	310	310
3.6.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	2786	4870	4870	4870	4870	4870	4870
4	Penelitian dan pengembangan								
4.1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	Dokumen	5 Kajian	4 Kajian	5 Kajian	5 Kajian	4 Kajian	3 Kajian	21 Kajian
4.2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	100	100	100	100	100	100	100
	Inspektorat								
5	Pengawasan								
5.1.	Persentase SKPD yang jumlah temuannya menurun	%	80	93	95	97	99	99	99

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
5.2.	Persentase hasil revidi LKJ pemda yang ditindaklanjuti dengan perbaikan	%	100	100	100	100	100	100	100
5.3.	Nilai rata-rata Maturitas SPIP SKPD minimal level 3	Level	3	3	3	3	3	3	3
5.4.	Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan oleh Inspektorat	%	100	100	100	100	100	100	100
5.5.	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	2	3	3	3	3	3	3
6	Sekretariat Dewan								
6.1.	Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap Alat-alat kelengkapan DPRD provinsi/Kab/Kota	ada/tidak		ada	ada	ada	ada	ada	ada
6.2.	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD)	ada/tidak		ada	ada	ada	ada	ada	ada
6.3.	Terintegrasi program-	ada/tidak		ada	ada	ada	ada	ada	ada

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
	program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran setwan DPRD								

BAB 9

PENUTUP



*Ekowisata Hutan
Meranti*



*Keindahan Gunung
Mamake*



BAB IX PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 ini disusun berdasarkan hasil kajian pendahuluan, hasil evaluasi kinerja dan aspirasi seluruh pemangku kepentingan, serta mempertimbangkan arah pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kotabaru Tahun 2005-2025.

Arahan pembangunan lima tahun ini menitikberatkan pada Pembangunan Ekonomi yang Berkualitas, Berbasis Sumberdaya Lokal, Inklusif, Integratif, dan Berkelanjutan secara menyeluruh dengan fokus pada upaya: (a). Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, (b). Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan wilayah (c). Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan sosial yang berkeadilan, (d). Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan perubahan iklim, serta (e). Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Dokumen RPJMD Tahun 2021 - 2026 ini ditetapkan sebagai penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020. Dengan demikian diharapkan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang transparan, efektif, dan akuntabel.

9.1 Pedoman Transisi

Pedoman transisi diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir. Dalam rangka menjaga keberlanjutan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Kotabaru menetapkan pedoman transisi yakni:

- 1) Setelah berakhirnya RPJMD Kabupaten Kotabaru pada tahun 2021, perlu disusun RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan lima tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah acuan bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2022. Acuan penyusunan perencanaan pembangunan

tahun 2022 didasarkan pada RPJPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2005-2025, RPJMN 2020-2024 serta dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022.

- 2) Dokumen RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026 menjadi panduan dalam penjabaran program dan kegiatan pembangunan untuk penyusunan RKPD, RENSTRA SKPD, RENJA SKPD, dan KUA - PPAS APBD.
- 3) Dasar dan acuan menciptakan perencanaan pembangunan yang menjamin terwujudnya sinergitas, keterpaduan dan sinkronisasi dengan arah pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota;
- 4) Dasar dan acuan dalam menentukan kebijakan program dan kegiatan pembangunan pada tingkat sectoral.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

Untuk memberikan pedoman sekaligus arahan yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Kotabaru dalam pelaksanaan RPJMD Periode 2021-2026, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Kotabaru berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya;
- 2) Setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja SKPD setiap tahun;
- 3) Setiap Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra SKPD;
- 4) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD ke dalam Renstra SKPD.

9.3 Perubahan RPJMD

Sebagaimana amanat Pasal 342 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka:

- 1) Perubahan RPJMD dapat dilaksanakan apabila:
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
 - c. Terjadi perubahan yang mendasar.
- 2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- 3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- 4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BUPATI KOTABARU,

H. SAYED JAFAR, SH